



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA REVITALISASI PANCASILA**

TESIS

**YUSUF MARETANTO
NPM : 0806449664**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEGIK INTELIJEN
JAKARTA
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA REVITALISASI PANCASILA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

YUSUF MARETANTO

NPM : 0806449664

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN
JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yusuf Maretanto

NPM : 0806449664

Tanda Tangan :



Tanggal : 04 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Yusuf Maretanto

NPM : 0806449664

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen

Judul : Pendidikan Karakter Bangsa Sebagai Salah Satu Upaya Revitalisasi Pancasila

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra F Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si

(.....)

Pembimbing : Dr Ricardi S Adnan

(.....)

Penguji : Joko Kusnanto Anggoro, Ph.D

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 04 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik semesta alam ini. Atas berkat rahmat dan karunia Nya, penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul : Pendidikan Karakter Bangsa Sebagai Salah Satu Upaya Revitalisasi Pancasila. Penulisan tesis ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar Magister Sains pada Program Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik dalam proses persiapan, bimbingan penulisan, hingga terselesaikannya tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Dra. F. Iriani Sopian Yudhoyoko, MSi selaku Ketua Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun tesis ini hingga selesai tepat pada waktunya.
2. Dr Ricardi S Adnan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Drs Julian Aldrin Pasha M.A, Ph.D selaku Narasumber, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.
4. Dr Seto Mulyadi, S.Psi, M.Si selaku Narasumber, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.
5. Erry Utomo, Ph.D selaku Narasumber, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.
6. Brigjen TNI (Purn) Irawan Soekarno selaku Narasumber, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.
7. Romo Franz Magnis Suseno selaku Narasumber, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.
8. Prof Dr Azyumardi Azra selaku Narasumber, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.

9. Budiarto Shambazy selaku Narasumber, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.
10. Arswendo Atmowiloto selaku Narasumber, yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.
11. Staf Sekretariat Kajian Strategik Intelijen UI, Pak Faisal, Mas Wing dan Mbak Heni, atas bantuannya selama ini.
12. Dosen-dosen di Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Strategik Intelijen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang menjadi bekal berharga bagi penulis, *Men Learn History To Be Wise Before (Irawan Soekarno)*.
13. Bapak Mulyono dan Ibu Siti Darwahyuti, kedua orang tua penulis yang terus menerus memberikan dukungan dan doa kepada penulis; dan Eka Wahyu, tunangan penulis yang terus menerus memberikan semangat dan supportnya.
14. Sahabat dan rekan-rekan seangkatan, terimakasih atas supportnya.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Namun dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritikan maupun saran yang membangun dari semua pihak, akan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan ini di waktu mendatang. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 04 Januari 2011

Yusuf Maretanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Maretanto
NPM : 0806449664
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pendidikan Karakter Bangsa Sebagai Salah Satu Upaya Revitalisasi Pancasila**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Januari 2011

Yang menyatakan,



Yusuf Maretanto

ABSTRAK

Nama : Yusuf Maretanto
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Stratejik Intelijen
Judul : Pendidikan Karakter Bangsa Sebagai Salah Satu Upaya Revitalisasi Pancasila

Pancasila, sebagai ideologi negara, berdasar kepada prinsip bhinneka tunggal ika. Kenyataan yang sekarang terjadi adalah adanya krisis multidimensi yang ditandai dengan lunturnya nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti meningkatnya kejahatan, korupsi, penyimpangan pajak, degradasi moral dan sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya pengabaian pendidikan karakter. Meskipun dalam pendidikan formal terdapat proses pendidikan, akan tetapi itu hanya transfer pengetahuan saja, bukan transfer nilai. Lebih buruknya lagi, nilai-nilai ini tidak pernah diimplementasikan dalam keseharian kita.

Situasi ini akan menjadi semakin gawat pada era globalisasi. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya standar kehidupan, investasi internasional, kemajuan teknologi dan ideologisasi global. Untuk itulah, Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus mampu menyesuaikan dirinya dalam persaingan global. Dalam kasus ini, bisa saja terjadi berakhirnya Pancasila, seperti yang dikatakan Daniel Bell (1962) dalam tesisnya tentang akhir ideologi dan juga bahwa globalisasi membawa efek negatif yang tidak sedikit jika kita tidak memiliki karakter bangsa yang kuat untuk menangkalnya, seperti pemahaman multikultural, kejujuran, taat hukum, adil, empati, pantang menyerah, dll.

Pada era global village ini, Indonesia harus lebih memperhatikan bidang pendidikan, bukan sekedar memenuhi hak warga Negara akan tetapi juga untuk membangun karakter seperti yang digariskan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang salah satu tujuannya adalah pembangunan karakter bangsa yang percaya dan takwa terhadap Tuhan YME, menghargai HAM, penegakan hukum dan implementasi bentuk baru dari pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warganegara yang berkarakter baik.

Sebenarnya selama ini tidak ada yang salah dengan Pancasila. Melihat fakta inilah, kita perlu mengupayakan suatu cara untuk merevitalisasi Pancasila. Salah satunya adalah melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter (Lickona:1991) merupakan upaya pemaksimalan berbagai dimensi dan jalur pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan karakter. Dalam tesis ini, pertama, akan dilakukan pengumpulan data terkait subyek dan obyek pendidikan karakter, berikut kebijakan dan program-program yang terkait, kemudian menganalisisnya menggunakan teori pendidikan karakter dan teori-teori pendukung lainnya melalui metode tertentu, untuk mensupport user dalam pengambilan kebijakan terkait revitalisasi Pancasila melalui pendidikan karakter demi kejayaan NKRI.

Kata kunci :
Pancasila, Revitalisasi, Pendidikan Karakter

ABSTRACT

Name : Yusuf Maretanto
Study Program : National Resilience Study
Specialities : Intelligence Strategic Study
Title : National Character Education as A Way To Revitalize Pancasila

Pancasila, our belief system, is based on five diversity in unity philosophic principles. At the present, multi dimension of Indonesia crises more or less relate to the lack of values - the values of Pancasila which is sourced from good and great values of this nation - in the daily life of Indonesia citizen, e.g the high crimes number, police corruption, tax office corruption, moral degradation and others. It is because character education was ignored. Eventhough there was education process in the formal school, it was only a transfer of knowledge, not a transfer values. The worst is it never implemented in the true life because what is thought is difference from what is done.

This situation could be worst in this globalization era. Globalization is source of rising living standard reaping the gains from trade, international investment, technological progress and global ideologizing. For this purpose, developing countries should make adjustment to increased competition and special efforts to eliminate inequality. In this case, it could be the end of Pancasila, like Daniell Bell (1962) said in his paper about the end of ideology and also globalization brings us more negative effect if we don't have any strong nation character such as multicultural values, honesty, obey the law, justice, empathy for others, spirit for struggle, etc.

In this global village era, Indonesia need to invest more in education not just to fulfill its peoples basic rights but also to provide their character that's noticed in Law No 20/2003 about National Education System, which is one of its aim is building a nation character that true belief and sacrifice for God, respect for human rights, enforcement of rule of law and implementation of the new form of civic education to develop smart and good citizens.

As a matter of fact, there is nothing wrong with Pancasila. Seeing that fact, we need to promote a way to revitalize Pancasila. One of them is using character education. Character education (Lickona:1991) is the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development. In this paper, we will collect data about character education subjects-objects and character education policies then analyze it using Lickona's character education theory and the other supporting theory in a proper way to support our user taking a decision about how to revitalize Pancasila by using character education program to keep the glory of Indonesia.

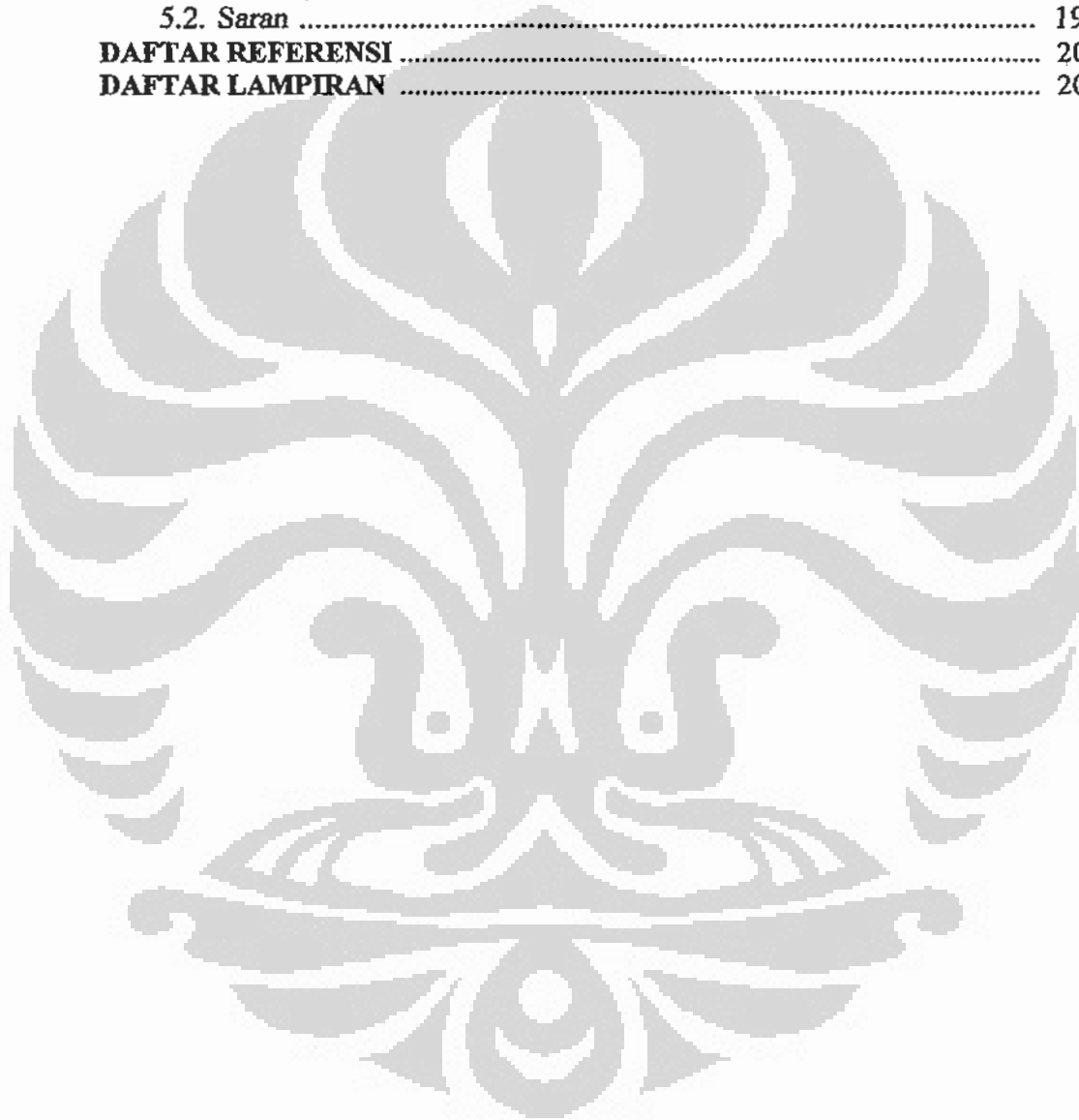
Keyword :
Pancasila, Revitalization, Character Education.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pembatasan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Kegunaan Penelitian	12
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.6.1 Kerangka Pemikiran	13
1.6.2 Pendekatan dan Tipe Penelitian	21
1.6.3 Pengumpulan Data	22
1.6.4 Model Analisa	22
1.7 Sistematika Penulisan	23
2. Tinjauan Pustaka	25
2.1 Ideologi	25
2.1.1 Tipe Ideologi	27
2.1.1.1 Ideologi Terbuka	27
2.1.1.2 Ideologi tertutup	27
2.1.2 Jenis Ideologi	28
2.1.2.1 Liberalisme	28
2.1.2.2 Sosialisme	29
2.1.2.3 Fundamentalisme Islam	30
2.2 Pancasila	31
2.2.1 Sejarah Pancasila	31
2.2.2 Revitalisasi Pancasila	32
2.2.3 Fungsi Pancasila	34
2.2.3.1 Dasar Negara	34
2.2.3.2 Pandangan Hidup Bangsa Indonesia	35
2.2.3.3 Jiwa Bangsa Indonesia	35
2.2.3.4 Kepribadian Bangsa Indonesia	35
2.2.3.5 Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia	35
2.2.3.6 Ideologi Negara/Ideologi Terbuka Bangsa Indonesia ..	36
2.3 Globalisasi	36
2.4 Pendidikan	39
2.4.1 Unsur-Unsur Pendidikan	40
2.4.1.1 Tujuan	40

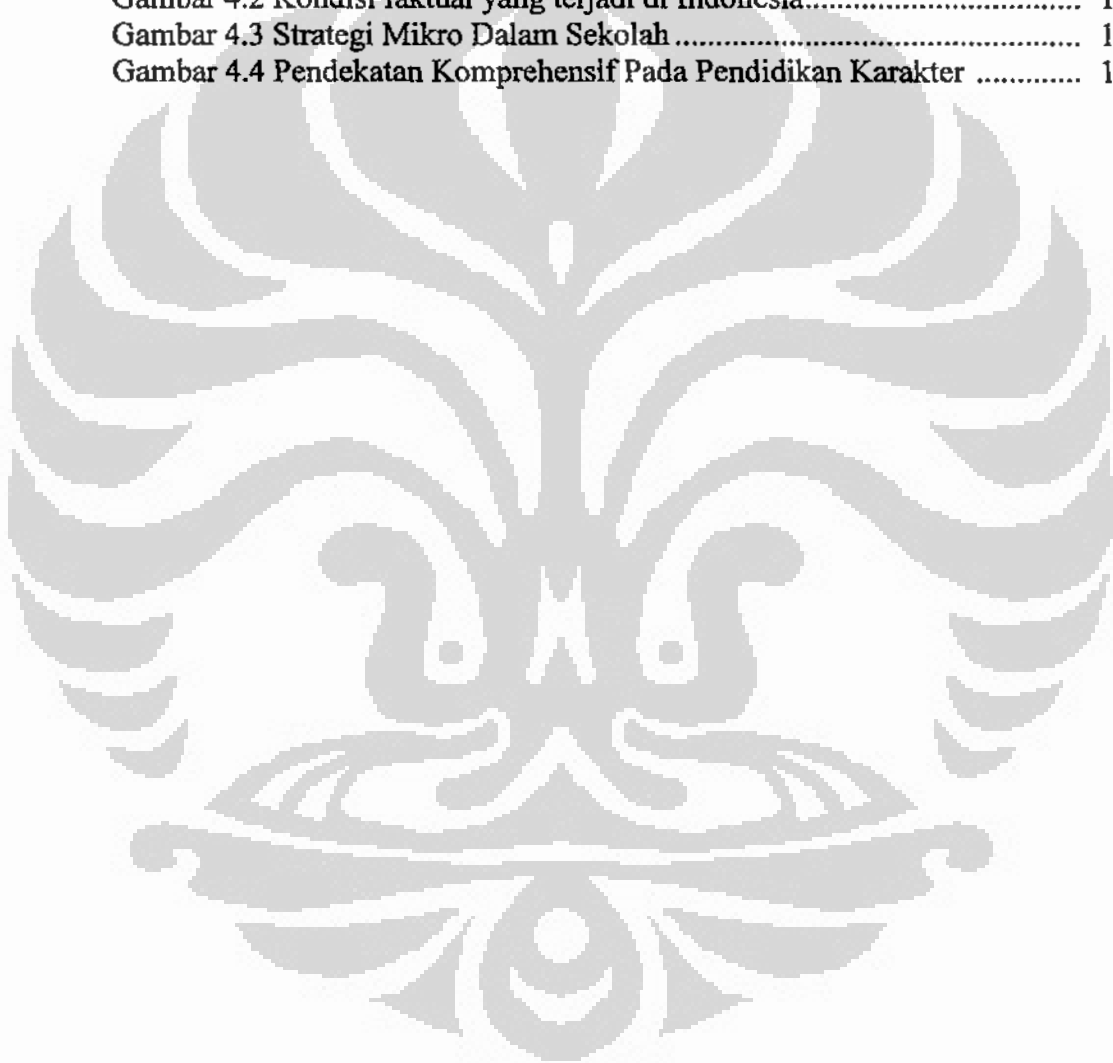
2.4.1.2 Subyek	40
2.4.1.3 Lingkungan	41
2.4.1.4 Alat	42
2.4.2 Kultur/Budaya Sekolah	43
2.4.3 Proses Pendidikan	46
2.5 Karakter Bangsa	46
2.5.1 Peran Penting Karakter	48
2.5.2 Pendidikan Karakter (<i>Character Education</i>)	49
2.6 Ritualisme	51
2.7 Media Massa	54
2.7.1 Bentuk-Bentuk Media Massa	55
2.7.1.1 Media Cetak	55
2.7.1.2 Media Elektronik	55
2.7.2 Efek Media dan Teori Dampak Media	56
2.7.2.1 Efek Media	56
2.7.2.2 Teori Dampak Media	57
2.7.3 Kepemilikan Media dan Isi Media	58
2.8 Intelijen	59
2.8.1 Ancaman	59
2.8.2 Cakupan Intelijen	61
2.8.2.1 Intelijen Sebagai Organisasi	61
2.8.2.2 Intelijen Sebagai Kegiatan	61
2.8.2.3 Intelijen Sebagai Pengetahuan	62
3. Situasi Bangsa Pasca Reformasi dan Sistem Pendidikan Nasional	64
3.1 Situasi Kehidupan Bangsa Pasca Reformasi	64
3.1.1 Eksistensi Pancasila Dalam Persaingan Ideologi	71
3.1.2 Eksistensi Media Dalam Era Reformasi	79
3.2 Sistem Pendidikan Nasional	81
3.2.1 Undang-Undang No 20 tahun 2003	83
3.2.2 Program Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014	90
3.2.3 Faktor-Faktor Pendukung	96
3.2.4 Faktor-Faktor Penghambat	98
3.3 Hasil Penelitian	102
4. Pendidikan Karakter Bangsa sebagai Upaya Revitalisasi Pancasila .	107
4.1 Urgensi Revitalisasi Pancasila	107
4.2 Program Pendidikan Karakter Bangsa	123
4.2.1 Urgensi Pendidikan Karakter	131
4.2.2 Pembangunan Bangsa yang Berkarakter	133
4.2.3 Subyek Pendidikan Karakter	138
4.2.3.1 Aktor Utama	140
4.2.3.2 Aktor Pelaksana	141
4.2.4 Obyek Pendidikan Karakter	143
4.2.4.1 Keluarga	146
4.2.4.2 Pendidikan Formal	147
4.2.4.3 Masyarakat	151
4.2.4.4 Media Massa	151
4.2.5 Metoda Pendidikan Karakter	153
4.2.5.1 Lingkup Negara	155

4.2.5.2 Lingkup Sekolah	163
4.2.5.3 Lingkup Keluarga	177
4.2.5.4 Lingkup Masyarakat	178
4.2.5.6 Lingkup Media	179
4.2.6 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat	182
4.2.7 Tujuan Akhir Manusia ber-Pancasila	185
5. Kesimpulan dan Saran.....	188
5.1. Kesimpulan.....	188
5.2. Saran	198
DAFTAR REFERENSI	204
DAFTAR LAMPIRAN	209



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Analisa	23
Gambar 3.1 Kekuatan Neo Liberal	74
Gambar 3.2 Evolusi gerakan Kiri.....	75
Gambar 3.3 Skema Program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014	95
Gambar 3.4 Skema Keluarga-Sekolah-Masyarakat	102
Gambar 4.1 Tataan Ideal dalam Proses Pembinaan Karakter	134
Gambar 4.2 Kondisi faktual yang terjadi di Indonesia.....	135
Gambar 4.3 Strategi Mikro Dalam Sekolah	164
Gambar 4.4 Pendekatan Komprehensif Pada Pendidikan Karakter	171

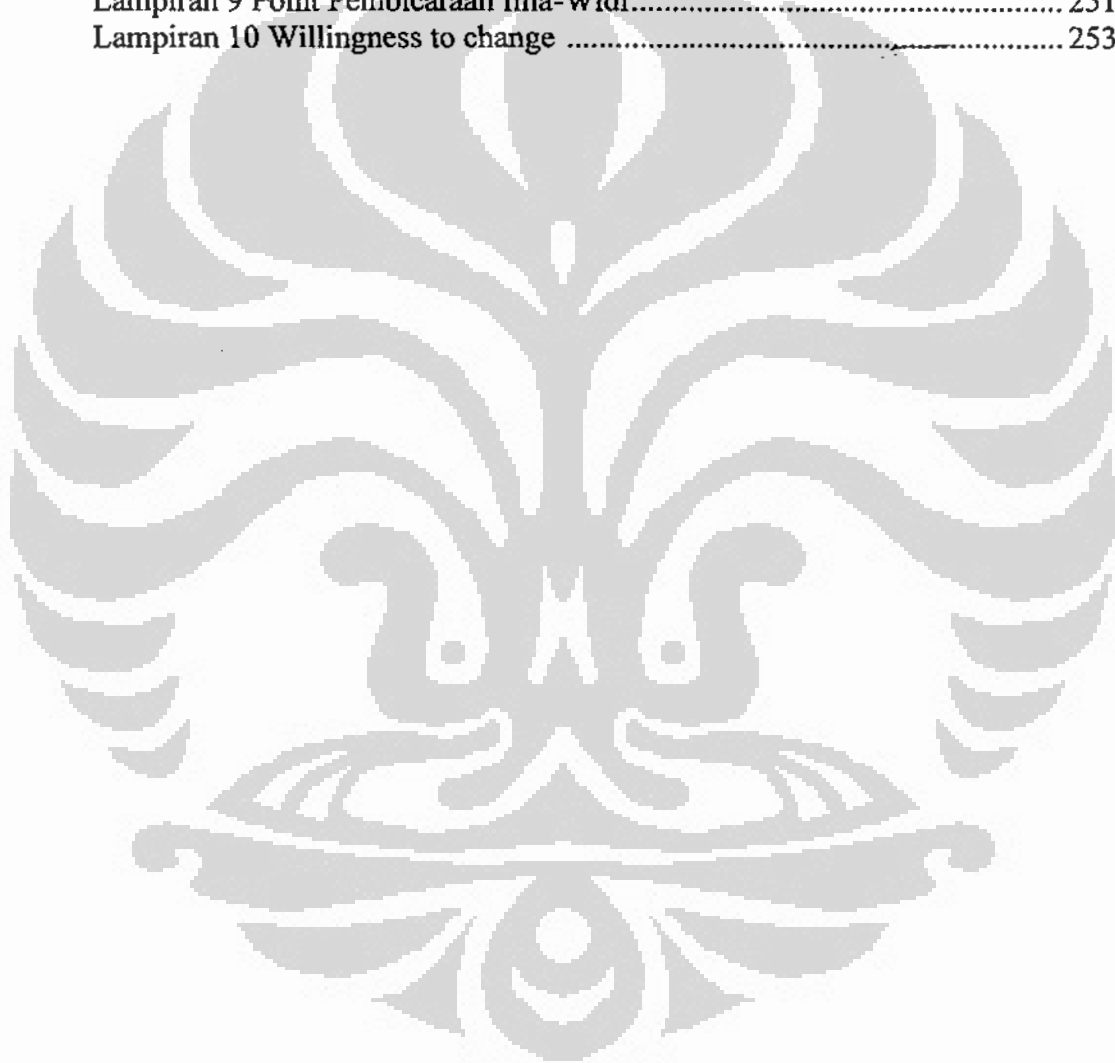


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Diagram Merton.....	52
Tabel 3.1 Perbandingan Gerakan Islam	77
Tabel 3.2 Pergeseran Peran Pers	79
Tabel 3.3 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa.....	84
Tabel 3.4 Inpres No 1/ 2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional.....	91
Tabel 3.5 Matriks Pendidikan Karakter Sebagai Revitalisasi Pancasila.....	104
Tabel 4.1 Perbandingan Inti Pancasila dengan ideologi lain	114
Tabel 4.2 Daftar Sekolah Internasional Di Indonesia	126
Tabel 4.3 Nilai-Nilai Ideologi, Agama dan Budaya	134
Tabel 4.4 Aktor Pendidikan Karakter	139
Tabel 4.5 Obyek Pendidikan Karakter di Lingkungan Pendidikan.....	144
Tabel 4.6 Metode Pendidikan Karakter berdasarkan Urgensinya.....	154
Tabel 4.7 Indikator Keberhasilan Sekolah Dalam Pendidikan Karakter.....	166
Tabel 4.8 Faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter	184

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara Erry Utomo	209
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Budiarto Shambazy	214
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Seto Mulyadi	218
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Julian Pasha	223
Lampiran 5 Transkrip Wawancara Irawan Soekarno	226
Lampiran 6 Transkrip Wawancara Romo Magnis	232
Lampiran 7 Transkrip Wawancara Arswendo Atmowiloto	236
Lampiran 8 Transkrip Wawancara Azyumardi Azra	243
Lampiran 9 Point Pembicaraan Ima-Widi.....	251
Lampiran 10 Willingness to change	253



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara harus mempunyai ideologi sebagai fundamen atau pondasi dari bangunan negara. Kuatnya fundamen negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuhan fundamen suatu negara, berakibat lemahnya negara tersebut. Mengubah fundamen, falsafah atau ideologi berarti mengubah eksistensi dan sifat negara. Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu berpegang kepada ideologinya.

Kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara yaitu Pancasila sebagai penuntun bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut Ernest Renan : kehendak untuk bersatu (*le desir d'être ensemble*) dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian bahwa Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Sejarah juga telah membuktikan, bahwa dalam perjalanannya Pancasila sebagai ideologi negara telah berhasil mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagai perbedaan-perbedaan elemen bangsa, dengan berdasarkan pada prinsip *bhinneka tunggal ika*.

Dalam tahun terakhir ini, pasca tumbanganya Orde Baru, Pancasila kembali menjadi wacana publik. Beberapa lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah menyelenggarakan diskusi, simposium, dan semacamnya mengenai Pancasila. Karena Pancasila yang merupakan landasan bersama (*common platform*) atau sering juga disebut di kalangan kaum Muslimin sebagai '*kalimatun sawa*'¹, kembali mendapat perhatian yang sepatasnya sudah harus diberikan sejak beberapa tahun⁴ lalu mempunyai tafsir tunggal.

Pada era kepemimpinan Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun secara formal Pancasila tetap dianggap sebagai ideologi Negara, tapi kita rasakan hanya sebatas pada pernyataan politik saja. Hal ini bisa dipahami karena arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian keras. Sudah lama, Pancasila kita sedang menghadapi krisis multidimensional. Pancasila kita sedang berhadapan dengan pola perilaku elite yang tidak lagi peka terhadap rakyatnya. Pancasila kita juga sedang menghadapi tantangan bagaimana membuat orang-orang beragama lebih toleran terhadap lainnya. Oleh karena itu, falsafah dan ideologi Pancasila seharusnya dapat menjadi alat kendali bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu mempersatukan bangsa, apabila bangsa Indonesia berhasil mempersatukan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Menghadapi arus globalisasi yang semakin pesat, keurgensian Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara semakin dibutuhkan. Secara etimologi, globalisasi berarti pengglobalan atau proses masuk ke ruang lingkup dunia. Anthony Giddens (1990) menyebut globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial di segenap penjuru dunia yang menghubungkan wilayah-wilayah yang saling berjauhan dengan cara tertentu sehingga apa yang terjadi pada tingkat lokal dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di tempat lain (yang mungkin bermil-mil jaraknya), serta sebaliknya.

Sejalan dengan Giddens, David Held dalam bukunya *Global Transformation Politics, Economic and Culture* (1995) menafsirkan globalisasi sebagai hubungan keterkaitan (*interconnectedness*) dan saling ketergantungan antar

¹ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila : Jalan kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2009, halaman 9.

benua yang berbeda, dalam berbagai aspek, dari kriminal hingga aspek budaya, dari keuangan hingga aspek spiritual. Menurut tafsiran fenomenologisnya, globalisasi berarti :

...pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan atau intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya dari situ dan sebaliknya, atau meningkatnya jejaring interdependensi antar umat manusia pada tataran benua-benua².

Arus globalisasi dengan segala muatannya sebenarnya merupakan proses ideologisasi baru. Hal ini biasanya diiringi dengan politik *endism*, yaitu sebuah tesis tentang matinya ideologi besar dunia akibat gerusan kapitalisme yang tak tertandingi. Negara maju dengan kapitalismenya menyusup melalui stigma *endism*. Kenyataan inilah yang dipromosikan oleh para pemikir endist yang tertuang dalam pelbagai karyanya, seperti *the end of ideology* (Daniel Bell) dan *the end of history* (Francis Fukuyama), *the end of nation state* (Kenichi Ohmae atau Jean-Marie Guehenno), dan lainnya.

Kenichi Ohmae dalam bukunya *The End of Nation State, The Rise of Regional State* (1995) menulis gejala global ini sebagai dunia tanpa batas (*borderles world*) dan menyatakan hapusnya negara-bangsa. Bahkan sebelumnya, Daniel Bell dalam "the End of Ideology" (1962) telah menyatakan nasionalisme dan ideologi telah berakhir. Demikian juga tesis Francis Fukuyama dalam *The End of History and the Last Man*" (1992) menegaskan nasionalisme tidak lagi menjadi kekuatan dalam sejarah. Ia berasumsi, demokrasi liberal menjadi semacam titik akhir dari evolusi ideologism atau bentuk final dari pemerintahan, dan sekaligus sebuah "akhir sejarah".

Francis Fukuyama dalam bukunya *The End Of History And The Last Man* (1992), mewartakan kemenangan kaum liberalisme.

Kita dapat menyaksikan, demikian katanya...akhir sejarah yang sedemikian itu: yakni akhir dari evolusi ideologis umat manusia dan

² Eeng Rizky Rahmatullah Ass Shilmy, *Globalisasi Sebagai Bentuk Penjajahan Dunia Ketiga*, dimuat dalam situs resmi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang, pada 05 Januari 2010. Dalam tulisannya, Eeng menegaskan pada hakikatnya, Globalisasi sangatlah identik dengan penjajahan/imperialisme, karena sifatnya yang serupa.

universalisasi demokrasi liberal barat sebagai bentuk final dari sistem pemerintahan umat manusia.

Dalam pidato memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak rakyat Indonesia untuk berhenti memperdebatkan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kini saatnya menjadikan Pancasila sebagai rujukan, sumber inspirasi, dan jendela solusi untuk menjawab segala tantangan. Pernyataan SBY tersebut merupakan langkah awal bagi upaya menghidupkan kembali Pancasila setelah sekian lama 'dikebumikan'. Bahkan keberanian SBY untuk menjadikan Pancasila sebagai *living ideology* merupakan fenomena yang cukup unik di tengah hampir seluruh anak bangsa teralienasi dari Pancasila dan sebagian elit merasa sungkan untuk 'memasarkan' Pancasila. Hal ini tentunya mampu menjawab kegelisahan Daniel Bell, Kenichi Ohmae, Fukuyama dan Huntington, bahwa Pancasila sebagai ideologi yang bersumberkan dari nilai-nilai luhur yang menjadi karakter dan kepribadian bangsa tidak akan tergilas oleh ideologisasi globalisasi. Justru sebaliknya, dengan menghidupkan Pancasila, maka bangsa Indonesia akan mampu menunjukkan jati dirinya dalam pergaulan internasional.

Sejak Presiden B.J. Habibie membuka kran ideologi selain Pancasila sebagai asas organisasi, eksistensi Pancasila semakin terperosok. Bahkan di tengah hujatan terhadap segala atribut Orde Baru, Pancasila betul-betul berada di titik nadir. Hal ini terlihat dari TAP MPR RI Nomor 18/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR Nomor 2/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Setelah itu, Pancasila ramai-ramai dikubur dan para penggagas reformasi merasa berdosa untuk menyebutkannya. Pancasila ditahbiskan sebagai monumen anti reformasi. Ini yang memperpanjang daftar kegagalan pemimpin di negeri ini untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan kebangsaan yang *marketable* bagi rakyatnya.

Kenyataan ini secara tidak langsung menjadi ancaman bagi upaya revitalisasi Pancasila sebagai *way of life*. Di samping itu, tantangan lain dari revitalisasi ideologi adalah terbukanya tawaran ideologi luar yang menyatu dalam arus globalisasi. Di tengah *open market democracy*, tawaran ideologi semakin terbuka dan semuanya menjanjikan kesejahteraan. Di sinilah Pancasila

dipertaruhkan. Kalau secara historis bangsa Indonesia tidak pernah merasakan kesejahteraan dan kedamaian di bawah naungan ideologi Pancasila, maka secara logika, ia tidak akan menarik bagi kalangan generasi bangsa. Bahkan dalam bentuk yang ekstrem bisa muncul kesadaran bahwa negara tanpa ideologi pun tetap eksis.

Dalam kondisi demikian, yang dibutuhkan bukan proses indoktrinasi Pancasila. Pancasila harus dijadikan medium paling mudah untuk merekat kebersamaan yang akhir-akhir ini mulai retak. Pancasila harus diturunkan menjadi tata cara hidup yang mudah (cepat) dipahami dan mudah (*comfortable*) dilaksanakan. Dan hal ini bisa dilakukan melalui keteladanan para pemimpin dalam mengelola negeri ini secara bermartabat. Langkah ini memang tidak mudah, karena para pemimpin negeri ini belum mampu mewariskan Pancasila sebagai *way of life*. Mereka berhenti pada proses ideologisasi, sakralisasi, dan berakhir dengan politisasi. Bahkan, menurut Ricardi S Adnan (2006), ideologisasi Pancasila memang diteriakkan dengan lantang, akan tetapi dalam pelaksanaannya justru terjadi yang sebaliknya, karena Negara dan masyarakat mengkhianati nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila³.

Sejalan dengan pemikiran Ricardi tersebut, dalam hasil jajak pendapat Kompas pada 30 September 2008⁴, menunjukkan sebagian publik (55 persen responden) meragukan keseriusan pemerintah menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sangat mungkin dipicu oleh keprihatinan atas kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Meskipun demikian, lebih lanjut dalam jajak pendapat ini, Mayoritas responden sepakat, sebagai identitas bangsa, Pancasila tetap menjadi landasan terbaik berdirinya bangsa ini. Hampir seluruh responden (96,6 persen) menyatakan, Pancasila haruslah dipertahankan sebagai ideologi negara. Sebanyak 92,1 persen menegaskan, Pancasila sebagai landasan terbaik untuk bangsa ini.

Dalam pergaulan internasional, identitas atau jatidiri sebuah bangsa merupakan salah satu hal yang teramat penting, karena tanpa suatu identitas atau

³ Ricardi S Adnan, *Potret Suram Bangsaaku : Gugatan dan Alternatif Disain Pembangunan*, Jakarta : UI Press, 2006, halaman 180.

⁴ Kompas, *Publik masih ragukan aktualisasi Pancasila*, Data ini merupakan hasil jajak pendapat Kompas edisi 30 September 2008.

jatidiri, maka eksistensi sebuah bangsa tidaklah nyata. Contoh ini terlihat jelas pada Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman yang eksis dalam situasi dunia di era globalisasi ini. Berbeda dengan Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya yang masih kebingungan dengan jatidirinya. Dalam kaitan ini, upaya revitalisasi Pancasila melalui pendidikan karakter menjadi syarat mutlak pembentukan karakter bangsa, untuk mempertahankan eksistensinya menghadapi gelombang globalisasi dengan segala dampaknya.

1.2. Rumusan Masalah

Situasi peradaban dunia saat ini tengah dilanda sebuah ideologi besar yaitu globalisasi. Proses ideologisasi globalisasi ini semakin tidak tertandingi, sehingga dimungkinkan politik *endism* akan terjadi dengan berakhirnya ideologi-ideologi dan hancurnya negara bangsa. Seperti kehancuran sosialisme oleh kaum liberalis, dikhawatirkan hal yang serupa juga akan terjadi pada Pancasila.

Melihat pentingnya eksistensi ideologi Pancasila bagi kelangsungan Bangsa Indonesia, dihadapkan pada berbagai ancaman yang kerap kali muncul dalam situasi peradaban dunia yang semakin mengglobal, maka perlu dirumuskan strategi dalam penyelamatan Pancasila dengan revitalisasi Pancasila melalui salah satu upayanya yaitu Pendidikan Karakter Bangsa. Urgensi pendidikan karakter bangsa ini memerlukan perhatian khusus, karena globalisasi tidak akan pernah menunggu kita untuk siap menghadapinya. Globalisasi dengan segala paham kebebasan dan keterbukaannya akan menggilas setiap bangsa yang tidak "berkarakter".

Hasil Jajak Pendapat Kompas (2008)⁵, yang diselenggarakan terhadap 860 responden di sepuluh kota di Indonesia menunjukkan, cukup banyak responden yang lupa dan tidak hafal isi Pancasila. Saat responden diminta untuk membacakan lima sila dari Pancasila, sebanyak 90,8 persen hafal sila pertama. Namun, saat dilanjutkan pada sila berikutnya, sedikitnya 27,8 persen lupa isi sila kedua, 23,8 persen lupa sila ketiga, 30,2 persen lupa sila keempat dan 28,8 persen lupa bunyi sila kelima. Kenyataan ini sungguh mengejutkan. Jika tahu saja tidak,

⁵ Kompas, *Masyarakat Ragukan Kebangkitan Indonesia*, Data ini merupakan hasil jajak pendapat Kompas edisi 26 Mei 2008.

maka bagaimana bisa memahami dan menghayatinya. Namun, dari hasil jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa publik tampak konsisten menerima keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keinginan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa masih dikemukakan oleh hampir seluruh responden Jajak Pendapat Kompas. Meskipun dalam Jajak Pendapat yang sama juga terungkap betapa penghargaan dan toleransi dalam masyarakat terasa semakin memburuk, dan ikatan sosial masyarakat semakin melemah. Sebagian besar responden (69,5 persen) menyatakan solidaritas nasional bangsa Indonesia saat ini lemah. Hanya 23,7 persen responden yang mengungkapkan bahwa toleransi antarkelompok, seperti kaya dan miskin, serta antaretnis cukup kuat. Sementara 73,1 persen menyatakan solidaritas antargolongan lemah.

Fenomena ini sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Gaya hidup individualistis, hedonis, berfoya-foya, konsumtif, pergaulan bebas dan berbagai penyakit moral seperti korupsi, penipuan, dan lain-lain merupakan efek negatif globalisasi yang begitu kuat terasa. Praktik korupsi yang terjadi sehari-hari dan dialami oleh banyak orang tecermin pula dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 25-27 Agustus 2010. Hasil jajak pendapat⁶ ini memperlihatkan bahwa satu dari empat responden yang diwawancarai melalui telepon mengakui pernah mengalami, melihat, ataupun sekadar mendengar terjadinya tindak korupsi di sekitarnya, mulai dari lingkungan sekolah, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan di kalangan keluarga sendiri. Tak kurang dari 40 persen responden menyatakan pernah melihat perilaku korupsi di wilayah pendidikan. Sementara di lingkungan pekerjaan responden, terdapat 36,4 persen yang mengakui mengalami maupun sekadar mendengar adanya tindakan korupsi. Bahkan, satu dari tiga responden berterus terang pernah memberikan uang ataupun barang di luar prosedur yang resmi ketika mereka berhubungan dengan aparat negara. Saat mereka harus mengurus berbagai surat, misalnya, mulai dari kartu tanda penduduk (KTP), surat-surat kendaraan, seperti surat izin mengemudi (SIM), bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan surat tilang, dengan alasan agar urusan surat-surat tersebut bisa segera diselesaikan. Gambaran buram ini disuarakan pula oleh para responden jajak pendapat ini. Dalam pandangan

⁶ Kompas, *Mempertanyakan Banalitas Korupsi*, Data ini merupakan hasil jajak pendapat Kompas edisi 30 Agustus 2010.

publik, tak ada satu pun lembaga atau institusi negara yang terbebas dari praktik korupsi. Mulai dari aparat penegak hukum, departemen-departemen pemerintah, pemerintah daerah, hingga DPR dan partai politik, semuanya telah terjangkau budaya korupsi. Bahkan, anggota Kabinet Indonesia Bersatu dinyatakan oleh sebagian besar responden (89,4 persen) tidak terbebas dari tindakan korupsi. Menurut sebagian besar responden jajak pendapat ini (45,3 persen), perilaku korupsi terutama didorong oleh motif-motif ekonomi, yaitu ingin memiliki banyak uang secara cepat dan etos kerja rendah. Responden lainnya menyebutkan tentang faktor rendahnya moral (17,3 persen), penegakan hukum lemah (8,8 persen), dan beberapa penyebab lainnya (28,6 persen).

Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah disarikan dalam Pancasila, seperti nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, agamis, hidup hemat dan sederhana. Dan jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, maka bangsa ini akan kehilangan karakternya dan Pancasila sebagai kristalisasi karakter luhur bangsa akan hilang dan dilupakan.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional bersama dengan instansi terkait lainnya harus mampu merumuskan program pendidikan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang mengejawantah dalam Pancasila. Sehingga, selain membentuk karakter bangsa, sekaligus juga merevitalisasi Pancasila.

Untuk itu dalam rencana penulisan proposal tesis ini, penulis akan merumuskan masalah dalam tiga pertanyaan utama, sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia, yang ditandai dengan melemahnya karakter bangsa, yang dikhawatirkan akan mampu mengancam eksistensi Pancasila sebagai falsafah negara dan kepribadian bangsa, terlebih Indonesia saat ini tengah berada pada era globalisasi dan persaingan ideologi dunia.
2. Bagaimana urgensi pendidikan karakter bangsa dalam membangun kembali karakter bangsa Indonesia, sekaligus sebagai upaya revitalisasi Pancasila, terkait dengan situasi karakter bangsa saat ini yang terpengaruh efek negatif globalisasi, seperti hedonis, korupsi, kemerosotan moral dan penyakit moral lainnya.

3. Bagaimana bentuk dari program pendidikan karakter bangsa yang efektif dalam membentuk manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan program pendidikan karakter bangsa.

1.3. Pembatasan Penelitian

Kelangsungan hidup suatu bangsa sangat ditentukan oleh penghargaan masyarakatnya terhadap nilai-nilai luhur yang tumbuh berkembang seiring pendewasaan jati diri bangsa tersebut. Hal ini disadari oleh para *founding fathers* negara Indonesia yang telah menyarikan sebuah konsep ideologi bangsa berdasarkan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia yang dinamakan Pancasila. Dalam sejarah kelahiran ideologi negara ini, sempat terjadi pertentangan antarberbagai paham yang dianut oleh masyarakat pada waktu itu. Namun, Pancasila telah membuktikan diri sebagai sebuah falsafah negara yang universal dan mampu menyatukan berbagai karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat beragam, di tengah ancaman perpecahan bangsa tersebut.

Kelahiran Pancasila sebagai ideologi bangsa, meskipun berjalan alot, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan berlangsung relatif mulus. Berbeda dengan proses kelahirannya, upaya untuk "membumikan" Pancasila di tengah bangsa Indonesia ternyata banyak menghadapi ancaman. Hal tersebut sudah mulai tampak sejak masa-masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ancaman terhadap eksistensi Pancasila tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal. Berpijak pada realitas adanya berbagai ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa sejak masa-masa awal kelahirannya, bisa dipastikan bahwa ancaman terhadap Pancasila akan terus berlangsung. Untuk itu, mau tidak mau, apabila Pancasila ingin tetap eksis di bumi Nusantara ini, perlu selalu dipersiapkan respons yang tepat atas berbagai ancaman yang tengah dan akan terjadi.

Salah satu upaya membumikan Pancasila yang bisa dilakukan adalah pendidikan karakter bangsa. Namun tentu saja, akan terdapat berbagai faktor baik yang mendukung maupun menghambat, karena dalam Sistem Pendidikan

Nasional di Indonesia, pendidikan karakter yang memiliki muatan nilai-nilai Pancasila masih belum sepenuhnya berjalan maksimal sesuai cita-cita dan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Lingkup penelitian akan difokuskan pada Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia saat ini, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, yang lebih khususnya tersirat pada upaya pendidikan karakter bangsa (*national character education*) yang menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sehingga mempermudah aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan proses pembelajaran Pancasila yang non dogmatis, diharapkan Pancasila bisa lahir kembali dalam artian revitalisasi Pancasila bisa berlangsung secara berkelanjutan.

Mengenai kemungkinan adanya faktor eksternal lainnya, meskipun tidak menjadi fokus penelitian ini, akan tetapi selama masih relevan dan mendukung penelitian, akan dipergunakan untuk membantu melengkapi analisa (pembahasan). Meski membahas mengenai ideologi dan kehidupan berbangsa dan bernegara, tesis ini tidak akan membahas mengenai partai politik, karena pembahasan partai politik memerlukan tesis tersendiri.

Penelitian dibatasi pada sejak dikeluarkannya UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas hingga tahun 2010, khususnya pada format atau program penyelenggaraan pendidikan karakter oleh Kementerian Pendidikan nasional sebagai kementerian yang berwenang dalam permasalahan ini, mengenai seluk beluknya, faktor pendukung dan penghambat, serta proses internalisasi Pancasila melalui pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi Pancasila.

Mengenai variabel ancaman terhadap ideologi, dibatasi sejak orde reformasi mulai digulirkan pada tahun 1998 hingga tahun 2010, dengan asumsi sejak 1998 era kebebasan demokrasi digulirkan di Indonesia sehingga Pancasila

dianggap bukan lagi satu-satunya asas tunggal di Indonesia. Hal ini berarti ancaman terhadap eksistensi Pancasila semakin nyata.

1.4. Tujuan Penelitian

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki kedudukan yang paling fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun saat ini Pancasila seperti terlupakan seiring dengan adanya globalisasi yang membawa nilai-nilai liberal yang mampu menggerus nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan situasi kekinian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam era globalisasi yang membawa berbagai pengaruh baik positif maupun negatif bagi bangsa, termasuk di dalamnya adalah ancaman terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, yang ditandai dengan satu kenyataan bahwa sebagian rakyat Indonesia mulai mengabaikan Pancasila. Terlebih dahulu harus didapatkan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, kemudian ideologi-ideologi yang ada dalam pergaulan dunia sekarang ini yang sedang terlibat dalam perseteruan ideologi dunia. Sehingga mampu menjelaskan ancaman-ancaman yang signifikan terhadap Pancasila baik dari faktor internal maupun eksternal.
2. Mengidentifikasi urgensi pendidikan karakter bangsa dalam membangun kembali karakter bangsa Indonesia sebagai upaya revitalisasi Pancasila, terkait dengan dinamika ancaman yang dihadapi khususnya efek negatif globalisasi seperti kemerosotan moral, hilangnya kepribadian bangsa dan penyakit moral lainnya, mengingat penyakit moral seperti korupsi yang telah membudaya.
3. Menganalisis bentuk dari program pendidikan karakter bangsa yang efektif dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program pendidikan karakter bangsa, untuk memastikan bahwa program pendidikan karakter bangsa dapat mencapai tujuannya untuk membentuk manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila. Dengan menyelenggarakan

pendidikan karakter yang tepat sasaran, maka sekaligus akan mampu merevitalisasi Pancasila.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian pada dasarnya memiliki dua kegunaan yaitu teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis nantinya akan dipergunakan sebagai upaya pengembangan ilmu, sedangkan kegunaan praktis lebih condong kepada upaya penggunaan hasil penelitian untuk diaplikasikan⁷. Kegunaan teoritis pada umumnya diperoleh pada penelitian ilmiah untuk kepentingan riset ilmu. Sedangkan kegunaan praktis akan diperoleh dari penelitian-penelitian yang bersifat teknik/praksis, yang salah satunya adalah penelitian intelijen stratejik.

Penelitian intelijen stratejik memiliki sedikit perbedaan kegunaan dengan penelitian akademis lainnya. Jika pada penelitian akademis, hasil dari penelitian tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan akademi, lain halnya dengan penelitian intelijen stratejik.

Hasil penelitian intelijen stratejik ini pada dasarnya merupakan produk intelijen. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada *user* (pemerintah) dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait dengan upaya revitalisasi pancasila melalui internalisasi Pancasila dalam proses pendidikan karakter bangsa, untuk menyelamatkan Pancasila dalam situasi persaingan global.

1.6. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang disusun secara sistematis dalam rangka memberikan penjelasan atas permasalahan ilmiah. Sedangkan metode merupakan serangkaian urutan atau cara yang konsisten yang memiliki syarat dan aturan tertentu yang telah disepakati. Jadi, metodologi penelitian merupakan tata cara yang baku yang berlaku dalam suatu disiplin ilmu untuk melaksanakan

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, Jakarta : Erlangga, 1999, halaman 8.

kegiatan penelitian sehingga dapat diperoleh penjelasan permasalahan yang diteliti yang konsisten⁸.

Metode penelitian akan menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh atau metode penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam kajian Intelijen Strategik, istilah metode penelitian diseragamkan menjadi metode analisa, karena sifat Intelijen Strategik sendiri yang multidisplin. Artinya dalam penelitian Intelijen paling tidak mencakup dua disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda.

Analisis intelijen strategik bertujuan untuk memberikan masukan kepada user berupa *early warning*, *early detection*, *foresight* dan *problem solving*. Untuk melakukan analisis dengan tepat diperlukan data-data yang tepat, aktual dan faktual yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori Ideologi. Sebagai hasil akhir dari analisa, perlu dirumuskan kebijakan terkait dengan perumusan upaya revitalisasi Pancasila melalui internalisasi Pancasila dalam pendidikan karakter bangsa untuk menghadapi situasi persaingan ideologi global dan mempertahankan eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.6.1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan kerangka pemikiran Intelijen Strategik, yaitu penelitian yang dimulai dari adanya sebuah ancaman. Sehingga, produk atau hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai upaya penyelamatan terhadap ancaman tersebut. Penelitian Intelijen Strategik ini diperuntukkan kepada pengambil kebijakan atau *policy maker*. Agar hasil dari penelitian tersebut dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam memutuskan atau mengambil sebuah kebijakan.

Masalah ancaman merupakan permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian intelijen strategik, terutama penelitian yang obyeknya bukan organisasi intelijen. Oleh karena itu, terlebih dahulu peneliti bahas tentang pengertian ancaman yang akan dijadikan sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian. Kerangka pemikiran intelijen strategik bisa dikatakan sebagai keseluruhan atau

⁸ *Ibid*, halaman 16.

totalitas penelitian baik dari sisi konsep, metode dan teknik yang memadukan antara penelitian ilmiah pada umumnya dengan penelitian intelijen stratejik.

Secara umum konsep ancaman dikaitkan dengan masalah yang berhubungan dengan negara, yaitu adanya aktivitas baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mengancam eksistensi bangsa, kedaulatan negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), stabilitas nasional dan kredibilitas pemerintah dan kepentingan nasional lainnya. Ancaman juga berarti berbagai (situasi, kondisi), (potensi dan tindakan) baik itu alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung yang patut diperkirakan, diduga berpotensi membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya.

Persaingan ideologi mungkin berakhir, tetapi bagi masyarakat dunia, ancaman pertikaian yang lebih besar akan terjadi. Samuel P. Huntington (1997), menulis sebuah artikel yang kemudian menjadi buku, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*. Sejak tahun 1993, ia mengingatkan kemungkinan benturan antar peradaban dunia, yang antara lain meliputi budaya, dan agama akan mewarnai dunia di masa depan. Bom di WTC, konflik-konflik etnis, dan agama diseluruh dunia, hingga tragedi Bom Bali mungkin bisa menyadarkan betapa kita manusia, makhluk yang mulia ciptaan Tuhan menjadi sangat kejam akibat dari kesadaran palsu.

Daniel Bell (1962) dalam tesisnya mengenai *The End Of Ideology* menunjukkan, hal ini biasanya diiringi dengan politik endism, yaitu sebuah tesis tentang matinya ideologi dunia akibat gerusan liberalisme yang tak tertandingi. Negara maju dengan liberalismenya menyusup melalui stigma endism.

Dekade terakhir ini, kita telah menyaksikan habisnya ideology-ideologi abad ke 19 khususnya marxisme, sebagai sebuah system intelektual yang mengklaim kebenaran atas pandangannya tentang dunia..namun satu penolakan terhadap ideology, dalam arti yang sebenarnya, haruslah tidak hanya kritisisme atas tatanan utopia, tetapi keberadaan masyarakat sebagaimana seharusnya. Apa yang perlu dikritik adalah kekakuan alienasi, tenggang rasa kepada orang lain... (Bell:1962)⁹

⁹ Nuswantoro, *Daniel Bell:Matinya Ideologi*, Indonesiatara, Magelang, 2001, halaman viii.

Dengan kata lain, ideologisasi globalisasi merupakan bentuk paling nyata dari upaya pengakhiran ideologi lainnya, termasuk Pancasila (*the end of the Pancasila*) sehingga memperlancar hegemoni negara maju. Dan tidak tertutup kemungkinan Pancasila pada akhirnya mati di tengah globalisasi akibat ketakberdayaan anak bangsa merespon berbagai godaan global. Jika Pancasila mati, sesuai perkiraan Bell, maka bangsa Indonesia akan kehilangan karakternya karena pada dasarnya Pancasila merupakan karakter bangsa.

Di tengah pasar ideologi yang semakin terbuka saat ini, eksistensi ideologi masing-masing negara sangat rentan terjangkit penyakit *endism*. Untuk itu, perlu langkah-langkah strategis dan konstruktif dengan memanfaatkan seluruh potensi dan peluang (*opportunity*) yang ada dalam masyarakat. Salah satu peluang tersebut adalah adanya potensi-potensi 'perlawanan' terhadap arus globalisasi yang belakangan marak terjadi khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara yang masih mencari jati dirinya, termasuk Indonesia.

Wacana tentang ideologi mencuat kembali seiring dengan arus globalisasi yang dianggap mengancam terhadap eksistensi *nation-state*. Di tanah air, nasib ideologi Pancasila mengalami pasang surut. Ia sempat disakralkan, tapi kemudian dicampakkan. Karena itu pula, Pancasila tak membumi bagi kehidupan bangsa. Sakralisasi telah menyebabkan Pancasila seperti benda museum yang berjarak dari generasi anak bangsa. Akibat itu pula, Pancasila tidak berharga dan dianggap barang langka yang tak menarik untuk diaktualisasikan. Ini terbukti dari semakin sulitnya mencari generasi muda yang, paling tidak, tahu lima sila Pancasila. Beberapa televisi pernah menayangkan wawancara mendadak dengan sejumlah generasi muda dari kalangan siswa sampai mahasiswa. Sebagian besar mereka tak bisa menyebutkan isi Pancasila. Ini menjadi indikator sederhana dari semakin terasingnya Pancasila dari nafas kehidupan anak bangsa.

Pancasila dijadikan ideologi dikarenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai falsafah dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi

ke generasi. Istilah ideologi negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat final. Oleh karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain.

Perlu disadari oleh semua pihak bahwa proses demokratisasi yang sedang berlangsung ini memiliki koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan NKRI, yang menganut ideologi negara Pancasila yang membina keberagaman, dan memantapkan kesetaraan. Oleh karenanya, tidak semua hal dapat dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satu pun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, sikap bangsa kita akan menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi dunia saat ini dan di masa mendatang.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki kedudukan yang tidak dapat tergantikan dengan ideologi lain. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang terdahulu terkenal dengan adat ketimuran bangsa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai budaya yang luhur, adab

kesopanan yang tinggi, saat ini karena pengaruh globalisasi yang disusupin oleh gaya kapitalis dan misi satu negara yang sudah masuk ke dalam kebudayaan Indonesia dengan segala pemikiran liberalis yang akhirnya mengikis nilai-nilai budaya Indonesia yang bermartabat menuju pada moral bangsa yang rendah, karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang memiliki dasar ke Tuhanan dan telah dilanggar dengan pemikiran-pemikiran liberalis yang bebas mendefinisikan makna ke Tuhanan dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang liberal yaitu berdasarkan hasil pemikiran individu atau kelompok dan bukan berdasarkan aturan hukum ke Tuhanan yang diajarkan oleh suatu agama.

Keadaan ini merupakan salah satu eksek negatif dari dibukanya keran kebebasan pers, sehingga berbagai macam informasi dari seluruh penjuru dunia dalam sebuah *global village* masuk dan menyatu dengan karakter bangsa Indonesia tanpa melalui proses filterisasi. Hingar bingar media yang menyuarakan gaya hidup Bangsa Barat, menjadi panutan sebagian bangsa ini, tanpa memperhatikan bahwa seharusnya karakter positif dari bangsa Baratlah yang seharusnya ditiru. Dan media massa mempunyai peranan penting dalam hal ini.

Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab kepada nilai pemikiran Liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab yaitu dengan maraknya pornografi dan pornoaksi yang mengatasnamakan seni dan menjungkirbalikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya yang dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang beradab, namun kini pengaruh kapitalis yang mengusung pemikiran liberalis dengan kebebasan tanpa batas, sesungguhnya sudah menurunkan arti peradaban bangsa Indonesia yang dahulu selalu dijunjung tinggi menjadi negara dengan kemerosotan moral yang cukup tajam dan tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila yang menganut paham ke Tuhanan YME yang seharusnya mengikat tiap-tiap individu masyarakat/bangsa dengan nilai-nilai ke Tuhanan yang sudah digariskan dalam satu ajaran agama yang mengikat dengan

batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Dan gaya kapitalis dan liberalis sudah melanggar makna kemanusiaan yang beradab menjadi tidak beradab dengan melokalisir tempat-tempat perjudian dan perzinahan, jelas bertentangan sekali dengan Ideologi Pancasila, khususnya sila ke Tuhanan YME dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembangunan dan modernisasi dalam era globalisasi, di salah satu sisinya, ternyata telah menggeser nilai dan budaya luhur bangsa. Budaya praktis dan realistik lebih dikedepankan dibanding dengan mengacu kepada nilai-nilai luhur bangsa, sehingga jarang lagi kita jumpai suasana kekeluargaan, kegotongroyongan dan bahkan pranata adat¹⁰.

Gaya kapitalis dengan pasar bebasnya dan pemikiran liberalis yang tanpa batas dan disertakan dalam globalisasi, sudah menciptakan banyak malapetaka di Indonesia yaitu makin terpuruknya perekonomian Indonesia dengan pasar bebasnya, dimana kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara yang mengusung misi tersebut dengan memberikan banyak persyaratan-persyaratan politik yang diajukan oleh penyandang dana seperti IMF dan Bank Dunia, sehingga Indonesia hanya dijadikan sebagai koloni untuk memasarkan hasil-hasil industri negara-negara maju yang mengusung misi ideologi suatu negara tersebut, tanpa mampu menjual hasil industri negara Indonesia yang sudah dirobokkan sendi-sendi perekonomian di seluruh sektor industri, keuangan maupun perdagangan dengan menggunakan kelompok-kelompok tertentu.

Pengaruh globalisasi yang ternyata mengusung misi politik suatu bangsa yang maju untuk masuk ke Indonesia, secara langsung sudah menggerogoti ideologi negara yaitu Pancasila dan tanpa sadar telah digantikan oleh gaya kapitalis dan saat ini Pancasila hanya akan dijadikan sebagai simbol negara yang tanpa makna, karena sudah tercabut jati dirinya yang memuat 5 dasar yang berisi tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 45, sesungguhnya tanpa sadar saat ini Indonesia telah dijajah dengan penjajahan model baru yang secara jelas menghancurkan seluruh aspek pertahanan kita dari dalam dengan memanfaatkan satu kelompok-kelompok tertentu.

¹⁰ Ricardi S Adnan, *Potret Suram Bangsaaku : Gugatan dan Alternatif Disain Pembangunan*, Jakarta : UI Press, 2006, halaman 3.

Perlunya strategi yang tepat untuk menghadapi globalisasi dengan gaya kapitalis dan liberalis yaitu Indonesia harus memiliki sistem pemerintahan yang kuat dengan strategi yang jelas dan memberlakukan hukum yang mengikat kuat pada individu, masyarakat serta membuat kesepakatan dengan negara-negara asing dalam melakukan hubungan kerjasama yang jelas tanpa adanya ketimpangan kebijaksanaan yang justru merugikan satu negara dan menguntungkan negara lain dalam melakukan kerja sama, dengan memberikan banyak persyaratan-persyaratan kepada negara Indonesia sebagai negara penerima bantuan pinjaman dari para pengusung gaya kapitalis tersebut. Salah satu strategi tersebut adalah revitalisasi Pancasila dengan konkretisasi nilai-nilai Pancasila kedalam kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, dalam hal ini adalah internalisasi Pancasila dalam pendidikan karakter bangsa, sehingga akan dihasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang ber-Pancasila.

Pancasila, pada hakekatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga merevitalisasi Pancasila sama artinya dengan merevitalisasi karakter bangsa, dan untuk itulah peran pendidikan karakter bangsa menjadi penting. Pemerintah sebagai penyelenggara negara pun harus mampu merumuskan format pendidikan karakter bangsa dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila bukan lagi sekedar doktrin belaka.

Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Disinilah letak peran penting pendidikan sebagai salah satu medium pembentukan moral, atau lebih tepatnya medium pembentukan karakter, karena pada hakekatnya, pendidikan bukan hanya sebatas transfer knowledge saja,

namun lebih dari itu. Menurut Sigmund Freud, *character is striving system with underlying behavior*, karakter merupakan kumpulan tata nilai yang terwujud dalam suatu system daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang ditampilkan secara mantap¹¹. Karakter juga merupakan hasil dari internalisasi nilai-nilai yang ada di sekitarnya yang dianggap baik ke dalam diri dan kepribadiannya. Sehingga Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter (Lickona:1991) dapat dimaknai sebagai "*the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development*". Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku di sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Selain di sekolah, pendidikan karakter juga harus berlangsung di keluarga di masyarakat, karena kedua lingkungan tersebut juga merupakan lingkungan pendidikan serta media sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai.

Pendidikan karakter bangsa (*national character education*) ini pulalah yang akan menjadi satu strategi jitu dalam upaya revitalisasi Pancasila untuk lebih membumikan Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam pendidikan karakter bangsa ini akan ditanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pengamalan secara nyata, bukan sekedar dogma dan indoktrinasi belaka. Karena menurut Prof Tilaar, karakter bangsa sebenarnya merupakan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia¹². Hal ini seharusnya mudah, karena pada prinsipnya nilai-nilai yang terdapat pada

¹¹ Armai Arief, *Masalah dan Usaha Pembangunan Karakter Bangsa*, dalam Refleksi Karakter Bangsa, Jakarta, 2008, hal 48.

¹² H.A.R Tilaar, *Karakter Bangsa Dalam Perspektif Pedagogik Kontemporer*, dalam Refleksi Karakter Bangsa, Jakarta, 2008, hal 14.

Pancasila merupakan ekstraksi dari berbagai nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang telah diwariskan secara turun temurun. Dengan proses internalisasi ini, secara tidak langsung Pancasila akan meresap dan menyatu bersama karakter setiap peserta didik, yang akan menghasilkan manusia Pancasila, yaitu manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki karakter sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.

Oleh karena itu, dalam Sistem Pendidikan Nasional harus dimasukkan kedalamnya, program-program pendidikan karakter bangsa, mengingat urgensi dari program ini demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tentu saja, kesemuanya harus dilakukan secara komprehensif antara pemerintah dengan seluruh rakyat Indonesia yang terkait dengan tujuan untuk menyelamatkan Pancasila dari ancaman ideologi lain dan upaya mempertahankannya demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena menyingkirkan dan melupakan Pancasila yang menjadi ideologi negara berarti juga memusnahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia (NKRI) cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

1.6.2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang diteliti. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitik, yakni berusaha menuturkan, menganalisa atau menafsirkan serta mengklasifikasikan data-data yang ada. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa pola dan struktur yang pada obyek penelitian atau sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedang analisa akan dilakukan dengan mempergunakan teori ideologi, teori pendidikan dan teori media massa, dengan mengetahui terlebih dahulu ancaman yang ada, berikut faktor pendukung dan penghambatnya, untuk kemudian dilakukan analisa untuk merumuskan *problem solvingnya*.

1.6.3. Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data sekunder seperti studi pustaka, studi literatur, jurnal, media cetak dan elektronik. Dalam kegiatan intelijen, kegiatan ini merupakan pengumpulan informasi dengan mempergunakan sumber terbuka. Sedangkan yang dimaksud pengumpulan informasi dari sumber tertutup merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik intelijen, yang dalam penelitian ini, dirasakan tidak perlu untuk digunakan.

Selain pengumpulan data sekunder, informasi juga diperoleh melalui hasil wawancara dan elisitasi dengan tokoh-tokoh ahli dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu untuk menjamin keakuratan nilai informasi, seperti juru bicara Presiden Drs Julian Aldrin Pasha M.A, Ph.D; Kabid Kurikulum Pendidikan Dasar Balitbang Kemendiknas Erry Utomo; Ph.D, Psikolog Anak Dr Seto Mulyadi, S.Psi, M.Si; Akademisi Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A; Tokoh Intelijen/Mantan Deputy BAKIN Brigjen TNI (Purn) Irawan Soekarno; Pemuka Agama Franz Magnis Suseno, Budayawan Arswendo Atmowiloto, dan Wartawan Senior Kompas Budiarto Shambazy.

1.6.4. Model Analisa

Dalam proses analisa diperlukan suatu permodelan untuk membantu mempermudah peneliti melakukan analisa. Model ini merupakan alur pikir yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini.



Gambar 1.1 Model Analisa

Dari permodelan diatas dapat dilihat, bagaimana proses internalisasi Pancasila yang sebenarnya memiliki unsur-unsur yang bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia, ke dalam proses pendidikan karakter, dengan memfokuskan pada subyek, obyek dan metoda yang dipergunakan, tanpa mengesampingkan adanya perkembangan lingkungan strategis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga akan dihasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila. Melalui upaya pendidikan karakter ini, maka secara tidak langsung telah menyelamatkan Pancasila (merevitalisasi Pancasila) dan mempertahankan eksistensi Pancasila dalam persaingan ideologi global dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini akan disusun dengan mempergunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pembatasan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori. Bab ini pada sub bab 1 akan menguraikan tentang Ideologi, baik dari segi definisi dan tipenya. Sub bab 2 akan menguraikan

tentang seluk beluk Pancasila, sejarah, revitalisasi Pancasila, fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub bab 3 akan menguraikan tentang globalisasi, baik secara teori maupun perkembangannya. Sub bab 4 akan menguraikan tentang Pendidikan, dilihat dari unsur-unsurnya dan proses pendidikan. Sub bab 5 akan menguraikan tentang Karakter Bangsa, serta urgensi pendidikan karakter. Sub bab 6 akan menguraikan tentang teori Ritualisme Robert K Merton. Sub bab 7 akan menguraikan tentang media massa, meliputi pengertian, bentuk-bentuk, efek media dan kepemilikan media. Sub bab 8 akan menguraikan tentang intelijen, dilihat dari definisi ancaman dan cakupan Intelijen, sebagai Organisasi, Kegiatan dan Pengetahuan.

BAB III Globalisasi, Pancasila dan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Bab ini akan menjelaskan tentang perkembangan yang terjadi saat ini meliputi situasi kehidupan bangsa pasca reformasi dan eksistensi Pancasila dalam persaingan ideologi serta Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia berikut program-program Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014, termasuk program pendidikan karakter bangsa beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

BAB IV Program Pendidikan Karakter Bangsa Sebagai Upaya Revitalisasi Pancasila. Bab ini akan memberikan analisa tentang urgensi dan bentuk Program Pendidikan Karakter Bangsa meliputi subyek, obyek, dan metodenya, berikut menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, termasuk perkembangan lingkungan strategis untuk mempermudah pencapaian tujuan dari program tersebut yaitu untuk membentuk karakter manusia Pancasila sebagai upaya revitalisasi Pancasila.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang *warning, forecasting* dan *problem solving* yang *actionable* yang dijabarkan dalam kesimpulan yang bisa diperoleh mengenai upaya pemerintah untuk merumuskan kebijakan terkait upaya revitalisasi Pancasila, khususnya melalui sektor pendidikan, dalam kaitan ini adalah pendidikan karakter bangsa, untuk membentuk manusia Indonesia berkarakter Pancasila dan mempertahankan eksistensi Pancasila demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan teoritis dipergunakan beberapa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, diantaranya adalah Teori Ideologi, Pancasila, Globalisasi, Pendidikan, Karakter Bangsa, Ritualisme, Media Massa dan Intelijen.

2.1. Ideologi

Ideologi adalah salah satu dari sekian banyak konsep yang paling ekuivokal (meragukan) dan elusif (sukar ditangkap) yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial; tidak hanya karena beragamnya pendekatan teoritis yang menunjuk arti dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi karena ideologi adalah konsep yang sarat dengan konotasi politik dan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari dengan makna yang beragam¹³.

Ideologi secara konsep sering dipahami secara berbeda-beda, baik dalam pengertian orang awam (*common sense*) maupun dalam pemakaian di dunia keilmuan. Pengertian paling umum tentang ideologi adalah sebagai seperangkat sistem yang diyakini; sebuah sistem ide. Secara etimologi, ideologi berasal dari dua buah kata, yaitu *idea* yang berarti pikiran dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal-soal cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; Sekumpulan doktrin, mitos, kepercayaan, dll, yang menuntun individu, gerakan sosial, institusi, golongan, atau kelompok yang besar; Sekumpulan doktrin yang mengacu pada beberapa tujuan politik dan sosial, bersama dengan perangkat-perangkat yang mendukung pemakaiannya. *"Ideology ... is usually taken to mean, a prescriptive doctrine that is not supported*

¹³ Jorge Larrain, *The Concept of Ideology*, 1966, halaman 1.

by rational argument." ¹⁴. "Ideologi...biasanya dimaknai sebagai sebuah doktrin yang bersifat preskriptif yang tidak didukung oleh argumentasi rasional".

John B Thompson dalam *International Grandbook Of The Studies In The Theory Of Ideology* (2007), mencatat bahwa istilah ideologi, merupakan derivasi dari *ideologues*, yang muncul pasca-Revolusi Perancis. Menganalisa wacana-wacana yang berkembang sekian lama di Eropa, Thompson mencatat, ideologi adalah berpikir tentang yang lain, berpikir tentang orang lain selain dirinya.

Menurut Soerjanto, terdapat 6 fungsi ideologi, diantaranya:

- a. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Selaras dengan fungsi-fungsi yang dikemukakan Soerjanto tersebut, terlihat bahwa ideologi mempunyai kontribusi peranan yang sangat penting untuk pencarian identitas/jatidiri dalam situasi kehidupan yang kompleks dan penuh ambiguitas ¹⁵. Ideologi membentuk suatu sistem pemikiran yang secara normatif memberikan landasan yang dijadikan pedoman tingkah laku dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya ideologi merupakan gambaran dari sejauh mana masyarakat berhasil memahami dirinya sendiri, memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat untuk mempunyai kehidupan bersama yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ideologi bagi bangsa Indonesia merupakan pedoman

¹⁴ D.D Raphael *Problems of Political Philosophy*, tahun 1970.

¹⁵ Kenneth Hoover et al, *Ideology and Political Life*, halaman 205.

dan penuntun dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila yang bersumberkan dari nilai-nilai luhur bangsa ini mengejawantah menjadi kepribadian dan karakter bangsa, sehingga kekhawatiran Bell, Fukuyama maupun Huntington jika sampai suatu bangsa kehilangan “ideologi”nya maka berakhirilah eksistensi bangsa tersebut, karena bangsa yang tidak berideologi maka ia tidak akan memiliki karakter bangsa, dan jika suatu bangsa tidak berkarakter, sudah dapat dipastikan ia akan tergilas oleh perkembangan zaman.

2.1.1. Tipe Ideologi

Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup.

2.1.1.1. Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan norma-norma dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya terdapat dalam sistem yang demokratis. Ideologi terbuka juga memiliki sifat luwes yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, karena ideologi terbuka mampu menyesuaikan dirinya dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ideologi terbuka, penguasa bertanggungjawab kepada rakyatnya. Contoh dari ideologi terbuka ini adalah Pancasila.

2.1.1.2. Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip

moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.

Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa *reserve*. Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik-buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Contoh dari ideologi tertutup adalah Marxisme-Leninisme, dan varian Sosialisme-Komunisme lainnya.

2.1.2. Jenis Ideologi

Dalam sejarah perkembangan ideologi, terdapat berbagai jenis dan varian ideologi. Namun dalam penelitian ini, hanya akan dicantumkan beberapa ideologi yang dominan, yang tengah terlibat dalam persaingan ideologi global.

2.1.2.1. Liberalisme

*Liberal politics thought is open to experimentation and innovation, is not enamored of tradition, and has tended to have great confidence in the human capacity for reason*¹⁶.

Meluasnya liberalism bersumber dari fakta, bahwa nilai-nilai liberal membentuk dan mencerminkan watak Negara modern serta sistem sosial dan ekonomi lain di Eropa Barat. Kelompok liberalis menegaskan komitmennya pada kesetaraan, kebebasan, individualitas dan rasionalitas. Mereka adalah figur egalitarian yang menolak bahwa seseorang tunduk secara alami pada orang lain,

¹⁶ Liberalism and the idea of progress, dalam buku *Political Ideas and Ideologies*, terbitan Harper&Row tahun 1974, halaman 501.

bukan berarti setiap orang adalah sama, melainkan setiap orang memiliki harkat moral yang sama. Setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan apa-apa yang mereka miliki, sama seperti orang lain.

Liberalisme berusaha mencapai kebebasan individu seluas mungkin dan sejalan dengan penegasan kesamaan derajat kebebasan untuk semua anggota masyarakat. Akhirnya sebagai rasionalis, mereka berpendapat bahwa pandangan-pandangan dalam ranah publik setidaknya harus terbuka bagi penilaian kritis dan perubahan sehingga validitasnya dapat diuji dan diperkuat. Namun pada hakikatnya, cita-cita liberal bukan hanya terbentuknya masyarakat yang terdiri dari orang-orang individualis yang mengejar kepentingannya sendiri-sendiri, melainkan sekumpulan warga yang mandiri dan bertanggungjawab. Seperti yang dijelaskan oleh Spencer (1820-1903), kebebasan memang harus menjadi milik semua orang, namun tetap ada peran negara yang menegakkan hukum dan ketertiban demi keamanan diri dan harta kekayaan kita¹⁷.

Prinsip-prinsip fundamentalis kaum liberal sebagaimana tersebut di atas semakin dikembangkan kaum kapitalis, karena mereka adalah pemilik modal dalam jumlah besar (konglomerat) maka kemungkinan untuk mencari keuntungan tanpa batas yaitu mengadakan produksi dengan menguasai alat produksi masyarakat dan Eksploitasi tenaga manusia dan sumber alam. Fakta-fakta inilah yang akhirnya memaksa sebagian kalangan untuk menyimpulkan bahwa liberalisme adalah kapitalisme, dimana yang kuat dan mempunyai modal akan semakin kuat dan yang lemah akan tertindas.

2.1.2.2.Sosialisme

Sebagai perimbangan terhadap kapitalisme sebagaimana telah disampaikan di atas – layaknya konsep tesis-antitesis-, muncullah paham sosialisme untuk mengantisipasi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin (perbedaan kelas), caranya adalah dengan menyamaratakan penghasilan perekonomian, karena semua orang adalah sama dan tidak ada perbedaan kelas. Oleh karena itu alat produksi dikuasai pemerintah atau sekelompok orang (partai

¹⁷ Richard Bellamy, *Ideologi Politik Kontemporer*, Terjemahan tahun 2001, halaman 32. Herbert Spencer merupakan salah satu tokoh utama tradisi liberal Inggris. Tokoh yang lainnya adalah John Locke (1632-1704) dan JS Mill (1806-1873).

sosialis) yang dikontrol pemerintah, dengan peraturan ketat serta kontrol keseragaman terhadap keberadaan upah dan penggajian.

Komunisme adalah tindak lanjut dari bentuk ekstrim sosialisme, yaitu untuk mengantisipasi persaingan bebas ekonomi antara kelas borjuis dengan kelas proletar (rakyat banyak), maka Karl Marx mengemukakan antisipasinya melalui keadilan yang anti kelas yang menghapuskan hak milik pribadi dan negara dikuasai partai tunggal sosial komunis. Obsesi Karl Marx melahirkan revolusi di berbagai belahan dunia, Lenin mendirikan pemerintahan Komunis Rusia, kemudian Stalin menjadikan partai Komunis tertancap kuat hampir tiga perempat abad di negara adi kuasa Uni Soviet sedangkan di Republik Rakyat Cina, Mao Tse Tung menyuburkan komunis di negara ini.

2.1.2.3. Fundamentalisme Islam

Fundamentalisme Islam adalah sebuah ideologi yang berusaha membangun kembali agama Islam sebagai sistem politik dalam dunia modern, dengan cara mereinterpretasikan unsur-unsur penting dalam Islam. Dalam pandangan ini, Islam menjadi suatu organik yang utuh, yang kelengkapan dan cakupannya menyaingi ideologi dan sistem negara lain.

Sebagai suatu gerakan politik dan sistem pemikiran, fundamentalisme Islam muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan modern yang bersifat internal dan eksternal, sebagai tanggapan kelompok sosial dan elite politik tertentu dalam masyarakat islam terhadap lembaga, konsep dan cita-cita yang dicetuskan dalam dunia modernitas. Salah satu pemikir dan pendiri mahzabnya adalah Sayyid Quthb (wafat 1966), yang terkenal sangat keras, yang beranggapan bahwa Islam harus ditegakkan kembali melalui revolusi, seperti yang dialami oleh Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini.

Dalam perkembangannya, akhirnya terdapat paradoks fundamentalisme Islam berupa keyakinan terhadap prioritas kegiatan politik dan pembuatan keputusan, sementara penerapan konkret ideologinya justru membungkam proses politik dan partisipannya. Karena mereka mulai menyadari pentingnya perjuangan politik yang berbeda dengan perjuangan bersenjata. Dan semenjak itulah, gerakan kelompok Islam yang masih mempergunakan strategi kekerasan, satu per satu

mulai dibatasi dan ditaklukkan. Fundamentalisme seringkali disamaartikan dengan radikalisme, meski sebenarnya berbeda. Radikalisme lebih berbahaya karena paham ini mengupayakan berbagai cara termasuk kekerasan dalam mencapai tujuannya, tentu saja paham ini sangat bertentangan dengan Pancasila yang memiliki nilai keadilan dan kasih sayang.

2.2. Pancasila

Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di India, *Panca* berarti lima dan *syila* berarti sendi, alas atau dasar. Jadi Pancasila atau Pancasila adalah lima sendi atau lima dasar yang baik. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila secara terpisah dari sila-sila lainnya atau membolak-balik sistematika dan tata urutannya akan mendatangkan pengertian yang keliru mengenai Pancasila¹⁸. Pemahaman Pancasila menjadi agenda utama untuk menemukan nilai-nilai luhur yang sebenarnya tertanam dalam teks Pancasila.

2.2.1. Sejarah Pancasila

Pancasila terlahir melalui sebuah proses sejarah bangsa yang panjang, dimulai sejak kegemilangan sejarah kerajaan Majapahit, hingga masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang dan perjuangan kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan yang turun menurun ini, dikristalisasikan dalam suatu proses penetapan Pancasila dalam sidang PPKI, melalui setidaknya 4 tahapan, yaitu : (a) Tahap Pengusulan, dilakukan oleh Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang tertuang dalam pidato Lahirnya Pancasila¹⁹, (b) Tahap Perumusan, dilakukan oleh Panitia Sembilan dari

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*, Jakarta, 2002, halaman 9. Prof Notonagoro menjelaskan bahwa sila Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan, tiap sila mengandung empat sila lainnya, sehingga persatuan dan kesatuan semua sila dari Pancasila dijiwai dan menjiwai sila lainnya yang merupakan simpulan yang tak dapat dipisahkan.

¹⁹ Pada sidang BPUPKI sebelumnya tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin berpidato mengusulkan lima asas dasar negara sebagai berikut : (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Pada sidang BPUPKI

BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, tertuang dalam Piagam Jakarta²⁰, (c) Tahap Penetapan, dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan (d) Tahap Peresmian, dilakukan oleh MPRS pada tanggal 5 Juli 1966, tertuang dalam Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966. Dengan rumusan Pancasila sebagai berikut : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

2.2.2. Revitalisasi Pancasila

Revitalisasi Pancasila dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali atau membunikan Pancasila sebagai pedoman nilai-nilai dasar yang memberikan orientasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara²¹, yang dieksplorasikan dalam beberapa dimensi, yaitu : a) dimensi realitas, yang mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai cerminan kondisi obyektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, b) dimensi idealitas, bahwa idealisme yang

tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengusulkan lima dasar negara sebagai berikut : (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan lahir dan bathin, (4) Musyawarah, dan (5) Keadilan rakyat. Baru Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara yang disebut dengan nama Pancasila secara lisan/tanpa teks sebagai berikut : (1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya beliau mengusulkan kelima sila dapat diperas menjadi *TriSila* yaitu *Sosio Nasional* (Nasionalisme dan Internasionalisme), *SosioDemokrasi* (Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat), *Ketuhanan yang Maha Esa*. Adapun Tri Sila masih diperas lagi menjadi *Eka Sila* yang intinya adalah "gotong royong".

²⁰ Pancasila dengan Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta sebagai berikut : (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²¹ Nurul Zuriyah, *Revitalisasi-Radikalisasi Filsafat dan Ideologi Pancasila di Era Reformasi dan Globalisasi*, Malang, 2002, halaman 203.

terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopia belaka, melainkan diobyektivasikan sebagai “kata kerja” untuk menuju hari esok yang lebih baik, c) dimensi fleksibilitas, bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang mandeg dalam kebekuan dogmatis, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru sesuai perkembangan zaman.

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara lambat laun semakin memudahkan penghayatan terhadap Pancasila, terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membawa ideologi-ideologi lain masuk ke Indonesia dan mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Setidaknya, aktualisasi dan revitalisasi Pancasila tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seperti Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu: kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, negara menghendaki adanya toleransi dari masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang ada serta diakui eksistensinya di Indonesia, negara Indonesia memberikan hak dan kebebasan setiap warga negara terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain : pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negara.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Persatuan Indonesia, yaitu: perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan, serta pengakuan negara terhadap kebhineka-tunggal-ikaan dari bangsa Indonesia dan kehidupannya.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu: penerapan kedaulatan dalam negara Indonesia yang berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, penerapan azas musyawarah dan mufakat dalam pengambilan segala keputusan dalam negara Indonesia, dan baru menggunakan pungutan suara terbanyak bila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, jaminan bahwa seluruh warga negara dapat memperoleh keadilan yang sama sebagai formulasi negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka, serta penyelenggaraan kehidupan bernegara yang didasarkan atas konstitusi dan tidak bersifat absolut.

Yang terakhir ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain: negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, negara menghendaki agar setiap warga negara memperoleh pengajaran secara maksimal, negara mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, dalam kaitan ini, pendidikan karakter berupaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, selain nilai agama dan budaya, sehingga mensukseskan pendidikan karakter sama halnya dengan merevitalisasi Pancasila.

2.2.3. Fungsi Pancasila

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut :

2.2.3.1. Dasar Negara

Dalam suatu negara, yang menjadi dasar atau fundamennya adalah pandangan hidup atau *prinsipil* bagi negara yang bersangkutan, inilah yang disebut dasar negara. Di dalam suatu dasar negara, biasanya terkandung azas-azas pikiran yang menjadi induk bagi pikiran-pikiran selanjutnya, prinsip-prinsip dasar, cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan negara tersebut. Sebagai implikasi Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila mengandung nilai-nilai religius, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai

kerakyatan dan nilai-nilai keadilan. Atas dasar itulah, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan Pancasila sebagai akidah hukum konstitusional yang diimplementasikan melalui berbagai aturan Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

2.2.3.2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Diartikan juga sebagai *way of life*. (a) Pancasila merupakan jawaban terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kehidupan yang baik, (b) Pancasila adalah konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, (c) Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari dan pedoman dalam mencapai tujuan bangsa.

2.2.3.3. Jiwa Bangsa Indonesia

Teori Karl Von Savigny menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang disebut *Volkgeist*²² yang berarti jiwa bangsa. Karena Pancasila lahir dan ada bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, maka Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang memberikan implementasi semua tingkahlaku setiap manusia Indonesia harus dijiwai dari sila-sila Pancasila.

2.2.3.4. Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa yang mempunyai siri khas, yang berarti Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia, yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya.

2.2.3.5. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila menjadi perjanjian luhur bangsa karena Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia, yaitu para *founding*

²² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*, 2002, halaman 14.

fathers, menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah disepakati sebagai perjanjian bersama pada saat meletakkan/menetapkan negara Republik Indonesia.

2.2.3.6. Ideologi Negara/Ideologi Terbuka Bangsa Indonesia

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem terpusat, negara mendominasi perekonomian, bukan warga negaranya²³. Dalam era globalisasi ini, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menyelaraskan dirinya dengan perubahan dan dinamika yang ada.

Di dalam penulisan tesis ini, akan lebih difokuskan kepada upaya revitalisasi Pancasila sebagai falsafah negara atau kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur yang telah menjadi karakter bangsa.

2.3. Globalisasi

Perkembangan teknologi, demokrasi dan interdependensi hubungan antar bangsa merupakan salah satu fenomena fundamental yang menandai bergulirnya globalisasi. Fenomena ini lambat laun mempengaruhi perubahan politik dunia

²³ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

yang berjuang pada suatu bentuk kompetisi antar bangsa. Kondisi ini berlangsung di seluruh penjuru dunia baik global, regional maupun nasional.

Memasuki millenium ketiga, polarisasi Timur dan Barat berganti menjadi polarisasi kaya dan miskin, juga mungkin polarisasi Barat dan Islam seperti disinyalir Huntington, dunia telah memasuki apa yang dinamakan sebagai “Gelombang Ketiga” yang ditandai dengan masyarakat informasi, era informasi atau era *post industrial*. Fukuyama menandai periode ini dengan berbagai kondisi sosial yang sangat kompleks pada sebagian besar dunia industri. Kejahatan dan kekacauan sosial mulai meningkat dan membuat wilayah-wilayah pusat kota hampir tidak dapat dihuni. Institusi sosial kekerabatan menurun tajam. Akhirnya, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga mengalami penurunan. Sifat dan keterlibatan masyarakat satu dengan lainnya pun telah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan drastis yang terjadi secara bersamaan itu oleh Fukuyama dianggap sebagai penyebab munculnya *Great Disruption* (Kekacauan Besar) dalam nilai-nilai sosial yang berlaku pada masyarakat era industri di abad ke-20.

McLuhan yang merupakan seorang pemikir komunikasi pada tahun 1964 telah melontarkan konsepnya mengenai *The Global Village*, namun konsep globalisasi baru masuk kajian dunia universitas tahun 80-an sebagai suatu pengertian sosiologi oleh Roland Roberston dari University of Pittsburgh, meskipun secara umum globalisasi dianggap sebagai suatu pengertian ekonomi (Tilaar, 1997:15).

Tabb (2001:10) mengatakan : “*definisi globalisasi merupakan sebuah kategori luas yang mencakup banyak aspek dan makna*”. Selanjutnya dia mengatakan

Istilah tersebut berarti sebuah proses saling keterhubungan antar negara dan masyarakat. Ini adalah gambaran bagaimana kejadian dan kegiatan di satu bagian dunia memiliki akibat signifikan bagi masyarakat dan komunitas di bagian dunia lainnya.... Ini bukan saja soal ekonomi tapi bahkan meningkatnya saling ketergantungan sosial dan budaya dari desa global yang minum Coke dan menonton Disney.

Malcom Waters dalam bukunya *Globalization*, membuat beberapa kemungkinan mengenai proses mulainya globalisasi. Pertama, globalisasi muncul sejak manusia hidup di bumi ini; kedua, globalisasi lahir sejalan modernisasi yang dimulai dikenal peradaban Barat yang sejalan dengan perkembangan kapitalisme;

ketiga, globalisasi merupakan fenomena baru yang berkaitan dengan pascaindustri, pascamodern atau disorganisasi kapitalisme. (Tilaar, 1997:16).

Proses globalisasi mempengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Masalah globalisasi bukan hanya eksploitasi atau pekerja dunia ketiga atau kerusakan lingkungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasa dan korporasi perdagangan raksasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau (*chaos*).

Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di sisi lain kesenjangan itu juga terjadi di dalam negara-negara tersebut, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin. Globalisasi yang menimbulkan krisis multidimensional telah mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia berupa krisis identitas dalam diri individu, kelompok dan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pembinaan kepribadian masyarakat yang merupakan pemberdayaan diri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul akibat globalisasi. Globalisasi juga membawa kecenderungan menguatnya fundamentalisme pasar yang membawa proses penghancuran dalam membentuk tatanan kehidupan bernegara, karena globalisasi menciptakan tatanan masyarakat yang eksklusif dan individualistis, dimana modal dan kekuasaan yang berbicara.

Dalam buku *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, Huntington meramalkan bahwa dunia akan memasuki konflik antar peradaban. Tiga peradaban yang paling dominan yaitu Barat Kristen, Sinic Confucian dan Islam akan bertarung memperebutkan hegemoni. Di luar tiga besar ada 5 sub peradaban yang tidak begitu dominan yaitu Jepang, Rusia, Hindu, Amerika Latin, dan Afrika. Melalui tesisnya, Huntington meyakinkan Barat, bahwa ideologi adalah senjata paling ampuh dalam perumusan pola hubungan internasional dan pembentukan Tata Dunia Baru. Dengan adanya dominasi tunggal AS dan negara nomor satu di dunia, AS mengatur tata politik dunia dengan bendera

kapitalismenya. Samuel Huntington pun telah meyakinkan dunia, bahwa tesisnya mengenai *clash of civilization* adalah cerminan dari kondisi dunia saat ini pasca runtuhnya Uni Sovyet²⁴.

Untuk menyelamatkan bangsa dan NKRI dari keruntuhan sebagaimana yang dialami Uni Sovyet, karena adanya supremasi ideologi politik neo-liberalisme-kapitalisme maka bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental-ideologi Pancasila, agar SDM warganegara kita mampu mewaspadaai *tantangan* globalisasi-liberalisasi, khususnya melalui politik supremasi ideologi. Dan saat ini Indonesia dihadapkan kepada suatu situasi persaingan ideologi dan globalisasi dimana Pancasila harus segera direvitalisasi, salah satunya melalui jalur pendidikan, untuk menunjukkan kekuatannya sebagai ideologi bangsa, yang mencerminkan nilai-nilai karakter dan jati diri bangsa.

2.4. Pendidikan

Pendidikan atau istilahnya *Paedagogiek* berasal dari bahasa Yunani *Pedagogues*, yang dalam bahasa Latin nya adalah *Paedagogus*, yang berarti pemuda yang bertugas mengantar anak ke sekolah serta menjaga anak itu agar ia disiplin dan bertingkah laku susila. Istilah ini lalu digunakan untuk menyebut pendidik (pedagog), mendidik (pedagogi) dan ilmu pendidikan (paedagogiek) yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *the study of educational goals and processes* (English and English, 1970:376)²⁵.

Menurut Prof. Dr. M.J. Langeveld, *paedagogiek* atau ilmu mendidik ialah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak (Langeveld:1)²⁶. Sedangkan pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

²⁴ Samuel P Huntington, *If not civilizations, what? Paradigms of the post-Cold War*, Foreign Affairs; Nov/Dec 1993; 72, 5; Academic Research Library, page. 186

²⁵ Wens Tanlain dkk, seperti dikutip dalam *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 1996, halaman 5.

²⁶ *Ibid.* Berdasar Langeveld, yang menjadi obyek pendidikan adalah proses-proses atau situasi pendidikan.

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara ²⁷. Selain itu, Pendidikan juga diartikan sebagai proses penyadaran (*conscienceciacao*) akan kebebasan individu dalam berefleksi dan bertindak, karena hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan anak manusia yaitu menyadari akan manusia yang merdeka ²⁸.

2.4.1. Unsur-Unsur Pendidikan

Setelah mencermati beberapa pengertian *paedagogiek*, maka dapat diketahui unsur-unsur atau aspek dasar dari pendidikan, yaitu adanya tujuan, subyek manusia, lingkungan dan alat pendidikan ²⁹. Unsur-unsur ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam proses atau situasi pendidikan yang menjadi obyek pendidikan.

2.4.1.1. Tujuan

Secara umum, tujuan pendidikan adalah manusia dewasa susila, yang harus mau berbuat baik yang susila ³⁰. Tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan YME, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Tujuan nasional ini hanya akan dapat dicapai melalui proses pendidikan yang panjang.

2.4.1.2. Subyek

Subyek pendidikan adalah manusia, baik itu pendidik maupun anak didik/peserta didik. Pendidik adalah orang dewasa yang bersusila yang memiliki kemampuan mendidik untuk melaksanakan tugas-tugas mendidik. Selain memiliki kematangan diri yang stabil, juga memiliki kematangan sosial dan profesional.

²⁷ Pengertian pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 butir 1

²⁸ Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2005, halaman 112.

²⁹ *Ibid*, halaman 19.

³⁰ *Ibid*, halaman 20, Dikutip dari Driyarkara (1980:17-38), Langeveld (1971:14&65).

Dengan karakter dan peranan pendidik tersebut, sehingga tidak memungkinkan sembarangan orang menjadi pendidik, karena akan berakibat tidak tercapainya tujuan pendidikan. Pendidik itu misalnya : orang tua, guru dan konselor.

Anak didik adalah manusia dalam perjalanan kemanusiaannya³¹. Dalam arti umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Setiap anak didik masih menjadi tanggungjawab pendidik, karena belum mempunyai kesempurnaan aspek kedewasaannya dan masih memiliki sifat-sifat dasar yang harus dikembangkan. Untuk menjamin berlangsungnya proses pendidikan yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan, tentu saja harus ada kerjasama yang baik pula antara pendidik dengan anak didik.

2.4.1.3.Lingkungan

Pendidik dan anak didik bersama-sama hidup dalam suatu kesatuan hidup tertentu di dalam suatu lingkungan. Philip H Coombs membedakan lingkungan pendidikan menurut pola pengelolaannya, yaitu :

- a. Pendidikan Informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media masa.
- b. Pendidikan Formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus, yang diperoleh secara teratur, sistematis dan bertingkat sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang jelas.
- c. Pendidikan Non Formal. Pendidikan non formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan,

³¹ *Ibid*, halaman 33. Dikutip dari Driyarkara (1980:79).

dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya. Disebut juga pendidikan luar sekolah yang diperoleh seseorang, yang bersifat fungsional dan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha perbaikan taraf hidup mereka. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

Berdasarkan ketiga pengertian itu maka jelaslah bahwa pendidikan non formal tidak identik baik dengan pendidikan formal maupun dengan pendidikan informal, namun saling melengkapi dan memperkaya, sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang dijabarkan dalam Bab VI mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

2.4.1.4. Alat

Selama berlangsungnya pendidikan, pendidik mempergunakan alat-alat pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Menurut Lavengeld, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan³². Berdasarkan wujudnya, terdapat 2 macam alat pendidikan, yaitu perbuatan pendidikan seperti teladan guru, perintah, larangan, pujian, hadiah, teguran, ancaman, hukuman dan benda-benda sebagai alat bantu seperti meja, kursi, alat peraga, papan tulis, dll. Alat pendidikan yang baik artinya alat tersebut sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan tertentu, pendidik dan anak didik mampu memahami peranan dan penggunaannya serta alat tersebut mampu membawa hasil yang diharapkan tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan proses pendidikan.

³² *Ibid*, halaman 52. Dikutip dari Lavengeld (1971:10&43), Barnadib (1982:95-96) dan Suwarno (1985:113). Contohnya adalah jika seorang ayah mencat dinding rumahnya menjadi putih bersih demi kenyamanan kehidupan keluarganya, maka ia menyediakan lingkungan pendidikan (keluarga). Dan jika ayah tadi menggunakannya pula untuk menasehati anaknya agar membiasakan diri menjaga kebersihan, maka ia menyediakan alat pendidikan (memberi nasehat merupakan alat pendidikan dan dinding tembok putih bersih juga merupakan alat bantu pendidikan).

2.4.2. Kultur / Budaya Sekolah

Menurut Deal dan Peterson (2009), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah atau bisa juga diartikan sebagai pola nilai, keyakinan dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah³³.

a set of values underlying attitudes, tradition, daily habits, and symbols practiced by the headmaster, teachers, administration officers, students, and people around the school. School culture is an identity, characteristics, and an image of the school for all people. Implementation of the school culture which is appropriate has meaningful influences on student learning activities. It also encourages teachers to do the job more efficiently and effectively to achieve good teacher performance (Deal&Peterson:2009)

Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Sebuah sekolah harus mempunyai misi menciptakan budaya sekolah yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, terintegratif, dan dedikatif terhadap pencapaian visi, menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya dan mempunyai karakter takwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja keras, toleran dan cakap dalam memimpin, serta menjawab tantangan akan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang dapat berperan dalam perkembangan iptek dan berlandaskan imtak. Dalam mengusung visi dan misinya sebagai lembaga layanan publik untuk mencerdaskan anak bangsa, maka diperlukan langkah langkah konkret pelaksanaan program sekolah, sehingga visi dan misi yang diusungnya tidak sekedar jargon sekolah, dan yang dinilai paling fundamental adalah bagaimana program-program yang dilaksanakan tersebut mampu mengokohkan kultur sekolah (*school culture*) dalam konteks upaya-upaya menumbuhkan kesadaran peka budaya belajar dan budaya mutu serta menciptakan masyarakat sekolah yang kondusif (*condusive school society*) yang dapat membentuk atmosfir pendidikan yang sehat di lingkungan sekolah.

³³ Deal dan Peterson, *Shaping School Culture*, New York, 2009, halaman 6-7.

Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah dimana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, antar tenaga kependidikan, antara tenaga kependidikan dengan pendidik dan peserta didik dan antar anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah sekolah. Interaksi internal kelompok dan antar kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggungjawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah. Budaya sekolah memiliki cakupan yang sangat luas, pada umumnya mencakup kegiatan ritual, harapan, hubungan sosial-kultural, aspek demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses pengambilan keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antar komponen di sekolah.

Budaya sekolah yang baik juga akan mampu meningkatkan efektifitas dan produktivitas sekolah, meningkatkan kemampuan komunikasi dan problem solving, mengembangkan kemampuan inovasi sekolah, memfokuskan pada prioritas dan kepentingan sekolah, membangun komitmen dan motivasi serta menjadi energy penggerak utama bagi warga sekolah³⁴. Berikut adalah elemen budaya sekolah menurut Deal dan Peterson (2009:19-126).

- (1) Sekolah sebagai suatu komunitas, yang memiliki misi tertentu, yang melakukan pembelajaran secara rutin, ada transfer pengetahuan dan nilai serta menjadi "rumah" yang kedua, setelah keluarga.
- (2) Artifak dan arsitektur sekolah, merupakan simbol-simbol yang mewakili karakter sekolah tersebut seperti adanya perpustakaan, mushola sekolah, ruangan piala, logo/panji sekolah, seragam sekolah, nama sekolah, hymne sekolah, ruangan alumni, dan sebagainya.
- (3) Sejarah sekolah, sebagai pedoman bagi sekolah untuk melangkah ke depan, dengan mempelajari dan mengetahui sejarah sekolah, maka akan dapat dijadikan kaca untuk melihat ke masa depan, mengetahui nilai-nilai mana yang harus dilestarikan dan pantangan apa yang harus dihindari, bagaimana sejarah kepemimpinan sekolah tersebut, krisis dan konflik yang

³⁴ *Ibid*, halaman 12-14.

pernah terjadi, perubahan-perubahan yang telah dilakukan bahkan tradisi sekolah tersebut di masa lampau.

- (4) Mitos Sekolah, merupakan serangkaian keyakinan yang dianggap sakral, berbasis pada prasangka, seringkali berada di luar batas rasionalitas manusia yang belum tentu benar, dan sulit dibuktikan kebenarannya. Sebuah keyakinan yang belum tentu benar dijadikan mitos pada dasarnya bertujuan untuk melanggengkan status quo untuk mempersatukan, menstabilkan kondisi, memberi harapan-harapan, bahkan menghegemoni. Seperti adanya keyakinan bahwa hanya lulusan SMA saja yang bisa dengan mudah memperoleh pekerjaan, lain halnya dengan lulusan SMK.
- (5) Peristiwa yang diungkapkan melalui cerita atau bahkan dongeng, merupakan pecahan-pecahan kecil yang nantinya akan membentuk sejarah. Cerita-cerita ini dimaksudkan untuk menggugah kalbu atau membangkitkan semangat dan motivasi, seperti cerita yang menyentuh yang pernah dialami staff sekolah, atau cerita perjalanan hidup seorang alumninya yang menjadi orang sukses, yang pada akhirnya akan mampu membentuk budaya sekolah.
- (6) Ritual sekolah, merupakan tradisi yang menjadi bagian hidup dari sekolah, seperti salam yang diucapkan ketika warga sekolah saling bertemu, inisiasi siswa baru, berdoa sebelum KBM dimulai, rutinitas di kelas, aktivitas pada jam istirahat dan sebagainya.
- (7) Upacara-upacara, merupakan suatu kegiatan seremonial yang dilaksanakan secara rutin, terjadwal dan kadang incidental, seperti upacara setiap hari senin, upacara hari-hari besar nasional, lepas sambut kepala sekolah baru, wisuda, temu alumni, malam keakraban, penyambutan tokoh nasional dan sebagainya.
- (8) Pembawa budaya, elemen budaya yang satu ini menegaskan fungsi sekolah sebagai pembawa budaya, yang mentransmisikan nilai-nilai budaya yang dimilikinya kepada setiap individu yang berada di dalam lingkup sekolah tersebut yang akan mempengaruhi bagaimana setiap individu dalam sekolah tersebut memiliki peranan dan kedudukan masing-

c

masing, sebaliknya warga sekolah tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga budaya sekolah yang mereka miliki.

2.4.3. Proses Pendidikan

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Proses pendidikan yang terjadi meliputi mendidik, situasi paedagogis dan pengaruh lingkungan yang turut mempunyai peranan dalam pemberian bantuan demi perkembangan manusia menjadi pribadi dewasa dalam artian yang seluas-luasnya³⁵.

Lavengeld (1971:19) menegaskan bahwa mendidik hanya merupakan bagian terbatas dari pendidikan, yakni penyidik bertindak terhadap anak didik, dalam arti dengan sengaja menyediakan dan menggunakan alat-alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sedangkan situasi paedagogis diartikan sebagai tindakan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik demi kepentingan anak didik, dan anak didik aktif turut serta dalam tindakan itu. Sementara itu, pengaruh lingkungan akan memberikan warna kepada anak didik selama proses pendidikan.

Salah satu proses yang terpenting adalah adanya internalisasi nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Internalisasi diartikan sebagai pemasukan nilai-nilai dari luar ke dalam diri seseorang secara sadar dan berkelanjutan, sehingga terjadi proses penyatuan antara nilai dengan karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Nilai-nilai yang diinternalisasikan tentu saja harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan tertentu, seperti misalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik selama proses pendidikan melalui kurikulum tertentu untuk membentuk manusia berkarakter Pancasila.

2.5. Karakter Bangsa

Karakter, dimaknai oleh Sigmund Freud sebagai kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya juang yang melandasi pemikiran, sikap dan

³⁵ *Opcit*, halaman 66.

perilaku. “*Character is striving system which underly behaviour*”³⁶. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”.

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Karakter seringkali dibedakan dengan kepribadian, karena kepribadian atau *personality* merupakan kekhasan individual yang membedakan seseorang dengan orang lainnya³⁷. Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *personality* yang berasal dari bahasa Latin *Persona* yang berarti topeng.

Menurut Allport, kepribadian adalah sebuah organisasi dinamis di dalam sistem psikis dan fisik individu yang menentukan karakteristik perilaku dan pikirannya. Sedangkan, karakter menurut Fromm (1973:226), “*character is the relatively permanent system of all noninstinctual strivings through which man relates himself to the human and natural world*”³⁸. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan penggambaran tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi nilai, sedangkan karakter merupakan penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai baik-buruk, benar-salah, baik secara eksplisit maupun implisit.

Karakter bangsa adalah akumulasi yang terbentuk dari karakter orang per orang, merupakan kumpulan tata nilai yang dianut suatu bangsa, sebagai pemikiran, sikap dan perilaku umum dari bangsa tersebut. Unsur utama dalam pembentukan karakter bangsa adalah nilai-nilai budaya. Maka pengembangan budaya merupakan penentu totalitas kepribadian/karakter bangsa yang berawal pada akar perjalanan sejarahnya dan ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya tersebut, kemudian dijadikan dasar dan tujuan pengembangan hidup bersama sebagai bangsa. Oleh karenanya pembangunan karakter suatu bangsa adalah suatu proses yang sifatnya berkelanjutan (*never ending process*) menuju

³⁶ Sigmund Freud, seperti dikutip dalam Soemarno Soedarsono, *Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap menuju Terang*, Jakarta, 2010, halaman 97.

³⁷ George Boeree, *Personality Theories*, Terjemahan oleh Prisme Sophie, Yogyakarta, 2005, halaman 13.

³⁸ Feist, *Theories of Personality*, New York, 2009, halaman 198.

pada kondisi karakter bangsa yang diinginkan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang digali dari akar sejarah dan budaya bangsa, sehingga Pancasila merupakan dasar sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter (*character building*) bagi bangsa Indonesia. Tanpa adanya karakter bangsa, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dalam era globalisasi yang bergerak cepat dewasa ini³⁹. Membangun karakter bangsa bertujuan agar bangsa yang bersangkutan mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya sehingga mampu mengantar bangsa menuju cita-cita yang didambakannya.

2.5.1. Peran Penting Karakter

Karakter seringkali dimaknai sebagai berbuat baik dan tidak baik saja. Bahkan tidak sedikit yang langsung menghubungkannya dengan budi pekerti. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tetapi ternyata karakter itu mempunyai arti dan peran penting yang sangat menentukan dalam menempuh dan mengisi hidup ini. Karakter sebagai hasil pendidikan memiliki peranan untuk mengantarkan anak didik menuju tujuan pendidikan nasional menjadi manusia yang berkarakter. Sedangkan pengetahuan yang dimilikinya akan menjadi nilai tambah bagi bobot pada kinerja yang ditampilkannya. *Knowledge is power, but character is more*. Namun pada kenyataannya, proses pendidikan masih saja mengabaikan pendidikan karakter, yang ditekankan hanyalah bagaimana menjadikan anak pintar, bukan anak yang berkarakter. Inilah yang harus dibenahi melalui sistem pendidikan yang baru.

Mengingat pentingnya peranan karakter, maka perlu adanya upaya koreksi terhadap kurikulum yang ada berupa perumusan yang secara eksplisit menyatakan *essential values, skills dan knowledge* yang berkenaan dengan jati diri bangsa dan dikembangkan melalui mata pelajaran yang ada di kurikulum, diikuti oleh *values, skills dan knowledge* yang spesifik untuk setiap mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Dengan desain kurikulum yang demikian, nilai dan karakter yang dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh dan memiliki dampak

³⁹ *Pendidikan Karakter Untuk Membangun Peradaban Bangsa*, Pidato Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam memeringati Hari Pendidikan Nasional Mei 2010, di Istana Presiden.

nyata dalam kehidupan dirinya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui desain ini, nilai harus dikembangkan secara kontinyu dan bersifat *integrated*⁴⁰.

Peranan karakter selanjutnya akan tampak signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu bangsa akan maju bukan semata-mata karena tingginya ilmu pengetahuan, teknologi dan kekayaan alam yang dimilikinya, melainkan karena dorongan semangat karakter bangsanya. Sejarah mencatat, para *founding fathers* telah mampu mencermati ciri-ciri yang dimiliki bangsa ini menjadi nilai-nilai pendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur ini kemudian dirumuskan secara cerdas sebagai Pancasila. Sebagai sebuah ideologi negara, Pancasila secara jernih telah mencerminkan karakter bangsa, sebagai jati diri bangsa.

2.5.2. Pendidikan Karakter (*Character Education*)

Thomas Lickona (1991) telah merumuskan sepuluh indikator suatu bangsa di ambang kehancuran, diantaranya adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, membudayanya ketidak jujuran, sikap fanatik terhadap kelompok/*peer group*, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, semakin kaburnya moral baik dan buruk, penggunaan bahasa yang memburuk, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara, menurunnya etos kerja, dan adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian di antara sesama⁴¹. Mencermati indikator-indikator tersebut dan membandingkannya dengan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini, akan terlihat betapa rapuhnya karakter bangsa yang kita miliki. Dan pendidikan karakter bangsa menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan mendesak.

Menurut Thomas Lickona (1991), pendidikan karakter dimaknai sebagai:

Character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values.... When we think about the kind of character we want for our children, it's clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do

⁴⁰ Prof Dr Hamid Hasan, seperti dikutip dalam Soemarno Soedarsono, *Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap menuju Terang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010, halaman 138.

⁴¹ Thomas Lickona, *Educating For Character : How Our Schools can Teach Respect and Responsibility*, USA: Bantam Books, 1991, halaman 12-22.

*what they believe to be right—even in the face of pressure from without and temptation from within*⁴².

Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara. Selain itu membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lickona menegaskan bahwa kita ingin anak-anak bisa menilai apa yang benar, peduli secara mendalam tentang apa yang benar. Kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar walaupun dalam situasi tertekan dan penuh godaan. Lebih lanjut, Lickona mengatakan :

*Moral education is not a new idea. It is, in fact, as old as education itself. Down through history, in countries all over the world, education has had two great goals: to help young people become smart and to help them become good. Good character is not formed automatically; it is developed over time through a sustained process of teaching, example, learning, and practice – it is developed through character education*⁴³.

Dalam pengertian tersebut dinyatakan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana, bukan usaha yang dilakukan secara kebetulan atau pun usaha yang asal-asalan. Membangun karakter tidak bisa dilakukan dengan mudah dan santai, hanya bisa dilakukan melalui pengalaman menghadapi percobaan dan pengorbanan, sehingga dapat dihasilkan jiwa yang kuat, visi yang jauh ke depan dan mendapat inspirasi dalam ambisi sehingga kesuksesan dapat diraih.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai *the golden rule*. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut Lickona (1991) ada 2 pilar nilai dasar yang paling penting yaitu *respect* dan *responsibility*⁴⁴. Selain itu, dalam pendidikan karakter Lickona juga menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Oleh karena itu, cara

⁴² Ibid, halaman 24-51.

⁴³ Ibid, halaman 6.

⁴⁴ Ibid, halaman 49.

membentuk karakter yang efektif adalah dengan melibatkan ketiga aspek tersebut. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan⁴⁵.

Penyelenggaraan pendidikan karakter di suatu lingkungan pendidikan tentunya juga harus berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan budaya lingkungan itu sendiri, agar tidak terjadi penyimpangan tujuan budaya.

2.6. Ritualisme

Ritualisme, menurut Robert K Merton dalam bukunya '*Social Theory and Social Structure*' (1964) merupakan suatu cara bertindak atau dengan perkataan lain merupakan suatu pola perikelakuan yang mengikuti urutan tindakan yang sudah ditentukan dalam peraturan atau budaya yang telah ada.

Ritualisme (*ritualism*) juga diartikan sebagai perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi masih berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat, misalnya upacara dan perayaan masih diselenggarakan, tetapi makna dan fungsinya telah hilang. Ritualisme merupakan sikap menerima cara-cara yang melembaga, tetapi menolak tujuan-tujuan kebudayaannya. Ritualisme ini bisa terjadi ketika seseorang mempertahankan cara-cara konvensional kultural, akan tetapi dirinya menolak tujuan kultur tersebut, dengan kata lain segala yang dilakukannya hanyalah ritualitas belaka yang seringkali sudah kehilangan makna. Misalnya adalah seorang anak SD yang mengikuti upacara bendera di sekolahnya setiap hari Senin, dengan tujuan agar tidak mendapatkan hukuman dari gurunya karena membolos upacara. Perilaku anak SD ini sesuai dengan aturan atau norma yang ada, namun menunjukkan penolakan terhadap tujuan yang sebenarnya yaitu untuk menanamkan nasionalisme.

Ritualisme ini bisa terjadi karena adanya kebingungan atau ketidakpahaman terhadap suatu budaya atau nilai. Contoh lainnya adalah seorang mahasiswa yang menempuh kuliah bertahun-tahun hanya untuk memperoleh

⁴⁵ *Ibid*, halaman 51.

ijazah dan gelar yang memungkinkannya memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga melupakan esensi pendidikan yang sebenarnya.

Ritualisme menurut Merton, merupakan 1 dari 5 perilaku menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu yang menunjukkan kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang berada pada situasi ini akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri.

Dengan menggunakan teori ini, Merton mencoba menjelaskan penyimpangan melalui struktur sosial. Menurut teori ini, struktur sosial bukan hanya menghasilkan perilaku yang konformis saja, tetapi juga menghasilkan perilaku menyimpang. Dalam struktur sosial dijumpai tujuan atau kepentingan, di mana tujuan tersebut adalah hal-hal yang pantas dan baik. Selain itu, diatur juga cara untuk meraih tujuan tersebut. Apabila terjadi ketidakharmonisan antara tujuan (cita-cita) yang ditetapkan dengan cara untuk mencapainya, maka akan terjadi penyimpangan. Dalam hal ini Merton mengemukakan tipologi cara-cara adaptasi terhadap situasi *anomie*, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri (*retreatisme*) dan pemberontakan (*rebellion*). Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Diagram Merton

Cara Adaptasi	Tujuan Budaya (Nilai)	Cara-Cara Yang Terlembagakan (Norma)
Konformitas	+	+
Inovasi	+	-
Ritualisme	-	+
Pengasingan Diri	-	-
Pemberontakan	+/-	+/-

**) Tanda '+' berarti ada penyelarasan, di mana warga masyarakat menerima nilai-nilai sosiobudaya atau norma-norma yang ada, sedangkan tanda '-' berarti menolaknya. Adapun tanda '+/-' menunjuk pada pola-pola perilaku yang menolak serta menghendaki nilai-nilai dan norma-norma yang baru.*

1. Konformitas (*conformity*), merupakan cara adaptasi dimana pelaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat. Konformitas merupakan suatu sikap menerima tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh : seseorang yang ingin lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil tidak memakai joki, tetapi dengan cara belajar sungguh-sungguh. Belajar merupakan cara untuk mencapai tujuan yang disetujui dan sudah melembaga dalam masyarakat, sedangkan menjadi PNS merupakan tujuan yang sesuai dengan nilai budaya. Sikap konformitas ini bukan merupakan keadaan anomis.
2. Inovasi (*inovation*), terjadi apabila seseorang menerima tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang diidamkan masyarakat, tetapi menolak norma dan kaidah yang berlaku. Inovasi merupakan suatu sikap menerima tujuan yang sesuai dengan nilai budaya, tetapi menolak cara-cara yang melembaga untuk mencapai tujuan. Contoh: masyarakat mendorong semua anggota masyarakat untuk memperoleh kekayaan yang melimpah. Namun, kenyataannya hanya beberapa orang yang berhasil memperoleh dengan menggunakan cara-cara yang disetujui. Mereka melihat betapa kecilnya kemungkinan untuk berhasil jika mematuhi peraturan, maka mereka berupaya untuk melanggar peraturan yang ada misalnya korupsi.
3. Ritualisme (*ritualism*), terjadi apabila seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara kultural, namun menolak tujuan-tujuan kebudayaan. Ritualisme merupakan sikap menerima cara-cara yang melembaga, tetapi menolak tujuan-tujuan kebudayaannya. Contoh sikap seenaknya dan berbincang-bincang dengan temannya pada waktu upacara. Hal ini menandakan bahwa ia telah melupakan makna upacara.
4. Pengasingan diri (*retreatism*), timbul apabila seseorang menolak tujuan-tujuan yang disetujui maupun cara-cara pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, pengasingan diri terjadi apabila nilai-nilai sosial budaya yang berlaku tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang telah ditetapkan. Pengasingan diri merupakan sikap yang menolak tujuan maupun cara-cara untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Contoh : seseorang yang menjadi pemabuk berat karena frustrasi, sehingga dia tidak

memperhatikan keluarga, dan pekerjaan. Ia mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal.

5. Pemberontakan (*rebellion*), terjadi apabila seseorang menolak sarana maupun tujuan yang disahkan oleh kebudayaan dan menggantikannya dengan yang lain. Pemberontakan merupakan sikap yang menolak tujuan dan cara-cara yang melembaga dan berupaya menggantikannya dengan tujuan dan cara baru atau lain. Contoh: kaum revolusioner.

Perilaku menyimpang ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui sebuah proses yang melibatkan media pembentukan kepribadian, seperti :

- a. Keluarga : keluarga yang selalu cekcok dan tidak harmonis menyebabkan keluarga gagal dalam mensosialisasikan nilai – nilai yang baik kepada anak , sehingga pada anak dapat terbentuk perilaku menyimpang
- b. Lingkungan Tempat Tinggal : seorang individu yang tinggal dilingkungan yang kumuh dengan berbagai bentuk perilaku menyimpang ada dan terjadi disekitarnya menyebabkan ia akan tumbuh menjadi orang yang berkpribadian yang menyimpang.
- c. Kelompok Bermain : kelompok bermain dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang pergaulan dengan anak yang suka membolos, membuat keonaran akan berpengaruh terhadap teman lainnya.
- d. Media Massa : media massa merupakan media sosialisasi yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Banyak pelaku menyimpang yang disebabkan karena pengaruh media massa, baik dari bacaan maupun dari tayangan media elektronik.

2.7. Media Massa

Pada era globalisasi informasi ini, pengertian tentang komunikasi massa telah mengalami perluasan. Dari yang semula sangat sederhana, yaitu menurut Bittner (1999) yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (*“mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people”*)

⁴⁶. Jadi media massa merupakan alat atau sarana untuk mengkomunikasikan pesan dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain.

Menurut Lasswell (1948), komunikasi memiliki unsur-unsur ⁴⁷ diantaranya: (1) Sumber/komunikator (*who*), (2) Pesan (*says what*), (3) Saluran komunikasi (*in which channel*), (4) Penerima/komunikan (*to whom*) dan (5) Pengaruh (*with what effect*). Dalam komunikasi massa, komunikator mengharapkan publiknya untuk memperhatikan pesan-pesan mereka, mempelajari isi pesan-pesan tersebut dan membuat perubahan yang dalam perilaku atau keyakinan atau menghasilkan respons-respons tingkah laku yang diinginkan.

2.7.1 Bentuk-Bentuk Media Massa

Dalam menyampaikan pesan, berita maupun informasi, komunikator mempergunakan berbagai jenis dan bentuk media, seperti antara lain :

2.7.1.1 Media Cetak

Media cetak merupakan media massa yang bersifat visual, karena hanya menampilkan pesan dalam bentuk gambar dan tulisan saja. Berikut adalah jenis dari media cetak :

- a. Surat kabar. Fungsi surat kabar yang paling menonjol adalah informasi karena sebagian besar isinya adalah berita, meskipun tidak menutup kemungkinan surat kabar juga memiliki fungsi hiburan.
- b. Majalah. Fungsi majalah bergantung kepada segmentasi di mana majalah tersebut berada. Majalah pertanian seperti *Trubus*, memberikan fungsi mendidik. Sedangkan majalah berita seperti *Tempo* lebih memberikan fungsi informasi.

2.7.1.2 Media Elektronik

Media elektronik merupakan bentuk media massa yang mempergunakan teknologi elektronika, baik secara audio maupun audio visual. Berikut beberapa jenis media elektronik :

⁴⁶ Elvinaro Ardianto dan Lukiat Komala, *Komunikasi Massa*, Bandung: Simbiosis, 2005, halaman 3

⁴⁷ Werner J Severin, *Theory of Communication*, Terjemahan, Jakarta: Kencana, 2005, halaman 55

- a. Radio. Selain fungsi kontrol sosial seperti pada surat kabar, radio mampu memberikan 4 fungsi media massa lainnya, yaitu untuk memberi informasi, menghibur, mendidik dan melakukan persuasi.
- b. Televisi. Dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti radio, televisi mampu memberikan fungsi media massa secara optimal.
- c. Komputer dan Internet. Komputer dan internet merupakan media elektronik yang paling kompleks namun sangat gampang untuk memperoleh atau mengakses informasi, hiburan maupun hal menarik lainnya dari internet. Internet memberikan kemudahan dalam segala hal kepada publik, tanpa mengenal batas wilayah, waktu, budaya dan karakteristik lainnya.

2.7.2 Efek Media dan Teori Dampak Media

2.7.2.1 Efek Media

Komunikasi jelas merupakan suatu kegiatan sosial, dimana salah satu fungsi pokok komunikasi adalah persuasi, atau mempengaruhi orang lain lewat penggunaan simbol. Banyak penelitian dalam komunikasi massa telah memperlakukan gambar atau visualisasi dari suatu realitas sebagai sumber stimulus afektif dan emosional. Mengamati pesan yang akan disampaikan menjadi lebih kompleks, karena akan menimbulkan persepsi yang lebih bervariasi, akan tetapi mampu memperkuat komunikasi melalui media massa. Dalam kaitan ini, Persepsi menurut Lahlry (1991) didefinisikan sebagai proses yang kita gunakan untuk menginterpretasikan data sensoris yang sampai melalui lima indera kita⁴⁸.

Dalam komunikasi massa, terdapat sebuah teknik yang disebut *fear appeals*, yaitu sebuah teknik yang dipergunakan untuk mengancam atau membangkitkan rasa takut dari dalam diri seseorang. Semakin kuat pengaruh dari *fear appeals* tersebut, maka publik akan mengalami perubahan sikap yang luar biasa cepat, dan cenderung akan mengikuti komunikator.

Dengan kondisi dari pengaruh *fear appeals* ini maka tidak lah mengejutkan bahwasanya citra yang lazim untuk media massa adalah citra jarum

⁴⁸ *Ibid*, halaman 83.

suntik atau peluru. Ini merupakan suatu konsep media dengan dampak yang langsung, segera dan kuat pada individu yang dijangkaunya. Inilah sebabnya, dalam perkembangan komunikasi, media massa telah menjadi kekuatan utama di dalam masyarakat mengingat efek yang ditimbulkan oleh kekuatan ini.

Salah satu efek komunikasi melalui media massa adalah mengarahkan perhatian publik pada masalah-masalah atau isu-isu tertentu. Efek ini disebut fungsi media massa untuk menentukan agenda atau *agenda setting* yang mengacu pada kemampuan media, dengan liputan berita tentang suatu peristiwa yang diulang-ulang, untuk mengangkat pentingnya sebuah isu dalam benak publik. Sehingga tanpa disadari, publik telah memiliki *mindset* akan suatu isu yang sedang berkembang. Seringkali, media massa memaksakan perhatian pada isu-isu tertentu. Media massa membangun citra publik tentang figur-figur politik. Media massa secara konstan menghadirkan objek-objek yang menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui dan dirasakan individu-individu dalam masyarakat⁴⁹.

Dampak dari sebuah pesan atau informasi yang disampaikan melalui media massa akan memberikan efek yang lebih besar kepada publik yang mengalami kesenjangan informasi, dalam artian mereka yang miskin informasi atau *information poor*. Miskin informasi karena mereka terkunci pada sebuah jaringan informasi informal yang kekurangan informasi, atau juga karena mereka tidak mengetahui saluran formal mana yang bisa memberikan informasi untuk memecahkan masalahnya atau yang bisa memberikan informasi yang mereka butuhkan. Faktor lainnya adalah status sosial ekonomi dan pendidikan individu-individu tersebut. Syarat lain agar efek media massa lebih efektif adalah adanya monopolisasi, dalam artian tidak adanya perlawanan terhadap propaganda yang dilakukan oleh media massa. Dan suplementasi, yaitu hubungan atau kontak langsung antara komunikator dengan komunikan⁵⁰.

2.7.2.2 Teori Dampak Media

Berikut adalah beberapa teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini untuk menjelaskan dampak-dampak media massa :

⁴⁹ *Ibid*, hal 264.

⁵⁰ *Ibid*, hal 396

- a. Teori Peluru (*Bullet Theory*). Teori ini disebut juga teori jarum suntik (*hypodermic needle theory*) atau teori sabuk transmisi (*transmission belt theory*) (De Fleur dan Ball Rokeach, 1982 : 262), yang memprediksikan dampak pesan-pesan komunikasi massa yang kuat dan universal pada semua audiens yang terekspos pada pesan-pesan tersebut.
- b. Teori Kultivasi (*Cultivation*). Menjelaskan dampak menyaksikan televisi ataupun media lainnya pada persepsi, sikap dan nilai-nilai orang. Contoh : orang yang terbiasa menonton berita kriminal, akan menganggap dunia ini tidak aman lagi.
- c. Hegemoni Media (*Media Hegemony*). Media massa dikendalikan oleh orang-orang yang berkuasa, sehingga gagasan kelompok yang berkuasa tersebut akan menjadi gagasan dari seluruh masyarakat.

2.7.3 Kepemilikan Media dan Isi Media

Media massa menjadi kuat dan dapat dipercaya oleh publik karena isi beritanya. Akan tetapi, ternyata kepemilikan media sangat mempengaruhi isi media, dan tentu saja ini berdampak langsung kepada pengaruh media terhadap publik. Sebagai contoh, surat kabar yang dimiliki oleh sebuah partai atau sebuah perusahaan, isi beritanya sudah dapat dipastikan tentang keunggulan dan kebaikan partai atau perusahaan tersebut.

Kepemilikan media menjadikan isi berita menjadi subjektif, dan mengingat dampak media massa yang sedemikian kuatnya, tentu akan sangat berbahaya jika tidak ada kontrol dari media lainnya, karena akan terjadi monopolisasi berita. Terlebih jika pesan yang disampaikan merupakan propaganda mengenai sesuatu isu yang sangat sensitif di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah isu mengenai suku, agama, ras dan antarkepercayaan, tentunya ini akan menjadi satu ancaman bagi integrasi bangsa.

2.8. Intelijen

Information is power. Adagium tersebut sepenuhnya benar, karena siapa yang menguasai informasi maka dialah yang akan menang. Namun, ternyata tidak

semua informasi memiliki “nilai”. Informasi yang biasa-biasa saja, tentu saja tidak akan berimplikasi apa-apa. Akan tetapi, informasi yang memiliki “nilai”, -dalam kaitan ini adalah bernilai intelijen karena terkait dengan permasalahan dan potensi ancaman terhadap keamanan nasional- akan memiliki signifikansi yang luar biasa.

Informasi yang diperoleh dari petugas intelijen di lapangan untuk selanjutnya dipilah dan diolah. Tujuan pemilahan informasi adalah sesuai dengan prinsip “*Garbage In Garbage Out*”, sehingga informasi yang akan dianalisa memang terlebih dahulu harus memiliki “nilai”. Analisa intelijen merupakan konversi dari informasi dasar yang telah diproses menjadi produk intelijen. Untuk keperluan analisa dan produksi, seorang analis sangat memperhatikan tingkat “kepercayaan” data, tingkat kebenaran dan tingkat relevansi. Mereka menyatukan data yang tersedia dalam satu kesatuan analisa yang utuh, serta meletakkan informasi yang telah dievaluasi dalam konteksnya. Bagian akhirnya adalah produk intelijen yang mencakup penilaian atas sebuah peristiwa serta perkiraan akan dampaknya pada keamanan nasional. Salah satu unsur vital dari produk intelijen adalah deteksi dini dan perkiraan keadaan.

Fungsi intelijen terkait dengan pengambilan keputusan, dalam rangka menentukan kebijaksanaan nasional, mengamankan serta menyuksekkannya. Oleh karena itu desain badan-badan intelijen disesuaikan dengan jatidiri, budaya bangsa, landasan negara, konstitusi negara, konsep hankam, dan persepsi ancaman terhadap negara masing-masing. Menurut Shulsky dan Schmitt, “Intelijen mengacu pada informasi yang relevan bagi formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah untuk mengejar kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk menghadapi ancaman dari *actual* dan potensial *adversaries*.”⁵¹ Melihat ancaman itulah maka peranan intelijen tidak dapat diabaikan dalam mendapatkan informasi tentang kekuatan, kemampuan, kelemahan dan niat (K3N) dari musuh.

2.8.1. Ancaman

Di dalam melakukan identifikasi ancaman, persoalan yang penting adalah memperkirakan “derajat ancaman” (*the degree of threat*). Kemampuan untuk

⁵¹ Abram N. Shulsky dan Gary J. Scmitt, *silent Warfare. Understanding The The World of Intelligence*, Washinton DC: Brassey, Third Edition, 2002, h.1-3. intelijen dan keamanan Negara, Ikrar Nusa Bhakti, h.4-5

menghadapi semua ancaman-ancaman tersebut bukan hanya bertolak dari kemampuan militer, tetapi juga kemampuan *element of national power* yang lain. Selain itu, ancaman harus dirumuskan secara realistis, termasuk alasan timbulnya baik internal maupun eksternal, sehingga mampu dirumuskan cara yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak ancaman-ancaman tertentu. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa⁵².

Dalam konteks Negara demokrasi, diperlukan perumusan kebijakan terkait ancaman keamanan nasional yang seimbang antara tingkat ancaman dengan institusi (aparatus) dan instrument yang dipergunakan, mulai dari peringatan dini (*early warning*). Pencegahan (*prevention dan preemption*), penindakan (*defense*) dan pemulihan (*rehabilitation*). Untuk itulah diperlukan identifikasi yang komprehensif mengenai perkembangan ancaman dari satu tingkat ke tingkat ancaman yang lebih besar. Respon yang terlambat dalam melakukan identifikasi terhadap ancaman akan membawa konsekuensi yang luar biasa bagi keselamatan dan kedaulatan Negara.

Perspektif ancaman yang terjadi di Indonesia memiliki tingkatan yang rumit dibandingkan ancaman yang dihadapi oleh negara-negara maju yang sudah mapan, dimana sasaran ancaman meliputi seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang cenderung untuk di Indonesia masih belum mapan. Dalam tulisan ini, dimensi ancaman yang dipergunakan adalah ancaman non konvensional yang dapat terjadi tanpa disadari dan dapat membahayakan kepentingan, tujuan, dan cita-cita luhur dari bangsa Indonesia. Ancaman non-konvensional dapat dirincikan sebagai berikut: Krisis kepercayaan; Krisis jati diri; Krisis ekonomi; penyelewengan terhadap ideologi negara pancasila dan UUD 1945, menyebarkan rasa permusuhan dan perpecahan yang berujung pada aksi anarkis, melakukan kegiatan yang dapat mengacaukan kegiatan perekonomian Indonesia (industri, produksi, distribusi, perdagangan, dan jasa pengangkutan) dan kegiatan hajat hidup rakyat secara luas; Propaganda; KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme). Dalam kaitan ini, ancaman yang dihadapi adalah

⁵² Definisi ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

eksistensi Pancasila dalam perikehidupan bangsa dan ancaman terhadap jati diri bangsa dalam pergaulan global, karena pada dasarnya Pancasila merupakan karakter bangsa Indonesia.

Melihat ancaman yang begitu multidimensional, perlu kiranya suatu negara memiliki sikap dan kebijakan yang tepat seiring dengan terwujudnya negara yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan suatu intelijen sebagai pemberi informasi dan pendukung suatu kebijakan dari pemerintah. Suatu negara tanpa informasi yang tepat dapat mengalami kesalahan kebijakan yang mengakibatkan kesalahan arah dari cita-cita suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan prinsip "*the fate of the nation may well rest on accurate and intelligence data*"⁵³.

2.8.2. Cakupan Intelijen

Dalam perkembangannya, intelijen didefinisikan ke dalam 3 cakupan yang berbeda, yaitu :

2.8.2.1. Intelijen Sebagai Organisasi

Intelijen sebagai organisasi diartikan sebagai Badan Intelijen, yaitu suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian kegiatan terkait intelijen. Di Indonesia, Badan Intelijen sipil yang tertinggi adalah Badan Intelijen Negara yang dulunya bernama BAKIN. Masing-masing institusi negara juga memiliki Badan Intelijen, seperti Baintelkam POLRI, BAIS TNI, Intelijen Imigrasi, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen institusi lainnya.

2.8.2.2. Intelijen Sebagai Kegiatan

Intelijen sebagai kegiatan meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi melalui sumber terbuka maupun tertutup, yang akan digunakan untuk keperluan analisa informasi dalam *supporting policy maker*. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penyelidikan dapat disamakan

⁵³ Ransom, Harry Howe— *The Nature of Intelligence: The Intelligence Establishment*. Published Harvard University, 1970

dengan proses pengumpulan data, misalnya melalui sumber terbuka seperti internet, buku, literatur, dokumen-dokumen dan wawancara bahkan elisitasi. Pengamanan adalah serangkaian kegiatan untuk melindungi informasi, instalasi, personel dalam upaya meminimalisir ancaman guna mengamankan kebijakan user. Penggalangan adalah serangkaian kegiatan yang terarah dan berencana untuk mempengaruhi emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi orang lain (masyarakat) agar mau bertindak sesuai keinginan pihak propagandis.

2.8.2.3. Intelijen Sebagai Pengetahuan

Intelijen sebagai pengetahuan pada prinsipnya adalah produk intelijen yang telah diolah dan dianalisa melalui serangkaian prosedur dan tahapan analisa. Dalam prakteknya, tahapan analisa ini disebut sebagai *Intelligence Cycle* (Siklus Intelijen) yang terdiri dari Perencanaan, Pengumpulan Informasi, Pengolahan dan Distribusi kepada User. Sedangkan, menurut Washington Platt dalam bukunya *Strategic Intelligence Production: Basic Principles* (1957), tahapan siklus intelijen terlihat lebih ilmiah, sehingga intelijen bisa dimasukkan dalam cakupan ilmu. Formula Washington Platt yang kemudian diterjemahkan sebagai metodologi penelitian intelijen stratejik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *General Survey* :Memilih Topic / isue yang akan diteliti; Mencari latar belakang mengapa isue tersebut harus diteliti;
- b. *Definition of Terms* : Definisi dan penjelasan apa yang dimaksud dari setiap terms dan concept. Merumuskan masalah dengan menelusuri dan membuat pertanyaan-pertanyaan, mendefinisikan, memfokuskan penelitian; Menyusun generalisasi atau hipotesis sementara. Dalam penelitian kualitatif sering disebut asumsi.
- c. *Collection of data* : Pengumpulan data dari berbagai sumber. Menentukan cara dan strategi untuk mengumpulkan data. Dalam intelijen terdapat HUMINT, IMINT, OSINT, SIGINT, MASINT sebagai tools/ alat untuk mengumpulkan data.
- d. *Intrepretation of data* : Mempelajari dan mengklasifikasikan data / cluster data dan sebagainya. Melakukan analisa data : kuantitatif / statistik dengan tabulasi dan sebagainya, Kualitatif dengan membuat logika-logika.

- e. *Formation of Hypotheses* : Dengan / setelah melakukan interpretasi data maka kita dapat memformulasi hipotesa-hipotesa pilihan. Melakukan pengujian hipotesa dari hipotesa sementara. Mengajukan pertanyaan pertanyaan, dari hasil koleksi dan analisis data, benarkah hipotesa sementara yang telah dibuat.
- f. *Drawing Conclusion* : Ini merupakan langkah pentingnya investigasi untuk membuktikan atau tidak membuktikan hipotesis pilihan tadi, untuk mendapatkan gambaran akhir dari intelijen. Dengan cara menarik kesimpulan. Nilai kesimpulan yang didapatkan tentu saja bergantung kepada proses pengumpulan data dan analisa.
- g. *Presentation* : Menggambarkan/menuliskan laporan final. penulis tidak hanya dituntut memiliki clear ideas, tetapi juga harus mampu mengekspresikan/ outspoken secara clearly. Hasil analisa tersebut perlu memenuhi kriteria future oriented, accurate, objective, timely dan welltold.

Atas dasar hal tersebut, semakin jelas bahwa pentingnya suatu informasi terhadap segala suatu hal. Namun informasi tidaklah semuanya bisa digunakan, karena penumpukan informasi hakekatnya menyebabkan kebingungan terhadap pemahaman suatu gejala. Analisa intelijen haruslah mengarah pada pencapaian tujuan nasional, *policy support, to prevent surprise, dan to get better future*. Proses penganalisaan intelijen agar menjadi cepat dan tepat harus melalui beberapa tahapan, yakni penilaian, pencatatan, penafsiran dan perkiraan. Pengolahan informasi pun guna menjadi sesuatu yang bernilai intelijen harus mencakup *warning* untuk mencegah pendadakan strategis, berisi forecasting (*predictive content*), memuat alternatif-alternatif *problem solving*, mengandung unsur 5W+1H, serta harus dapat menggambarkan secara jelas "*the real problems, the picture of reality*".

BAB 3

SITUASI BANGSA PASCA REFORMASI DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sebagai gambaran mengenai situasi kekinian untuk mempermudah proses analisa pada bab selanjutnya, maka akan di deskripsikan beberapa gambaran singkat mengenai perkembangan yang terjadi saat ini eksistensi Pancasila dalam persaingan ideologi dan situasi kehidupan bangsa saat ini serta Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Program Kementerian Pendidikan Nasional beserta faktor pendukung dan penghambatnya dan yang terakhir adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

3.1. Situasi Kehidupan Bangsa Pasca Reformasi

Gerakan reformasi yang diawali di beberapa kampus utama di seluruh Indonesia, adalah upaya untuk mengadakan penataan kembali berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial. Menurut Imawan (2004) tujuan utama gerakan reformasi 1998 dalam bidang politik adalah meningkatkan demokratisasi kehidupan politik dan perbaikan hubungan politik. Karena itu salah satu agenda utama reformasi politik adalah mengadakan amandemen terhadap UUD 1945 untuk meningkatkan demokratisasi hubungan politik antara penyelenggara negara dengan rakyat, dan menciptakan distribusi kekuasaan (*distribution of power*) yang lebih efektif antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme *check and balances* dalam proses politik.

Reformasi telah melahirkan kebebasan, namun terkadang timbul kebebasan yang melampaui kebebasan demokrasi dan justru bertentangan dengan demokrasi. Sementara masih banyak pejabat negara dan elite politik yang tidak bisa memberi contoh yang baik bagaimana berpolitik atau berdemokrasi yang sesuai dengan nilai, norma, karakter, dan etika politik dan demokrasi. Padahal demokrasi diperjuangkan secara terus-menerus baik dari segi kelembagaan, tradisi, budaya demokrasi, dan perilaku yang demokratis.

Para pemimpin dan elite politik memiliki peran besar dalam penyelenggaraan negara dan kelangsungan demokrasi. Peran itu ditunjukkan dalam perilaku dan praktik yang baik yang dilandasi oleh moral dan etika, mematuhi sistem ketatanegaraan serta bersikap dan berperilaku sebagai negarawan. Pembangunan moral dan etika menjadi suatu gerakan, sebagai basis pendidikan, serta kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan serta pelecehan terhadap kredibilitas Pancasila sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu *platform* dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat *survive* dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Memang, penekanan Pancasila sebagai ideologi Negara pada masa Soeharto bersifat kaku dan mutlak pemaknaannya⁵⁴, terlebih dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal telah menempatkan Pancasila dalam posisi yang sulit di tengah percaturan ideologi besar dunia.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, sebenarnya gerakan reformasi telah berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang diakhiri, dan menjadi tugas dari dunia pendidikan untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.

⁵⁴ Gumilar Rosliwa Somantri, *Pancasila dalam perubahan Sosial Politik Indonesia Modern*, dalam Restorasi Pancasila, Jakarta, 2006 halaman 18.

Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 diakui telah banyak membawa perubahan dan kemajuan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun kehidupan berdemokrasi. Namun disisi lain, juga berdampak pada terjadinya erosi dan krisis akan jati diri sebagai bangsa.

Jati diri bangsa Indonesia dapat kita lihat dari ideologi ataupun pandangan hidupnya, yakni Pancasila. Tetapi akibat perkembangan era global dan kemajuan jaman dewasa ini, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa, mulai ditinggalkan. Sejumlah kalangan bahkan mulai khawatir dan prihatin terhadap kecenderungan nilai-nilai Pancasila yang tidak lagi menjadi "*way of life*" dan "ruh" dalam berbagai kebijakan publik untuk meraih cita-cita bangsa. Ada kecenderungan untuk tidak menganggap Pancasila sebagai hal yang penting untuk dipahami dan diaplikasikan. Saat ini orang semakin jarang membicarakan dan mendiskusikan masalah Pancasila, dan bahkan terkesan alergi. Demikian juga lembaga pendidikan tidak lagi mengajarkan materi Pancasila sebagai salah satu bagian pembangunan karakter bangsa dalam kurikulum pendidikan. Pancasila dianggap sudah tidak ampuh lagi sebagai perekat bangsa, karena di berbagai wilayah timbul berbagai konflik, benturan dan disharmoni sosial. Hal ini juga diperparah dengan minimnya sosok teladan yang baik.

Walaupun Pancasila sebagai filosofi bangsa sudah disepakati sebagai jati diri, nilai dan konsensus yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, tetapi kenyataannya masih kita temui banyak anak bangsa yang mencari jati diri lain, yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme maupun terorisme. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu ditanamkan kembali pemahaman nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa.

Setiap warga Negara, penyelenggara Negara dan lembaga kenegaraan serta kemasyarakatan lainnya perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan. Karena tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul. Bila tidak ada upaya sungguh-sungguh dari seluruh komponen bangsa

Indonesia untuk merevitalisasi dan mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa, maka militansi bangsa yang mendekati titik kritis dan jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur, akan mempercepat terjadinya disintegrasi bangsa.

Terlihat bahwa pelaksanaan kenegaraan yang pada hakekatnya mendasarkan pada *core philosophy* bangsa dan Negara Indonesia Pancasila, lebih diwarnai oleh semangat dan prinsip-prinsip liberalisme-individualisme. Bahkan filosofi tersebut didewakan dalam sistem politik Indonesia dewasa ini. Dalam proses reformasi dewasa ini selain kurang memperhatikan *welfare state* dan tidak meletakkan dasar filsafat negara sebagai dasar kesepakatan yang fundamental dalam mewujudkan negara yang demokratis, persatuan kebangsaan Indonesia dewasa ini juga sangat rapuh dan memprihatinkan. Terjadinya eskalasi kekerasan yang menggerogoti kesadaran kebangsaan Indonesia atau *nation state* kita tidak lepas dari gagalnya negara di dalam menjalankan peran-peran dasarnya. Negara gagal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial antar daerah (sebagai tujuan dari *welfare state*), yang kemudian menjadi pemicu bangkitnya nasionalisme etnis di beberapa daerah yang kaya dengan sumber daya alam (Darwin, 2007). Etnisitas dan agama memang merupakan simbol yang mudah sekali dimanipulasi untuk membangun identitas kelompok dan membangkitkan dukungan yang fanatik dari konstituen. Politisasi sentimen primordial di era kebebasan ini mudah meningkat eskalasinya menjadi suatu konflik yang besar, yang sebenarnya hanyalah merupakan konflik kecil dan mudah diselesaikan.

Menurut Hendro Priyono, kondisi *nation state* Indonesia di era global dewasa ini selain pudarnya rasa nasionalisme, juga menjadi *imagined communities*, yaitu karena era transisi maka muncullah gerakan sektarian yang membayang-bayangi bangsa Indonesia dengan ancaman teror (Priyono, 2007: 126). Format kebebasan tanpa disertai dengan manajemen keamanan negara yang memadai dan kondisi kesejahteraan yang rendah, menurut tesis Huntington (1997) akan menimbulkan konflik peradaban, dan menurut Naisbitt terjadi gerakan *tribalisme* (1994), yaitu gerakan yang berdasar pada fanatisme etnis, suku, ras, agama, golongan dan primordial lainnya. Berbagai konflik etnis, suku, ras, agama dan golongan terjadi di era reformasi saat ini, seperti peristiwa konflik suku

Dayak dan Madura, Islam dan Kristiani di Ambon dan Poso, konflik Achmadiyah, Salafiah, Wahabi dengan kelompok Islam lainnya, fanatisme etnis bahkan Papua dan Aceh itu meruncing menjadi nasionalisme etnis, yang telah memakan korban. Jajak Pendapat Kompas tahun 2008 telah terbukti bahwa nilai-nilai toleransi dan solidaritas nasional yang dimiliki bangsa ini mulai menghilang.

Selain permasalahan konflik horisontal, bangsa Indonesia juga tengah mengalami krisis karakter dan kemerosotan moral, ditunjukkan dengan adanya berbagai kasus seperti korupsi oleh pejabat, maraknya pornografi dan pornoaksi, serta meningkatnya gaya hidup hedonis, bahkan yang lebih memprihatinkan, antar suporter bola saja bisa terjadi keributan (Seto Mulyadi:2010).

Oleh karena itu sudah saatnya segenap elemen bangsa ini memikirkan nasib rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang dilanda krisis yang berkepanjangan. Agar terciptanya suatu kehidupan rakyat yang aman, harmonis, adil dan sejahtera sudah tidak dapat ditunda lagi untuk melakukan revitalisasi negara kebangsaan (*nation state*), yang fondasinya sebagaimana telah diletakkan oleh *founding fathers* kita. Bangsa Indonesia ini memiliki ciri yang khas, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bangsa Indonesia bersifat multikultural yang terdiri atas beratus-ratus suku, ras, agama, maupun golongan. Kelemahan dan keterpurukan negara Indonesia di era kebebasan dewasa ini, memberikan udara segar dan menyuburkan terorisme, separatisme, konflik antar kelompok primordial suku, ras, agama, maupun golongan sebagaimana yang diungkapkan A.M. Hendropriyono, pakar intelijen Indonesia (2007).

Bangsa yang multikultural serta kehidupan keagamaan yang beranekaragam, tidak mungkin tanpa prinsip persatuan dan kesatuan sebagai perekat bangsa. Dengan meletakkan *basic philosophy* negara sebagai landasan pembaharuan, maka *common platform* reformasi dapat dirumuskan dengan jelas dan menyentuh '*demos*' (rakyat) sebagai paradigma dalam reformasi. Proses reformasi untuk mewujudkan negara dan bangsa yang demokratis, aman dan sejahtera, tidak mungkin hanya dengan cara saling menyalahkan, menanamkan kebencian dan dendam kepada rakyat. Dengan menggunakan akal sehat dan beradab, menilai suatu orde atau kekuasaan dalam negara ini, yang baik kita teruskan dan tingkatkan, dan yang buruk kita tinggalkan, maka kita akan menjadi

bangsa yang dewasa. Ungkapan-ungkapan kalangan elit politik yang menimbulkan efek kekerasan, dendam dan kebencian sesama anak bangsa ini sudah saatnya untuk diakhiri.

Pengefektifan Pendidikan karakter tentang rasa kebangsaan Indonesia dan agama dalam berbagai kebijakan publik, terutama sektor pendidikan menjadi satu hal yang urgent. Karena tidak efektifnya usaha pembinaan terhadap perkembangan wawasan kebangsaan dalam berbagai kebijakan publik selama ini, telah menjauhkan ikatan batin antara generasi penerus dan generasi pendiri bangsa ini. Dekadensi moral dan lemahnya karakter pejabat, yang berujung pada korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi hambatan untuk mewujudkan *public trust* tersebut. Selain itu agama juga belum diletakkan sepenuhnya sebagai prinsip hidup serta moral dalam kehidupan bersama, dalam mewujudkan masyarakat yang madani, damai, sejahtera, beradab dan harmonis.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sekarang sedang menghadapi tantangan berat, karena sebagian besar dari rakyat, elite politik dan tokoh-tokoh masyarakat lupa bahwa bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka disibukkan oleh berbagai isu parsial seperti masalah HAM, lingkungan hidup, keterwakilan perempuan, pilpres dan pilkada langsung, korupsi, kenaikan BBM dan sebagainya. Memang isu-isu tersebut sangat penting, akan tetapi menyelesaikan isu-isu tersebut kasus perkasus tidak akan bisa menyelesaikan problem kebangsaan kita secara menyeluruh dan mendasar. Kesibukan yang berlarut-larut inilah yang kemudian menggeser persoalan substansial bangsa Indonesia, yaitu dilupakannya Pancasila oleh sebagian besar rakyat dan elite politik kita.

Dengan kata lain, diukur dari ideologi Pancasila, dapatlah dikritisi dan dievaluasi, bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, migas, sumber daya air, pertambangan dan lain-lain, yang bersumber dari kapitalisme global adalah kebijakan yang melawan Pancasila. Demikian juga dengan banyaknya ancaman menerpa, mulai dari kekerasan berbasis agama, konflik antar pengikut calon dalam Pilkada, konflik antar kampung, konflik antar suku, kesenjangan sosial yang semakin tajam, harga sembako tinggi, tiadanya lapangan pekerjaan, separatisme, konsumerisme, kemiskinan yang semakin parah,

penghisapan sumber daya pertambangan dan migas oleh kekuatan kapital, privatisasi pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya.

Dengan cara demikian, dapat dijelaskan bahwa kesemerawutan kehidupan kebangsaan kita saat ini, kemiskinan yang merajalela, kekerasan, ketidakadilan dan ancaman perpecahan bangsa, bersumber dari kelalaian kita untuk menempatkan Pancasila sebagai "*grund norm*", sebagai norma dasar yang menjadi sumber hukum kebijakan pemerintah yang berkuasa.

Akhir-akhir ini, massa seringkali melakukan unjuk rasa untuk menagih janji pemerintah yang dikampanyekan dulu. Demonstran melakukan tindakan destruktif dan tidak sesuai dengan Pancasila. Mereka menginjak-injak dan membakar foto Presiden dan Wakil Presiden dan tokoh-tokoh lain yang didemo. Tentu saja ini merupakan perilaku tidak terpuji yang bertentangan dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila yang mengisi nurani bangsa Indonesia. Ditambah lagi, Korupsi telah merambah berbagai lini yang menyeret birokrat sipil dan militer diajukan ke pengadilan. Manipulasi pajak dengan nominal yang tidak sedikit jumlahnya telah membentuk *integrated corruptor* atau koruptor berjamaah (Suhartono W. Pranoto, 2009). Penyakit korupsi merupakan bagian dari penyakit sosial-budaya masyarakat Indonesia yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah. Ini mengingatkan bangsa kita telah kehilangan arah akibat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan menjadi *collapsed state*: negara tidak berperforma baik karena fungsi-fungsi negara tidak membawa negara keluar dari berbagai kebobrokan internal. Artinya, negara gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya terutama saat masyarakat membutuhkan kehadiran negara.

Memang, implementasi secara empiris nilai-nilai Pancasila masih sangat jauh dari harapan. Ketuhanan yang maha Esa, ternyata masih diartikan sebagai perselisihan dengan agama lain, karena menganggap agamanya yang paling benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berkenaan dengan nilai kecintaan terhadap sesama makhluk manusia, kejujuran dan keadilan, yang banyak terjadi justru permusuhan, tindak kekerasan, bahkan pembunuhan, kecurangan, penipuan, pemerkosaan dan perlakuan yang diskriminatif. Persatuan Indonesia, berkenaan dengan nilai kecintaan pada bangsa dan tanah air, kebersamaan, dan

kebhinekatunggalikaan, yang tampak justru egoisme subjektif, egoisme kelompok, dan primordialisme. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berkenaan dengan nilai kerakyatan, musyawarah mufakat, dan demokrasi, yang banyak terjadi justru memeralat rakyat, feodalisme, dan kartel politik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkenaan dengan nilai keadilan, dan kesejahteraan lahir batin, yang membuat prihatin justru adanya pengangguran, kemiskinan dan neoliberalisme. Kegagalan itu paling menonjol dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa, yang berimbas pada kehidupan bermasyarakat, bahkan di lingkungan keluarga dan pribadi. Banyak penyelenggara negara dan elit politik yang semestinya menjadi suri teladan bagi masyarakat umum sesuai dengan jabatan dan fungsinya ternyata mengecewakan. Dan disinilah letak peran penting Pancasila, sebagai ideologi kritis, sebagai “*grundnorm*” yang mendasari sendi-sendi kehidupan kebangsaan Indonesia. Jika Bung Karno pernah menyatakan “Penemuan Kembali Revolusi Kita” sekarang saatnya menyatakan “Penemuan Kembali Pancasila Kita” sebagai istilah lain dari revitalisasi Pancasila.

3.1.1. Eksistensi Pancasila Dalam Persaingan Ideologi

Pancasila yang diyakini sebagai aktualisasi dan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa ini, seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, dianggap sebagai penjelmaan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan pemilihan Pancasila sebagai ideologi, ketepatannya tergantung kepada jiwa bangsa itu sendiri. Ideologi yang dianggap benar dan sesuai dengan jiwa bangsa, terlebih yang telah terbukti mampu bertahan dari berbagai cobaan dan ujian dari ideologi lain, melalui gerakan-gerakan atau pemberontakan yang akan memperkuat keyakinan pentingnya mempertahankan ideologi. Salah satu contohnya adalah ideologi yang dimiliki China. Bersumber dari Buddhism yang sama dengan di India⁵⁵, namun bangsa China lebih cepat maju dibanding India, karena ideologi tersebut sudah menjadi jiwa bangsa China.

Dalam implementasinya sebagai ideologi, tentu saja Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa, karena eksistensi suatu bangsa ditentukan dari

⁵⁵ Edward Friedman, *Is China a Success while India is a Failure? dalam World Affairs*; Fall 2004; 167, 2; Academic Research Library, pg. 59

eksistensi kepribadiannya. Sebuah wisdom mengatakan “*when wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, everything is lost (NN).*”

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka, sehingga Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, akan tetapi mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkrit sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang.

Ada sejumlah pertimbangan mengapa founding fathers memilih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu, Pertama, secara demografis bangsa kita memiliki pluralitas yang sangat lebar dari berbagai aspek (multidimensi). Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, terdapat kesenjangan multiaspek misalnya aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan kultural.

Kedua, secara kultural, dalam masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara mendarah-daging nilai-nilai luhur seperti kekeluargaan, gotong-royong, toleransi, keramah-tamahan, budi pekerti dan sebagainya, meski menurut antropolog budaya Koentjaraningrat, juga mengidap gejala penyakit sosial yang negatif, seperti berwatak “feodalistis”, “munafik”, “suka mencari kambing hitam” dan “malas” (pasif, rendah dalam inisiatif, kreasi dan inovasi). Untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa serta mengatasi penyakit budaya tersebut, satu-satunya jalan adalah pendidikan yang berkualitas, berorientasi pada pembangunan jatidiri bangsa Indonesia (*nation and character building*). Persoalannya, sistem pendidikan nasional saat ini justru bermasalah, karena lebih menekankan aspek *transfer of knowledge* daripada *transfer of values*.

Ketiga, secara geografis, negara kita merupakan negara kepulauan (*archipelagic country*) dengan garis pantai yang amat panjang (nomor dua terpanjang di dunia), terletak pada posisi silang yang amat strategis serta amat kaya dengan Sumber Daya Alam. Kondisi ini melahirkan banyak keuntungan namun juga berpotensi kerawanan, termasuk masuknya kepentingan-kepentingan asing (regional dan global) dan sulitnya pengawasan wilayah.

Dalam konteks ini dapat dibayangkan apa yang mungkin terjadi di Indonesia dengan lebih dari 2000 kelompok etnis yang berdiam di 18 ribu pulau. Jika tidak dibentengi Pancasila, dipagari nasionalisme serta dikawal oleh kesadaran bela negara dan patriotisme yang kokoh-tangguh, maka tidak akan ada yang mampu menjamin eksistensi NKRI terhindar dari disintegrasi.

Tantangan dari dalam di antaranya, terjadinya berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya Pancasila di bumi Indonesia. Bahkan, bisa jadi akan mengakibatkan Indonesia tinggal sebuah nama sebagaimana halnya negara Yugoslavia dan Uni Soviet.

Tidak kalah seriusnya dengan tantangan dari dalam, Pancasila juga kini tengah dihadapkan dengan tantangan eksternal berskala besar berupa globalisasi. Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, secara drastis telah menghilangkan batas-batas etnis bahkan bangsa. Sehingga tanpa bisa dihindari dan menghindari, Indonesia turut menjadi bagian dari arus besar berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Sekecil apa pun perubahan yang terjadi di belahan dunia lain akan langsung diketahui atau bahkan dirasakan akibatnya oleh Indonesia. Sebaliknya, sekecil apa pun peristiwa yang terjadi di Indonesia secara cepat akan menjadi bagian dari konsumsi informasi masyarakat dunia. Pengaruh dari globalisasi ini begitu cepat dan mendalam. Situasi internal-eksternal inilah yang menjadi ancaman bagi NKRI dalam kacamata intelijen, karena situasi kekinian yang ada akan mampu mempengaruhi stabilitas nasional dan eksistensi Pancasila.

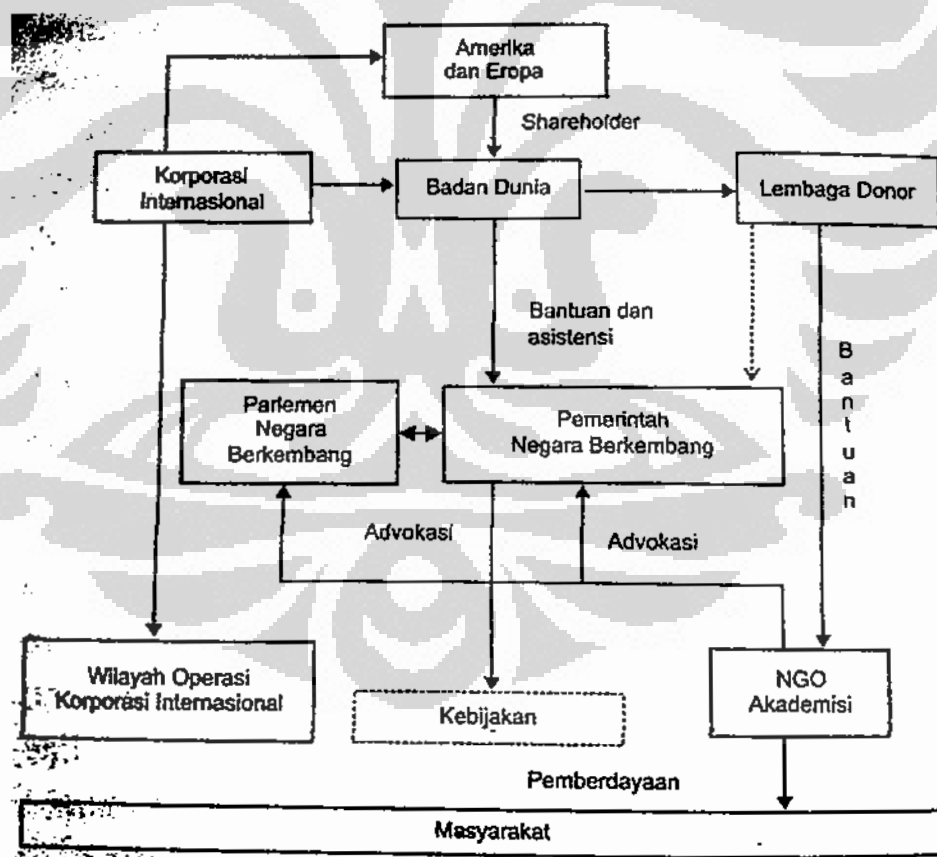
Sejak masa reformasi, arus gobalisasi masuk begitu derasnya ke Indonesia, tidak terkecuali pengaruh ideologi dunia. Pasca runtuhnya Sovyet, ideologi komunis memang telah takluk di hadapan ideologi liberal. Namun, ternyata ideologi liberal yang bertransformasi menjadi neoliberal⁵⁶ menghadapi ideologi lainnya, yaitu sosialisme demokratis dan islam radikal. Dan Indonesia, sebagai

⁵⁶ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila*, Jakarta:Pustaka LP3ES, 2009, halaman 267. Perbedaan mendasar liberalism dan neoliberalisme terletak pada gagasan besar yang menyatukan politik dan ekonomi pasar.

salah satu negara terbesar di Asia tidak luput menjadi ajang persaingan ideologi, tentu saja ideologi-ideologi ini telah bertransformasi dalam bentuk baru, tidak sesederhana seperti masa lalu yang terpetakan secara bipolar.

a. **Neoliberalisme**

Dalam bukunya *Negara Pancasila* (2009), As'ad menerangkan bahwa benih-benih neoliberal telah tertanam sejak awal Orde baru ketika pemerintah mengalami kesulitan keuangan, dan terpaksa berhutang kepada negara Barat. Neoliberal semakin terlihat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi 1997, dan semakin deras masuk ke Indonesia ketika kran demokratisasi dibuka. Aktivis LSM dan kalangan akademisi yang jenuh dengan otoritarianisme Orde Baru, tanpa sadar telah membuka pintu bagi neoliberalisme. Neoliberal dengan leluasa masuk, karena demokrasi sebenarnya merupakan hasil dari liberalisasi politik dalam kebebasan berpendapat.



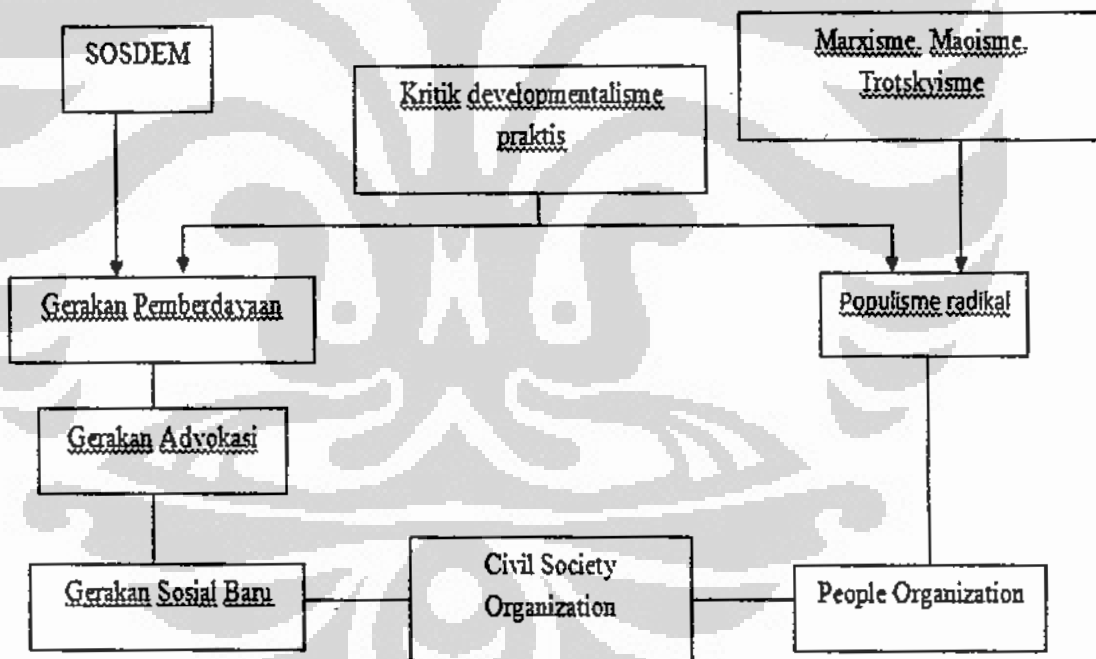
Gambar 3.1 Kekuatan Neo Liberal

Sumber: As'ad Said Ali, Negara Pancasila, 2008, halaman 274.

Dari gambar diatas, terlihat bahwa neoliberalisme dapat masuk dengan mudahnya melalui bantuan keuangan, pendidikan dan demokratisasi ke negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Adanya penjualan aset negara seperti Indosat dan BUMN lain sebagai bentuk privatisasi bidang ekonomi. Demikian juga dengan maraknya sekolah internasional di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bentuk privatisasi bidang pendidikan, seperti Jakarta International School dan Bandung International School.

b. Ideologi Kiri

Dalam perkembangannya, tidak jauh berbeda dengan liberalisme. Ideologi kiri juga memiliki banyak varian, mulai dari marxisme, maoisme, trotskyisme dan perkembangan terakhirnya adalah sosial demokrasi (sosdem). Runtuhnya Uni Sovyet, ternyata membawa transformasi dalam perkembangan ideologi kiri.



Gambar 3.2 Evolusi gerakan Kiri

Sumber : diolah dari www.unisosdem.org diakses pada 9 Desember 2010.

Dengan mengusung gagasan besar kebebasan, persamaan dan solidaritas, Sosdem tetap berupaya melawan varian liberalisme/kapitalisme dengan mengkritik developmentalism praktis yang dibawa globalisasi. Sosialisme di

Indonesia bukanlah hal baru, karena pada era Orde Lama, Soekarno berupaya menerapkan sosialisme ala Indonesia untuk mengikis dan memerangi kapitalisme. Pasca digulirkannya reformasi, sosdem berupaya mengukuhkan dirinya di Indonesia, dengan mencoba memasuki arena politik, dengan membawa isu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperjuangkan kelas pekerja, buruh dan kaum miskin kota, akan tetapi ternyata dukungan rakyat terhadap Sosdem masih rendah, sehingga partai politik yang berplatform sosdem pun akhirnya bertumbangan, seperti PRD (Partai Rakyat Demokratik). Kekalahan dramatis Partai Sosial Demokrat (Partai Sosdem) dalam Pemilu 2009 membuktikan kesadaran politik rakyat Indonesia bertambah meninggi. Namun, meskipun demikian, dalam bentuk *people organization* maupun *civil society organization*, sosdem di Indonesia mengalami perkembangan dan mobilisasi di level grass root, antara lain kaum buruh, petani dan mahasiswa militan. Pada sebuah event Social Democracy : Freedom, Democracy and Social Justice di Bandung (2009), beberapa LSM seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) terang-terangan menyatakan dirinya berasaskan sosdem.

c. Islam radikal

Ideologi yang berbasiskan agama bukanlah hanya Islam saja. Namun, di Indonesia, islam radikal mengalami perkembangan yang cukup pesat, sejak zamannya DI/TII Kartosoewiryo hingga HTI yang terus mengembangkan massanya. Dalam konteks Islam, ideologisasi islam muncul ketika Jamaluddin al Afghani (1839-1897) membentuk partai Hizbul Wathon di Mesir dan memutuskan untuk melawan penguasa Islam Tradisional dan Barat.

Dalam perkembangannya, gagasan Ideologisasi Islam ini diteruskan oleh Hasan Al Banna yang membentuk Ikhwanul Muslimin. Gagasan Islam moderat ini ternyata tidak diterima oleh semua ulama Islama. Taqiyudin An Nabhani, misalnya, keluar dari Ikhwanul Muslimin kemudian mendirikan Hizbut Tahrir pada 1953.

Tabel 3.1 Perbandingan Gerakan Islam

Pemimpin Global	Sistem Organisasi	Sistem Rekrutmen	Metode Dakwah	Agenda	Pusat Jaringan
Muhammad Ali	Gabungan organisasi modern dan sistem sel	Usrah sistem sel	Membentuk jamaah melalui halaqah Membangun partai	Daulah Islamiah	Mesir
Abu Basma	Gabungan sistem sentralistik dan organisasi massa	Sel Tertutup Mobilisasi massa	Halaqah terbatas, kader inti Mobilisasi, demonstrasi	Khilafah	Yordani
Abd. Muqbil Abi bin al-Miskoli	Ketaatan guru murid Pesantren	Pesantren	Pesantren salafi Pencerbitan	Pemurnian ajaran Islam	Saudi, Yaman
Osama Bin Laden Abu al-Zawahri	Jaringan tertutup, Cluster regional	Sistem sel tertutup	Jihad, latihan militer	Jihad global melawan Barat	Afganistan, Moro, Irak
Makdumendi	Gabungan organisasi modern dan jaringan ahlu Bait	Pengajian, organisasi.	Pendekatan kultural Ceramah, diskusi Organisasi massa	Negara Islam versi Syiah	Iran, Lebanon
Shaykh Raza	Cluster antarnegara	Ta'lim	Silaturahmi khuruj	Amar ma'ruf (minus nahi mungkar)	India Utara

Sumber : Kholid Novianto, *Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia, dalam reform Review Vol 1 No 1 April-Juni 2007.*

Bersamaan dengan itu pula, jaringan islam internasional mulai memasuki Indonesia, karena Indonesia dianggap berpotensi dengan jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Jaringan-jaringan islam internasional ini terus bergerak dan memobilisasi massa, menjadikan Indonesia sebagai arena persaingan ideologi, karena tidak semuanya ideologi islam radikal saling mensupport, belum lagi dengan adanya gerakan fundamentalisme kristen maupun gerakan ideologi sekuler lainnya, baik kanan maupun kiri.

Di Indonesia, beberapa gerakan Islam ini telah masuk dan memiliki massa yang tidak sedikit. Hizbut Tahrir misalnya, pada tahun 1990-an embrio HT ini masuk ke Indonesia melalui kampus-kampus Islam dan kemudian pada tahun 2002 menggunakan nama Hizbut Tahrir Indonesia. Dakwah yang dipergunakan adalah memperbaiki diri, membentuk rumah tangga islami, memotivasi masyarakat, membersihkan rakyat dari berbagai bentuk kekuasaan asing, memperbaiki pemerintahan dan mendirikan negara Islam. Gerakan lain seperti Jihadi yang di Indonesia berkembang dengan nama Jamaah Islamiyah, juga berkeinginan untuk mendirikan khilafah Islamiyah, namun mereka mempergunakan teror dalam upaya pencapaian tujuannya, seperti kasus Bom Bali

2002 dan Bom Kuningan 2004. Sementara gerakan Syiah dan Jamaah Tabligh lebih *soft*, karena tidak mempergunakan metode kekerasan. Syiah yang didukung oleh pemerintah Iran, di Jakarta seringkali mengadakan acara pengajian dengan jumlah massa yang bertambah. Sementara jamaah tabligh berupaya untuk memperoleh massa dari *grass root*.

Sudah dapat dibayangkan, beragam ideologi dunia yang ada di Indonesia akan mengalami persaingan yang sengit dan kompleks, terlebih jika ideologi-ideologi tersebut nantinya akan semakin membesar dan menjatuhkan. Disinilah aktualisasi Pancasila menjadi jawaban dari berbagai tantangan global tersebut, termasuk tantangan bagi Pancasila itu sendiri.

Implikasi dari dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup maka bangsa yang besar ini mempunyai *sense of belonging* dan *sense of pride* atas Pancasila. Untuk menumbuhkembangkan kedua rasa tersebut maka melihat realitas yang tengah berkembang saat ini setidaknya dua hal mendasar perlu dilakukan. *Pertama*, penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penanaman kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung pemahaman tentang adanya suatu proses pembangunan kembali kesadaran akan Pancasila sebagai identitas nasional. Upaya ini memiliki makna strategis manakala realitas menunjukkan bahwa dalam batas-batas tertentu telah terjadi proses pemudaran kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satu langkah terbaik untuk mendekatkan kembali atau membunikan kembali Pancasila ke tengah rakyat Indonesia tidak lain adalah melalui pembangunan kesadaran sejarah.

Kedua, perlu adanya kekonsistenan dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Jangan sampai Pancasila ini hanya sekadar wacana di atas mulut, sementara di lapangan penuh dengan perilaku hipokrit. Dengan demikian, penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah merupakan suatu kesadaran moral bagi tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Seperti yang pernah dikatakan oleh Roeslan Abdulgani (1986),

Pancasila kita bukan sekadar berintikan nilai-nilai statis, tetapi juga jiwa dinamis. Tiada gunanya kita, hanya secara verbal mencintai

kemerdekaan, kalau kita tidak berani melawan penjajahan, baik yang tradisional-kuno maupun yang neokolonial. Tiada gunanya kita, secara verbal saja menjunjung tinggi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kalau kita takut melawan kemusyrikan. Tiada guna kita, secara verbal saja mengagungkan sila Perikemanusiaan, kalau kita membiarkan merajalelanya situasi yang tidak manusiawi. Tiada faedahnya kita, jika secara verbal saja kita mencintai Persatuan Indonesia, kalau kita membiarkan merajalelanya rasa nasionalisme dan patriotisme merosot dan membiarkan bangsa lain mengeksploitasikan kebodohan dan kelemahan rakyat kita. Tak ada manfaatnya, jika kita cinta akan sila Kerakyatan tetapi kita membiarkan keluhan rakyat tersumbat. Kurang artinya bila kita ngobrol saja tentang sila Keadilan Sosial, kalau kita sendiri membiarkan kepincangan sosial ekonomis merajalela.

3.1.2. Eksistensi Media Dalam Era Reformasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, media memiliki peranan yang teramat besar dalam mempengaruhi perkembangan karakter bangsa. Dengan adanya Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagai efek dari dibukanya kran demokrasi seluas-luasnya, Media tampak mengalami suatu pergeseran peran dari yang sebelumnya berada dalam pengawasan pemerintah dan digunakan untuk tujuan-tujuan pembangunan, menjadi suatu lembaga yang berorientasi pada bisnis dan tak dapat dipungkiri, digunakan untuk tujuan-tujuan kelompok penguasa modal/pemilik media.

Tabel 3.2 Pergeseran Peran Pers

Masa Orde Baru	Masa Reformasi
1. Berdasarkan UU No 21 tahun 1982	1. Berdasarkan UU No 40 tahun 1999
2. Pers merupakan alat perjuangan nasional dan alat pembangunan nasional	2. Pers merupakan lembaga sosial dan lembaga ekonomi
3. Untuk penerbitan pers, harus memiliki SIUPP dari pemerintah	3. Untuk penerbitan pers, harus mendirikan badan usaha
4. Adanya campur tangan penguasa dalam pemberitaan	4. Mengikuti mekanisme pasar
5. Berorientasi pada stabilitas politik	5. Berorientasi pada profit
6. Dipergunakan untuk kepentingan penguasa	6. Dipergunakan untuk kepentingan pengusaha pemilik media

Sumber : dikutip dengan perubahan seperlunya dari Ibnu Hamad, Mindfacturing : Kontribusi Media Membangun Bangsa, dalam buku Refleksi Karakter Bangsa, 2008, halaman 185.

Mencermati tabel tersebut diatas, kita ambil satu contoh yang paling menonjol, tidaklah mengherankan jika pada tahun 1980an belum ada Blue Film buatan orang Indonesia, akan tetapi seiring digulirkannya reformasi dan kebebasan pers, mulai bermunculan berbagai film dan video porno buatan orang-orang Indonesia. Hal ini terjadi karena, media begitu vulgarnya mengangkat pemberitaan atau memunculkan budaya barat, khususnya budaya *free sex* dalam setiap tayangannya, hanya untuk mengejar rating yang tinggi, yang akhirnya berdampak negatif pada perkembangan karakter bangsa, karena bangsa ini tidak memiliki penyaring atau filter budaya yang cukup kuat. Pancasila yang diharapkan menjadi filter budaya, semakin lama semakin ditinggalkan karena dianggap kuno dan berbau orde baru.

Atas dasar orientasi profit ini pula, terjadi ledakan jumlah media, baik cetak maupun elektronik, Wikrama Abidin (anggota Dewan Pers, 2007) menyatakan, dalam tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia hanya 289, sedangkan pada tahun 1999, jumlah media cetak menjadi 1687 media. Pada tahun 1997, jumlah televisi hanya 6 stasiun, sedangkan pada tahun 2005, jumlah televisi menjadi 65 stasiun. Pada tahun 1997, terdapat 740 stasiun radio, sedangkan pada tahun 2005, jumlah stasiun radio mencapai 10000-an stasiun baik yang berizin maupun tidak.

Keadaan ini sungguh sangat ironis, karena media memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan budaya bangsa dan mendidik, bukan hanya menghibur saja. Memang, di satu sisi pemberitaan mengenai apa yang terjadi mempunyai fungsi *to inform*, akan tetapi pemberitaan ini pula yang menjadikan daerah lain yang pada mulanya tidak mengetahui “hal” tersebut, akhirnya menjadi familiar. Sebagai contoh, pergaulan bebas saat ini tidak hanya terjadi di perkotaan saja, namun di pedesaan bahkan di pelosok, pergaulan bebas bukanlah suatu hal yang baru lagi. Kejahatan, kekerasan, penyimpangan seksual, narkoba, minuman keras serta perilaku tak bermoral dan irasional seringkali menjadi komoditas berita dan

acara yang diharapkan mampu meraih rating tinggi untuk memperoleh keuntungan semata. Tentu saja ini sesuai dengan kebijakan dari pemilik media. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan karakter dalam kerangka sistem pendidikan nasional sebagai salah satu upaya revitalisasi Pancasila.

3.2. Sistem Pendidikan Nasional

Rumusan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Rumusan diatas menunjukkan Pemerintah Negara Indonesia dituntut lebih aktif dan menangani penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada masa pemerintahannya, Bung Karno begitu terobsesi dengan suatu gerakan atau usaha pembangunan karakter bangsa, yang diberi nama “*Nation and Character Building*.” Bung Karno menyadari bahwa sebagai akibat dijajah oleh Belanda selama sekitar tiga abad, terbentuklah karakter rakyat yang disebut “abdikrat,” meminjam istilah dari Verhaar dalam bukunya *Identitas Manusia*. Rakyat merasa dirinya sebagai *kawulo dalem* atau abdi raja yang mempunya sekedar “*nyadong dawuh*,” suatu penyerahan diri secara total kepada raja. Sebagai akibat terbentuk rakyat tanpa keberdayaan diri serta tidak memiliki kepercayaan diri atau *self confidence*.

Dalam beberapa hal ternyata Bung Karno berhasil dalam usaha *Nation and Character Building*. Rakyat mulai menyadari bahwa dirinya merupakan warga bangsa dari suatu negara yang besar yang bernama Indonesia yang wilayahnya terbentang di antara dua samudra besar dan dua benua. Rakyat dari Sabang sampai Merauke merasa terikat dalam suatu negara bangsa, dan rakyat merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, dalam batas-batas tertentu. Rakyat berani berkata :”*Go to hell with your aids.*”

Usaha *Nation and Character Building* diteruskan pada masa pemerintahan Pak Harto. Bila pada pemerintahan Bung Karno kebanggaan rakyat sebagai bangsa Indonesia lebih bersifat politis, maka pada masa pemerintahan Pak Harto diusahakan mengisi kebanggaan dalam arti nyata. Rakyat kecukupan pangan, sandang dan papan, rakyat pandai dan sehat, *income per capita* rakyat tinggi, rakyat kerja keras, sehingga lebih bertitik berat pada sisi ekonomi. Sementara itu watak bangsa dibangun dengan bersendi pada adat budaya bangsa. Berkembanglah gerakan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Rakyat dididik untuk dapat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga-bangsa dan warga-dunia, dan mampu untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memasuki era reformasi negara dan pemerintah belum sempat untuk membangun karakter bangsa. Gelombang globalisasi yang demikian deras, dalam situasi rakyat yang belum siap, berakibat globalisasi meluncur tanpa kendali dan tanpa saringan dengan sepatutnya, berakibat rakyat terbawa arus kebebasan dan individualisme. Karakter bangsa terjebak ke dalam titik nadir, seperti materialistis, individualistis, hedonistis, mementingkan diri sendiri, lunturnya wawasan kebangsaan dan sebagainya. Oleh karena itu sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi, sekarang saatnya membangun karakter bangsa, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki harga diri, percaya diri, serta mampu bersaing dengan bangsa lain utamanya dengan negara tetangga, dalam berbagai aspek kehidupan dunia.

Karakter bangsa Indonesia tercermin dalam *belief system* yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pancasila, serta tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini dan di masa yang akan datang, yang terjalar dalam nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan, serta kompetensi-kompetensi yang perlu dikembangkan. Nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan di antaranya adalah : keadilan, keberadaban, kejujuran, kebenaran, kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan, ketaqwaan, keimanan, kecintaan, kebersamaan. Nilai-nilai tersebut perlu difahami maknanya dan diwujudkan dalam kenyataan. Sedangkan kompetensi yang perlu dikembangkan di antaranya berupa kemampuan untuk bertanggung jawab, terbuka, transparans, akuntabel, bersaing, mengemukakan

gagasan dan aspirasi secara etis, pengambilan keputusan, mengatasi konflik, mengimplementasikan keputusan, dan sebagainya.

Setelah reformasi, Tap MPR No.II/MPR/1978 dicabut berdasarkan atas Tap MPR No.XVIII/1998 karena dipandang berbau indoktrinasi. Kemudian muncul Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa (EKB) merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. EKB dimaksudkan untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian dalam kehidupan berbangsa. EKB meliputi Etika Sosial dan Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, dan Etika Lingkungan.

Tap MPR itu juga memberikan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan. Ketetapan MPR ini sebenarnya dimaksudkan sebagai pengganti dari Tap MPR No.II/MPR/1978 yang telah dicabut. Sungguh amat disayangkan Tap MPR ini tidak ditindaklanjuti. Mungkin saja pihak eksekutif dan legislatif serta elit partai politik sudah lupa. Ini berarti mereka tidak mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk menegakkan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang mereka buat sendiri. Di sini letak perbedaannya dengan Tap MPR No.II/MPR/1978, yang segera ditindaklanjuti dengan membentuk BP7.

3.2.1. Undang-Undang No 20 tahun 2003

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya sekedar memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep

pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan SDM Indonesia secara berkelanjutan dan merata.

Ini sejalan dengan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yang menjabarkan mengenai tujuan pendidikan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Rumusan tujuan pendidikan nasional inilah yang menjadi dasar pengembangan pendidikan karakter bangsa, dengan mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang bersumber dari Agama, Pancasila dan budaya masyarakat. Berikut adalah sejumlah nilai pendidikan karakter bangsa.

Tabel 3.3 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa

Nilai	Deskripsi
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5. Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan

	cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
9. Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar
10. Semangat kebangsaan	Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
11. Cinta tanah air	Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa
12. Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain
13. Bersahabat/komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain
14. Cinta damai	Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya
15. Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya
16. Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi
17. Peduli sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan

18. Tanggungjawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan YME
-------------------	---

Sumber : Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Balitbang Kemendiknas, 2010, halaman 9-10.

Ke 18 nilai karakter tersebut tentunya bukanlah suatu hal yang mutlak, karena dalam perkembangannya pada tahapan peletakan dasar (2010-2014) akan terus dikembangkan dan diformulasikan karakter-karakter positif yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, agama dan budaya. Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa formulasi karakter tersebut bersumberkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain religius, toleransi, dan tanggungjawab; sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab antara lain menghargai prestasi, bersahabat, peduli sosial dan peduli lingkungan; sila Persatuan Indonesia antara lain semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai; sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan antara lain demokratis, rasa ingin tahu; dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia antara lain jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, gemar membaca.

Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, fungsi pendidikan karakter bangsa yang tercantum dalam Bahan Pelatihan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang disusun Balitbang Kemdiknas (2010) diantaranya adalah:

- a. Pengembangan : pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa
- b. Perbaikan : memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggungjawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat
- c. Penyaring : untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat

Dengan prinsip-prinsip pengembangan pendidikan karakter bangsa, sebagai berikut:

- a. Berkelanjutan. Dalam artian proses pembentukan karakter adalah proses yang tidak pernah berhenti (*never ending process*) dan berkelanjutan di setiap lembaga pendidikan.
- b. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah, yang mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran dan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.
- c. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, dalam artian materi nilai karakter bangsa tidak perlu disusun dalam suatu bentuk mata pelajaran baru, namun diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada, sehingga nilai-nilai karakter bangsa tidak perlu diujikan seperti pada UN.
- d. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan, sementara guru menerapkan prinsip Tut Wuri Handayani.

Sementara itu, masih dalam buku yang sama, tujuan dari pendidikan karakter bangsa yang sebenarnya adalah :

- a. Mengembangkan potensi nurani,afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
- b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius
- c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa
- d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif dan berwawasan kebangsaan
- e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *dasar* pendidikan nasional mengandung beberapa makna. Secara *filosofik* sistem pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, bahwa sistem pendidikan nasional *bertolak dari dan bermuara*

pada konsepsi sistemik kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, secara sosio-politik, manusia dewasa Indonesia yang "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab" itu menjadi individu anggota masyarakat, individu anak bangsa, dan individu warga negara yang secara kolektif-nasional mau dan mampu membangun watak dan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat.

Pada sisi lain secara substantif-edukatif sistem pendidikan nasional ditujukan untuk menghasilkan manusia dewasa Indonesia yang "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab", sebagaimana digariskan sebagai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diwujudkan sebagai proses belajar anak dan orang dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang bersifat konsentris tentang Pancasila (*knowing Pancasila*), belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*doing Pancasila*), dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan (*building Pancasila*).

Setelah reformasi, UU No.20/2003 Pasal 37 mengenai kurikulum pendidikan dasar dan menengah tidak memasukkan Pendidikan Pancasila, melainkan hanya Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian, padahal dalam kurikulum sebelumnya adalah PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Pasal 1 ayat 2 UU No 20/2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Penghilangan Pancasila kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 6 PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional No.22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk kurikulum perguruan tinggi juga sama, yaitu dengan keluarnya SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006, maka Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian hanya terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Jadi Pendidikan Pancasila ditiadakan. Tidak semua perguruan tinggi mengikuti ketentuan ini. Alasan mereka yang tidak menjalankan ketentuan ini adalah berpegang pada landasan filosofis dan yuridis konstitusional, yaitu kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ini berarti Pancasila dipahami, dihayati dan diamalkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi sebagai insan Indonesia dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, maupun sebagai penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Azyumardi Azra mengatakan

Sebuah kesalahan besar dan melanggar Konstitusi, kalau penyelenggara negara tidak menanamkan dan membudayakan pandangan hidup dan dasar falsafah negara kepada warga negara, khususnya generasi muda. Dan salah satu solusinya adalah dengan adanya mata pelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter yang di dalamnya mengandung muatan nilai-nilai luhur Pancasila, bukan indoktrinasi Pancasila. Karena bagaimanapun juga, sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, pada hakekatnya bukan hanya sekedar tempat transfer knowledge belaka, melainkan juga mengusahakan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai⁵⁷.

Mengingat moral adalah sesuatu yang bersifat abstrak maka nilai-nilai moral kebaikan mulai diajarkan pada generasi muda ini. Oleh sebab itu tema yang sesuai dengan usia anak dalam berpikir konkrit perlu diakomodasi. Cerita-cerita kepahlawanan dan kisah kehidupan yang perlu diteladani baik dari para orang bijak, maupun para pejuang bangsa dan humanisme tetap diperlukan. Bahkan imajinasi anak terhadap kehidupan yang ideal ini (meskipun apa yang dilihatnya dari sekitarnya tidaklah demikian) perlu ditekankan kepada anak agar ia mencintai kebajikan dan terdorong untuk berbuat hal yang sama. Karena itu dalam mendidik

⁵⁷ Azyumardi Azra, *Pembangunan Karakter Bangsa : Pendekatan Budaya, Pendidikan dan Agama*, dalam buku *Releksi Karakter Bangsa*, Jakarta, 2008, halaman 41.

karakter pada anak pengenalan dini terhadap nilai baik dan buruk sangat diperlukan. Dan itu menjadi tugas para pendidik dan sekolah untuk membentuk manusia menjadi makhluk baik yang beradab dan berbudi luhur.

3.2.2. Program Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014

Pendidikan bertujuan menyadarkan peserta didik bahwa selain sebagai warganegara dalam suatu negara, ia adalah bagian dari warga negara dunia. Disinilah peran Kementerian Pendidikan Nasional sangat dibutuhkan untuk merumuskan format pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam kaitan ini adalah rencana program Kementerian Pendidikan Nasional yang terkait dengan pendidikan karakter, yaitu suatu upaya terencana untuk membantu orang untuk memahami, peduli dan bertindak atas nilai-nilai etika/moral, mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang membantu orang hidup dan bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat dan bangsa.

Pembangunan karakter yang menjadi salah satu tugas utama Kemdiknas, perlu ditindaklanjuti dengan perumusan langkah-langkah sistematis dan komprehensif. Pendidikan karakter dikembangkan dalam bingkai utuh Sistem Pendidikan Nasional sebagai rujukan normatif, dirumuskan dalam sebuah kerangka pikir utuh dalam bingkai sistem pendidikan nasional. Tujuan lainnya adalah untuk menyusun rekomendasi tentang strategi pembelajaran dan implementasi pendidikan karakter bangsa dalam satu kesatuan sistem pendidikan. Sebagai contoh misalnya, untuk pembentukan watak melalui sekolah, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, menerapkan pendekatan keteladanan. Guru dan tenaga pendidik mampu mensosialisasikan nilai-nilai yang positif melalui pemberian contoh dan keteladanan. Kedua, menjelaskan berbagai nilai yang baik dan buruk dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dibarengi dengan adanya penghargaan atau pujian untuk menumbuhkan nilai-nilai yang baik, dan upaya pencegahan bahkan hukuman untuk meminimalisir berkembangnya nilai-nilai yang buruk. Ketiga, menerapkan pendidikan berbasis karakter, dalam artian mengintegrasikan mata pelajaran yang telah ada dengan penginternalisasian pendidikan karakter ke dalamnya, sehingga pendidikan karakter bukan hanya sekedar hafalan belaka.

Tabel 3.4 Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan

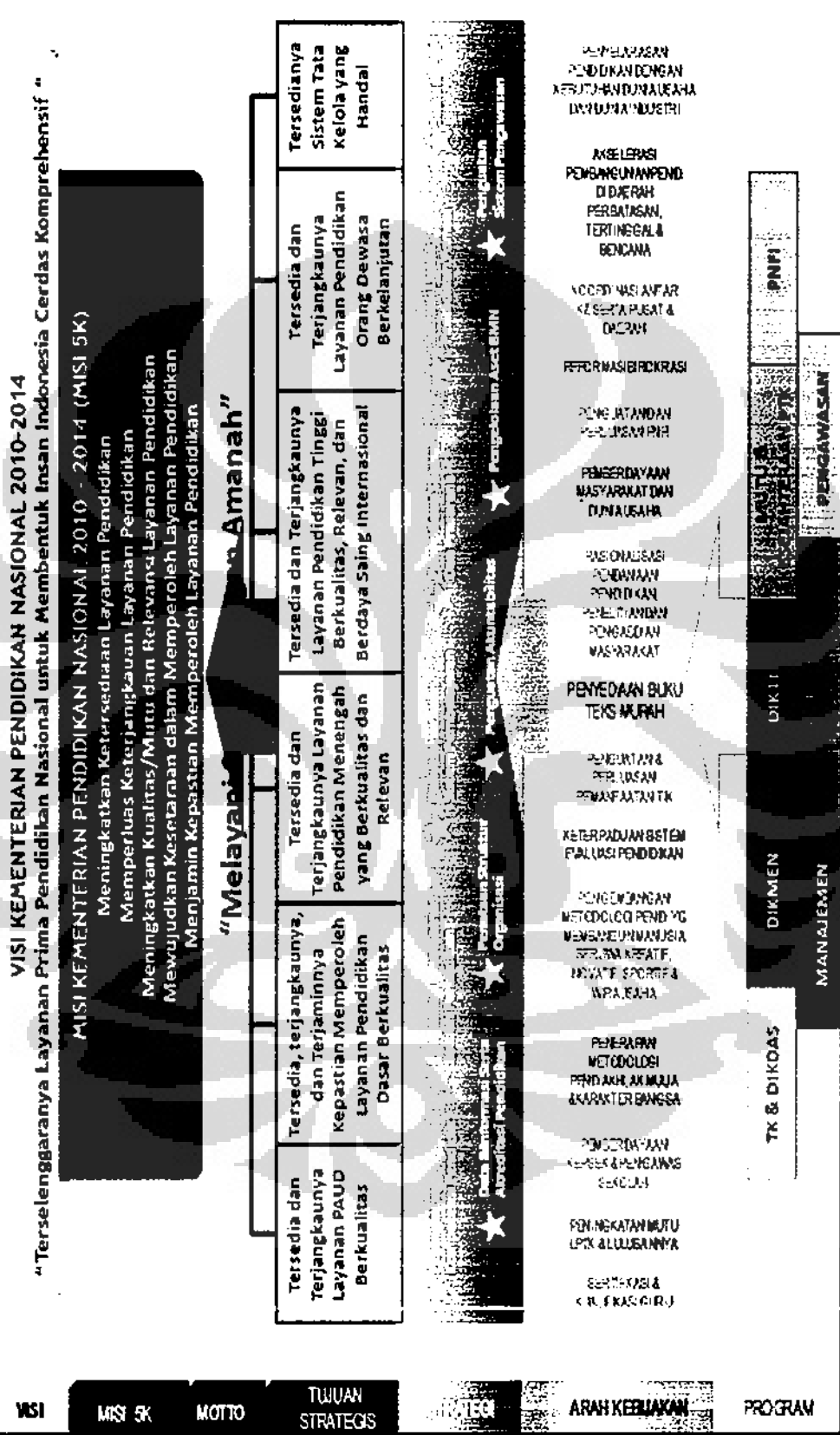
PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET	SASARAN	INSTANSI	PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi	Peningkatan sistem manajemen BOS	Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen BOS	Desember 2010	Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau	Kemendiknas	
	Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta	Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen BOS madrasah Persentase mata pelajaran SD sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 78 judul mapel) Persentase mata pelajaran SMP sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 47 judul mapel) Persentase mata pelajaran SMA sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 93 judul mapel) Persentase mata pelajaran SMK yang dibeli hak ciptanya (total 493 judul mapel)	Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010 Desember 2010	100% 100% 100% 100% 100% 52%	Kemendiknas Kemendiknas Kemendiknas	
Perbaikan status gizi anak sekolah	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa TK, RA dan siswa SD MI terutama di daerah tertinggal, percontok, perbatasan, dan kepulauan	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, percontok, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS	Desember 2010	Membalutnya gizi bagi siswa TK/RA dan SD MI melalui PMTAS	Kemendiknas	Daerah terikat
		Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, percontok, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS	Desember 2010			

PROGRAM	TINDAKAN	KUANTITAS	TARGET PENCAPAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengajaran metodologi dan kurikulum	Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	100% Ternyata diujikan uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Desember 2010	Ternyata diujikan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Kemendiknas	Daerah terkait
Pengajaran pengalihan sekolah	Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	15% Persentase kepala TK, SD yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berakreditasi menurut kab. kota Persentase kepala RA, MI yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berakreditasi menurut kab. kota	Desember 2010	Peningkatannya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah-madrasah sebagai satuan pendidikan unggul	Kemendiknas	Kab. Kota terkait
		10% Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berakreditasi menurut kab. kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab. Kota terkait
		15% Persentase kepala MTs yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berakreditasi menurut kab. kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab. Kota terkait
		10% Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berakreditasi menurut kab. kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab. Kota terkait
		15% Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berakreditasi menurut kab. kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab. Kota terkait

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN (3)	TARGET PENCAPAIAN (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH TERTANGGUNG JAWAB (7)
		Persentase kepala MA yang sudah mengikuti pelatihan kepala madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab kota	Desember 2010		Kemendag	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas TK/SD yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas R.A/MI yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab kota	Desember 2010		Kemendag	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas MTs yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah	Desember 2010		Kemendag	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab kota	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas MA yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab kota	Desember 2010		Kemendag	Kab/Kota terkait

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN ? (3)	TARGET PENCAPAIAN ? (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Peningkatan kualitas pendidikan agama	Peningkatan kualitas guru agama dan relevansi pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama	Persentase guru agama Islam yang mengikuti pelatihan kompetensi	100%	Desember 2010	Kemendiknas	(7)
		Jumlah siswa MA yang mengikuti program penguasaan di dunia usaha/dunia industri	5.000	Desember 2010	Kemendiknas	
		Jumlah sarani yang mengikuti program penguasaan di dunia usaha/dunia industri	1.000		Kemendiknas	
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti program penguasaan di dunia usaha/dunia industri	500		Kemendiknas	
		Penyusunan Standar Nasional Pendidikan bagi pendidikan agama dan Kearamahan	Penyusunan Standar	Desember 2010	Kemendiknas	
		Satuan pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu	10.000	Desember 2010	Kemendiknas	
Peningkatan kualitas penges/olam dan layanan pendidikan	Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan	Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Penjaminan Independen Internasional	8	Desember 2010	Kemendiknas	
		Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	95	Desember 2010	Kemendiknas	
		Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis ITK	40%	Desember 2010	Kemendiknas	
		Persentase satuan pendidikan jenjang SMP menerapkan pembelajaran berbasis ITK	20%	Desember 2010	Kemendiknas	
		Jumlah sekolah di 5 kabupaten provinsi DIY yang memiliki sistem e-pendidikan	50 sekolah	Desember 2010	Kemendiknas	
		Penyusunan dan Pengembangan E-Governance di sekolah (e-pendidikan)		Desember 2010	Kemendiknas	

Gambar 3.3 Skema Program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014



3.2.3. Faktor-Faktor Pendukung

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena didukung oleh sejumlah fakta positif yaitu posisi geopolitik yang sangat strategis, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, kemajemukan sosial budaya, dan jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terlebih menurut Azyumardi Azra dalam tulisannya *Revitalisasi Pancasila dan Identitas Nasional* (2008) menyebutkan bahwa :

Faktor yang mampu mendukung pembangunan karakter diantaranya adalah adanya identitas nasional yang mencakup : 1) semangat kebangsaan (nasionalisme) Indonesia; 2) Negara bangsa (nation state) Indonesia; 3) Dasar Negara Pancasila; 4) Bahasa nasional, bahasa Indonesia; 5) lagu kebangsaan Indonesia Raya; 6) Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika; 7) bendera Negara sang Merah Putih; 8) Konstitusi Negara UUD 1945; 9) Integrasi wawasan nusantara; 10) Tradisi dan kebudayaan daerah yang diterima sebagai bagian integral dari budaya nasional.

Dari sejumlah fakta positif atas modal besar yang dimiliki bangsa Indonesia, jumlah penduduk yang besar menjadi modal yang paling penting karena kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat bergantung pada faktor manusianya (SDM). Masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial budaya dapat diselesaikan dengan SDM. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi untuk menjadi Indonesia yang lebih maju diperlukan revitalisasi dan penguatan karakter SDM yang kuat. Salah satu aspek yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan karakter SDM yang kuat adalah melalui pendidikan.

SDM merupakan aset paling penting untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju. Namun untuk mencapai itu, terlebih dahulu kita memiliki SDM yang berkarakter kuat, yang dicirikan oleh kapasitas mental yang berbeda dengan orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, kekuatan dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat unik lainnya yang melekat dalam dirinya. Untuk itu sudah saatnya dilakukan perubahan mendasar dalam dunia pendidikan. Bagaimana menyusun sistem pendidikan yang didalamnya ditanamkan karakter bangsa dan masyarakat yang membangun. Artinya tidak

menonjolkan budaya kekerasan, dan lebih mengedepankan dialog, etika dan saling menghargai.

M Soeparno dalam bukunya *Revolusi Karakter Bangsa* (2006), merumuskan karakter bangsa yang digali dari falsafah Negara Pancasila yang bersumberkan dari nilai-nilai luhur bangsa, sebagai berikut :

- a. Bangsa Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bangsa Indonesia adalah manusia yang bangga sebagai warga Negara Indonesia serta mencintai Tanah Air dan angjanya, berbudi pekerti baik, siap membela Negara dan bangsa demi tegaknya NKRI.
- c. Bangsa Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah manusia yang memiliki jiwa kebersamaan, gotong royong, toleransi serta anti segala bentuk kekerasan.
- d. Bangsa Indonesia adalah manusia yang berbadan sehat, bersih, hemat, jujur, tertib, cermat, rajin, tepat waktu serta berdisiplin tinggi.
- e. Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki kemauan belajar dengan jangkauan masa depan, penuh inisiatif, kreatifitas, inovasi yang dilandasi dedikasi yang tinggi demi kemajuan, pengabdian dan manfaat bagi kehidupan dirinya, bangsa dan negaranya serta umat manusia.

Lebih lanjut, menurut M Suparno, rumusan karakter bangsa tersebut bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, karena karakter berawal dari tindakan yang menjadi kebiasaan yang kemudian membudaya, dan tentunya bersifat dinamis, bukan statis.

Selain itu, yang turut memegang peranan penting dalam keberlangsungan pendidikan karakter adalah pemerintah, khususnya pejabat Kementerian Pendidikan Nasional, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan program-program terkait pendidikan karakter. Terlebih dengan semakin banyaknya sekolah internasional yang ada di Indonesia, yang memiliki kurikulum, tentunya berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah negeri, maka kecermatan Kemendiknas diperlukan dalam menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan izin sekolah internasional ini, seperti Jakarta

International School, Gandhi Memorial International School dan puluhan sekolah internasional lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3.2.4. Faktor-Faktor Penghambat

Kita masih menghadapi berbagai masalah nasional yang kompleks, yang tidak kunjung selesai. Terkikisnya identitas dan jati diri bangsa yang dimulai dari pemimpin membuat martabat sebagai sebuah bangsa berdaulat berkurang maknanya. Bangsa besar dan jaya sebagaimana cita-cita kemerdekaan sepertinya akan terus mengalami degradasi makna. Bahkan, masyarakat Indonesia cenderung terlenakan oleh kejayaan bangsa dan sejarah masa lampau, tanpa mampu menyadari kenyataan bahwa Negara ini tengah sekarat dalam perkembangan zaman. Misalnya aspek politik, di mana masalahnya mencakup kerancuan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, kelembagaan negara yang tidak efektif, sistem kepartaian yang tidak mendukung, dan berkembangnya pragmatism politik. Lalu aspek ekonomi, masalahnya meliputi paradigma ekonomi yang tidak konsisten, struktur ekonomi dualistis, kebijakan fiskal yang belum mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak, dan kebijakan perdagangan dan industri yang liberal. Dan aspek sosial budaya, masalah yang terjadi saat ini adalah memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi nilai keagamaan, memudarnya kohesi dan integrasi sosial dan melemahnya mentalitas positif.

Kepercayaan dan penghargaan dunia terhadap bangsa Indonesia semakin berkurang karena lemahnya karakter para pemimpin dalam mengedepankan nilai kebangsaan. Elit bangsa justru sebagiannya menjadi pelaku kejahatan terhadap negara seperti korupsi dan berbagai perilaku moral hazard. Di saat yang sama, kebijakan menerima liberalisasi ekonomi menurut hukum pasar (*free market*) tanpa proteksi, membuat Indonesia kembali terjebak dalam permainan bangsa-bangsa pemilik modal. Kuatnya hegemoni dan cengkeraman kapitalisme global dalam dunia politik dan ekonomi membuat Indonesia yang memang masih lemah tidak mampu keluar dari ketergantungan terhadap utang luar negeri. Dari titik ini, kita sudah terjebak dalam pusaran globalisasi.

Beragam identitas mengalami perubahan akibat kekuatan globalisasi. Terlebih dengan masuknya ideology yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila. Realitas ini menunjukkan bangsa menghadapi tantangan yang sangat besar, sehingga diperlukan upaya pembangunan karakter dan identitas bangsa dalam berbagai aspek. Pemimpin negeri perlu menyadari tugas pembangunan karakter bangsa ini sebagai bagian penting dalam menanamkan spirit nasionalisme menuju amanah besar membangun kedaulatan dan kejayaan bangsa. Jika tidak belajar dari sejarah maka keburukan sejarah itu akan berulang pada setiap generasi.

Prof. Amien Rais dalam bukunya *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia* (2008) mengungkapkan berulangnya sejarah jatuh bangun negeri ini justru dipicu oleh kebodohan dan mental inlander sebagian elit yang memegang kekuasaan pada masanya. Akibatnya justru pada era reformasilah kita melihat penjualan aset negara BUMN secara instan dan besar-besaran terjadi. Saat oposisi elit bangsa meneriakkan kemerdekaan dan demokrasi, lalu ketika berkuasa mereka bebas menjual aset negara.

Persoalannya adalah hingga saat ini SDM Indonesia masih belum mencerminkan cita-cita pendidikan yang diharapkan. Misalnya kasus-kasus aktual, masih banyak ditemukan siswa yang menyontek dikala sedang menghadapi ujian, bersikap malas, tawuran antar sesama siswa, melakukan pergaulan bebas, terlibat narkoba, dan lain-lain.

Memang masalah ini tidak dapat digeneralisir, namun setidaknya ini fakta yang tidak boleh diabaikan karena kita tidak menginginkan anak bangsa kita kelak menjadi manusia yang tidak bermoral sebagaimana saat ini sering kita melihat tayangan TV yang mempertontonkan berita-berita seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, korupsi, dan penculikan, yang dilakukan tidak hanya oleh orang-orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak usia belasan.

Dalam kasus Indonesia, krisis karakter, mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan kemampuan untuk mengerahkan potensi masyarakat guna mencapai cita-cita bersama. Krisis karakter ini seperti penyakit akut yang terus menerus melemahkan jiwa bangsa, sehingga bangsa kita kehilangan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan bermartabat di tengah-tengah bangsa lain di dunia.

Mochtar Lubis dalam *Manusia Indonesia* (1977), memaparkan enam sifat manusia Indonesia, yaitu : (1) Munafik atau Hipokrit, (2) Enggan bertanggungjawab, (3) Bersikap dan Berperilaku Feodal, (4) Percaya Takhayul, (5) Artistik, berbakat seni, dan (6) Lemah watak atau karakternya.

Krisis karakter di Indonesia tercermin dalam banyak fenomena sosial ekonomi yang secara umum dampaknya menurunkan kualitas kehidupan masyarakat luas. Korupsi, mentalitas peminta-minta, konflik horizontal dengan kekerasan, suka mencari kambing hitam, kesenangan merusak diri sendiri, adalah beberapa ciri masyarakat yang mengalami krisis karakter.

Korupsi, korupsi adalah salah satu bentuk krisis karakter yang dampaknya sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Korupsi menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi bangsa ini, dan pada gilirannya menjadi sumber dari berkembangnya kemiskinan di Indonesia. Dalam pergaulan internasional, posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia telah menyebabkan bangsa ini kehilangan martabat di tengah-tengah bangsa lain. Korupsi terjadi karena orang-orang kehilangan beberapa karakter baik, terutama sekali kejujuran, pengendalian diri (*self regulation*), dan tanggung jawab sosial. Fakta dari jajak pendapat Kompas Litbang Kompas pada 25-27 Agustus 2010 menyebutkan bahwa 40% responden pernah melihat perilaku korupsi di sekitarnya, mulai dari kepengurusan administrasi, birokrasi hingga kependudukan. Lebih lanjut, dalam pandangan 89,4% responden, menyatakan pejabat di Negara ini telah terjankit budaya korupsi.

Hipokrisi atau Kemunafikan. Di atas telah disampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Namun, di pihak lain masyarakat Indonesia nampaknya adalah masyarakat yang sangat rajin melakukan kegiatan keagamaan. Bahkan tidak jarang orang Indonesia membanggakan diri sebagai masyarakat yang hidupnya sangat religius, dan sepanjang yang saya ketahui, tindakan korupsi, atau mengambil yang bukan haknya atau milik orang lain, seperti juga mencuri, dilarang oleh semua agama. Lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa menurut salah seorang pejabat KPK, lembaga negara yang paling korup adalah Departemen Agama. Apabila pernyataan tersebut didasarkan pada data yang dapat dipercaya, maka hal ini

adalah contoh yang paling nyata dari hipokrisi di Indonesia, di samping sekian banyak contoh yang lain. Hipokrisi atau kemunafikan mengandung arti kepura-puraan atau menyuruh atau menasihati orang lain melakukan hal yang baik namun dia sendiri melakukan hal sebaliknya.

Mentalitas makan siang gratis. Berkembangnya mentalitas ‘makan siang gratis’, adalah fenomena lain yang menunjukkan krisis karakter. Ini adalah sikap mental yang memandang bahwa kemajuan bisa diperoleh secara mudah, tanpa kerja keras, bisa dicapai dengan menandahkan tangan dan dengan menuntut kekiri dan kekanan.

Kesenangan mencari kambing hitam/ Enggan bertanggungjawab. Kebiasaan menimpakan kesalahan kepada orang lain, merupakan salah satu karakter yang menghambat kemajuan. Ini bukan kekuatan, namun kelemahan. Di masa lalu kita masih sering mendengar banyak orang menyatakan bahwa sulitnya Indonesia mencapai kemajuan lama sesudah kemerdekaan adalah akibat ulah penjajah Belanda. Dalam mencari penyebab rusaknya ekonomi Indonesia sekarang kita punya kambing hitam konspirasi Amerika Serikat, IMF, World Bank, dan akibat dominasi golongan minoritas. Akibatnya, bangsa kita kurang bisa belajar dari pengalamannya sendiri, dan kurang mampu berubah ke arah yang lebih baik karena merasa bahwa tak ada yang perlu diperbaiki pada diri kita.

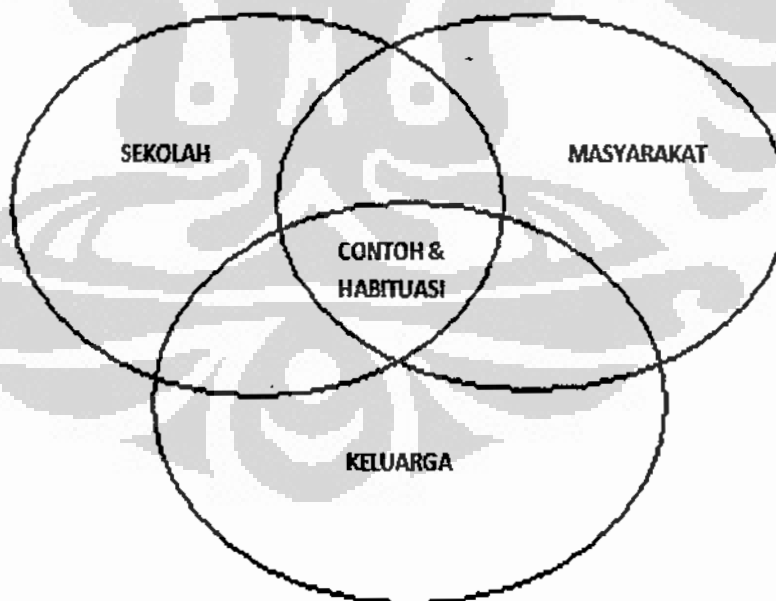
Salah satu penyebab melemahnya jiwa dan karakter nasionalisme bangsa, disinyalir karena adanya pengkaburan nilai-nilai Pancasila. Padahal, Pancasila adalah salah satu sarana penumbuhan semangat nasionalisme dan pembangunan karakter bangsa yang efektif. Dengan kurikulum dan pembelajaran Pancasila saat ini menjadikan guru kesulitan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan karakter bangsa para siswanya. Kurikulum yang ada hanya memungkinkan pengembangan karakter berupa hapalan (kognisi) sedangkan afeksi (penumbuhan mental) diabaikan.

Memperhatikan tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia diperlukan kepemimpinan nasional yang dapat berfungsi efektif dan tegar. Akan tetapi juga diperlukan masyarakat yang kuat jasmani dan rohani, karena kepemimpinan saja tanpa ada dukungan yang memadai sulit mewujudkan hal-hal yang kongkrit dan nyata. Untuk itulah, membaca ulang dan mempelajari sejarah

menjadi amat penting untuk tidak mengulang kejatuhan bangsa akibat kesalahan elit-elitnya. Sebuah wisdom mengatakan “*Those who don't learn from history, are doomed to repeat it*” (NN). Siapa pun yang tidak belajar dari sejarah, mereka pasti mengulanginya.

3.3. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, terlihat bahwa keadaan bangsa saat ini tengah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, yang ditandai dengan adanya disorientasi dan kemerosotan moral, yang diperparah dengan minimnya pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Oleh karena itu, pendidikan karakter dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang urgent dan harus mendapatkan perhatian khusus, tentunya internalisasi nilai-nilai pancasila ini harus dilakukan dengan metode yang baru. Diantara bentuk pendidikan karakter yang ideal tersebut, beberapa narasumber memiliki kesamaan jawaban, bahwa diperlukan adanya keteladanan dan pembiasaan (habitulasi) bagi anak untuk menumbuhkan karakter yang baik.



Gambar 3.4 Skema Keluarga-Sekolah-Masyarakat

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Pendidikan karakter ini tentunya berlangsung di rumah, sekolah dan masyarakat, dengan metoda yang berbeda-beda. Pendidikan karakter di rumah misalnya, dilakukan oleh orang tua dengan memberikan contoh kepada anaknya dan membiasakan anaknya hidup berdasarkan tuntunan agama, Pancasila dan budaya. Selain itu, orang tua juga menghindarkan penggunaan kekerasan dalam mendidik anak, karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi perkembangan jiwa dan karakter anak di kemudian hari.

Pendidikan karakter di sekolah, dirumuskan ke dalam budaya sekolah yang baik, dengan melalui pendekatan keteladanan dan habituasi kepada murid agar terbiasa hidup dalam kultur yang baik, sehingga akan terbentuk karakter yang baik sebagai hasil dari proses pendidikan. Pendidikan karakter di masyarakat diupayakan melalui sosialisasi media dan keteladanan dari para pemimpin mulai dari tingkat lokal yaitu RT hingga tingkat nasional. Dengan adanya kesadaran dari berbagai pihak dan dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter seperti keseriusan pemerintah, tanggungjawab dan kepedulian dari masing-masing pihak, maka pendidikan karakter yang menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, akan berlangsung dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan untuk membentuk manusia berkarakter Pancasila.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang disusun dalam bentuk matriks untuk memudahkan pembahasan lebih lanjut pada bab 4.

Tabel 3.5 Matriks Wawancara Terkait Pendidikan Karakter Sebagai Salah Satu Upaya Revitalisasi Pancasila

	Pemerintah	Kemendiknas	Akademi	Psikolog	Pegiat Media	Pemuka Agama	Budayawan	Intelijen
Kondisi Bangsa saat ini	Dengan Pancasila, bangsa ini tidak akan kehilangan karakternya.	Terjadi kelunturan karakter	dari level internasional hingga individual, mengalami disorientasi dan kemerosotan	Mengkhawatirkan, nilai-nilai positif mulai tidak terlibat	Mengkhawatirkan, terjadi kemerosotan moral, dan terpuruk dalam globalisasi	Karakter bangsa Indonesia terancam oleh transformasi masyarakat yang gagal	Sangat mengkhawatirkan	Stagnan, bahkan terjadi kemunduran, tidak ada lagi leader pancasilais
Urgensi Pendidikan Karakter	Harus mendapat perhatian khusus	Urgent, penting	Menjadi prioritas	Sangat urgent	Tidak dapat ditunda lagi	Urgent	Urgent dengan metode baru	Segera, tinggalkan cara-cara lama
Butuk Pendidikan Karakter Ideal	Mengintegrasikan pendidikan Pancasila, agama dan budaya	Melalui pendekatan habitiasi	Modeling, sosialisasi dan pendidikan berbasis karakter	Melalui keteladanan	Melalui mata pelajaran wajib dari TK hingga universitas	toleransi dalam pluralitas, peka terhadap penderitaan dan nasionalisme yang sehat	Merubah mind set melalui contoh, peristiwa dan create model baru kemudian dipraktikkan	Propaganda melalui audiovideo
Pendidikan Karakter di Rumah	Orang tua memberi contoh dengan perilaku dan kehidupan.	Berikan contoh, pembiasaan dan pendidikan yang baik. Bagi	Membentuk keluarga yang baik, beragama dan berilmu,	Arahan-anak untuk kreatif, penunji keinginannya,	Orang tua berperan penting	Perlu nya seminar untuk orang tua agar mampu mendidik anak	Orang tua harus well informed sehingga mampu mendidik anak	Beri penjelasan melalui audiovideo

	agama yang baik	unwealth family, pemerintah turut bertanggungjawab	sederhana	perluas wawasannya, jauhan kekerasan	Selain pendidikan agama, harus tetap ada pendidikan budi pekerti dan kewarganegaraan	Penerapan toleransi dalam pluralitas, mengajarkan kepekaan terhadap penderitaan dan memupuk nasionalisme yang sehat	Contoh-contoh kemudian dipraktekkan, pembelajaran sejarah bangsa atau cerita keseharian yang diframing.	Melalui mata pelajaran yang diaplikasikan dalam keseharian, kerjasama kampus dengan pihak lain terkait pendidikan karakter
Pendidikan Karakter di Sekolah	Kemendiknas bertanggungjawab merumuskan formulasi pendidikan karakter	Pendekatan habituasi, utamakan kebersihan, kedisiplinan, aturan, kejujuran, tidak perlu mata ajar baru	Penanaman dan pendidikan nilai ke anak didik	Diintegrasikan pada pelajaran yang sudah ada				
Pendidikan Karakter di Masyarakat	Menciptakan karakter baru lebih kritis, media yang obyektif	Aturan harus ditegakkan, adanya public trust, serta good media	Kebersamaan masyarakat dalam mengakkan system nilai	Harus ada pemimpin yang baik dan menjadi contoh	Masyarakat dan media tidak bertanggungjawab atas pendidikan karakter	Pemimpin masyarakat dan pemerintah harus mampu mendidik masyarakat, begitu juga peran media	Harus kuat di rumah dan di sekolah terlebih dahulu, karena masyarakat itu rumit, terlebih dengan adanya industrialisasi media	Propaganda melalui media dan budaya

Faktor Pendukung	Kemendiknas bertanggungjawab dengan tugasnya	Keseriusan satuan pendidikan	Adanya identitas nasional yang kuat	Pejabat pemerintah yang berkarakter	Kurikulum dan kualitas pengajar	nilai-nilai Pancasila masih berakar dalam hati masyarakat	Kepedulian dan policy pemerintah	Pendidikan yang kontinyu dan sosialisasi dengan metode baru
Faktor Penghambat	Kemendiknas mengabaikan tugasnya	Satuan pendidikan yang apatis	Lemahnya identitas nasional	Pejabat pemerintah yang bermoral rendah	Kualitas pengajar yang kurang	Kekerasan dan ketidakadilan	Pemerintah yang apatis dan cuek	Ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila

Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan narasumber.

BAB 4
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
SEBAGAI UPAYA REVITALISASI PANCASILA

Setelah mencermati gambaran situasi dan perkembangan yang sedang terjadi di lingkungan strategis, meliputi kehidupan bangsa pasca reformasi, eksistensi Pancasila dan Sistem Pendidikan Nasional, maka akan dilakukan upaya analisa dan pembahasan terkait program pendidikan karakter bangsa sebagai salah satu upaya revitalisasi Pancasila.

4.1. Urgensi Revitalisasi Pancasila

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila.

Disinilah letak kesalahan pemerintah pada masa lampau yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup dengan segala atribut doktrinasinya. Suatu ideologi seharusnya tidak hanya berada di tataran idea atau doktrin belaka, tetapi juga harus memiliki sistem untuk mengatur kehidupan dan memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan, dijaga eksistensinya dan disebarakan. Setidaknya ada 3 faktor yang memarjinalkan Pancasila, yaitu Pertama, Pancasila telah ternoda dengan upaya indoktrinasi karena selama 32 tahun dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, Pancasila kehilangan wibawa, ketika di era reformasi terjadi liberalisasi politik yang menghapuskan adanya asas tunggal. Dan ketiga, Pancasila semakin kehilangan

posisinya dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang mendorong sentimen kedaerahan.

Dengan perkataan lain, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Di titik inilah Pancasila membutuhkan suatu upaya restorasi atau istilahnya adalah revitalisasi. Revitalisasi Pancasila dalam kondisi keterpurukan sekarang ini merupakan tuntutan yang tepat dan urgent. Revitalisasi disini dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang untuk pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan zaman. Revitalisasi mencakup pula upaya menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang, yang diinternalisasikan dengan meletakkan masyarakat sebagai subyek yang kreatif, sehingga Pancasila menjadi sebuah solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Merevitalisasi Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan dan lain sebagainya. Membiarkan kondisi bangsa dalam keterpurukan sama halnya kita sengaja menjadikan Pancasila hanya sebagai alat politisasi untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Pada periode ini Pancasila selalu dijadikan alat legitimasi serta dipolitisir untuk meraih serta mempertahankan kekuasaan.

Revitalisasi Pancasila dapat diartikan sebagai usaha mengembalikan Pancasila kepada subjeknya yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan. Untuk merevitalisasi, maka Pancasila perlu diajarkan dalam kaitannya dengan pembuatan atau evaluasi atas kebijakan publik selain dibicarakan sebagai dasar negara. Pancasila dapat dihidupkan kembali sebagai nilai-nilai dasar yang memberi orientasi dalam pembuatan kebijakan publik. Pancasila adalah solusi alternatif bagi terwujudnya Negara Kesatuan Indonesia, yang telah teruji semenjak masa kemerdekaan sampai dengan masa reformasi.

Meskipun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam perjalanannya ada berbagai macam cobaan dan tantangan yang senantiasa datang dan mengiringi

dalam setiap gerak dan langkah dinamika bangsa ini. Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena Pancasila adalah alat pemersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga setiap upaya untuk menggantinya akan selalu berhadapan dengan seluruh kekuatan Indonesia secara menyeluruh.

Revitalisasi tentu merupakan suatu upaya sistematis dalam rangka kembali membangun spirit nasionalisme yang selama ini telah mengalami kemunduran sehingga seluruh persoalan kebangsaan seperti konflik etnis, agama, serta permasalahan dalam bentuk apapun, bisa dengan mudah teratasi. Ini menjadi agenda penting yang harus secepatnya dilakukan ketika semangat persatuan menjadi barang langka di negeri ini.

Pada sisi yang lain revitalisasi juga merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat bahwa kita hidup di Indonesia yang sangat beraneka ragam dalam berbagai hal tidak hanya agama, bahasa maupun budaya. Hal ini menjadi penting mengingat pancasila sebagai ideologi bangsa, telah mulai dilupakan oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari serangkaian aksi yang tidak lagi mengindahkan prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Terjangan globalisasi dan menguatnya politik identitas dalam tahun-tahun terakhir menyadarkan kita bahwa kelangsungan hidup bangsa bisa terancam. Menguatnya praktik korupsi, intimidasi, kekerasan dan konflik menjadi sumber dari kehancuran NKRI. Jika praktik-praktik tersebut tidak segera dihentikan, maka rakyat akan menderita dan menyerahkan semuanya pada aparat pemerintahan yang bertanggung jawab. Akhirnya Pemerintah pun diharapkan mampu menjadi inisiator dan titik pusat revitalisasi Pancasila. Seperti yang diungkapkan Budiarto Shambazy dalam wawancaranya,

Bangsa kita belum mempunyai kemandirian yang memadai untuk menghadapi persaingan politik, ekonomi, dan kultural pada tingkat global. Penyebabnya karena bangsa kita terlalu lama dikekang oleh kekuasaan Orde Baru yang memiskinkan dan membodohi rakyat. Kekangan Orde Baru memang berkurang setelah terjadinya Reformasi tahun 1998, tetapi pemiskinan dan pembodohan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun telah terlanjur membuat bangsa kita terpuruk dalam kompetisi global. Sistem pendidikan kita tidak lagi memberikan bekal yang memadai untuk murid TK sampai mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kewarga negaraan serta budi pekerti.

Sehubungan dengan hal tersebut, revitalisasi Pancasila harus dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu pada tataran ide dan praksis. Dalam tataran ide, hal yang paling penting dilakukan adalah menjawab sikap alergi masyarakat terhadap Pancasila. Karena itu, gotong royong dan musyawarah bisa menjadi cara bagi representasi Pancasila. Gotong royong dan musyawarah juga bisa dijadikan sumber dalam rangka revitalisasi Pancasila.

Dalam tataran praksis, utamanya menyangkut relasi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, revitalisasi Pancasila harus dimulai dengan membangkitkan optimisme publik. Misalnya, kepemimpinan nasional harus menegaskan kembali bahwa Negara Republik Indonesia adalah bukan negara agama. Kepemimpinan nasional harus menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negeri yang kebebasannya berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.

Revitalisasi Pancasila mendesak karena beberapa alasan - dalam kaitan ini, secara intelijen, kita membicarakan dinamika ancaman- internal dan eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya masa reformasi, beberapa faktor pemersatu bangsa jelas mengalami kemerosotan. Yang tak kurang pentingnya adalah serbuan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan disorientasi sosial dan moral, tetapi bahkan mengakibatkan memudarnya identitas nasional Negara RI.

Revitalisasi pancasila juga dapat dilakukan dengan cara manifestasi identitas nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai wawasan, antara lain; spiritual yang berlandaskan etik, estetika, dan religiusitas sebagai dasar dan arah pengembangan profesi untuk pembangunan nasional yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme untuk menemukan jati diri bangsa serta sadar dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa globalisasi dan mampu mengatasi, menangkap tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berbangsa dan bernegara.

Kelemahan dalam pengembangan, penjabaran dan implementasi Pancasila yang kurang "membumi" menjadi magnet tersendiri bagi ancaman secara konstitusional seperti mengganti Pancasila dengan ideologi lain, menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak mengacu pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila tidak diaktualisasikan, mengaburkan arti Pancasila dan

memanipulasi Pancasila, serta ancaman secara inkonstitusional seperti tekanan ekonomi, krisis multidimensional, korupsi, huru-hara dan kerusuhan massa.

Keseluruhan kelemahan ini berpangkal pada belum dihayatinya dan diamalkannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari setiap warga Negara. Termasuk Kebijakan MPR untuk melakukan sosialisasi mengenai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Alasannya adalah karena dalam praktik kehidupan keseharian, sangat banyak orang tahu, bahkan sering berbicara tentang perbuatan yang baik, tetapi ternyata tidak dilakukannya. Sebaliknya, semua orang sangat paham tentang perbuatan yang buruk, tetapi justru itulah yang dilakukannya. Penyebabnya tiada lain karena karakternya lemah.

Dewasa ini masih terbuka peluang dan waktu untuk mengimplementasikan Etika Kehidupan Berbangsa sebagai salah satu wujud pembentukan karakter bangsa demi stabilitas dan kelanjutan pembangunan bangsa dan negara. Solusi terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan di atas adalah dengan kembali ke nilai-nilai Pancasila.

Pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Membumikan Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Pancasila yang sesungguhnya berada dalam tataran filsafat harus diturunkan ke dalam hal-hal yang sifatnya implementatif. Sebagai ilustrasi nilai sila kedua Pancasila harus diimplementatifkan melalui penegakan hukum yang adil dan tegas. Contoh, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) harus tegas dan tanpa kompromi menindak para pelaku kejahatan, termasuk koruptor. Jadi membumikan Pancasila salah satunya adalah dengan penegakan hukum secara tegas. Tanpa penegakkan hukum yang tegas, maka Pancasila hanya rangkaian kata-kata tanpa makna dan nilai serta tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

Kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun non formal (masyarakat). Pada tataran pendidikan formal perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (dulu Pendidikan Moral Pancasila) di sekolah. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini

dianggap oleh banyak kalangan “gagal” sebagai media penanaman nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya sekedar menyampaikan sejumlah pengetahuan (ranah kognitif) sedangkan ranah afektif dan psikomotorik masih kurang diperhatikan. Ini berakibat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan cenderung menjenuhkan siswa. Hal ini diperparah dengan adanya anomali antara nilai positif di kelas tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Dua realitas yang sangat kontras dan kontradiktif. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus dikemas sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi alat penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda.

Pada tataran masyarakat, internalisasi Pancasila gagal menjadikan masyarakat Pancasila. Pola penataran P4 yang dipakai sebagai pendekatan rezim Orde Baru juga gagal mengantarkan masyarakat Pancasila. Hal ini disebabkan Pancasila justru dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan. Ketika reformasi seperti saat ini, Pancasila justru semakin jauh dari perbincangan, baik oleh masyarakat maupun para elit politik. Pancasila seakan semakin menjauh dari keseharian kita. Sungguh ironis sebagai bangsa pejuang yang dengan susah payah para pendiri negara (*founding father*) menggali nilai-nilai Pancasila dari budaya bangsa, kini semakin pudar dan tersisih oleh hiruk pikuk reformasi yang belum mampu menyelesaikan krisis multidimensional yang dialami bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu perlu dicari suatu model (pendekatan) internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat yang tepat dan dapat diterima, seperti melalui pendekatan agama dan budaya.

Ketiga, keteladanan dari para pemimpin, baik pemimpin formal (pejabat negara) maupun informal (tokoh masyarakat). Dengan keteladanan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikutinya. Hal ini disebabkan masyarakat kita masih kental dengan budaya paternalistik yang cenderung mengikuti perilaku pemimpinnya. Seperti diungkapkan Seto Mulyadi dalam wawancaranya,

Jadi dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter baik, karena para pemimpin inilah yang bisa mengubah dunia. Kenapa sekarang banyak pemimpin yang memiliki karakter kurang positif yang akhirnya malah merusak tatanan yang ada dalam masyarakat ini. Jadi pemimpin itu harus

arif, bijak, kalau ada masalah dihadapi dengan kreatif, kecerdasan moral dan spiritual yang baik, maka masyarakat pun akan baik.

Oleh karena itu, kita harus melandaskan diri pada Pancasila dalam menyelesaikan setiap masalah kebangsaan yang kita hadapi. Tentu saja ini memerlukan proses. AS yang merdeka tahun 1776, dengan didasari liberty, equality dan fraternity, memerlukan waktu ratusan tahun untuk sampai kepada bentuknya yang sekarang. Namun hal ini bukanlah justifikasi untuk menghambat revitalisasi Pancasila. Pancasila harus dengan segera dihidupkan kembali.

Suatu ideologi atau dasar negara, dapat direvitalisasi, kalau dapat diuji terus menerus dengan dasar negara bangsa lain –dalam artian Pancasila harus terus menerus dapat diuji- dan dapat diuji terus menerus dengan realitas yang berubah dan berkembang –dalam artian Pancasila menjadi *working ideology/living ideology*-. Bahwa setiap bangsa, kelompok, bahkan individu memerlukan nilai-nilai yang dijadikan dasar dan pegangan dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai itulah yang menjadi pendorong dan penggerak, penentu arah yang dituju sekaligus filter dalam menghadapi aneka alternatif yang dihadapi. Oleh karena itu, nilai ini harus disepakati kemudian dihayati dan diamalkan. Inilah yang menjadi latar belakang revitalisasi, karena Pancasila baru disepakati dan belum diamalkan dengan sungguh-sungguh.

Pancasila yang merupakan ideologi terbuka, harus terus melakukan persesuaian dan pengadopsian berbagai perkembangan yang positif dari berbagai ideologi dunia. Oleh karena itu penyaringan/filterisasi budaya harus terus dilakukan agar bangsa Indonesia tidak tergilas dan terombang-ambing dalam situasi persaingan politik global yang tidak menentu tersebut. Bahkan, Irawan Soekarno dalam wawancaranya, mengutip ucapan Bung Karno, “*usir itu budaya ngak ngek ngok. saring itu, usir itu yang tidak betul-tidak betul itu.*”

Globalisasi bagi bangsa Indonesia membawa arus yang begitu besar dampaknya, baik positif maupun negatif, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, investasi, ekonomi, kualitas produk, budaya, sosial, bahkan ideologi. Hal ini juga disadari sepenuhnya oleh Julian Aldrin Pasha, dalam wawancaranya,

Globalisasi yang positif pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena globalisasi sesuai dengan sifat Pancasila yang terbuka

dan dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Sebagai contoh, penggunaan berbagai bentuk alat komunikasi, semakin menjadikan dunia ini menjadi kecil. Tidak ada batas-batas lagi dalam mengakses informasi, sehingga kita akan senantiasa mengikuti perubahan global. Memang, ada efek negatif yang ditimbulkan dari globalisasi, dan itu sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu, bangsa kita harus memiliki karakter yang kuat agar tidak mudah terombang ambing oleh globalisasi yang negatif, baik internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, salah satu yang menjadi fokus dalam tesis ini adalah efek negatif globalisasi yang membawa perubahan maupun pergeseran sistem nilai Pancasila. Gejolak reformasi melahirkan fenomena yang mengandung kecenderungan sebagai masalah fundamental, yang menuntut alternatif pemecahan. Dinamika liberalisasi global dapat memacu masalah fundamental sebagai tantangan dan ancaman atas integritas NKRI.

Globalisasi juga telah membawa bangsa Indonesia ke tengah-tengah persaingan ideologi dunia yang saling berebut pengaruh dan kepentingan. Kaum liberal yang menghendaki negara-negara berkembang untuk melakukan perubahan sistem politik, ekonomi, sosial dan keamanan, sehingga mereka akan mampu leluasa masuk ke wilayah Indonesia untuk menjalankan kepentingannya, sementara di satu sisi, ada kelompok sosialis demokratis (sosdem) yang berupaya menghadang laju liberalisme beserta variannya, dan kelompok Islam radikal yang menjadikan Indonesia sebagai basis perjuangannya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tentu saja ini menjadi ancaman bagi ideologi kita, seperti yang diungkapkan Irawan Soekarno dalam wawancaranya,

Ada clash of civilization disitu, seperti Huntington bilang itu. Globalisasi itu menjadi tantangan berat bagi kita. Nilai-nilai sana masuk kesini dan nilai-nilai disini tertindas habis. Contoh-contoh empiris sejarah sudah membuktikan, dan itu berlanjut.

Tabel 4.1 Perbandingan Inti Pancasila dengan ideologi lain

	Ketuhanan	Kemanusiaan	Persatuan	Demokrasi	Keadilan sosial
Pancasila	Setiap orang bebas memeluk	Persaudaraan, saling menghormati	Kesatuan antara tempat-	Musyawaharh mufakat, kekeluargaan	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

	agama dan kepercayaan masing-masing, saling bertoleransi	dan menyayangi	wilayah-geopolitik. perdamaian		
Liberalisme	Spiritualitas tidak penting	Hak individu adalah absolut	Tidak mengutamakan kesatuan tempat, ekspansif	Voting/suara terbanyak	Pemilik modal adalah yang berkuasa
Sosialisme	Spiritualitas tidak penting	Hak kolektif adalah absolut	Tidak mengutamakan kesatuan tempat, ekspansif	Keputusan penguasa adalah keputusan bersama	Kesejahteraan bersama
Radikalisme Islam	Agama merupakan pembedaan /dasar tertinggi	Agama adalah kebenaran absolut	Tidak mengutamakan kesatuan tempat-orang	Berdasarkan pemimpin atau ulama	Kesejahteraan milik umat yang sudah ditentukan rezekinya

Sumber : Diolah dari pembahasan bab sebelumnya.

Maraknya sekolah internasional di Indonesia, dalam pandangan intelijen juga harus diwaspadai sebagai upaya penyebaran ideologi dan budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Pancasila. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus dari pemerintah melalui Kemendiknas untuk memonitor penyelenggaraan sekolah internasional, karena kita tidak mungkin bisa melarangnya, khususnya dalam era globalisasi ini.

Menghadapi arus globalisasi yang semakin pesat ini, keurgensian Pancasila sebagai dasar negara semakin dibutuhkan. Pancasila dengan sifat keterbukaannya melalui tafsir-tafsir baru kita jadikan pengawal dan pemandu kita dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Revitalisasi Pancasila perlu menekankan pada orientasi ideologi yang mewujudkan kemajuan yang pesat, peningkatan kesejahteraan yang tinggi dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan tolok ukur evaluasi penyelenggaraan Negara oleh karena itu, dalam revitalisasi Pancasila harus juga dilihat bahwa segenap pengaturan dan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus merupakan derivasi dari Pancasila.

Beberapa tahapan revitalisasi Pancasila dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, mengkaji kembali Pancasila dengan menempatkannya sebagai *grundnorm* untuk mengevaluasi secara kritis berbagai produk politis Negara, sehingga Pancasila akan terlihat lebih dinamis. Kedua, revitalisasi Pancasila harus diiringi upaya pencapaian konsensus dan dialog secara simultan diantara komponen bangsa untuk menilai Pancasila dan pelaksanaannya. Dan ketiga, perlu dilakukan perbaikan metode internalisasi Pancasila ke segenap masyarakat Indonesia, seperti dengan pengintegrasian pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional.

Pelaksanaan atau aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Aktualisasi Obyektif yang berupa pelaksanaan nilai Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif (pendidikan, kesehatan), yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya yang direalisasikan dalam bentuk perundang-undangan dan produk kebijakan lainnya, serta aktualisasi subyektif yang berupa pelaksanaan nilai Pancasila dalam setiap pribadi warganegara Indonesia. Aktualisasi nilai Pancasila secara subyektif justru lebih penting daripada aktualisasi obyektif, karena aktualisasi subyektif merupakan persyaratan keberhasilan untuk aktualisasi obyektif. Nilai-nilai luhur Pancasila yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup beragama.
 - c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b. Saling mencintai sesama manusia.
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 - d. Tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.
 - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
- a. Menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 - c. Cinta tanah air dan bangsa.
 - d. Bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.
 - e. Memiliki rasa persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - f. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e. Dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah.
 - f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b. Bersikap adil.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak-hak orang lain.
 - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
 - f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 - g. Tidak bersifat boros.
 - h. Tidak bergaya hidup mewah.
 - i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
 - j. Suka berkerja keras.
 - k. Menghargai hasil karya orang lain.
 - l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Mari kita bedah satu persatu dengan pemahaman yang baru. Dan pemahaman ini bisa saja berbeda untuk setiap orang karena dalam memaknai sesuatu kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda.

Ketuhanan Yang Maha Esa

Ini adalah wilayah yang sangat pribadi antara manusia dengan Tuhan-nya. Segala macam pemahaman ataupun konsep tentang Tuhan berada di wilayah ini.

Kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa pemahaman kita paling benar. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan-pun patut kita hormati. Dan pada dasarnya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, sebenarnya sudah mengakui keberadaan Tuhan dengan tidak mengakui-Nya walaupun dengan konsep yang berbeda. Dan bila kita mencoba untuk memaksakan kehendak, maka yang terjadi adalah kemunafikan. Kita bisa menjual agama dan Tuhan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Mereka yang pendapatnya berlainan akan dibungkam. Dan bila manusia sudah tidak bebas lagi dan kehilangan wilayah pribadinya, ia akan kehilangan pula kecerdasannya untuk berpikir dan hati nuraninya untuk bertindak.

Mereka yang sudah kehilangan hati nuraninya selalu mencari pembenaran atau kambing hitam atas kesalahan yang ia lakukan dibanding melakukan introspeksi diri. Seperti bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini akibat pengrusakan lingkungan dianggap adalah cobaan dari Tuhan dan manusia harus selalu sabar. Rakyat hanya duduk diam dan selalu menyalahkan pemerintah atas ketidakberesan negeri ini. Pejabatpun dengan santai duduk di kursi empuk meminta rakyat untuk bersabar dan saling melempar tanggungjawab ke pejabat lainnya atas kondisi negeri ini.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Langkah berikutnya bila kita bisa memahami dan mengamalkan sila pertama, dengan sendirinya kemanusiaan dalam diri kita akan berkembang. Kita akan peduli dengan sesama, tidak merasa paling benar, tidak main hakim sendiri dan tidak serakah. Karena sila pertama berusaha untuk menanamkan Cinta di hati setiap umat manusia. Hubungan antara manusia dengan manusia dan lingkungan sekitarnya akan menjadi harmonis bila dilandasi dengan rasa Cinta. Yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Dari tayangan dan berbagai acara-acara di televisi sudah mencerminkan hal tersebut. Penderitaan orang dipertontonkan dan kita menjadi terhibur. Kekerasan menjadi tontonan sehari-hari. Semua itu merupakan pembodohan dan menjauhkan diri kita pada kualitas kemanusiaan.

Kemanusiaan bukan hanya fisik saja tetapi juga jiwa. Orang dengan mudah menggunakan jubah agama atau melakukan ritual agama agar dipandang bermoral atau berakhlak oleh lingkungannya. Dosa bisa dihapuskan hanya dengan

membayar sejumlah uang kepada mereka yang mengaku sebagai calo Tuhan dan kemudian melakukan korupsi kembali. Masyarakat dianjurkan untuk mengikuti program berbayar tertentu untuk memperbanyak amal sehingga bisa masuk surga.

Seseorang bisa membunuh berdasarkan keyakinan yang ia miliki. Dan semua itu terjadi karena kita selalu melihat perbedaan fisik saja tanpa melihat esensi kemanusiaan itu sendiri. Keragaman di Indonesia sangat rentan akan hal-hal seperti ini bila kemanusiaan dalam diri rakyatnya belum berkembang.

Persatuan Indonesia

Persatuan bisa terjadi kalau kemanusiaan dalam diri kita sudah berkembang sehingga kita bisa bekerjasama bahu membahu membangun Indonesia. Bagaimana kita bisa saling bekerjasama bila melihat yang berbeda langsung kita curigai. Selama persatuan tidak terjadi, dengan mudah orang asing akan memporak-porandakan negara ini. Segala kekayaan kita akan dikuras habis tanpa kita sadari.

Menggunakan barang impor sudah menjadi kebanggaan bagi kita untuk menggunakannya tanpa menyadari bahwa barang-barang tersebut akan mematikan industri lokal kita. Segala macam makanan dan baju yang dapat kita produksi sendiri semuanya harus diimpor. Di sini bukan melarang secara mutlak produk impor, tetapi pemakaian secara berlebihan yang disayangkan. Karena akibat yang ditimbulkan adalah manusia Indonesia tidak menjadi produktif lagi dan menjadi pengkonsumsi yang memperkaya negara lain. Ditambah di berbagai media, semua sudah mengatasnamakan brand (merk) nya masing-masing bila ingin berbuat sesuatu kebaikan. Jalan-jalan sudah dipenuhi oleh iklan untuk menjejali pikiran rakyat seolah-olah pemerintah atau negara ini sudah tidak ada lagi. Jadi yang mempersatukan rakyat saat ini adalah materi, tidak ada lagi Persatuan Indonesia.

Memasuki sila ketiga ini, diharapkan semua bisa bekerjasama tanpa pandang bulu untuk membangun kebersamaan, membangun Indonesia untuk kejayaan. Bila kita bersatu kita akan menjadi kuat, sebaliknya kita akan runtuh. Inilah inti sila ketiga, untuk membangun pertahanan demi menjaga apa yang menjadi milik kita bersama. Pertahanan yang bukan saja menghadapi serangan dari luar, tetapi juga dari dalam.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan

Pemimpin lahir dari rakyat. Kualitas rakyat mempengaruhi kualitas pemimpin. Bila rakyat cerdas, negara ini akan menghasilkan seorang pemimpin yang akan memimpin dengan hikmat kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh pemimpin yang tamak kekuasaan. Kualitas pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya sendiri. Jadi Rakyat harus dibangkitkan dan dipintarkan. Rakyat yang pintar akan bisa memperbaiki kondisi seburuk apapun. Rakyat yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang cerdas. Siaran di televisi dan berbagai media harus membantu hal ini, bukan hanya mementingkan materi sehingga rakyat menjadi bodoh. Kita perlu seorang pemimpin atau perwakilan untuk mengatur negara ini dengan baik, mengatur jalannya pemerintah, kerjasama dengan pihak lain dan mengolah sumber-sumber yang kita miliki. Oleh karena itu sila ini bertujuan untuk selalu mengingatkan bahwa kekuatan rakyat adalah segalanya. Bila kekuatan rakyat lemah, mudah ditakut-takuti atau dibodoh-bodohi, pemimpin yang lahirpun akan seperti itu.

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Inti dari sila kelima adalah untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada seorangpun atau kelompok manapun yang boleh menguasai seluruh alam dan kekayaan di Indonesia. Semuanya harus digunakan untuk kepentingan Rakyat Indonesia, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Yang harus digarisbawahi, keadilan sosial yang dimaksud bukan berdasarkan kepada paham sosialisme, tapi didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Romo Magnis bahkan menegaskan dalam wawancaranya :

tentang pancasila, menurut saya kita harus belajar misalnya pluralism di sila yang pertama, misalnya perasaan kuat mengenai yang menolak ketidaksamaan, yang menolak adanya paksaan, sila yang kelima dan sebagainya, tetapi sila ketiga misalnya bagaimana generasi berikutnya merasa diri orang Indonesia, merasa bangga menjadi orang Indonesia, merasa besatu menjadi orang Indonesia, nah itu semua pertanyaan yang penting. Sila yang kedua bagi saya kunci, karena itu merupakan bottom line bagi yang paling bawah, mari kita semua bertekad, bersumpah yang sama, mari kita berlaku secara beradab dalam situasi apapun, itu bottom line, kalau itu tercapai itu bagus, banyak masalah kita kenapa orang dalam kebingungan membawa diri secara beradab, ikut melakukan yang

dia kemudian merasa malu kalau orang lain menanyakannya. Jadi pancasila memang berguna.

Senada dengan pernyataan Romo Magnis, Seto Mulyadi juga menyinggung beberapa sila dalam wawancaranya :

sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya berarti menjalankan ibadah agamanya saja, kalau Islam bukan hanya Hablum minallah, akan tetapi juga Hablum minnanaas, itu yang harus ditekankan betul-betul. Lalu sila kedua kemanusiaan yang Adil dan Beradab, itu harus menghargai hak-hak asasi manusia, dan perlu lebih diteladankan mulai dari orang tua. Orang tua seringkali berbicara tentang HAM..HAM...HAM, tapi hak anak di rumah dilanggar. Itu yang sebetulnya menciptakan budaya kekerasan, karena kekerasan diajarkan sejak usia dini. Menyelesaikan sesuatu tidak dengan dialog, musyawarah, tetapi selalu dengan kekerasan, kekuatan, kekuasaan.

Melalui pemahaman inilah Pancasila dikembangkan dalam semangat demokrasi yang secara konsensual akan dapat mengembangkan nilai praktisnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba pluralistik. Selain itu melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana telah dirintis dan ditradisikan oleh para pendahulu, merupakan suatu kewajiban etis dan moral yang perlu diyakinkan oleh generasi sekarang.

Dalam situasi semacam itu, terdapat gagasan bagaimana melakukan revitalisasi dan reinterpretasi terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, baik sebagai kontrak sosial maupun sebagai ideologi. Untuk itu, ada sejumlah asumsi yang bisa kita jadikan titik tolak. Pertama, perubahan-perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kedua, ada nilai-nilai lama yang bisa kita jadikan pegangan di dalam mengarungi perubahan-perubahan itu. Ketiga, ada nilai-nilai baru yang baik yang bisa kita adopsi. Berangkat dari asumsi-asumsi seperti itu, di dalam melakukan revitalisasi dan reinterpretasi terhadap Pancasila kita bisa menggunakan prinsip '*continuity and change*'. Prinsip demikian menempatkan Pancasila tidak di dalam ruang yang vakum, melainkan di dalam ruang yang tidak lepas dari interaksi dengan nilai-nilai lain yang berkembang di dalam masyarakat, termasuk di dalam masyarakat global.

Romo Magnis dalam wawancaranya mengatakan

Dan saya melihat dalam pendidikan karakter, tentu semua lima sila itu penting, tetapi yang paling rare adalah 3, yang pertama adalah toleransi dan kemampuan untuk hidup dalam pluralitas, anak harus mampu, mantap dan yakin dalam identitas budaya dan religiusnya, biar dia bisa bergaul bermain bersama dengan anak yang identitasnya berbeda, dengan enak. Yang kedua, barangkali paling penting adalah mendidik anak supaya menjadi peka terhadap penderitaan, orang miskin, orang tertindas, orang tahanan, supaya tidak menjadi keras hati, itu akan sangat membantu Pancasila, misal keadilan social, tidak tahan melihat bangsa ini menderita. Yang ketiga adalah nasionalisme yang sehat. Keindonesiaan itu penting jadi anak harus dibantu supaya bangga dan gembira dalam keindonesiaannya.

Melalui prinsip semacam itu, Indonesia tetap memiliki nilai-nilai yang dijadikan pegangan di dalam mengarungi perubahan-perubahan itu. Selain itu Indonesia juga bisa melakukan adaptasi-adaptasi terhadap lingkungan yang terus menerus mengalami perubahan, terlebih dalam era globalisasi yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap perubahan karakter bangsa.

4.2. Program Pendidikan Karakter Bangsa

Dalam upaya merevitalisasi Pancasila sebagai dasar negara maka perlu disiapkan lahirnya generasi sadar dan terdidik. Sadar dalam arti generasi yang hati nuraninya selalu merasa terpanggil untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, terdidik dalam arti generasi yang mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian akan dimunculkan generasi yang mempunyai ide-ide segar dalam mengembangkan Pancasila.

Hanya dengan pendidikan bertahap dan berkelanjutan, generasi sadar dan terdidik akan dibentuk, yaitu yang mengarah pada dua aspek. Pertama, pendidikan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman akademis, keterampilan profesional, dan kedalaman intelektual, kepatuhan kepada nilai-nilai (*it is matter of having*). Kedua, pendidikan untuk membentuk jatidiri menjadi sarjana yang selalu komitmen dengan kepentingan bangsa (*it is matter of being*).

Kemasan kurikuler pendidikan tentang Pancasila secara historis-kurikuler telah mengalami pasang surut (Winataputra, 2001). Mengacu pada kurikulum sekolah, mulai dari Civics tahun 1962, Pendidikan Kewargaan Negara dan

Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003. Sementara itu di perguruan tinggi sudah dikenal Pancasila dan Kewiraan Nasional tahun 1960-an, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan tahun 1985, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003. Untuk Indonesia pada saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, yakni dalam Pasal 37 menggariskan program kurikuler pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.

Semua proses pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural. Karena itu inti dari pendidikan, termasuk pendidikan karakter adalah belajar atau *learning*. Dalam konteks pendidikan formal dan nonformal, proses belajar merupakan misi utama dari proses pembelajaran atau *instruction*. Secara normatif, dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 20/ 2003 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa "Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar". Satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, sekolah tinggi, institut, dan universitas) merupakan suatu lingkungan belajar pendidikan formal yang terorganisasikan mengikuti *legal framework* yang ada. Oleh karena itu proses belajar dan pembelajaran harus diartikan sebagai proses interaksi sosiokultural-edukatif dalam konteks satuan pendidikan, bukan hanya dibatasi pada konteks klasikal mata pelajaran atau mata kuliah.

Dalam konteks itu, maka pendidikan karakter berdasarkan Pancasila dalam pengertian generik, harus diwujudkan dalam keseluruhan proses pembelajaran, bukan hanya dalam pembelajaran mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Kajian Pancasila. Oleh karena itu, konsep kebudayaan Pancasila yang menjadi tema sandingan pendidikan karakter berdasarkan Pancasila, menjadi sangat relevan dalam upaya menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai unsur pembangunan watak dan peradaban Indonesia yang bermartabat dalam konteks multikulturalisme Indonesia. Dalam konteks itu maka satuan pendidikan seyogyanya dikembangkan sebagai satuan

sosiokultural-edukatif yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan satuan pendidikan yang membudayakan dan mencerdaskan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dapat dirasakan 2 masalah besar dan mendasar, yaitu masalah yang urgent dan masalah yang important. Masalah yang urgent adalah masalah yang tampak, misal kenakalan remaja, kriminalitas, KDRT, KKN. Sementara masalah important adalah masalah yang tak tampak di permukaan, tetapi dapat dirasakan, misalnya krisis budi pekerti, rendahnya keteladanan, lunturnya nurani dan hilangnya jati diri.

Memang harus diakui, bahwa dalam masyarakat terjadi perubahan nilai. Namun nilai-nilai dasar yang universal, dalam kaitan ini adalah Pancasila, harus menjadi filter untuk menerima atau menolak nilai-nilai baru yang ditawarkan itu. Selanjutnya, karena nilai-nilai yang dihayati itu akan membentuk suatu karakter, maka nilai-nilai yang dihayati seseorang atau suatu bangsa dapat diukur melalui karakternya. Perubahan yang terjadi pada karakter, bisa saja karena perubahan nilai yang dianut atas dasar kesadaran mereka, dan bisa juga karena lupa atau terpedaya oleh salah satu nilai-nilai tersebut, dan disinilah diperlukan *nation and character building* yang tidak lain adalah revitalisasi Pancasila. Ini berarti upaya untuk memperkuat ingatan dan meningkatkan pengamalan tentang nilai-nilai luhur yang telah kita sepakati bersama dan menjadi landasan pembentukan bangsa, di samping membuka diri untuk menerima nilai-nilai baru, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Rumusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu memiliki 2 (dua) arti penting yaitu membangun manusia Indonesia yang cerdas dan berbudaya. Pengertian cerdas harus dimaknai, bukan saja sebagai kemampuan dan kapasitas untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kapasitas untuk menguasai ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang manusiawi, tetapi cerdas emosional artinya memiliki kecerdasan emosional yang dengan bahasa umum disebut sebagai berkarakter mulia atau berbudi luhur, berakhlak mulia. Sedangkan berbudaya memiliki makna sebagai kemampuan dan kapasitas untuk menangkap dan mengembangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang beradab dalam sikap dan tindakan berbangsa dan bernegara (karakter bangsa).

Barangkali untuk kedua hal itulah, baik pemerintah maupun masyarakat relatif masih setengah hati untuk mengembangkannya secara utuh. Secara jujur diakui bahwa pemerintah telah berupaya keras, bahkan di tahun 2010 ini menaikan APBN pendidikan nasional menjadi 20 persen, tetapi setuju atau tidak kenyataannya secara umum negara (pemerintah) belum mampu menyediakan kesempatan dan akses pendidikan bermutu secara adil bagi semua warga negara dengan muatan lahirnya generasi yang berkarakter.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa kekuatan pasar telah menerobos dunia pendidikan di tanah air, sehingga muncul privatisasi sekolah dan komersialisasi pendidikan yang menjadikan sekolah mahal. Bukan hanya itu, inilah salah satu muatan yang diteriaki orang sebagai bentuk-bentuk liberalisme baru atau neo liberalisme. Sebagai contoh adalah maraknya sekolah internasional di berbagai wilayah di Indonesia seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Daftar Sekolah Internasional Di Indonesia

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NO. DAN TGL. SK	ALAMAT
1.	DKI JAKARTA	1. The British Int. School 1.384.522.7-013	No. 07/0/1977 10 Januari 1977	Jl. Kebon Nanas, Kebayoran Lama Jakarta Selatan Telp. 5480858. 5484376
		2. Jakarta Int. School 1.060.374.4.053	No. 348/0/1977 12 Agustus 1977	Jl. Terogong Raya 33, Cilandak Jakarta Selatan Telp. 762555, 7692555
		3. De Nederlandse Int. School 1.062.586.1-053	No. 0624/0/197 26 Desember 1977	Jl. Anggrek Neli Murni No. 65 Jakarta Barat Telp.
		4. Gandhi Memorial Int. School	No. 014/0/197701 Pebruari 1977	Jl. Pangdaran IX Blok B4, Ancol Barat Jakarta Utara Telp. 366215 - 355937
		5. Sekolah Jepang Jakarta	No. 0201/0/1979 5 September 1979	Jl. Ragunan I, Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp. 7805386 - 7805388
		6. Deutsche Int. Schule 1.374.467.7-021	No. 0195/0/1978 20 Juni 1978	Jl. Sam Ratulangi 9 - 15 Jakarta Pusat Telp.
		7. Sekolah Perancis Jakarta	No. 0119/0/1979 3 September 1979	Jl. Junaedi 32, Cipete Jakarta Selatan Telp. 790351

		8. Pakistan Embassy School	No. 042/0/1978 14 Maret 1978	Jl. Dempo I, Matraman Jakarta Pusat Telp. 4214137
		9. Nort Jakarta Iny. School	No. 0418/0/1990 15 Juni 1990	Jl. Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. 4512412 - 4500683
		10. Jakarta Int. Korean School 1.583.322.1.011	No. 0694/0/1990 24 Nopember 1990	Jl. Jend. Gatot Subroto 47-48 Jakarta Selatan Telp.
		11. Lentera Int. School (Ijin Sementara) 1.570.415.8-013	No. 5334/C/U/1991 27 Juni 1991	Jl. RS Fatmawati 50,Cipete Jakarta Selatan (Wisma Subud) Telp.
		12. Jakarta Taipei School	No. 343/C7/G/1991 23 Mei 1991	Jl. Boulevard Q A3 No. 20 Kelapa Gading Permai - Jakarta Utara Telp.
2.	Jawa Barat	13. Bogor Expatriate School	No. 058/0/1976 15 Maret 1976	Jl. Papandayan No. 9, Bogor Telp. (0251) 324360
		14. Nehru Memorial Int. School	No. 0202/0/1979 5 September 1979	Jl. Lembong No. 40, Bandung Telp. (022) 434479
		15. Bandung Int. School 1.206.735.1-423	No. 0622/0/1977 24 Desember 1977	Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri 6, Bandung Telp. (022) 212688
		16. Sekolah Alliance Bandung	No. 0253/0/1979 8 Nopember 1979	Jl. Gunung Agung No. 8, Bandung Telp. (022) 81844
		17. Sekolah Perancis Bandung	No. 075/0/1980 7 Maret 1980	Jl. Purnawarman No. 32, Bandung Telp.
		18. Deutsche Schule Bandung	No. 0139/0/1981 13 April 1981	Jl. Kyai Gede Utama 12, Bandung Telp (022) 81932
		19. Bandung Japanese School	No. 0118/0/1982 3 April 1982	Jl. Ciumbeleuit 199, Bandung Telp. (022) 81532
3.	Jawa Tengah	20. Sekolah Int. Semarang	No. 0367/0/1983 7 September 1983	Jl. Raung 16, Semarang Telp. (024) 312667
		21. Central Java Intermission School	No. 0241/0/1981 10 Agustus 1981	PO. Box 42, Desa Cabean RT 004, Salatiga Telp. (0298) 81312
4.	DI. Yogyakarta	22. Sekolah Int. Yogyakarta	No. 0506/0/1989 24 Agustus 1989	Pogung Baru Blok A-18, PO. Box Yogyakarta Telp. (0274) 86067
5.	Jawa Timur	23. Surabaya Int. School	No. 0420/0/1977	Jl. Kupang Indah IX/17, Surabaya

		1.232.580.9-604	23 September 1977	Telp. (031) 69324
		24. Sekolah Jepang Surabaya	No. 0203/0/1979 5 September 1979	Jl. Darmo Permai Selatan 14, Surabaya Telp. (031) 66657, 67253
		25. Sekolah Int. Wesley Malang 1.236.084.8-623	No. 0169/0/1980 2 Juni 1980	Jl. Raya Dieng No. 10, Malang Telp.
6.	Bali	26. Bali Int. School 1.543.692.6-901	No. 0102/0/1986 28 Pebruari 1986	Jl. Segara No. 2 Denpasar Telp.
7.	Sumatera Utara	27. Medan Int. School 1.228.723.1-113	No. 0202/0/1977 10 Juni 1977	Jl. Tali Air Desa Mangga Telp.
		28. Sekolah Jepang Medan	No. 0168/0/1980 2 Juni 1980	Jl. Sei Asahan No. 50, Medan Telp.
8.	Sumatera Selatan	29. Sekolah Int. Bukit Asam	No. 002/0/1985 8 Juni 1985	Jl. Tanjung Enim, Sumsel Telp.
9.	Riau	30. Sekolah Amerika Caltex	No. 0142/0/1976 2 Juni 1976	Jl. Rumbai Pekanbaru, Riau Telp. (Rumbai) 4456, (Duri) 2501
10.	DI. Aceh	31. Sekolah Int. Lhok Seumawe	No. 0116/0/1976 21 Mei 1976	Jl. Bianglancang, Tromol Pos 22, Aceh Utara Telp. (0645) 21566
11.	Kalimantan Barat	32. Sekolah Int. Bamboo River	No. 0282/0/197 24 Agustus 1978	Jl. Serukam Samalantan Kotak Pos 20, Singkawang Telp.
12.	Kalimantan Timur	33. Sekolah Int. Balikpapan	No. 0308/00/1976 13 Desember 1976	Jl. Pasir Ridge PO. Box 76, Balikpapan Telp. () 1474
		34. Sekolah Int. Bontang	No. 0307/0/1976 13 Desember 1976	Jl. Bontang Telp.
		35. Sekolah Int. Tanjung Bara	No. 0261/0/1991 16 Mei 1991	Komplek PT. Kaltim Prima Coal Sangata Baru, Kec. Sangata, Kutai Telp.
14.	Irian Jaya	36. Sekolah Int. Tembagapura	No. 0407/0/1976 10 September 1976	Tembagapura - Irian Jaya Telp.
		39. Sekolah Int. Sentani	No. 0170/0/1980	Pos 7 Sentani Telp.

	1.499.1112.9-952	2 Juni 1980	
	40. Sekolah Int. Bokondini	No. 0171/0/1980 2 Juni 1980	Kotak Pos 210, Sentani Telp.
	41. Sekolah Misi Abenabo	No. 047/0/1981 14 Desember 1981	NRC Pass Valley C/O Maf Sentani Telp.
	42. Sekolah Int. Hillerast	No. 0368/0/1987 25 Juni 1987	Tromol Pos 4, Sentani Telp.

Sumber : *www.ortax.org diakses pada 1 Desember 2010*

Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sesuai Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 61 ayat (1). Kebijakan SBI diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten) guna meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di Indonesia. Di Indonesia, sekolah bertaraf internasional diawali dengan didirikannya sekolah-sekolah yang disiapkan khusus untuk menampung siswa-siswa asing, yang orangtuanya bekerja sebagai diplomat asing ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional seperti Jakarta Internasional School (JIS), yang didirikan tahun 1951. Sejak itu, mulai bermunculan berbagai sekolah bertaraf/berstandar internasional di Indonesia, baik yang didirikan oleh kantor-kantor Kedutaan Besar asing maupun oleh lembaga-lembaga swasta (domestik dan asing) yang bergerak di bidang pendidikan.

Sekolah bertaraf internasional yang dikelola asing di kota-kota besar Indonesia sudah menjadi gejala biasa. Sekolah dengan kurikulum dan orientasi global itu tumbuh seiring dengan kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia yang ingin anak-anaknya dapat bersaing dengan penduduk manca negara di era global. Agar anak-anak Indonesia yang menjadi peserta didik di sekolah bertaraf internasional itu tidak melupakan jati diri sebagai manusia Indonesia, Kemdiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) mengeluarkan pedoman tentang prosedur dan izin belajar di sekolah asing.

Izin belajar siswa WNI bersekolah di sekolah dengan sistem dan kurikulum internasional/asing ini bertujuan untuk menjamin siswa WNI

memperoleh materi pembelajaran yang membekali mereka dengan pengetahuan dan sikap tentang nilai-nilai moral, akhlak, nasionalisme dan budaya Indonesia seperti yang diberikan kepada peserta didik Indonesia pada umumnya, yaitu melalui mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dan Agama untuk melindungi kepribadian dan semangat nasionalisme mereka agar tidak luntur. Selain itu pemberian izin belajar bagi siswa WNI ini sekaligus sebagai dasar pembinaan dan layanan administrasi lebih lanjut ketika jika hendak pindah sekolah atau akan melanjutkan pendidikan ke satuan pendidikan nasional. Sayangnya, belum ada upaya pengawasan yang efektif dari pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan PPKn, Bahasa Indonesia, dan Agama menjadi mata ajar pokok, bukan pendukung atau mulok (muatan lokal), yang tentu saja akan mempengaruhi pendidikan karakter bagi setiap warganegara Indonesia.

Maraknya privatisasi dan industrialisasi sekolah serta ketidakmampuan negara dalam memastikan pendidikan bermutu yang terjangkau bagi semua warga negara menyebabkan timbulnya semacam pengelompokan atau faksionalisasi siswa di sekolah-sekolah, menurut latar belakang sosio-ekonomi, agama dan etnisitas. Sisi lainnya yang dapat dilihat adalah bahwa pendidikan masih menjadi alat kekuasaan negara, dimana sekolah dijadikan sebagai institusi instrumental dari negara dan mengabdikan kepada kepentingan politik sesaat siapapun pemegang pemerintahan.

Hal itu tercermin karena kurang cermatnya membuat sebuah grand design pendidikan nasional, sehingga selalu muncul masalah kurikulum. Beban kurikulum yang terlalu padat di sekolah hanya mementingkan satu hal yaitu nilai kelulusan, dan ada kesan guru menjadi tidak lebih hanya sekedar operator kurikulum. Kualitas pendidikan nasional yang relatif rendah, juga tercermin dari kompetisi sumber daya manusia Indonesia yang rendah. Menurut HDI (Human Development Index), Indonesia berada pada peringkat ke 112 dari 175 negara. Tetapi sekali lagi, yang lebih memprihatinkan adalah bahwa kondisi umum pendidikan di Indonesia relatif masih berorientasi pada aspek pengajaran formal (transfer pengetahuan dan pemahaman) dan belum sepenuhnya berorientasi pada aspek pendidikan (transfer nilai).

Karakter dibangun dari kebiasaan yang merupakan representasi dari kebudayaan, sedangkan identitas adalah pencerminan dari karakter yang membedakan suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Karenanya, agar masyarakat dapat terjaga dari serangan budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma budaya Pancasila sebagai moral bangsa, pendidikan karakter perlu direvitalisasi. Suka atau tidak suka, saat ini bangsa Indonesia sedang berada di tengah pusaran hegemoni dunia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya menghadirkan kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia, tetapi juga mengundang sejumlah permasalahan baru. Contoh sederhana adalah teknologi multi media yang berubah begitu cepat. Selain makin memudahkan dalam pencarian informasi, teknologi ini juga memiliki kekayaan muatan yang tidak terbatas, baik ragam maupun kemudahan mengaksesnya. Tetapi dibalik semua itu, juga sangat potensial untuk mengubah gaya hidup seseorang. Bahkan dengan mudah dapat merambah ke pintu-pintu keluarga yang semula dibangun dengan kesantunan atau ke dalam ruang keluarga yang semula sarat dengan norma susila. Oleh karena itu, pendidikan karakter (*character learning* atau yang dulu dikenal dengan *character building*), dinilai sangat penting untuk di revitalisasi, tidak hanya di sekolah, namun juga di berbagai tingkat lingkungan dan kesempatan.

4.2.1. Urgensi pendidikan karakter

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap bertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir

generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Karakter, seperti yang dijabarkan Lickona dalam bukunya, terdiri dari tiga bagian yang saling terkait yaitu pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*) dan perilaku moral (*moral behavior*). Tanpa adanya ketiga bagian tersebut, maka akan terjadi kesenjangan antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukannya. Padahal orang yang berkarakter adalah orang yang konsisten antara pikiran dan tindakan.

Berbagai kerusuhan yang bersifat anarkis muncul dari pesta demokrasi Pilkada baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota. Belum lagi upaya-upaya kotor sebagian orang yang berusaha memaksakan kemenangannya dalam Pilkada tersebut melalui berbagai jalan pintas yang tidak dapat dibenarkan oleh etika demokrasi itu sendiri. Seringnya kejadian-kejadian tersebut muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air, dapat menghancurkan peradaban bangsa. Lemahnya karakter para pemimpin bangsa, menjadi penyebab utama tidak terkendalikannya kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Kondisi ini secara bertahap akan melahirkan generasi yang lemah mental, moral dan kepribadian. Pengabaian moral yang menyebabkan perilaku tidak berkarakter, lambat laun akan membentuk budaya dan peradaban yang menunjukkan penurunan harkat dan martabat manusia. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka diperlukan pendidikan karakter bagi anak-anak kita sejak usia dini dengan tujuan menumbuhkan karakter yang positif pada anak didik. Pendidikan karakter sejak usia dini juga merupakan upaya membentengi anak-anak penerus bangsa dari kemajuan dan perkembangan zaman yang demikian pesat. Oleh karena itu, dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (*golden age*), karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Seperti diungkapkan oleh Seto Mulyadi dalam wawancaranya,

Pendidikan karakter harus dimulai dari usia dini. Mungkin, yang dewasa bisa kita upayakan melalui diskusi-diskusi, pembentukan LSM yang membimbing karakter anti kekerasan. Tetapi kita harus berhitung untuk 10, 20 atau 30 tahun ke depan. Itu mulai dari anak-anak. Kita harus berani mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak. Hanya dengan menghentikan kekerasan terhadap anak, kita akan mampu menciptakan generasi yang unggul, yang akan membawa bangsa ini lebih maju dan ideal.

Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak play group dan taman kanak-kanak. Di sinilah peran guru, yang dalam filosofi Jawa disebut digugu lan ditiru, dipertaruhkan. Karena guru adalah ujung tombak di kelas, yang berhadapan langsung dengan peserta didik.

Menghadapi era globalisasi dan persaingan ideologi ini, merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera disosialisasikannya pendidikan karakter mulai anak usia dini. Karena globalisasi tidak akan menunggu untuk menggilas bangsa yang tidak berkarakter.

4.2.2. Pembangunan Bangsa yang Berkarakter

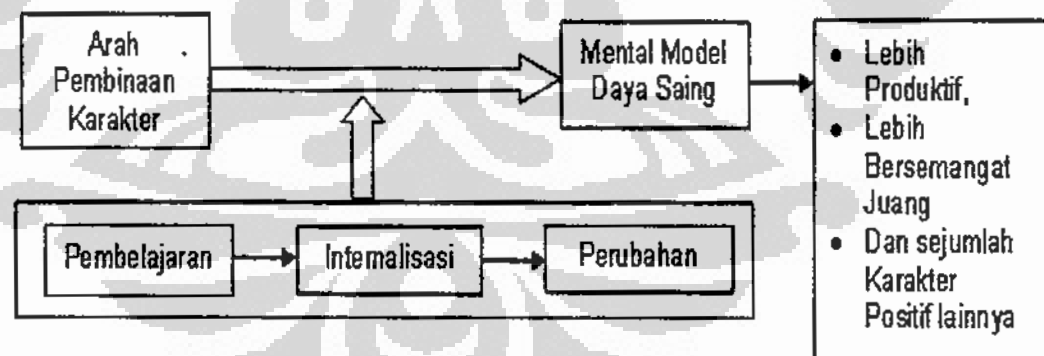
Pada prinsipnya memang membangun sebuah bangsa tidaklah cukup hanya dalam esensi fisik belaka. Perlu adanya suatu orientasi yang sedemikian sehingga esensi fisik tersebut berlanjut dalam suatu internalisasi untuk menuju pada pembangunan tata nilai atau sebaliknya pembangunan yang berorientasi pada tatanan fisik tersebut dijiwai oleh semangat peningkatan tata nilai sosio kemasyarakatan dan budaya, meskipun yang kedua ini umumnya lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama.

Tabel 4.3 Nilai-Nilai Ideologi, Agama dan Budaya

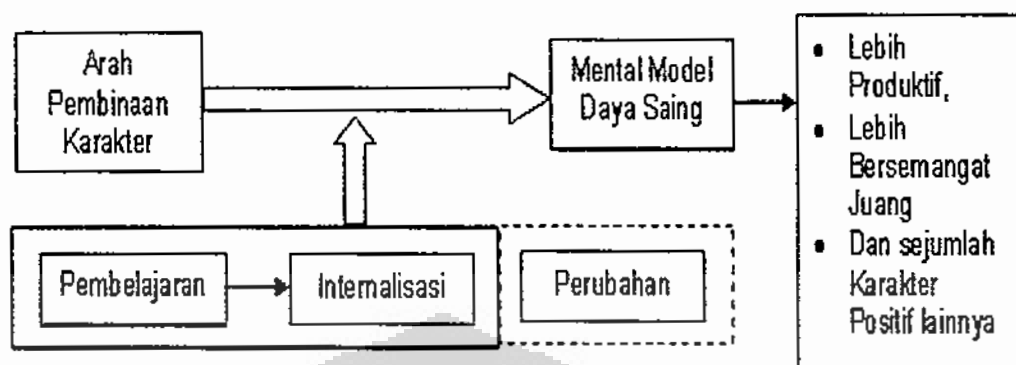
IDEOLOGI	AGAMA	BUDAYA
<ul style="list-style-type: none"> • Displin, hukum dan tata tertib • Mencintai tanah air • Demokrasi • Mendahulukan kepentingan umum • Berani • Setiakawan/solidaritas • Rasa kebangsaan • Patriotik • Warga negara produktif • Martabat/harga diri bangsa • Setia/bela negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Iman pada Tuhan YME • Taat pada perintah Tuhan YME • Cinta agama • Patuh pada ajaran agama • Berahlak • Berbuat Kebajikan • Suka menolong dan bermanfaat bagi orang lain • Berdoa dan bertawakal • Peduli terhadap sesama • Berperikemanusiaan • Adil • Bermoral dan bijaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi dan Itikad baik • Baik hati • Empati • Tata cara dan etiket • Sopan santun • Bahagia/gembira • Sehat • Dermawan • Persahabatan • Pengakuan • Menghormati • Berterima kasih

Sumber : Ganes Gunansyah, *Orientasi Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Karakter, 2008*

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa nilai-nilai suatu ideologi, agama dan budaya merupakan nilai-nilai karakter positif yang harus dimiliki oleh suatu bangsa yang ingin maju. Oleh karena itu, sistem pendidikan berbasis karakter harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam diri setiap warganya dalam upaya membangun bangsa yang berkarakter.



Gambar 4.1 Tatanan Ideal dalam Proses Pembinaan Karakter



Gambar 4.2 Kondisi faktual yang terjadi di Indonesia

Dari gambar di atas terlihat bahwa permasalahan pembangunan karakter di Indonesia masih berkutat pada tahapan internalisasi, sehingga tidak kunjung terjadi perubahan seperti yang diharapkan. Ini juga yang disadari oleh Irawan Soekarno dalam wawancaranya,

Kita ini, kalau belajar dari sejarah...maka sosialisasi di bidang Pancasila itu..sudah usang, sudah ndak laku lagi, sudah ndak bisa diterima masyarakat. buku banyak tentang pancasila, sering ada seminar tentang pancasila, tapi ndak ada yang ndenger lagi, tidak ada. Jadi anda harus bisa menemukan terobosan baru. Apa.

Fakta ini menunjukkan pemerintah belum mampu menemukan cara untuk menginternalisasikan Pancasila secara efektif, oleh karena itu diperlukan suatu metode baru. Namun melalui suatu proses internalisasi pengetahuan yang berjalan secara konsisten dan terutama dengan adanya semangat untuk melakukan perubahan secara signifikan, misalnya, Korea Selatan saat ini telah tumbuh menjadi kekuatan yang paling diperhitungkan di kancah regional Asia Timur bahkan dunia. Pakar reformasi Korea Selatan, Linsu Kim (2002) pernah mengatakan bahwa pembelajaran secara kontinyu atau *continuous learning* tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, tanpa disertai adanya kemampuan untuk berubah atau *ability to change*. Bahkan menurutnya, proses pembelajaran barulah menemukan maknanya setelah terjadinya proses perubahan pasca proses pembelajaran tersebut, khususnya dalam konteks pola pikir, pola sikap dan perilaku.

Sehingga tidaklah terlalu mengherankan kalau kita mendengar atau mengetahui bahwasanya sudah terlalu banyak contoh dan kasus dimana segenap

idea, pemikiran dan konsepsi-konsepsi yang telah dirumuskan dan dirancang dengan baik, bahkan melibatkan banyak orang yang pakar di bidangnya masing-masing pada akhirnya hanya menjadi sebatas tata wacana atau kumpulan buku-buku dan referensi tanpa adanya upaya kongkrit untuk menginternalisasikannya dan untuk selanjutnya menjadi landasan dalam proses perubahan sikap maupun perilaku, baik bagi individu maupun masyarakat dan bangsa.

Dari kenyataan ini maka dapat dideduksi bahwa permasalahan umum dalam konteks pembinaan karakter bangsa adalah mencakup upaya-upaya untuk mencapai suatu proses internalisasi pengetahuan yang kemudian dapat berlanjut sampai dengan terjadinya suatu perubahan atau *changes* tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka agenda terpenting dalam konteks pembinaan karakter bangsa adalah menyangkut adanya reformasi kolektif dari segenap komponen bangsa ini untuk sanggup melakukan pergantian atau *changes* setelah menjalani setiap proses pembelajaran. Karena sifatnya yang kolektif, maka tentunya hal tersebut tidak mungkin menjadi tugas atau kewajiban dari pemerintah saja, akan tetapi juga menyangkut tugas dan kewajiban dari seluruh masyarakat.

Secara normatif, dan sebagaimana telah hampir dapat diterima oleh umumnya kita sekalian, pembentukan karakter bangsa merupakan hal yang amat penting bagi generasi muda dan bahkan menentukan nasib bangsa di masa depan. Selanjutnya, kita juga telah sering mendengar bahwasanya generasi muda perlu memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keras, untuk dapat menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang memiliki daya saing tinggi, sehingga dapat berada sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Namun pada kenyataannya, pernyataan di atas sering hanya sebatas pada retorika. Kondisi yang kita hadapi sekarang menunjukkan bahwa era globalisasi telah menempatkan generasi muda Indonesia pada posisi yang berada di tengah-tengah deras arus informasi yang sedemikian bebas, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Sebagai akibatnya, maka nilai-nilai asing secara disadari ataupun tidak disadari telah memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung kepada generasi muda. Tentu saja hal ini harus segera diantisipasi agar tidak terjadi penggerusan nilai-nilai budaya bangsa yang akan berjalan terus

secara sistematis dan pada akhirnya bangsa ini akan semakin kehilangan integritas dan jati-dirinya.

Masa depan generasi bangsa adalah masa depan bangsa Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia adalah terletak pada pondasi jati diri dan karakter bangsa Indonesia dibangun secara berkesinambungan. Bangsa Indonesia akan tetap bertahan dan tetap jaya jika mampu memberi responsi kepada logika perkembangan historisnya sendiri, dan akan hancur berantakan jika gagal.

Berangkat dari logika semacam itu, kebijakan kementerian pendidikan nasional yang mengutamakan pendidikan karakter bangsa bukan saja perlu didukung tetapi perlu suatu gerakan nasional membangun pendidikan karakter bangsa yang dilakukan di lingkungan keluarga, pada satuan pendidikan dengan melakukan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, pengembangan budaya satuan pendidikan, pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan yang dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi, di lingkungan pemerintahan, di lingkungan masyarakat umum dalam organisasi sosial kemasyarakatan, di lingkungan masyarakat politik dan partai politik, di lingkungan dunia usaha dan industri serta di lingkungan masyarakat media massa.

Bagi masyarakat pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Pengutamaan pendidikan karakter bangsa yang menjadi kebijakan pemerintah sesungguhnya merupakan penegasan dan pengutamaan tugas-tugas dan misi suci (*mission sacre*) pendidikan pada aspek pengembangan sikap (*afektif*) anak pada sistem nilai budaya dan sikap mental anak, selain aspek pengetahuan (*kognitif*) dan keterampilan (*psikomotorik*) anak.

Pengetahuan (*kognitif*) dan Keterampilan (*psikomotorik*) adalah suatu kemampuan yang penting di miliki oleh anak dalam menyambut masa depannya, akan tetapi penanaman sikap (*afektif*) oleh pendidik yang menjadi sikap mental anak ketika memiliki pengetahuan (*kognitif*) dan keterampilan (*psikomotorik*) lebih menjamin masa depan generasi bangsa Indonesia.

Sebuah bangsa adalah kumpulan dari tata nilai (*values*). Sendi sendi yang menopang sebuah bangsa umumnya adalah berupa karakter dan mentalitas rakyatnya yang menjadi pondasi yang kukuh dari tata nilai bangsa tersebut.

Keruntuhan sebuah bangsa umumnya ditandai dengan semakin lunturnya nilai-nilai bangsa tersebut, walaupun secara fisik bangsa tersebut sebenarnya masih eksis. Meskipun sudah bukan barang baru, namun harus diakui bahwa fenomena globalisasi adalah dinamika yang paling strategis dan membawa pengaruh dalam tata nilai dari berbagai bangsa termasuk bangsa Indonesia. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai ancaman yang berpotensi untuk menggulung tata nilai dan tradisi bangsa kita dan menggantinya dengan tata nilai pragmatisme dan populerisme asing. Di sinilah perlunya disosialisasikan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter, yang bukan hanya slogan atau simbol semata, akan tetapi sebagai suatu praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlanjut dan berkesinambungan demi perubahan yang lebih baik.

4.2.3. Subyek Pendidikan Karakter

Aspek pendidikan adalah aspek terpenting dalam membentuk karakter bangsa. Dengan mengukur kualitas pendidikan, maka kita dapat melihat potret bangsa yang sebenarnya, karena aspek pendidikanlah yang menentukan masa depan seseorang, apakah dia dapat memberikan suatu yang membanggakan bagi bangsa dan dapat mengembalikan jati diri bangsa atau sebaliknya.

Setidaknya ada empat faktor utama yang harus diperhatikan: faktor kurikulum, dana yang tersedia untuk pendidikan, faktor kelaikan tenaga pendidik, dan faktor lingkungan yang mendukung bagi penyelenggaraan pendidikan. Keempat faktor ini terkait satu sama lain untuk dapat menghasilkan SDM dengan karakter nasional yang mampu bersaing di era global, yang akhirnya dapat mengembalikan jati diri bangsa.

Pada masalah aspek otoritas pendidikan, anak didik selama ini hanya ditekankan pada aspek kognitif saja. Akibatnya adalah anak didik yang diberi materi pelajaran hanya sekedar 'tahu' dan 'menenal' dengan apa yang didapatkannya, tanpa memahami apa yang mereka pelajari apalagi menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Padahal aspek yang lainnya, seperti afektif adalah hal penting yang harus dididik. Karena institusi pendidikan seharusnya dapat membuat anak didik menerapkan apa yang diajari, karena sesungguhnya itulah kegunaan dari ilmu pengetahuan.

Penanaman karakter anak didik dengan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik tidak akan berhasil menghasilkan generasi penerus yang memberikan dampak positif bagi bangsa. Mungkin memang nilai di atas kertas raport dan IPK terlihat bagus dan memuaskan, akan tetapi ketika anak didik tidak mampu menerapkan ilmu yang mereka dapatkan apa gunanya ilmu yang mereka punya. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu tanpa aktualisasi ilmu, akan tetapi pembentukan karakter diri dan bangsa dengan ilmu yang didapat, hingga akhirnya mereka para generasi muda dapat mengembalikan jati diri bangsa dengan ilmu yang mereka punya.

Banyaknya faktor atau media yang mempengaruhi pembentukan karakter ini menyebabkan pendidikan untuk pengembangan karakter bukan sebuah usaha yang mudah. Secara normatif, pembentukan atau pengembangan karakter yang baik memerlukan kualitas pelaku dan situasi lingkungan yang baik juga.

Tabel 4.4 Aktor Pendidikan Karakter

Aktor \ Jalur	Rumah	Sekolah	Masyarakat
Aktor utama (bertanggung jawab)	Orang tua Pemerintah (bagi unwealth family)	Pemerintah Kemendiknas Perangkat sekolah	Pemimpin Pemilik media
Aktor pelaksana	Orang tua Saudara	Kepala sekolah Guru Tata Usaha	Perangkat masyarakat Masyarakat umum Media massa

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Dari tabel diatas dapat kita analisa, bahwa di setiap lingkungan pendidikan, baik itu di rumah, di sekolah (formal) dan di masyarakat, terdapat 2 kategori aktor yang menjadi subyek pendidikan.

4.2.3.1. Aktor Utama

Aktor utama yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pendidikan karakter di lingkungan masing-masing. Di **rumah**, misalnya, sebagai lingkungan pendidikan yang pertama, aktor utamanya adalah kedua orang tua yang membesarkan dan mendidik anaknya, sejak lahir. Bagi keluarga yang berada, tidaklah sulit untuk memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Namun, bagi keluarga yang tidak berada, yang kadang untuk makan saja masih sulit, tentu saja akan kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan yang tepat, bahkan tidak jarang pula, anak malah menjadi eksploitasi kedua orang tuanya. Contohnya adalah anak jalanan, yang dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya, hanya karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang, pemerintah harus bertanggungjawab dan menunjukkan kepeduliannya kepada unwealth family, karena setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan.

Aktor utama di lingkungan **sekolah**, melibatkan otoritas pendidikan yang tertinggi, yaitu pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan telah berusaha memberikan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN, yang tentunya, dalam pelaksanaannya memerlukan perhatian dan pengawasan agar program-program pemerintah di bidang pendidikan ini tidak salah sasaran, seperti program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selain itu, sebagai percepatan pembangunan, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 1 tahun 2010 tentang Percepatan prioritas Pembangunan bidang pendidikan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendiknas dengan menyusun Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Kemendiknas juga telah menyusun Program pendidikan anak usia dini (PAUD) bermutu yang mampu "melejitkan" kecerdasan dan karakter anak, membentuk kesiapan belajar lebih lanjut, serta melaksanakan pelayanan dengan jangkauan sasaran yang semakin meluas, merata, dan berkeadilan. Serta mengupayakan terwujudnya pendidikan yang berkeadilan gender melalui peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan serta mendukung upaya pencegahan diskriminasi, trafficking, dan tindak kekerasan sebagai wujud

perlindungan HAM. Yang tidak kalah penting adalah peran Perangkat sekolah untuk menjamin berlangsungnya pendidikan karakter sesuai tujuan pendidikan nasional.

Sementara itu, di lingkungan **masyarakat**, yang menjadi aktor utama adalah pemimpin, dalam hal ini, pemimpin bisa diartikan sebagai presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, bahkan kepala RT sekalipun. Seorang pemimpin mempunyai tanggungjawab yang sedemikian besar kepada yang dipimpinnya, khususnya dalam pembentukan karakter. Selain pemimpin, aktor utama lainnya adalah pemilik media. Pasca reformasi, secara kuantitas, media mengalami perkembangan yang signifikan, karena demikian mudahnya akses untuk mendirikan suatu media. Namun, secara kualitas, media mulai tergerus oleh globalisasi, karena adanya *profit oriented* dengan mengejar rating tertinggi, sehingga melupakan nilai-nilai dan budaya luhur bangsa. Disinilah letak peran vital pemilik media dalam menentukan kearah mana media yang dimilikinya bekerja dan mencerdaskan bangsa.

4.2.3.2. Aktor Pelaksana

Aktor pelaksana yang melaksanakan langsung pendidikan karakter di lingkungan yang bersangkutan. Di **rumah**, yang menjadi aktor pelaksana adalah orang tua dan saudara. Semenjak lahir, orang tua harus mengajarkan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk kepada anaknya. Pembiasaan ini perlu, karena internalisasi yang efektif adalah pada saat anak masih berada pada usia dini. Ketika orang tua sudah mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik, saudara-saudaranya juga harus mendukungnya, bukan malah sebaliknya. Yang harus digarisbawahi adalah, nakalnya anak kecil biasanya karena rasa keingintahuannya yang besar, sehingga orang tua harus jeli dan tepat menyikapinya.

Di lingkungan **sekolah**, kepala sekolah, guru dan pelaksana tata usaha menjadi aktor pelaksana pendidikan karakter. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kerjasama yang baik dari masing-masing perangkat sekolah untuk menciptakan kultur sekolah yang baik, dalam suatu rules atau aturan-aturan yang harus selalu dipatuhi dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang ada. Seperti misal, banyaknya penggunaan alat komunikasi canggih, yang

memungkinkan anak didik mengakses situs porno dari handphone nya, atau menyatel video porno dengan gadgetnya, harus menjadi perhatian khusus bagi perangkat sekolah. Bisa saja dengan menyusun peraturan, bahwa selama KBM (kegiatan belajar mengajar) berlangsung, tidak diperbolehkan mempergunakan HP atau gadget lainnya, karena selain mengganggu proses KBM juga mampu merusak karakter, khususnya dengan adanya peredaran video porno yang sekarang sedang marak. Sebagai penanggungjawab operasional sekolah, Kepala sekolah harus mampu mengembangkan kepemimpinan berdasarkan dialog, saling perhatian dan pengertian satu dengan yang lainnya, namun tetap dengan ciri ketegasannya.

Terakhir, aktor pelaksana di masyarakat adalah perangkat masyarakat, masyarakat itu sendiri dan media. Perangkat masyarakat harus mampu menyusun peraturan yang efektif, masyarakat harus mau mematuhiya dan media dalam hal ini berperan mensosialisasikannya dalam upaya pembentukan karakter yang baik. Misalnya, pemerintah membuat aturan tentang larangan membuang sampah di sembarang tempat, disertai dendanya. Masyarakat harus mematuhi aturan ini dalam upaya membentuk karakter cinta kebersihan dan kerapian, sementara itu media mensosialisasikanya melalui iklan layanan masyarakat. Atau, dalam birokrasi administrasi, pemerintah menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga meminimalisir upaya korupsi atau pungli sekecil apapun itu, sehingga masyarakat pun terbiasa dengan kultur atau budaya anti korupsi, sementara media berupaya memberitakan penanganan kasus-kasus korupsi dan mensosialisasikan budaya anti korupsi.

Dalam pendidikan karakter ini, hendaknya masing-masing aktor berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila diharapkan sebagai jalan hidup yang akan dapat mengatasi masalah bangsa. Dengan begitu Pancasila akan dapat pula tetap menjadi falsafah dan ideologi bagi masyarakat Indonesia yang moderen. Secara kreatif dan dinamis, Pancasila mampu memadukan antara aspirasi masa depan, menyelesaikan masa kini dan memberi harga pada masa lalu. Perjalanan sejarah membuktikan Pancasila mampu memberikan dasar yang kokoh bagi kesatuan dan persatuan bangsa.

4.2.4. Obyek Pendidikan Karakter

Membangun karakter anak bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu harus dilakukan melalui jalur institusi pendidikan/sekolah, institusi keluarga hingga institusi masyarakat. Di institusi pendidikan, agar anak didik memiliki karakter, maka tujuan utama pendidikan harus berorientasi pada pembangunan watak/karakter, bukan sekedar membangun kompetensi dengan menanggalkan karakter. Kompetensi memang dibutuhkan dalam pembangunan nasional, akan tetapi kompetensi tanpa karakter hanya akan melahirkan sosok anak bangsa yang kurang humanis.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik.

Tabel 4.5 Obyek Pendidikan Karakter di Lingkungan Pendidikan

Jalur Unsur	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Media Massa
Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> Orang tua Saudara 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala sekolah Guru Pelaksana tata Usaha Murid 	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Perangkat masyarakat Masyarakat umum Norma-norma 	<ul style="list-style-type: none"> Pemilik media Media massa Pasar media
Media komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Makan bersama Acara keluarga Rekreasi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Mading sekolah Tata tertib sekolah Absensi guru dan murid Upacara bendera Praktek lapangan (PKL, KKN, magang) 	<ul style="list-style-type: none"> Acara 17 agustusan Upacara 17 Agustus Papan informasi Spanduk-spanduk dan selebaran Lembaga Swadaya Masyarakat Kerja bakti 	<ul style="list-style-type: none"> Surat pembaca Program CSR dari media yang bersangkutan, seperti peduli bencana, dll Iklan layanan masyarakat
Sasaran	Pendidikan agama,	Pendidikan anak usia	Terciptanya karakter baru	Terbentuknya pers yang

	karakter dan budaya bagi anak sejak lahir, sebagai pondasi bagi pendidikan di lingkungan selanjutnya	dini dan pengembangan karakter sesuai jenjang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, agama dan budaya	yang kritis, sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman, khususnya globalisasi saat ini	berkarakter, yang tidak hanya mengejar profit, namun juga menselaraskan diri dengan nilai-nilai Pancasila, karena efek media yang begitu kuat dampaknya di masyarakat.
--	--	---	---	--

Sumber : diolah dari hasil wawancara

4.2.4.1. Keluarga

Keluarga adalah komunitas pertama di mana manusia, sejak usia dini, belajar konsep baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan salah. Dengan kata lain, di keluargalah seseorang, sejak dia sadar lingkungan, belajar tata-nilai atau moral. Karena tata-nilai yang diyakini seseorang akan tercermin dalam karakternya, maka di keluargalah proses pendidikan karakter berawal.

Pendidikan di keluarga ini akan menentukan seberapa jauh seorang anak dalam prosesnya menjadi orang yang lebih dewasa, memiliki komitmen terhadap nilai moral tertentu seperti kejujuran, kedermawanan, kesedehanaan, dan menentukan bagaimana dia melihat dunia sekitarnya, seperti memandang orang lain yang tidak sama dengan dia –berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda latar belakang budaya. Di keluarga juga seseorang mengembangkan konsep awal mengenai keberhasilan dalam hidup ini atau pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan hidup yang berhasil, dan wawasan mengenai masa depan.

Dari sudut pandang pentingnya keluarga sebagai basis pendidikan karakter, maka tidak salah kalau krisis karakter yang terjadi di Indonesia sekarang ini bisa dilihat sebagai salah satu cerminan gagalnya pendidikan di keluarga. Korupsi misalnya, bisa dilihat sebagai kegagalan pendidikan untuk menanamkan dan menguatkan nilai kejujuran dalam keluarga. Orang tua yang membangun kehidupannya di atas tindakan yang korup, akan sangat sulit menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya.

Mereka mungkin tidak menyuruh anaknya agar menjadi orang yang tidak jujur, namun mereka cenderung tidak akan melihat sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sebagai salah satu nilai yang sangat penting yang harus dipertahankan mati-matian. Ini mungkin bisa dijadikan satu penjelasan mengapa korupsi di Indonesia mengalami alih generasi. Ada pewarisan sikap permisif terhadap korupsi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di

lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Bahkan pengabaian pendidikan karakter anak usia dini di rumah pun kini semakin menjadi gejala umum karena ibunya bekerja diluar rumah demi menopang ekonomi keluarga. Pengasuhan anak pun akhirnya diserahkan kepada pembantu atau babysitter. Hal ini sangatlah tidak tepat, mengingat rumah merupakan wahana pertama dan terpenting dalam pembentukan karakter seorang anak manusia. Orang tua harus mampu bertindak preventif maupun represif dalam menghadapi kenakalan anak, tapi bukan berarti selalu menggunakan jalan kekerasan, dan sebisa mungkin selalu memantau perkembangan dan pergaulan si anak.

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar dapat dicapai, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik. Mengingat faktor anak didik tidak bisa diepaskan dari faktor orang tua sebagai walinya, kerjasama antara sekolah dan orang tua anak didik juga sangat penting dan diperlukan, diantaranya untuk mencegah kenakalan anak. Segala sesuatu yang dilakukan anak didik di sekolah juga menyangkut kepentingan orang tua. Dengan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua, maka tingkahlaku dan prestasi anak dapat dipantau dengan baik.

4.2.4.2. Pendidikan Formal

Pendidikan karakter di sekolah sebenarnya bisa dilakukan dengan mensosialisasikan *character building* kepada guru dan tenaga pendidik lainnya, termasuk pengelola sekolah. Pendidikan karakter kepada siswa sebenarnya paling efektif jika dilakukan dengan cara ditularkan dan melalui suri teladan dari kepala sekolah, guru maupun pelaksana tata usaha. Oleh karena itu, agar siswa memiliki karakter yang bersih, maka kebersihan lingkungan kelas dan sekolah harus selalu dijaga. Agar siswa memiliki karakter disiplin, maka para guru beserta pengelola sekolah harus memberikan contoh dengan tidak terlambat datang ke sekolah.

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Pendidikan karakter pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas, sesuai dengan elemen budaya sekolah yang idealnya harus dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan (Deal dan Peterson, 2009:19-126) seperti sekolah sebagai suatu komunitas, Artifak dan arsitektur sekolah, Sejarah sekolah, Mitos Sekolah, Peristiwa/touching stories, Ritual sekolah, Upacara-upacara, serta Pembawa budaya.

Sistem pendidikan mengembangkan pola kelakuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari murid-murid. Sebagai suatu komunitas, sekolah memiliki norma, tatanan sosial dan interaksi sosial yang tentunya berbeda dengan masyarakat, karena dalam sekolah yang lebih ditekankan adalah aspek pendidikan baik pengetahuan maupun moralnya. Namun yang selama ini terjadi, sekolah masih menjadi sekadar komunitas berbagai ilmu, meskipun di beberapa sekolah berasrama mulai terlihat adanya sisi pendidikan karakter.

Budaya sekolah yang kuat terlihat dari artifak dan arsitektur sekolahnya, bagaimana guru dan muridnya berseragam, bagaimana kebersihan lingkungan sekolah bisa terjaga dan unsur-unsur artifak lain yang terjaga, dalam rangka pembentukan karakter. Sekolah juga melestarikan histori dan mitos yang positif dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam hal ini adalah untuk pembentukan karakter. Histori ini hendaknya memiliki keterkaitan dengan histori bangsa ini, karena hal ini sangat diperlukan dalam membangun karakter, meskipun dalam lingkungan pendidikan, mata pelajaran sejarah dan pancasila mulai perlahan-lahan ditinggalkan, karena timbul kebosanan ataupun adanya

angapan ini hanyalah indoktrinasi belaka. Mitos sekolah yang positif harus dijaga, seperti adanya mitos bahwa sekolah itu ada untuk membentuk bukan hanya orang pintar tapi juga berkarakter, sebaliknya mitos negatif yang menjerumuskan sebaiknya ditinggalkan, seperti orang tidak bisa sukses jika bersekolah di SMK. Untuk menghilangkan mitos yang negative ini bisa dilakukan melalui *touching stories* yang mampu menyentuh kalbu, yang mampu memberikan pemahaman dan penghayatan yang sebenarnya mengenai pendidikan yang sedang dijalaninya dan apa tujuannya. Cerita-cerita dari alumni yang sukses bisa dijadikan pemicu semangat untuk membentuk karakter mereka menjadi orang sukses, yang tentunya harus memiliki kemauan, kemampuan, pekerja keras, bertanggungjawab dan berbagai karakter positif lainnya.

Sekolah juga melestarikan ritual-ritual seperti menyapa guru atau murid yang lebih tua dengan cara-cara tertentu, atau ritual lain yang mengarah kepada pembentukan karakter. Selain itu sekolah juga menyelenggarakan upacara-upacara yang bukan hanya sekedar formalitas belaka, namun benar-benar memiliki tujuan budaya.

Sebagai pembawa budaya, Sekolah bertugas untuk menyampaikan kebudayaan kepada generasi baru dan karena itu harus selalu memperhatikan masyarakat dan kebudayaan umum. *Convey culture* ini bisa melalui pertunjukkan seni, pertandingan olahraga ataupun penggunaan teknologi, seperti yang baru saja dilakukan oleh mahasiswa ITS yang menciptakan game mengenai sejarah palagan ambarawa (Republika, 20 Desember 2010). Mungkin sejarah bangsa yang lainnya juga bisa divisualisasikan dalam bentuk film, video maupun game untuk Mengenal dan mengenang perjuangan para pahlawan, Menanamkan rasa cinta dan kebanggaan kepada tanah air dan bangsa, Menumbuhkan rasa patriotism dan tentunya membentuk karakter bangsa yang kuat. Di sekolah juga hendaknya diajarkan dan dipahami bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang plural, bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, agama, bukan untuk diperlebar, akan tetapi memperkaya khasanah bangsa, sehingga anak didik mengerti bahwa meskipun mereka berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua.

Disinilah terdapat peran kepala sekolah. Sebagai pemimpin di suatu sekolah, Kepala sekolah harus memahami kultur sekolah yang ada sekarang ini,

dan menyadari bahwa hal itu tidak lepas dari struktur dan pola kepemimpinannya. Kultur sekolah akan baik apabila: a) kepala sekolah dapat berperan sebagai model, b) mampu membangun tim kerjasama, c) belajar dari guru, staf dan siswa, d) memahami kebiasaan yang baik untuk terus dikembangkan. Selain itu kepala sekolah juga harus mampu menjembatani komunikasi antara sekolah dengan orang tua untuk mendapatkan umpan balik mengenai budaya sekolah yang terlihat dari luar. Dengan dapat memahami permasalahan yang kompleks sebagai suatu kesatuan secara mendalam, kepala sekolah dan guru akan memiliki nilai-nilai dan sikap yang amat diperlukan dalam menjaga dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan. Melalui cara ini diharapkan akan terbentuk budaya sekolah yang selaras dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. Namun satu hal yang harus diwaspadai adalah adanya *ritualisme*. Tanpa adanya penanaman nilai yang tepat, segala bentuk budaya dan tradisi yang terbentuk di sekolah, seperti upacara bendera ataupun peringatan hari besar nasional, hanyalah menjadi seremoni belaka, tanpa menghasilkan efek apapun. Padahal tujuan atau nilai budaya dan karakter penyelenggaraan upacara di sekolah secara rutin adalah menanamkan rasa kebangsaan, jiwa nasionalisme serta cinta tanah air. Seperti yang dilakukan TNI di daerah perbatasan, yang berupaya menanamkan nasionalisme kepada masyarakat daerah perbatasan melalui upacara, meski nasionalismenya lebih didasari karena masyarakat segan kepada TNI (Ima&Widi:2010).

Gejala ritualisme ini dapat dilihat dengan jelas, misalnya, pada saat pelaksanaan upacara yang seharusnya khidmat, ada beberapa peserta upacara yang saling berbicara di dalam barisan. Para peserta upacara yang sedang berbicara ini sebenarnya tidak tahu, lupa atau bahkan mengabaikan tujuan dari upacara. Mereka mengikuti upacara, karena mereka memang harus mengikutinya, jika tidak, mereka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Oleh karena itu, satu-satunya upaya untuk mereduksi ritualisme ini adalah dengan menginternalisasikan nilai

secara efektif, untuk meminimalisir penyimpangan terhadap tujuan budaya, seperti yang dikemukakan oleh Robert Merton dalam bukunya '*Social Theory and Social Structure*' (1964).

4.2.4.3.Masyarakat

Jalur ketiga adalah pembangunan karakter di masyarakat, karena institusi masyarakat sangat menentukan pembangunan karakter bangsa. Masyarakat yang pada hakekatnya adalah sekumpulan individu akan menjadi baik, jika individu-individu tersebut, baik pemimpin maupun masyarakat itu sendiri memiliki karakter yang baik. Dengan bekal pendidikan karakter yang diperolehnya dari rumah dan sekolah, diharapkan ketika berada di tengah-tengah masyarakat, mereka akan mampu menjadi individu yang berkarakter kritis sehingga tidak terpengaruh kepada dinamika masyarakat, namun mengubah dinamika masyarakat, khususnya eksekusi dari globalisasi menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk membangun masyarakatnya, bukan malah terjebak dalam globalisasi negatif.

4.2.4.4.Media Massa

Jalur keempat adalah Media masa. Dalam era kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi sekarang ini, salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar dalam pembangunan atau sebaliknya juga merusak karakter masyarakat atau bangsa adalah media massa, khususnya media elektronik, dengan pelaku utamanya adalah televisi.

Sebenarnya besarnya peran media, khususnya media cetak dan radio, dalam pembangunan karakter bangsa telah dibuktikan secara nyata oleh para pejuang kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, melakukan pendidikan bangsa untuk menguatkan karakter bangsa melalui tulisan-tulisan di surat kabar waktu itu. Bung Karno dan Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan, keberanian dan persatuan melalui radio. Mereka, dalam keterbatasannya, memanfaatkan secara cerdas dan arif, teknologi yang ada pada saat itu untuk membangun karakter bangsa, terutama sekali: kepercayaan diri bangsa, keberanian, kesediaan berkorban, dan rasa persatuan.

Sayangnya kecerdasan dan kearifan yang telah ditunjukkan generasi pejuang kemerdekaan dalam memanfaatkan media massa untuk kepentingan bangsa makin sulit kita temukan sekarang. Media massa sekarang memakai teknologi yang makin lama makin canggih. Namun tanpa kecerdasan dan kearifan, media massa yang didukung teknologi canggih tersebut justru akan melemahkan atau merusak karakter bangsa. Sebagai contoh, sebagian besar program televisi justru lebih menonjolkan karakter buruk daripada karakter baik. Sering kali pengaruh lingkungan keluarga yang baik justru dirusak oleh siaran media televisi. Hal ini karena adanya **efek media** yang bersifat seperti peluru, atau yang disebut dengan *bullet theory* atau yang juga dikenal dengan teori jarum suntik atau *hypodermic needle theory*, dimana pesan media yang disampaikan begitu kuat terekspos dan tertancap ke dalam diri komunikan.

Di keluarga, anak-anak dididik untuk menghindari kekerasan, namun acara TV justru penuh dengan adegan kekerasan. Di rumah, anak-anak dididik untuk hidup sederhana, namun acara sinetron di televisi Indonesia justru memamerkan kemewahan. Di rumah anak-anak dididik untuk hidup jujur, namun tayangan di televisi Indonesia justru secara tidak langsung menunjukkan 'kepahlawanan' tokoh-tokoh yang justru di mata publik di anggap 'kaisar' atau 'pangeran-pangeran' koruptor. Para guru agama mengajarkan bahwa membicarakan keburukan orang lain dan bergosip itu tidak baik, namun acara televisi, khususnya infotainment, penuh dengan gosip. Bapak dan ibu guru di sekolah mendidik para murid untuk berperilaku santun, namun suasana sekolah di sinetron Indonesia banyak menonjolkan perilaku yang justru tidak santun dan melecehkan guru. Secara umum, banyak tayangan di televisi Indonesia, justru 'membongkar' anjuran berperilaku baik yang ditanamkan di di rumah oleh orang tua dan oleh para guru di sekolah. Disinilah media, sebagai obyek pendidikan karakter harus mampu mempertahankan eksistensi dan jatidirinya sesuai dengan ciri dan karakter bangsa, agar media mampu berperanserta secara aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya, hal ini tidak lepas dari peran pemilik media, sesuai teori hegemoni media, bahwa yang memiliki modal lah yang akan menguasai dan menggerakkan media, dan hendaknya para pemilik media juga bertanggungjawab terhadap pendidikan karakter bangsa, bukan hanya mengejar profit semata.

4.2.5. Metoda Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sangat erat dan dilatar belakangi oleh keinginan mewujudkan konsensus nasional yang berparadigma Pancasila dan UUD 1945. Konsensus tersebut selanjutnya diperjelas melalui UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan karakter merupakan suatu hal yang penting dan urgent bagi bangsa ini, mengingat adanya proses globalisasi yang membawa bangsa ini ke dalam situasi persaingan ideologi, sehingga tanpa adanya ideologi atau karakter bangsa yang kuat, bangsa ini akan terombang-ambing dalam pusaran globalisasi dan akhirnya mati seperti tesisnya Daniel Bell tentang *The End Of Ideology* (1962). Intelijen sebagai penyuplai pertimbangan kepada user, harus mencermati ancaman ini dengan hati-hati, karena permasalahan ideologi dan karakter merupakan permasalahan yang sangat prinsip.

Karakter bangsa harus dibangun sejak dini apabila kita ingin membuat suatu perubahan yang berarti bagi bangsa ini. Sasarannya adalah terbangunnya bangsa Indonesia yang berkarakter, modern, intelektual, inovatif baik melalui strategi pendidikan informal, formal maupun non formal. Strategi yang dimaksud antara lain menggunakan metoda berdasarkan tingkat urgensi pendidikan karakter.

Tabel 4.6 Metode Pendidikan Karakter berdasarkan Urgensinya

Aktor Urgensi	Pemerintah	Sekolah	Keluarga	Masyarakat	Media massa
Tinggi	Menciptakan satu gerakan nasional pendidikan karakter Merumuskan formulasi pendidikan karakter yang efektif	Mata pelajaran khusus menyangkut pendidikan karakter Mengintegrasikan pendidikan karakter dengan mata ajar yang sudah ada	Orang tua memperhatikan perkembangan karakter anak Orang tua mengajarkan nilai-nilai karakter dengan contoh dari pembiasaan	Pemimpin harus bisa memberikan keteladanan yang baik, seperti anti korupsi, transparansi, responsibility, dsb Adanya norma dan aturan yang jelas beserta sanksinya	Pemilik media harus mengupayakan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat Media membantu mendidik karakter, tanpa semata-mata mengejar profit
Rendah	Melaksanakan pendidikan dalam kerangka SISDIKNAS	Pendidikan karakter terlepas dari proses pendidikan formal, pendidikan dilakukan melalui pendekatan habituasi dan contoh	Orang tua mewakili proses pendidikan karakter kepada pihak lain, seperti orang ketiga, yayasan dsb.	Pendidikan melalui LSM maupun lembaga-lembaga nonformal lainnya	Media membantu pemerintah dalam menyampaikan iklan layanan masyarakat

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

4.2.5.1.Lingkup Negara

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya sistem pendidikan nasional, yang bertanggungjawab dan berperan besar dalam upaya merumuskan pendidikan karakter adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan **Instruksi Presiden RI No 1 tahun 2010** tanggal 19 Februari 2010, yang berisi instruksi tentang Prioritas Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan. Di dalam prioritas percepatan pembangunan nasional bidang pendidikan ini, terdapat poin yang terkait dengan pendidikan karakter yaitu Penguatan metodologi dan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif ini berdasarkan nilai nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa, dengan tujuan terwujudnya kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.

Tidak dipungkiri bahwa munculnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari fakta-fakta yang melatarbelakanginya, tak terkecuali dengan fenomena hadirnya Pendidikan Karakter Bangsa ini. Kondisi bangsa ini memang sungguh memprihatinkan, disamping diuji dengan bencana alam yang bertubi – tubi bangsa kita juga dihadapkan dengan ujian yang jauh lebih dahsyat yakni terjadinya degradasi moral yang menimpa banyak kalangan. Korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, tawuran pelajar, kehidupan ekonomi yang konsumtif, dan kehidupan politik yang tidak produktif menjadi hal yang lumrah dijumpai di masa sekarang ini yang tidak hanya menjadi keprihatinan para pengambil kebijakan dan pemerhati pendidikan tetapi juga menjadi keprihatinan kita bersama.

Oleh karena itu, Kemendiknas, sebagai institusi Kementerian yang berwenang menangani masalah pendidikan, harus merumuskan suatu formulasi pendidikan karakter yang efektif, yang bukan hanya slogan saja, mengingat urgensi pendidikan karakter yang harus segera direalisasikan. Hal inilah yang menginspirasi para pengambil kebijakan untuk mencanangkan Pendidikan Karakter Bangsa secara nasional ke seluruh institusi pendidikan. Launching Pendidikan Karakter Bangsa ini dicanangkan pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2010. Adapun langkah – langkah program

pendidikan karakter bangsa ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- (1) Konsolidasi dan peletakan dasar-dasar (2010-2014),
- (2) Pemanjapan strategi implementasi (2015-2019),
- (3) Pengembangan Berkelanjutan (2020-2024).

Berikutnya Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa ini akan dimonitor dan dievaluasi, kemudian didesain kembali untuk keberlanjutan. Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter Bangsa ini ke depannya menjadi Gerakan Nasional Pendidikan Karakter sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Dalam pelaksanaannya, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (Balitbang Puskur) menyusun naskah untuk dilaksanakan oleh pendidik. Naskah tersebut berupa pedoman sekolah yang bersifat praktis dan dapat dilaksanakan dalam suasana pendidikan yang ada di sekolah pada saat sekarang. Menurut Balitbang Puskur, pelaksanaan Pendidikan Karakter Bangsa memerlukan berbagai perubahan dalam pelaksanaan proses pendidikan yang terjadi di sekolah pada saat sekarang. Yang dimaksud dengan perubahan yang diperlukan bukanlah mengubah kurikulum yang berlaku tetapi menghendaki sikap baru dan keterampilan baru dari para guru, kepala sekolah dan konselor sekolah. Sikap dan keterampilan baru inilah yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk keberhasilan implementasi Pendidikan Karakter Bangsa. Lebih lanjut lagi, perubahan sikap dan penguasaan keterampilan yang dipersyaratkan tersebut hanya dapat dikembangkan melalui pendidikan dalam jabatan yang terfokus, berkelanjutan, dan sistemik.

Pendidikan Karakter Bangsa merupakan suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.” (Balitbang, Puskur, 2010). Lebih lanjut, usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai

dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Dalam pelaksanaannya, Pendidikan Karakter Bangsa **tidak** mengubah kurikulum yang berlaku, melainkan terintegrasi dalam pembelajaran, pengembangan diri, dan pengembangan nilai-nilai pembiasaan dalam budaya sekolah.

Adanya budaya yang membuat peserta didik tumbuh dan berkembang dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan peserta didik yaitu Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, hingga lingkungan yang lebih besar yaitu budaya nasional bangsa, dan yang lebih luas lagi adalah budaya universal yang diterima oleh umat manusia. Jika peserta didik asing dengan budaya terdekat, maka dia tidak mengenal budaya bangsanya dan dia tidak merasa menjadi bagian dari budaya bangsanya. Ketika hal ini terjadi, sangat mungkin dia rentan terhadap pengaruh budaya asing tanpa memiliki rasa pertimbangan (*valueing*) dalam menerima budaya luar.

Ini juga yang hendaknya diwaspadai dengan semakin maraknya sekolah internasional di Indonesia. Mencermati fakta yang ada, Kemendiknas perlu melakukan upaya pengawasan yang lebih ekstra untuk menjamin warga Indonesia yang menempuh pendidikan di sekolah internasional tetap mendapatkan pengajaran kewarganegaraan, Pancasila dan bahasa Indonesia, bukan sekedar mata ajar sebagai formalitas atau syarat belaka, mengingat pendidikan merupakan metoda untuk membentuk karakter seseorang.

Peserta didik yang memiliki dasar pertimbangan (*valueing*) yang kuat maka cenderung untuk tumbuh dan berkembang sebagai warga Negara yang baik. Diharapkan, peserta didik akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma dan nilai ciri ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu, fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” tentulah sesuai dengan apa yang kita harapkan terhadap peserta didik. Dengan demikian, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) sudah

memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri peserta didik sebagai anggota masyarakat dan bangsa.

Selain merencanakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter, kemendiknas juga telah merumuskan **Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014**. Di dalam renstra Kemdiknas 2010-2014 sebagai tindak lanjut Inpres No 1 tahun 2010, terdapat 2 program yang terkait dengan pembentukan karakter, sebagai berikut :

a. Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa.

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, porno-grafi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan *soft skills* yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- 3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- 4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

b. Pengembangan Metodologi Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan

jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- 1) Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;
- 3) Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan;
- 4) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- 5) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif;
- 6) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- 7) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

Sejalan dengan Renstra Kemendiknas tersebut, pada 2 Mei 2010, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh telah meluncurkan siaran televisi TV Citra Indonesia Terampil. Program kerja sama dengan Indovision, dengan mempergunakan satelit Indostar II yang mampu mengcover seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke wilayah Malaysia, Filipina Selatan, Singapura, dan sebagian Australia ini, khusus didedikasikan untuk memberikan pembelajaran keterampilan kepada masyarakat terutama di daerah terpencil, terluar, dan terdepan, serta daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses untuk meningkatkan kemampuan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup mereka. Siaran yang dipancarkan

melalui chanel 845 Indovision ini, pada tahap awal akan dipasang penerima siaran di 1.000 lokasi.

Selain siaran televisi, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh juga meluncurkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Pusat Perbelanjaan atau disebut TBM@Mall. Kehadiran TBM@Mall ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar gemar belajar dan membaca. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mendekatkan TBM di pusat-pusat fasilitas publik yang semakin semarak. Dengan adanya TBM@Mall, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, serta lebih fleksibel meskipun hanya sambil berbelanja atau jalan-jalan di mall. Tidak hanya di Jakarta, TBM@Mall akan hadir di Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Makasar, dan seluruh wilayah negeri ini. Untuk wilayah Jakarta, TBM@Mall akan hadir diantaranya di Blok M Mall dan Plaza Semanggi.

Dalam menjamin hak setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan, pemerintah juga telah menerapkan Program Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini dikarenakan pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak atas "pendidikan dasar" bagi warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun. Namun, pendidikan untuk anak yang berusia dibawah tujuh tahun tidak dimasukkan sebagai pendidikan dasar. Padahal, istilah pendidikan dasar seharusnya mulai berlaku mulai anak berusia 0-18 tahun. Hal ini sesuai dengan usia golden age atau keemasan anak, yaitu usia 0-9 tahun. Sedangkan menurut Konvensi Anak, yang disebut anak yaitu yang berusia 0-18 tahun. Jadi seharusnya UU mengenai Sistem Pendidikan Nasional tersebut mengakomodir usia anak dari umur 0-18 tahun tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, PAUD termasuk dalam jenis pendidikan Non Formal. Pendidikan Non Formal selain PAUD yaitu Tempat Penitipan Anak (TPA), Play Group dan PAUD Sejenis. PAUD sejenis artinya PAUD yang diselenggarakan bersama dengan program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu untuk kesehatan ibu dan anak). Sedangkan pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), PAUD dimasukkan kedalam program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Pada penyelenggaraan PAUD, jenis pendidikan ini tidak menggunakan kurikulum baku dari Depdiknas, melainkan menggunakan rencana pengajaran yang disebut Menu Besar. Menu Besar ini mencakup pendidikan moral dan nilai keagamaan, fisik/motorik, bahasa, sosial-emosional dan seni. Panduan dalam Menu Besar ini akan dikembangkan oleh tiap PAUD, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing PAUD.

Berikut ini adalah berbagai implementasi dari berbagai teori tentang pendidikan karakter dalam konteks pendidikan anak usia dini.

- 1) Ciptakan suasana penuh kasih sayang mau menerima anak sebagaimana adanya, menghargai potensi anak, memberi rangsang-rangsang yang kaya untuk segala aspek perkembangan anak, baik secara kognitif, afektif, sosioemosional, moral, agama, dan psikomotorik,
- 2) Berikan pengertian betapa pentingnya "cinta" dalam melakukan sesuatu, tidak semata-mata karena prinsip timbal balik. Tekankan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi cinta dan pengorbanan. Ajak anak kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantu anak kita berbuat sesuai dengan harapan-harapan kita, tidak semata karena ingin dapat pujian atau menghindari hukuman. Ciptakan hubungan yang mesra, agar anak peduli terhadap keinginan dan harapan-harapan kita. Ingatkan pentingnya rasa sayang antaranggota keluarga dan perluas rasa sayang ini ke luar keluarga, yakni terhadap sesama. Berikan contoh perilaku dalam hal menolong dan peduli pada orang lain.
- 3) Gunakan metode pembiasaan yaitu mengajak anak melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan yang kita programkan sehingga kegiatan tersebut melekat pada diri anak menjadi kebiasaan hidup mereka sehari-hari. Misalnya, kebiasaan menolong teman yang kesusahan, menjenguk orang sakit, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Pembiasaan seperti ini sekaligus menjadi ajang pembelajaran bagi anak dan berlangsung sampai kira-kira masuk SD. Setelah itu, berbagai sumber belajar, misalnya lingkungan atau pembiasaan baca-buku, akan ikut membentuk karakter anak selain contoh-contoh dari guru dan orang tuanya. Membangun karakter terhadap anak hendaknya menjadikan

seorang anak terbiasa untuk berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Sebagai contoh, seorang anak yang terbiasa makan tiga kali sehari, akan merasa tidak enak bila makan hanya dua kali sehari. Dengan demikian, kebiasaan baik yang sudah menjadi instink, otomatis akan membuat seorang anak merasa kurang nyaman bila tidak melakukan kebiasaan baik tersebut.

- 4) Gunakan metode keteladanan yang memberikan model yang menjadikan anak meniru dengan bangga. Peserta didik lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat untuk ditiru. Keteladanan memang menjadi salah satu hal klasik bagi berhasilnya sebuah tujuan pendidikan karakter. Dalam hal ini perilaku guru dalam keseharian tentu menjadi model. Guru yang patut digugu dan ditiru. Guru dalam arti luas tentu termasuk orangtua, tokoh masyarakat, maupun aparatur pemerintah. Perilaku-perilaku mereka akan ikut membentuk karakter peserta didik. Cara lain yang dianggap baik dilakukan adalah dengan *contextual learning*, yaitu dalam setiap pembelajaran anak-anak diberikan contoh kegiatan yang baik dengan langsung diperlihatkan dalam tindakan-tindakan seluruh pendidik dalam suatu lembaga pendidikan.
- 5) Gunakan metode cerita karena cerita bisa sangat menggugah dan melibatkan berbagai emosi, mempengaruhi perilaku, dan menentukan pengambilan keputusan seseorang manakala disampaikan dengan efektif. Kekuatan cerita dapat tergali melalui serangkaian perilaku berkarakter dan menanamkan konsep diri positif. Metode pembelajaran karakter ini dilakukan dengan cerita-cerita keteladanan seperti kisah-kisah keteladanan Nabi-nabi, sahabat-sahabat nabi, pahlawan-pahlawan Islam, dunia, nasional ataupun lokal.
- 6) Kurangi jumlah mata pelajaran berbasis kognitif dalam kurikulum-kurikulum pendidikan anak usia dini. Pendidikan intelektual (kognitif) yang berlebihan akan memicu pada ketidak seimbangan aspek-aspek perkembangannya. Setelah dikurangi beberapa pelajaran kognitif, tambahkan materi pendidikan karakter. Materi pendidikan karakter tidak

identik dengan mengasahkan kemampuan kognitif, tetapi pendidikan ini adalah mengarahkan pengasahan kemampuan affektif.

- 7) Gunakan permainan tradisional. Salah satu media yang sesuai digunakan dalam implementasi pendidikan membangun karakter anti korupsi adalah melalui permainan tradisional anak yang sudah cukup lama berkembang di negeri ini, bahkan permainan-permainan tersebut sarat dengan nilai-nilai budaya bangsa. Namun demikian seiring dengan perkembangan jaman permainan tradisional ini semakin lama semakin dilupakan oleh anak-anak terutama di perkotaan karena sudah semakin banyaknya permainan modern yang berasal dari luar negeri. Beberapa permainan yang bersifat adu ketangkasan akan melatih anak-anak untuk lebih sportif, mengakui kelebihan orang lain, berusaha untuk tidak berbuat curang dan mau menerima kemenangan orang lain dan kekalahan sendiri, serta bijaksana ketika menjadi pemenang.

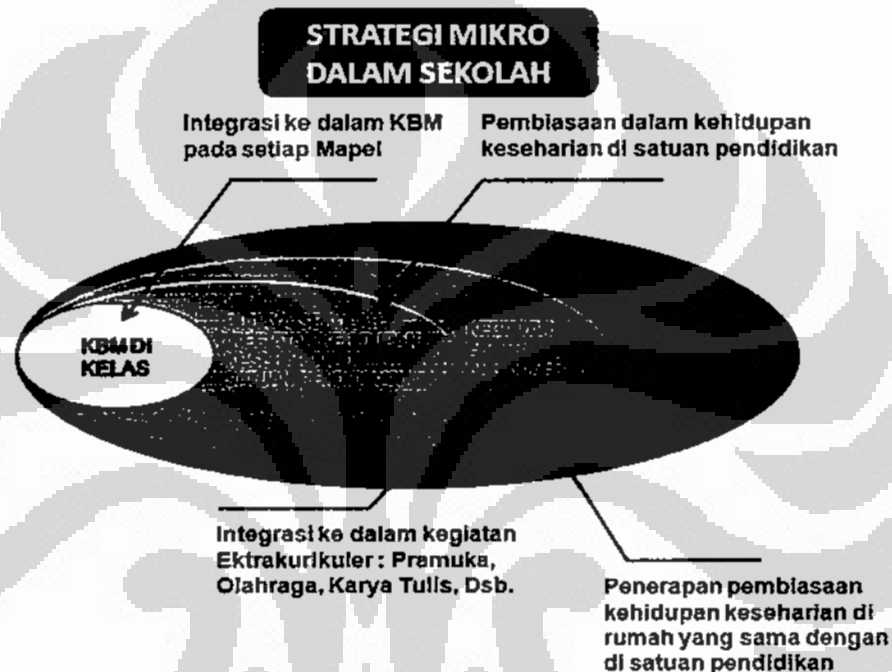
Dengan adanya kerjasama, peran serta dan kejujuran semua pihak, untuk mencerdaskan bangsa, terutama anak-anak, maka hak pendidikan tingkat dasar dapat dipenuhi secara maksimal. Kita pun dapat melihat anak-anak, dari keluarga manapun, terutama keluarga miskin, terpenuhi hak pendidikannya. Pada tingkat selanjutnya, pendidikan yang berkualitas kemudian dapat menjadi rencana bersama, setelah hak pendidikan tingkat dasar tersebut terpenuhi.

4.2.5.2. Lingkup Sekolah

Sekolah sebagai bagian dari lingkungan memiliki peranan yang sangat penting, sehingga setiap sekolah dan seluruh lembaga pendidikan hendaknya memiliki *school culture*, dimana setiap sekolah memilih pendisiplinan dan kebiasaan mengenai karakter yang akan dibentuk. Sebagai tindak lanjutnya, pendidikan karakter ini tidak dijadikan kurikulum yang baku, melainkan dibiasakan melalui proses pembelajaran. Selain itu mengenai sarana-prasarana, pendidikan karakter ini tidak memiliki sarana-prasarana yang istimewa, karena yang diperlukan adalah proses penyadaran dan pembiasaan.

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai

pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik.

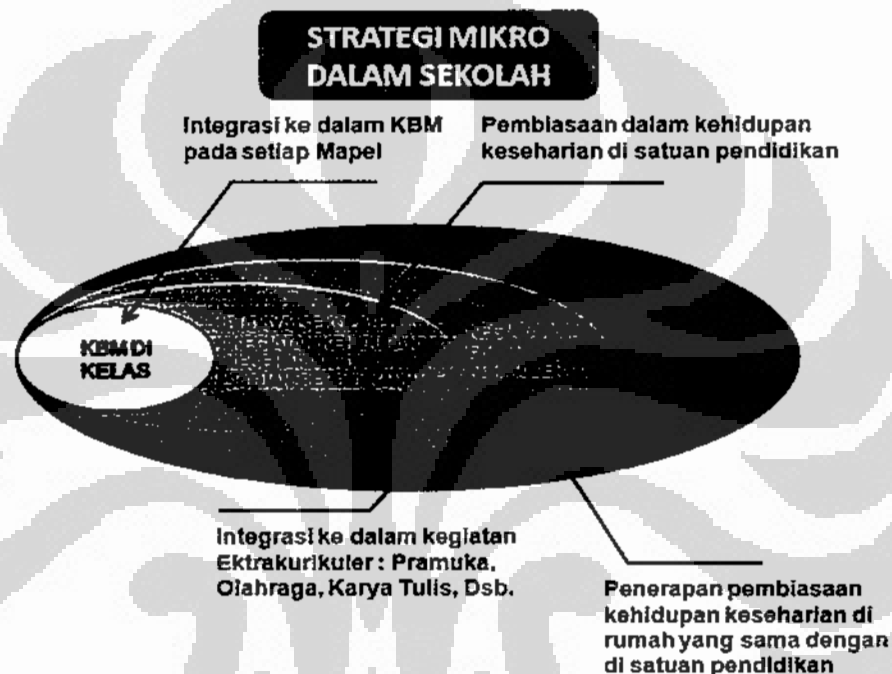


Gambar 4.3 Strategi Mikro Dalam Sekolah

Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi,

pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplicitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik.



Gambar 4.3 Strategi Mikro Dalam Sekolah

Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi,

nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah.

Dalam habituasi, perlu diciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak didik memiliki karakter dan membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi. Sekolah sebagai *leading sector* harus berupaya memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di lingkungan masing-masing.

Sebenarnya, secara materi, pendidikan karakter di sekolah-sekolah di Indonesia, sudah tercakup dalam pelajaran Pendidikan Agama dan sebagian pendidikan lainnya. Namun seperti halnya banyak mata pelajaran lainnya, mata ajaran itu masih lebih berorientasi pada pendekatan kognitif melalui hafalan dan ditujukan untuk perburuan nilai semata. Artinya pembelajaran masih berorientasi pada aspek perolehan pengetahuan semata secara akademik. Pendidikan dan pembelajaran terhadap proses perubahan tingkah laku anak didik masih terabaikan. Jika ini dibiarkan terus-menerus maka kesenjangan antara mengetahui dan perilaku semakin melebar. Oleh karenanya diperlukan usaha yang serius untuk meninjau kembali antara teori pendidikan moral dan karakter yang diajarkan di sekolah, dan bagaimana praktek yang terjadi dalam keseharian siswa di sekolah. Teori, yaitu mencakup dimensi dan kurikulum pendidikan karakter apa saja yang diajarkan di sekolah, bagaimana kualifikasi atau kriteria pendidik yang semestinya, bagaimana hal tersebut diajarkan, bagaimana sistem penilaian keberhasilan pendidikan karakter tersebut. Lalu, lebih penting lagi bagaimana praktek nyata dari teori-teori itu dalam bentuk perilaku guru dan siswa di sekolah. Juga, yang terpenting, adalah keteladanan pemimpin dan guru. Guru harus bisa menjadi contoh. Selain itu, sekolah juga mengajarkan mengenai pluralitas yang memiliki arti penting bagi bangsa ini, bahwa pluralitas bukan ancaman, melainkan sebuah kekuatan yang menjadikan bangsa ini besar.

Tabel 4.7 Indikator Keberhasilan Sekolah dan Kelas Dalam Pendidikan Karakter

Nilai	Deskripsi	Indikator Sekolah	Indikator Kelas
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain	Merayakan hari-hari besar agama Memiliki fasilitas ibadah	Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran Member kesempatan beribadah
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan	Adanya kantin kejujuran Larangan membawa HP saat ujian Transparansi laporan keuangan sekolah	Menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang Larangan menyontek Transparansi penilaian kelas
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya	Menghargai dan member perlakuan yang sama terhadap warga sekolah tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial Memberi perlakuan yang sama terhadap stakeholder	Menghargai dan member perlakuan yang sama terhadap warga kelas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, status social Penugasan dalam kelompok yang berbeda-beda

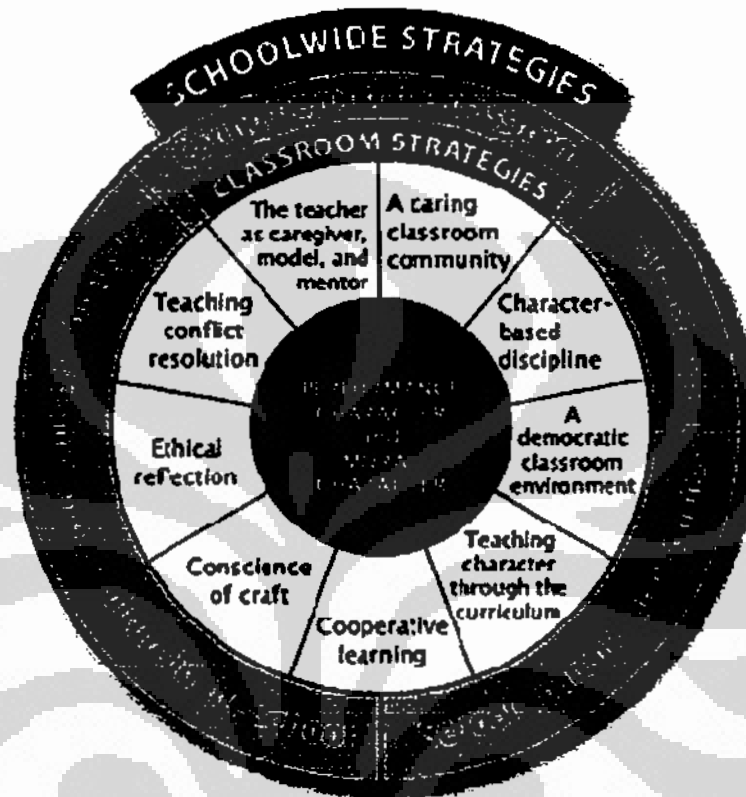
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan	Memiliki catatan kehadiran Penghargaan terhadap warga sekolah yang disiplin dan sanksi terhadap pelanggar aturan Memiliki tata tertib sekolah	Membiasakan hadir tepat waktu Menggunakan pakaian/seragam/peralatan sesuai jenis pelajaran
5. Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya	Menciptakan suasana kompetisi yang sehat Menciptakan situasi sekolah yang menantang untuk bekerja keras	Menciptakan kondisi pantang menyerah dan daya tahan belajar Menciptakan situasi persaingan dalam kelas yang sehat Memiliki pajangan slogan/motto giat belajar
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki	Menciptakan situasi yang menumbuhkan daya pikir dan kreativitas	Pemberian tugas yang memacu tumbuhnya kreativitas Menciptakan situasi belajar yang kreatif
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas	Menciptakan situasi sekolah yang penuh kemandirian	Menciptakan suasana kelas yang member kesempatan anak didik untuk mandiri

8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain	Melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan Pemilihan kepengurusan organisasi sekolah secara terbuka	Membiasakan kelas dengan musyawarah mufakat Pemilihan pengurus kelas secara terbuka Mengimplementasikan model pembelajaran yang dialogis dan interaktif
9. Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar	Menyediakan media komunikasi, baik cetak maupun elektronik Memfasilitasi waraga sekolah untuk bereksplorasi dalam iptek dan budaya	Eksplorasi lingkungan secara terprogram Akses media informasi
10. Semangat kebangsaan	Cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan	Upacara setiap hari senin Upacara hari besar nasional Peringatan hari pahlawan Kunjungan ke tempat bersejarah Perlombaan pada hari besar nasional	Bekerjasama dengan teman sekelas yang berbeda suku, etnis maupun status Mendiskusikan hari-hari besar nasional
11. Cinta tanah air	Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,	Menggunakan produk dalam negeri Menggunakan bahasa Indonesia dengan	Memajang foto presiden, wakil presiden, lambang Negara, peta

	kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa	baik dan benar	Indonesia, dsb Menggunakan produk peraga kelas buatan dalam negeri
12. Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain	Memberi penghargaan atas prestasi setiap warga sekolah Memajang tanda-tanda penghargaan prestasi Program beasiswa bagi yang berprestasi	Memberi penghargaan terhadap hasil karya peserta didik Menciptakan situasi pembelajaran untuk memotivasi peserta didik berprestasi
13. Bersahabat/komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain	Suasana sekolah yang interaktif Berkomunikasi dengan bahasa yang santun Saling menghargai dan menghormati Pergaulan yang sesuai susila	Pengaturan kelas yang interaktif Pembelajaran yang dialogis Tidak ada jarak antara guru dan murid
14. Cinta damai	Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya	Menciptakan suasana sekolah yang harmonis Membiaskan anti kekerasan Membiaskan perilaku yang tidak bias gender	Menciptakan suasana kelas yang damai Pembelajaran yang tidak bias gender Suasana kekerabatan di dalam kelas

15. Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kejajikan bagi dirinya	Program wajib baca Menyediakan fasilitas perpustakaan	Daftar buku untuk bacaan peserta didik Pembelajaran yang memotivasi penggunaan referensi
16. Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam	Membiasakan kebersihan lingkungan Penyediaan tempat sampah Penyediaan kamar mandi dan air bersih Pembiasaan hemat energy Program cinta bersih lingkungan	Memelihara lingkungan kelas Tersedia tempat sampah di kelas Pembiasaan hemat energi
17. Peduli sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan	Memfasilitasi kegiatan social Melakukan aksi sosial	Berempati kepada teman sekelas yang kesusahan Membangun kerukunan warga kelas
18. Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan YME	Membuat laporan setiap kegiatan lisan maupun tertulis Menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas Melakukan pekerjaan sesuai tugasnya tanpa disuruh	Pelaksanaan tugas piket bergilir Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah Mengajukan usul pemecahan masalah

Pendidikan karakter di sekolah juga dapat dikembangkan melalui pendekatan komprehensif, seperti yang diungkapkan Lickona (1991:67-420) melalui beberapa langkah, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 4.4 Pendekatan Komprehensif pada Pendidikan Karakter

Sumber : Thomas Lickona, Educating For Character, halaman 69.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Guru menjadi pengajar dan model yang memberikan contoh yang baik dan mengupayakan hubungan yang harmonis dengan anak didiknya. Misalnya dengan menanamkan nilai-nilai yang positif, menjelaskan efek negative dari mencontek, mempergunakan storytelling sebagai pembelajaran, menghindari penggunaan kata-kata kasar atau makian jika ada anak didiknya yang salah, pendekatan personal ke anak didik.
- 2) Mempraktekkan perilaku moral yang baik di dalam kelas dengan saling menghargai, menghormati dan membantu antar anak didik. Misalnya dengan menjadikan anak didik yang satu dengan yang lainnya saling

mengenal dengan baik, mengikutsertakan anak didik yang lebih tua dalam forum-forum tertentu, meningkatkan kualitas interaksi kelompok, mengembangkan kebiasaan peduli dan kasih-sayang.

- 3) Membiasakan disiplin dengan menegakkan tata tertib kelas maupun sekolah. Misalnya pendekatan aturan secara kooperatif, menyesuaikan aturan dengan perkembangan karakter anak didik, pemberian sanksi jika melanggar aturan, perlu sesekali melibatkan orang tua.
- 4) Menghidupkan suasana demokratisasi di dalam kelas untuk membiasakan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Misalnya menyelenggarakan class meeting, meningkatkan peran anak didik dalam pengambilan keputusan kelas untuk memilih pengurus kelas.
- 5) Mengintegrasikan pembelajaran karakter ke dalam kurikulum yang telah ada dengan menyisipkannya. Misalnya menyisipkan nilai-nilai positif dalam KBM, adanya guru tamu dan pendidikan multikultural.
- 6) Membiasakan kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Misalnya membentuk kelompok tugas atau belajar, kompetisi antar kelompok, proyek kelompok atau kelas, membiasakan anak didik aktif dalam kelompoknya.
- 7) Membiasakan anak didik untuk menghargai setiap proses dan upaya pembelajaran dalam bentuk apapun. Misalnya memberikan pengertian tentang pekerjaan, tentang kenyataan hidup yang ada, memperbanyak pengalaman bagi anak didik, merayakan keberhasilan kelas, memberikan PR, pengajaran sesuai hobi atau minat anak didik.
- 8) Merefleksikan moral dan karakter masing-masing anak melalui tulisan, bacaan, dialog dan diskusi dalam kelas. Misalnya memberikan pemahaman moral dan karakter, membangkitkan potensi pada anak didik sesuai karakter masing-masing.
- 9) Mengajarkan resolusi konflik dalam menangani berbagai jenis konflik yang mungkin dialami anak-anak. Misalnya memecahkan konflik-konflik secara terbuka dan jujur, dan tidak dengan kekerasan, meningkatkan tanggungjawab anak didik terhadap permasalahan yang mereka buat.
- 10) Menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan berkarakter untuk memudahkan anak didik menyerap nilai-nilai yang diajarkan di kelas.

Misalnya aktivitas sekolah harus diarahkan kepada kegiatan untuk belajar membaca lebih giat, pemeliharaan kondisi kelas dengan menggunakan model-model dan kesempatan-kesempatan bagi pelayanan sekolah dan masyarakat untuk membantu peserta didik untuk belajar memperhatikan serta memelihara suasana kelas

- 11) Menciptakan kultur atau budaya sekolah berdasarkan nilai-nilai yang positif. Misalnya melalui kepemimpinan kepala sekolah, memperluas disiplin sekolah, memperluas rasa kemasyarakatan di sekolah, ciptakan organisasi yang demokratis, ciptakan suasana bermoral di antara kelompok orang dewasa, dan sediakan waktu untuk memperlihatkan perilaku moral.
- 12) Mengajak orang tua untuk turut berperan dalam pendidikan karakter khususnya di lingkungan keluarga sebagai upaya membantu kontinuitas pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah. Misalnya mengajak orang tua dan anggota masyarakat sebagai partner dalam pendidikan nilai-nilai, dukung orang tua sebagai pendidik moral pertama dan utama bagi anak-anaknya, mendorong orang tua untuk mendukung sekolah dalam melakukan usaha-usaha untuk memacu meningkatkan nilai-nilai yang baik, dan menggunakan bantuan masyarakat (seperti pemuka-pemuka agama, kalangan pengusaha, dan media massa) dalam mengembangkan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah.

12 strategi pendidikan karakter di dalam kelas dan lingkup sekolah dan lingkungan sekitarnya, merupakan upaya untuk menciptakan performa karakter yang baik yang meliputi *moral knowing (awareness)*, *moral loving/feeling (attitude)* dan *moral action*. Relevansi dari teori ini berarti karakter yang baik terdiri dari mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai atau menginginkan kebaikan (*loving or desiring the good*) dan melakukan kebaikan (*acting the good*).

Dalam komponen “*moral knowing*” (pengetahuan moral) terdapat enam aspek, yaitu (1) kesadaran moral (kesadaran hati nurani). (2) *Knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), terdiri atas rasa hormat tentang kehidupan dan kebebasan, tanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keterbukaan,

toleransi, kesopanan, disiplin diri, integritas, kebaikan, perasaan kasihan, dan keteguhan hati. (3) *Perspective-taking* (kemampuan untuk memberi pandangan kepada orang lain, melihat situasi seperti apa adanya, membayangkan bagaimana dia seharusnya berpikir, bereaksi, dan merasakan). (4) *Moral reasoning* (pertimbangan moral) adalah pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan bermoral dan mengapa kita harus bermoral. (5) *Decision-making* (pengambilan keputusan) adalah kemampuan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah moral. (6) *Self-knowledge* (kemampuan untuk mengenal atau memahami diri sendiri), dan hal ini paling sulit untuk dicapai, tetapi hal ini perlu untuk pengembangan moral.

Dalam komponen "*moral feeling*" (perasaan moral), terdapat enam aspek penting, yaitu (1) *conscience* (kata hati atau hati nurani), yang memiliki dua sisi, yakni sisi kognitif (pengetahuan tentang apa yang benar) dan sisi emosi (perasaan wajib berbuat kebenaran). (2) *Self-esteem* (harga diri), dan jika kita mengukur harga diri sendiri berarti menilai diri sendiri; jika menilai diri sendiri berarti merasa hormat terhadap diri sendiri. (3) *Empathy* (kemampuan untuk mengidentifikasi diri dengan orang lain, atau seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialami oleh orang lain dan dilakukan orang lain). (4) *Loving the good* (cinta pada kebaikan); ini merupakan bentuk tertinggi dari karakter, termasuk menjadi tertarik dengan kebaikan yang sejati. Jika orang cinta pada kebaikan, maka mereka akan berbuat baik dan memiliki moralitas. (5) *Self-control* (kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri), dan berfungsi untuk mengekang kesenangan diri sendiri. (6) *Humility* (kerendahan hati), yaitu kebaikan moral yang kadang-kadang dilupakan atau diabaikan, pada hal ini merupakan bagian penting dari karakter yang baik.

Dalam komponen "*moral action*" (tindakan moral), terdapat tiga aspek penting, (1) *competence* (kompetensi moral), yaitu kemampuan untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan moral dalam berperilaku moral yang efektif; (2) *will* (kemauan), yakni pilihan yang benar dalam situasi moral tertentu, biasanya merupakan hal yang sulit; (3) *habit* (kebiasaan), yakni suatu kebiasaan untuk bertindak secara baik dan benar.

Pendidikan karakter yang hanya mengajarkan *moral knowing* seperti umumnya yang dilakukan di Indonesia dalam pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak menjamin seseorang dapat berkarakter yaitu yang sesuai antara pikiran, kata, dan tindakan. Kita dapat mengatakan bahwa 95% kemungkinan kita semua tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Masalahnya adalah kita tidak mempunyai keinginan kuat atau komitmen kuat untuk melakukannya dalam tindakan nyata. Bentuk-bentuk konkret adanya gap antara aspek kognitif (*knowing*) dan perilaku nyata adalah perilaku kecurangan seperti kasus doping yang menimpa atlet yang ingin meraih juara atau gelar, siswa yang mencontek, menjiplak, membawa kertas catatan ke ruangan ujian, mahasiswa meraih gelar palsu, ijazah palsu, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak jujur dan secara moral tidak bisa diterima.

Penanaman nilai-nilai moral dan akhlak mulia dalam rangka membentuk karakter siswa di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, dan keteladanan. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang sifatnya membentuk perilaku melalui kegiatan yang sudah terjadwal seperti: pelaksanaan upacara bendera, ibadah memperingati hari besar keagamaan dan kegiatan kebersihan. Pelaksanaan upacara bendera yang selalu dilakukan pada setiap hari Senin di sekolah harus dijadikan sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme dan kedisiplinan. Kenyataan yang ada, selama ini pelaksanaan upacara bendera di sekolah tidak lebih dari sebuah rutinitas. Indikasi ini dapat dilihat dari perilaku siswa yang tidak segera menuju lapangan upacara, masih bercakap-cakap saat pelaksanaan upacara atau tidak memakai kelengkapan seragam sekolah secara baik. Upacara tidak boleh dipandang sebagai kegiatan rutinitas di sekolah tetapi harus menjadi sarana menanamkan nilai-nilai disiplin dan patriotisme. Inilah yang oleh Robert Merton disebut sebagai *ritualisme*. Pelaku ritualisme memang secara fisik mengikuti budaya tersebut, akan tetapi dirinya mengabaikan atau bahkan menolak tujuan dari budaya, yang dalam hal ini dicontohkan mengabaikan tujuan upacara bendera.

Peringatan hari besar keagamaan di sekolah yang dimotori organisasi siswa intrasekolah (OSIS) harus dimaknai sebagai pembelajaran untuk menanamkan nilai religius kepada siswa. Pelajaran agama yang diterima siswa

dalam kelas akan lebih mengukuhkan makna bila disinkronkan dengan kegiatan dalam bentuk peringatan hari besar keagamaan. Ceramah dari pemuka agama tentang Nuzul Quran misalnya, akan menumbuhkan keyakinan siswa karena sesuatu yang didapatkannya dalam kegiatan tersebut menjadi “pembenaran” terhadap materi pelajaran agama yang diterimanya di ruang kelas oleh guru agamanya.

Begitu pula halnya dengan kegiatan piket kelas dan kegiatan 7K di sekolah. Kelas adalah milik bersama. Menjaga kebersihan kelas adalah tugas semua warga kelas. Kegotongroyongan dalam menjaga kebersihan kelas dituangkan dalam pembagian tugas piket. Wali kelas, guru harus menanamkan makna kegiatan kebersihan kelas ini karena selain bersih itu pangkal kesehatan, nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, berat sama dipukul dan ringan sama dijinjing harus menjadi tumpuan utama dalam upaya menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Kelas bersih bukan tujuan utama. Sekolah bisa menggaji petugas kebersihan untuk itu, tetapi penanaman nilai-nilai kepada siswa yang lebih utama. Kegiatan kebersihan ini pula perlu diketahui wali siswa sebab tidak sedikit orang siswa menjadi “tidak berkenan” ketika anaknya melanggar peraturan sekolah lalu “dihukum” dengan membersihkan kamar kecil.

Kegiatan spontan, yakni perilaku terpuji dalam kejadian khusus, seperti: memberi salam, tindakan terpuji seperti membuang sampah pada tempatnya, mengatasi silang pendapat yang terjadi antarsiswa. Sekolah harus membiasakan perilaku santun antarsiswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, dan semua warga sekolah. Kesantunan ini diwujudkan dengan kebiasaan memberikan salam. Menyapa dengan hangat sehingga menimbulkan iklim keterbukaan.

Kegiatan keteladanan, yakni perilaku yang dapat dijadikan contoh bagi orang lain. Biasanya keteladanan lebih cenderung berawal dari atas ke bawah. Kepala sekolah harus menjadi teladan bagi guru-guru di sekolah. Kepala sekolah jangan hanya mengumbar kata-kata disiplin dalam rapat guru, tetapi ia pun harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Begitu juga guru-guru jangan hanya bisa menceramahi siswanya bila datang terlambat atau tidak membuat pekerjaan rumah

(PR), tetapi guru pun tidak boleh terlambat datang ke kelas dan selalu membuat persiapan sebelum mengajar.

4.2.5.3. Lingkup Keluarga

Sebagaimana kita ketahui, rumah merupakan lingkungan pendidikan karakter yang pertama yang mempunyai kedudukan vital dalam pembentukan karakter anak, karena pada usia-usia dini, anak lebih mudah dibentuk dan diinternalisasikan nilai-nilai yang baik, dalam kaitan ini adalah nilai-nilai agama, budaya dan Pancasila.

Oleh karena itu, orang tua sebagai guru karakter di rumah, harus selalu memperhatikan perkembangan karakter anak dengan cermat, setelah mengajarkan nilai-nilai karakter yang positif melalui contoh dan pembiasaan kepada anak. Khususnya pada anak kecil, rasa ingin tahu dan kreativitas mereka begitu tinggi. Sebagai orang tua yang baik, hendaknya keingintahuan dan kreativitas tersebut disalurkan dengan cara yang tepat. Seringkali kita menjumpai orang tua yang memarahi anaknya karena mencoret-coret dinding rumah, padahal seharusnya hal itu terjadi. Dalam kasus ini, seharusnya orang tua memberikan media yang tepat untuk anak menyalurkan kreativitasnya.

Satu hal yang harus selalu digarisbawahi adalah bahwa marah dan bentakan yang ditujukan ke anak akan berdampak buruk bagi perkembangan emosinya, karena hal ini sama saja dengan pembiasaan kekerasan pada anak sejak usia dini. Akan lebih baik, jika orang tua menegurnya secara halus dan menunjukkan bagaimana yang benar.

Selain itu, situasi di dalam rumah juga harus harmonis. Seringkali kita temui dalam keseharian masyarakat, adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Hal ini jelas akan berakibat negatif pada perkembangan karakter anak. Terlebih pada keluarga yang *broken home*, maka anak akan jauh dari nilai-nilai kasih sayang, peduli dan cinta damai. Dalam kasus ini, sebaiknya jika memang orang tua sedang mengalami masalah, sebisa mungkin anak tidak tahu, atau lebih parahnya jika kedua orang tua tersebut memutuskan untuk bercerai, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik. Sehingga sekali waktu mereka ingin berkumpul kembali, tidak akan ada hambatan yang berarti.

Jika hal ini yang terjadi, maka pendidikan karakter pada anak harus dilakukan oleh pihak yang mampu, atau jika kedua belah pihak tidak mampu maka bisa diwalikan kepada pihak ketiga, entah itu saudara dari keluarga atau bahkan yayasan atau panti asuhan. Yang terpenting adalah jangan sampai menyalahgunakan anak dan membiasakan hidupnya dalam kekerasan.

Idealnya, pada pembentukan karakter yang pertama, anak sudah diinternalisasikan nilai-nilai agama, budaya dan Pancasila, sebagai pondasi untuk memperoleh pendidikan karakter di lingkungan selanjutnya.

4.2.5.4. Lingkup Masyarakat

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, kita dapat melihat adanya berbagai kasus kemerosotan moral, seperti maraknya korupsi, tindakan asusila, kecurangan-kecurangan yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga dilakukan oleh para pejabat dan pemimpin di negeri ini. Tentu saja, dengan tidak adanya keteladanan dari para pemimpin, maka masyarakat pun terpengaruh dan tergerak untuk melakukan hal yang sama, terlebih jika karakter masyarakat juga belum terbentuk dengan kuat. Apalagi di era globalisasi ini yang memungkinkan masyarakat mengakses segala bentuk informasi dari mana saja, dan yang lebih memprihatinkan adalah tidak semua informasi yang diakses bernilai positif. Malah cenderung bernilai negative, seperti budaya seks bebas dan gaya hidup hedonis yang diadopsi dari budaya barat.

Masyarakat terlihat susah untuk mengadopsi globalisasi positif seperti budaya disiplin dan etos kerja keras yang juga dimiliki oleh bangsa Barat. Selain karena lemahnya karakter masyarakat, juga karena tidak adanya keteladanan dari pemimpin, termasuk penerapan norma dan aturan yang seringkali dengan mudahnya dilanggar. Masyarakat selama ini cenderung dinobatkan oleh kejayaan bangsa di masa lalu, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan sumber daya alam bahkan muncul ungkapan "*tongkat kayu dan batu jadi tanaman*", tanpa mampu melihat jelas ke depan bahwa ada ancaman globalisasi yang nyata. Tentu saja ini memerlukan upaya penyadaran yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pemimpin masyarakat.

Oleh karena itu, metode pendidikan di masyarakat ini mengutamakan keteladanan dari para pemimpin masyarakat dengan membudayakan perilaku anti korupsi, disiplin dalam pekerjaan dan waktu, transparansi administrasi dan keuangan untuk menumbuhkan *public trust* serta adanya *responsibility* yang jelas dari para pemimpin. Sementara di sisi masyarakat, perlu adanya suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut bergerak mensosialisasikan dan mengembangkan pendidikan karakter dalam masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan mempergunakan media seperti seni, olahraga dan teknologi. Irawan Soekarno dalam wawancaranya mengatakan bahwa untuk mensosialisasikan pendidikan karakter bisa melalui seni seperti wayang, ketoprak dan bahkan animasi. Hal ini tentu saja benar, namun akan lebih tepat lagi jika media yang dipergunakan diselaraskan dengan perkembangan zaman. Misalnya melalui produksi film seperti *Anak Seribu Pulau* (Garin Nugroho, 1996), *Merah Putih* (Yadi Sugandi, 2009), *Anak-Anak Merah Putih* (Arswendo, 2010), dan seharusnya bukan hanya itu saja, akan tetapi sejarah bangsa, perjuangan para pahlawan, kekayaan nusantara hendaknya lebih dieksplor dan divisualisasikan sebagai bentuk pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia. Yang disayangkan, selama ini masih banyak film-film yang jelas “tidak berkarakter”, seperti film-film tentang hantu, film esek-esek, atau sinetron di televisi. Melalui olahraga, meskipun jarang, akan tetapi mulai terlihat, salah satunya adalah pertandingan sepakbola yang dijalani Timnas sekarang di piala AFF 2010, yang mampu membangkitkan rasa kebanggaan dan kebangsaan Indonesia serta persatuan dan nasionalisme, yang tentu saja berdampak positif bagi pembangunan karakter bangsa ini.

Dengan didukung pendidikan karakter yang kuat dari lingkungan keluarga dan sekolah, ditambah 2 faktor diatas maka diharapkan akan terbentuk karakter masyarakat yang kuat yang tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman sebagai efek dari globalisasi.

4.2.5.5. Lingkup Media

Metode pendidikan karakter yang selanjutnya adalah penggunaan media massa. Sebagai sarana komunikasi massa, media memiliki peranan dalam pendidikan karakter yang sangat besar. Sesuai dengan **teori peluru** atau **teori**

jarum suntik, efek informasi atau berita yang disampaikan kepada media akan memberikan dampak yang luar biasa pada perkembangan karakter seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang selalu menonton tayangan televisi yang berisi kekerasan, maka dalam kehidupannya sehari-hari orang tersebut akan terpengaruh juga untuk melakukan tindak kekerasan. Atau sesuai dengan teori kultivasi yang menunjukkan bahwa pemberitaan media mampu mempengaruhi nilai-nilai dan persepsi seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang selalu mengikuti tayangan berita mengenai tindak kriminal akan memiliki persepsi bahwa lingkungan di sekitarnya tidak aman lagi. Persepsi ini lambat laun akan mempengaruhi karakternya, sehingga orang tersebut akan menjadi gampang curiga, paranoid dan tidak mudah percaya dengan orang. Tentu saja karakter seperti ini akan berakibat buruk pada pergaulan dan kehidupannya bermasyarakat.

Yang perlu dicermati adalah bahwa media menampilkan tayangan seperti itu hanya untuk mengejar rating. Kadang dengan bahasa yang bombastis dan vulgar, seperti yang dilakukan oleh media cetak yang disebut Koran kuning atau *yellow paper*, untuk menarik konsumen. Tentu saja kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, pemilik media menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam menentukan perkembangan media sebagai sarana pendidikan karakter bangsa. Seperti yang diungkapkan Arswendo Atmowiloto dalam wawancaranya,

media itu bagian dari industry. Dia akan menyuarakan nilai-nilai Pancasila, misalnya, kalau itu menguntungkan penerbitannya dia. Kalau enggak, ya enggak. Media massa yang paling rawan disini, karena dia bagian dari industry. Kamu majalahnya dianggap bagus, medianya dianggap bagus atau stasiun tv nya dianggap bagus kalau penontonnya sedikit, orang ga akan pasang iklan disitu. Dia bekerja dengan sistem nilainya berbeda dengan yang itu tadi. Mereka memang mengabdikan pada industry. Paling campur tangan politik, salah satunya pada zaman orba pemerintah menguasai media, benar atau tidak, tapi program-programnya jalan. Ini, sekarang..sudah ga mungkin begitu lagi. Nah, larinya media ini kepada industry itu saja. System industry memang begitu, karena yang punya modal kuatlah yang bisa..kayak calon anggota DPR kalau ga punya duit ya ga bisa maju, kasarnya gitu. Mereka kalau ga punya duit ya ga bisa punya media, makin kuat, makin kuat dan makin menguasai. Dan disini policy pemerintah itu dibutuhkan, kayak di Amerika, stasiun tv itu diharuskan memiliki tayangan edukasi buat anak, di Thailand juga diharuskan, kalau disini kan pasar dibiarkan liar kayak begitu. Amerika

juga mengalami ini tahun 70an, tapi sebelum tahun 80an, mereka sudah lolos dari situ. Ada banyak program-program seperti Baywatch, tapi ada juga tayangan keluarga seperti little house and the prairiy.

Pemilik media juga harus mengupayakan *corporate social responsibility* kepada masyarakat, misalnya dengan memberikan bantuan kepada korban bencana, menyampaikan iklan layanan masyarakat, dan sebagainya. Pemilik media sebisa mungkin harus menghindari nafsu untuk mengejar rating demi profit semata, karena banyak hal yang bisa dilakukan melalui media, khususnya dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sosialisasi pendidikan karakter. Pemberitaan maupun tayangan yang disiarkan pun hendaknya sesuai dengan norma dan nilai yang ada, dalam hal ini adalah berdasarkan Pancasila.

Langkah terakhir adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip penerapan pendidikan karakter (Lickona, 2007). Character Education Quality Standards merekomendasikan 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif, sebagai berikut

- 1) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter
- 2) Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan dan perilaku
- 3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter
- 4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian
- 5) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik
- 6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua siswa, membangun karakter mereka dan membantu mereka untuk sukses
- 7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari para siswa
- 8) Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia kepada nilai dasar yang sama
- 9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter

- 10) Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter
- 11) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan siswa

4.2.6. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu perkembangan globalisasi di semua aspek kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun peradaban dunia. Dalam suatu negara telah memiliki keteraturan yang terimplementasikan kedalam suatu budaya yang tumbuh dan berkembang sebagai akibat interaksi antar manusia dalam pola kehidupan sehari-hari. Budaya bangsa Indonesia yang patut kita banggakan antara lain adalah sifat gotong-royong, sopan-santun, ramah dan menghargai orang lain.

Salah satu tantangan terbesar yang perlu segera dijawab bangsa yang besar ini, khususnya oleh para pemegang kekuasaan, adalah menjawab tantangan atas lemahnya kesejahteraan rakyat dan penegakkan keadilan. Ketimpangan kesejahteraan antara kota dan desa, terlebih Jawa dan luar Jawa merupakan salah satu permasalahan besar yang harus segera dijawab oleh bangsa ini. Masalah penegakkan keadilan juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius para pengambil kebijakan. Keadilan sosial yang telah lama digariskan para pendiri negeri ini sering menjadi kontraproduktif manakala hendak ditegakkan di kalangan para penguasa dan pemilik uang. Jadilah hingga sekarang ini pisau keadilan yang dimiliki bangsa ini masih merupakan pisau keadilan bermata ganda, tajam manakala diarahkan kepada rakyat kebanyakan, dan tumpul atau bahkan kehilangan ketajamannya sama sekali manakala dihadapkan dengan para pemegang kekuasaan atau pemilik sumber-sumber ekonomi.

Bila dua hal itu saja mampu dikedepankan bisa jadi bangsa yang besar ini tidak akan mudah tergoyahkan oleh berbagai tantangan dan ancaman yang ada, baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari dalam bisa jadi akan pupus dengan sendirinya manakala kesejahteraan rakyat terkondisikan pada keadaan yang baik dan keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Intelijen harus

mampu mencermati ancaman-ancaman ini untuk dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Ancaman dari luar, termasuk arus besar globalisasi sekalipun tidak akan menggeruskan Pancasila sebagai sebuah ideologi tetapi justru akan menjadikan Pancasila sebagai kekuatan yang mampu mewarnai arus besar globalisasi. Terlebih karena globalisasi bagi bangsa ini bukanlah merupakan barang baru.

Dengan runtuhnya Uni Sovyet yang berideologi komunis, orang meragukan manfaat ideologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang beranggapan bahwa ideologi tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat penganutnya. Ideologi sekadar dipandang sebagai pembenaran terhadap kebijakan yang diperjuangkan oleh para elit politik. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa banyak sekali kerawanan dan kekurangan yang sekarang kita alami, termasuk berbagai persoalan yang diutarakan di atas, merupakan konsekuensi dari kelalaian masa lalu yang terutama menyebabkan lemahnya karakter bangsa.

Maka kalau kita hendak mengatasi berbagai kekurangan sekarang seperti Korupsi, tingginya angka Kemiskinan, lemahnya kekuasaan Hukum, Pendidikan Umum yang tertinggal dari negara tetangga, kurangnya jaminan Kesehatan, dan lainnya, maka itu adalah karena masih lemahnya karakter bangsa dewasa ini. Kelemahan karakter ini berdampak pada Kepemimpinan, Manajemen dan Perilaku yang kurang memberikan keberhasilan dalam pencapaian Tujuan Perjuangan.

Sekarang dalam kenyataan sukar menemukan manusia dan pemimpin Indonesia dengan sifat dan sikap nasionalis atau patriot yang dilandasi Pancasila, yang secara tangguh, ulet dan gagah berani memperjuangkan Tujuan Perjuangan Bangsa. Malahan yang sering kita temukan, bahkan di kalangan pejabat tinggi Negara, adalah sifat dan sikap lemah, rasa inferior terhadap bangsa lain, mudah diliputi perasaan menyerah, sikap munafik sehingga seringkali implementasi jauh berbeda dari yang dibicarakan dan kurangnya komitmen untuk mengusahakan yang terbaik.

Tabel 4.8 Faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter

Aktor Faktor	Pemerintah	Sekolah	Keluarga	Masyarakat
Pendukung	Keteladanan para pemimpin Transparansi dan akuntabilitas Responsibility pejabat	Kualitas dan keteladanan perangkat sekolah Tata tertib sekolah yang jelas Suasana sekolah yang kondusif	Bimbingan agama, moral dan budaya serta contoh dari orang tua Suasana keluarga yang harmonis	Pemimpin masyarakat yang bisa jadi panutan Good mass media Aturan dan norma yang jelas
Penghambat	Budaya korupsi Rendahnya moral pejabat Program-program yang tidak konkret	Pelanggaran tata tertib Perangkat sekolah tidak bisa dicontoh Kecurangan sistemik pada ujian	Unwealth family Broken family Keluarga yang tidak harmonis	Suasana masyarakat yang chaos Media massa yang hanya mengejar profit Ideologi asing

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Dari tabel diatas sudah terlihat cukup jelas, faktor-faktor yang mampu mendukung dan menghambat penyelenggaraan pendidikan karakter. Dengan memanfaatkan seluruh potensi keunggulan diri yang ada pada bangsa ini, pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat harus bersinergi mengembangkan pendidikan karakter sesuai dengan kewenangan dan lingkup pendidikan karakter yang dimilikinya. Karakter bangsa Indonesia yang lemah seperti yang dikemukakan Mochtar Lubis (1977), seperti munafik atau hipokrit, enggan bertanggungjawab, percaya takhayul dan feodal harus diminimalisir melalui penerapan metode karakter di lingkungan masing-masing.

Pemerintah dengan program-program dan kebijakan yang dimilikinya harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas, serta menghindari budaya korupsi dan budaya yang bisa melemahkan birokrasi, untuk mewujudkan *public trust*. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan formal harus mampu menerapkan metode pendidikan karakter dengan didukung keteladanan dari perangkat sekolah dan tata tertib sekolah untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam upaya menumbuhkan situasi sekolah yang kondusif dan nyaman. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan karakter yang pertama harus mampu memaksimalkan penanaman nilai agama, budaya dan Pancasila serta pembiasaan karakter yang positif kepada anak, dan meminimalisir adanya kekerasan dalam rumah tangga ataupun pertengkaran yang tidak perlu dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis yang akan berdampak positif pada perkembangan jiwa dan kepribadian anak. Sementara itu, sebagai lingkungan pendidikan karakter yang terakhir, di dalam masyarakat harus terdapat unsur pemimpin yang baik, aturan dan norma yang jelas, masyarakat yang taat norma dan sosialisasi melalui media yang tepat. Sebisa mungkin diminimalisir faktor-faktor yang mampu menimbulkan konflik dan hal-hal yang mampu mereduksi harmonisasi masyarakat. media juga diharakan tidak mengejar profit semata, yang akhirnya berekses negatif dalam upaya pembentukan karakter bangsa, terlebih dalam situasi globalisasi dan persaingan ideologi seperti sekarang ini.

Selama para aktor pendidikan karakter tersebut melandaskan pola pikir, sikap dan perilakunya pada nilai-nilai Pancasila, agama dan budaya selain didukung dengan faktor-faktor positif dan mereduksi faktor-faktor negatif, maka pendidikan karakter akan mampu terselenggara dengan baik dalam upaya mencapai tujuannya membentuk manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila.

4.2.7. Tujuan Akhir Manusia ber-Pancasila

UUD 1945 (versi Amendemen), Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Bila dipelajari lebih lanjut, tujuan pendidikan nasional sesuai dengan substansi Pancasila, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada sisi lain secara *substantif-edukatif* sistem pendidikan nasional harus ditujukan untuk menghasilkan manusia dewasa Indonesia yang "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab", sebagaimana digariskan sebagai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus diwujudkan sebagai proses belajar anak dan orang dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang berdasar Pancasila (*knowing Pancasila*), belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*doing Pancasila*) dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan (*building Pancasila*).

Jelas sekali bahwa Pembangunan Karakter harus menjadi prioritas tinggi dalam perjuangan bangsa kita dewasa ini dan masa depan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kelangsungan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila sangat tergantung dari kuatnya karakter bangsa. Untuk itu bangsa Indonesia dengan dipimpin kepemimpinan nasional harus melaksanakan Pembangunan Karakter secara intensif dan luas pada seluruh bangsa. Yang terpenting adalah Teladan yang diberikan oleh setiap Pemimpin, mulai dari Kepala Negara hingga eselon pemerintah terendah, juga oleh setiap pemimpin organisasi apa pun di masyarakat

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Suatu penelitian intelijen strategik hanya akan memiliki nilai guna ketika hasil penelitian tersebut sudah menjadi produk intelijen untuk disajikan kepada user. Oleh karena itu, dari hasil analisa pada bab 4, perlu disarikan beberapa kesimpulan termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan saran-saran yang mengandung nilai intelijen sebagai bahan pertimbangan *user* dalam mengambil suatu *policy*, dalam hal ini adalah pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila. Dengan produk intelijen yang memiliki nilai lebih, diharapkan *policy* yang akan dihasilkan oleh *user* akan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab 4 dengan mencermati fakta-fakta pada bab 3, terlihat bahwa terjadi kesenjangan antara kondisi karakter bangsa yang diharapkan dengan kondisi karakter bangsa saat ini. Menurut beberapa narasumber, kondisi karakter bangsa Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, karena Pancasila sebagai ideologi dan kepribadian bangsa mulai ditinggalkan dan dilupakan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk merevitalisasi atau membumikan Pancasila kembali sekaligus menginternalisasikan Pancasila melalui suatu pendidikan karakter bangsa untuk membentuk manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila.

5.1.1. Situasi Kekinian Bangsa

Dari hasil wawancara terlihat, bahwa semua narasumber menyepakati bahwa Pancasila merupakan ideologi Negara kita. Oleh karena itu seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah didasarkan pada Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki beberapa kedudukan, sebagai dasar negara, pandangan hidup, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa yang harus senantiasa diwujudkan eksistensinya, sesuai dengan rumusan-rumusan tersebut.

Sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendahulu kita senantiasa melakukan upaya tersebut. Dalam perjalanannya sebagai ideologi negara, Pancasila tak luput dari berbagai ancaman yang menerpa. Beberapa pemberontakan yang bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi lain, pernah terjadi di Indonesia. Berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap Pancasila disebabkan karena sebagian bangsa Indonesia belum mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Pancasila sebagai **karakter bangsa**, perlu dipahami dengan benar. Karena sila-sila dari Pancasila itu digali dari kehidupan rakyat Indonesia sendiri, yang bersumberkan pada **nilai-nilai luhur** bangsa. Pancasila bukan saja merupakan *political contract* atau konsensus nasional, tetapi juga merupakan ideologi dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia dituntut bukan hanya mengerti Pancasila, melainkan juga harus memahami nilai-nilai dasar Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membangun karakter bangsa sebaiknya dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila karena jika suatu bangsa dapat mengamalkannya maka akan terbentuk suatu bangsa berkarakter tangguh yang menjadi suatu keharusan, terlebih dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Persaingan ideologi yang terjadi dalam era **globalisasi** tak dapat dipungkiri menimbulkan kekhawatiran tersendiri, yang telah ditunjukkan oleh Daniel Bell melalui tesisnya *The End Of Ideology* (1962). Tesis ini pun terbukti ketika Uni Sovyet runtuh, dan sosialisme komunis tumbang.

Namun, suatu ideologi tidak akan "mati" selama ia dijadikan tuntunan dan pedoman dalam menentukan arah kehidupan ke depan bagi sistem kehidupan bangsa (*belief system*). Suatu ideologi diterpa dan diuji oleh keadaan sekitarnya yang menyebabkan ideologi itu layu, bangkit, berkembang, dan bisa jadi "hidup" kembali. Atas cermatan ini, tampaknya tidak sulit menjelaskan bila kapitalisme menjadi sebuah ideologi negara dan bangsa-bangsa di belahan Amerika dan Eropa Barat. Demikian pula, tidak aneh bila ajaran-ajaran Islam dijadikan sebagai "ideologi" di negara seperti Iran. Jawaban terhadap semua masalah itu adalah karena ideologi bangsa tersebut telah mampu dijadikan sistem hidup dan kehidupannya. Demikian juga hendaknya dengan Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila merupakan ideologi murni, ideologi praktis. Pancasila telah menjadi ciri

khas bangsa Indonesia yang tidak ditemukan pada bangsa lain. Oleh karena itu bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian Pancasila ditengah gencarnya arus globalisasi.

Dengan kata lain, Pancasila tidak akan dapat membumi jika tetap hanya dijadikan mitos dan impian utopia tanpa memiliki model praktis dalam memecahkan masalah hidup. Pancasila tidak hanya dijadikan pedoman bangsa, namun harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar tetap tegak berdiri dalam wadah NKRI. Pancasila harus menjadi bagian kehidupan riil bangsa kita, bukanlah mitos. Oleh karena itu, hendaknya :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk kerukunan antar umat beragama, antara etnis dan kelompok masyarakat yang plural, toleransi terhadap perbedaan, namun bersedia mendahulukan kepentingan bersama.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diartikan sebagai penghargaan kita kepada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, menjamin kemerdekaan orang per orang tanpa mebeda-bedakan latar belakang agama, suku, bangsa dan warna kulit.
- c. Sila Persatuan Indonesia hendaknya menimbulkan kesadaran perlunya perstauan sebagai masyarakat yang plural, baik dari etnis, budaya maupun agama, sehingga pluralism ini menjadi potensi yang besar dalam membangun bangsa
- d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan diartikan sebagai rujukan demokrasi yang lebih mengedepankan permusyawaratan untuk menjamin kelompok minoritas, sesuai dengan kondisi masyarakat yang plural.
- e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan indikasi bahwa keadilan sosial merupakan titik sentral pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bangsa, untuk melahirkan kemandirian bangsa serta daya kompetitif bangsa yang tangguh, diatas landasan kolcktif, bukan perorangan.

Sayangnya, bangsa ini belum mampu menegakkan Pancasila dengan benar, sehingga bangsa ini terhanyut dalam pusaran globalisasi yang membawa

akses positif maupun negatif. Globalisasi positif tentunya sangat bermanfaat bagi bangsa ini, misalnya dengan kemudahan akses informasi di dunia yang semakin *borderless* ini dan adanya perkembangan teknologi yang menjadikan bangsa kita tidak ketinggalan zaman. Namun, akses negatif globalisasi, kita sadari maupun tidak, telah mempengaruhi perkembangan karakter bangsa ini. Berdasarkan data litbang Kompas tahun 2010, terlihat bahwa korupsi hampir atau bahkan telah menjadi budaya di Indonesia. Belum lagi dengan adanya pergaulan bebas, gaya hidup konsumtif, hedonis, kemerosotan moral yang kesemuanya terjadi karena bangsa ini tidak mampu memanfaatkan Pancasila sebagai filter/penyaring budaya. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Dari level makro hingga mikro bahkan telah terjadi disorientasi dan hilangnya leader pancasilais di berbagai lini.

Terlebih lagi, dengan bergulirnya globalisasi, maka semakin banyak ideologi asing yang masuk ke wilayah Indonesia, seperti liberalisme, sosialisme dan fundamentalis Islam dalam berbagai variannya. Tentu saja ini menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi eksistensi Pancasila sebagai perwujudan karakter bangsa. Jika kita tidak mampu mempertahankan Pancasila sebagai karakter bangsa, yang memiliki muatan nilai-nilai luhur bangsa, maka kita akan tergerus oleh pergerakan zaman, dan sekali lagi, ini akan semakin membuktikan kebenaran tesis Bell.

5.1.2. Urgensi Pendidikan Karakter sebagai Upaya Revitalisasi Pancasila

Dari hasil analisa pada bab 4 didapatkan kesimpulan bahwa upaya **internalisasi** pancasila melalui pendidikan karakter bangsa dirasakan sebagai sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan karena berkembangnya beberapa kondisi yang mendorong baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam mengharapkan hasil upaya internalisasi, patut diperhitungkan pengaruh berbagai faktor nasional dan internasional yang cenderung menghambat. Semakin dalam proses internalisasi Pancasila terjadi, maka karakter manusia Indonesia akan semakin kuat sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman ideologi maupun dampak globalisasi lainnya.

Oleh karena itu, upaya **revitalisasi Pancasila** merupakan sesuatu yang **urgent** dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Pancasila harus “dihidupkan” dan

“dibumikan” melalui langkah-langkah konkret yang terus menerus disegarkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk itulah diperlukan suatu metode baru dalam proses pembelajaran Pancasila yang bukan hanya sekedar indoktrinasi, akan tetapi lebih kepada internalisasi Pancasila ke dalam kepribadian dan karakter tiap-tiap warga negara, sehingga terbentuk manusia Indonesia yang ber-Pancasila, yang akan melanggengkan eksistensi Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi bangsa. Namun disadari proses internalisasi Pancasila ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena yang dibudayakan adalah nilai-nilai yang mendasar.

Menurut narasumber, mentransformasi Pancasila dengan cara nonindoktrinatif, maka dengan sendirinya aplikasi Pancasila akan terkontrol dari berbagai lokus, seperti lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Butir-butir Pancasila akan dihayati dan dilakukan dengan kesadaran penuh sehingga diharapkan semua perilaku menyimpang yang nonperilaku anti-Pancasilais dapat terkontrol dengan baik dan kembali ke sumber dasarnya yaitu Pancasila. Namun, tidak dilupakan bahwa masyarakat memerlukan contoh dari atas, yaitu para pemimpin lebih dulu.

Pendidikan karakter yang berisikan interaksi antara peserta didik dalam latar pendidikan formal dan nonformal, dan antara anggota masyarakat dalam latar pendidikan informal, dengan seluruh sumber inspirasi dan informasi yang memungkinkan setiap orang baik secara individual maupun kolektif mampu mewujudkan esensi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan sebagai proses idealisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang multikultural-bhinneka tunggal ika. Yang menjadi *integrating forces* adalah sistem nilai Pancasila yang baik secara substantif masing-masing silanya maupun secara sistemik keseluruhan lima silanya sangat menghargai dan mewadahi keberagaman dalam keyakinan, dalam dimensi kemanusiaan, dalam semangat mempersatukan Indonesia, dalam mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan sebagai wahana penting dalam pembentukan karakter bangsa mengandalkan adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila yang harus dilaksanakan

secara terencana dan sistematis, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sementara itu, lembaga-lembaga keagamaan berperan penting dalam rangka membekali dan membimbing umatnya dengan penyadaran akan kemajemukan, toleransi, dan kebersamaan sebagai bangsa yang memiliki kesamaan pengalaman historis dan perasaan senasib sepenanggungan. Di samping itu, media massa memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang besar bagi tumbuh dan berkembangnya nasionalisme dan pembangunan karakter bangsa melalui publikasi-publikasi yang dapat selalu membangkitkan ingatan kolektif tentang rasa kebangsaan, sebagaimana peran ini telah dimainkan oleh media massa di awal-awal penyebaran paham nasionalisme dalam panggung sejarah perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, di masa kini media massa juga harus dapat berkiprah sebagai agen pembangunan karakter bangsa dengan menjadikan gerakan budaya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai agenda settingnya.

Pendidikan karakter sesuai pendapat Lickona (1991) merupakan sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*) selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis, sehingga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh aktor yang terkait, tidak seharusnya berhenti hingga disini. Pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi. Pendidikan adalah persoalan kemanusiaan yang harus dihampiri dari perkembangan manusia itu sendiri oleh karena itu perlu diketahui dan dirumuskan secara utuh sosok generasi manusia Indonesia masa depan. Proses pendidikan karakter akan melibatkan ragam aspek perkembangan peserta didik, baik kognitif, konatif, afektif maupun psikomotorik sebagai suatu keutuhan (holistik) dalam konteks kehidupan kultural. Oleh karena itu pemerintah hendaknya menjamin terselenggaranya proses pendidikan karakter yang kontinyu.

Proses pembelajaran yang membangun karakter tidak bisa sebagai proses linier layaknya dalam pembelajaran kebanyakan bidang studi yang bersifat transformasi informasi, walaupun sesungguhnya itu keliru, tapi tidak bisa juga berwujud menjadi sebuah mata pelajaran "pendidikan karakter" yang diajarkan sebagai sebuah bidang studi. Karakter tidak bisa dibentuk dalam perilaku instan yang bisa diolimpiadekan. Perkembangan karakter harus menyatu dalam proses

pembelajaran yang mendidik, disadari sebagai tujuan pendidikan, dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang transaksional dan bukan instruksional, dan dilandasi pemahaman secara mendalam terhadap perkembangan peserta didik. Suasana pembelajaran ini akan menumbuhkan efek pembelajaran yang di dalamnya termasuk pengembangan karakter, *soft skills* dan sejenisnya seiring dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran itu.

5.1.3. Bentuk Program Pendidikan Karakter Bangsa

Dari hasil analisa wawancara yang dilakukan terhadap para narasumber, didapatkan unsur inti proses pendidikan karakter, yaitu subyek, obyek dan metodenya. Dilihat dari subyeknya, pendidikan karakter di rumah, sekolah dan masyarakat melibatkan aktor utama yang bertanggungjawab dan aktor pelaksana yang melaksanakan tugas-tugas pendidikan karakter. Di rumah, yang menjadi aktor utamanya adalah orang tua dan pemerintah, khususnya bagi unwealth family. Sedangkan aktor pelaksananya adalah orang tua dan saudara si anak.

Di sekolah, yang menjadi aktor utamanya adalah Pemerintah, Kemendiknas dan Perangkat sekolah. Sedangkan aktor pelaksananya adalah kepala sekolah, guru dan pelaksanan tata usaha. Sementara dimasyarakat, yang menjadi aktor utamanya adalah pemimpin dan pemilik media. Sedangkan aktor pelaksananya adalah perangkat masyarakat, masyarakat umum dan media massa. Untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan karakter, maka sinergi dari masing-masing aktor atau pelaku pendidikan karakter tersebut menjadi syarat mutlak yang harus ada, karena pendidikan karakter yang berlangsung di masing-masing lingkungan pendidikan tersebut sebenarnya saling menguatkan dan melengkapi.

Dilihat dari obyeknya, terdapat 4 jalur pendidikan karakter yang masing-masing memiliki perangkat, media komunikasi dan sasaran yang berbeda-beda. Di rumah, perangkat yang dimiliki adalah orang tua dan saudara yang mempergunakan acara keluarga, makan bersama, rekreasi keluarga sebagai media komunikasinya untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang positif, agama dan budaya kepada anak sejak dini, sebagai pondasi bagi pendidikan karakter di

lingkungan selanjutnya. Oleh karena itu pendidikan karakter memerlukan keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa. Pola asuh atau *parenting style* adalah salah satu faktor yang secara signifikan turut membentuk karakter anak. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan utama dan pertama bagi anak, yang tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Permasalahan intern rumah tangga, seringkali menjadi hambatan dalam pendidikan karakter, sehingga pemerintah melalui instansi terkait harus turut memberikan perhatiannya, misalnya melalui Komnas Perlindungan Anak.

Di sekolah, perangkat yang dimiliki adalah Kepala sekolah, Guru, Pelaksana Tata Usaha dan Murid, yang mempergunakan Mading sekolah, Tata tertib sekolah, Absensi guru dan murid, Upacara bendera, Praktek lapangan (PKL, KKN, magang) sebagai media komunikasinya untuk menanamkan nilai-nilai luhur (setidaknya ada 18 nilai (*value*), seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab) yang bersumberkan pada Pancasila, agama dan budaya. Berkaitan dengan hal ini, sekolah diharapkan memiliki budaya sekolah (*school culture*) yang kuat dan kokoh.

Di masyarakat, perangkat yang dimiliki adalah Pemimpin, Perangkat masyarakat, Masyarakat umum dan Norma-norma, yang mempergunakan Acara 17 agustusan, Upacara 17 Agustus, Papan informasi, Spanduk-spanduk dan selebaran, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kerja bakti sebagai media komunikasinya untuk menciptakan karakter baru yang kritis, sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman, khususnya globalisasi saat ini.

Sedangkan pada media massa, perangkat yang dimiliki adalah Pemilik media, Media massa dan Pasar media yang mempergunakan Surat pembaca, Program CSR dari media yang bersangkutan, seperti peduli bencana dan Iklan layanan masyarakat sebagai media komunikasinya untuk menciptakan pers yang berkarakter sehingga mampu dan turut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bukan hanya mengejar rating tertinggi dengan alasan profit semata. Bagi pemilik media, hal ini mungkin merupakan sebuah dilema, karena sosialisasi

pendidikan karakter merupakan hal yang non populis jika dibandingkan dengan tayangan ataupun pemberitaan yang high rating, seperti acara gosip, sinetron, dan berbagai acara yang mengadopsi budaya barat yang negatif. Namun hal ini harus disadari oleh pemilik media sepenuhnya, bahwa mereka juga bertanggungjawab dalam pembentukan karakter bangsa ini, mengingat efek media yang begitu luar biasa terhadap perkembangan karakter seseorang.

Dilihat dari **metoda** yang dipergunakan, masing-masing aktor mempergunakan metoda yang berbeda-beda meskipun sebenarnya satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Pemerintah, misalnya, berupaya menciptakan suatu gerakan nasional pendidikan karakter, menyusun kebijakan berupa UU No 20 tahun 2003 mengenai Sisdiknas yang didalamnya terdapat tujuan pendidikan karakter, disusul dengan adanya Instruksi Presiden No 1 tahun 2010 mengenai prioritas percepatan pembangunan nasional di bidang pendidikan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendiknas dengan menyusun program pendidikan karakter yang digariskan dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yang kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan dalam launching Pendidikan Karakter Bangsa, launching televisi Citra Indonesia Terampil dan Taman Bacaan Masyarakat @Mall, disamping adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pengawasan sekolah internasional yang mulai marak di tanah air. Hal ini harus terus menerus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan.

Sekolah, mempergunakan beberapa metoda diantaranya adalah penyusunan bahan ajar baru bagi pendidikan karakter yang meliputi pendidikan Pancasila, agama dan budaya; pengintegrasian pendidikan karakter dengan mata pelajaran yang sudah ada dan pembelajaran karakter melalui pendekatan habituasi dan contoh. Satu hal yang harus diwaspadai dari pendekatan habituasi adalah jika sudah bersinggungan dengan budaya atau tradisi. Tanpa adanya internalisasi nilai yang kuat kepada peserta didik, dengan pendekatan habituasi, yang akan terjadi adalah **ritualisme**, yaitu mengabaikan tujuan budaya, meskipun peserta didik tersebut mengikuti serangkaian budaya yang dimaksud. Namun ritualisme ini bisa saja dihindari dengan menciptakan budaya sekolah yang kokoh.

Sementara itu, di rumah, metoda pendidikan karakter yang dipergunakan adalah mengajarkan nilai-nilai karakter yang positif kepada anak sejak dini, kemudian mencermati dan perkembangannya, dengan menghindari adanya kekerasan dalam proses internalisasi nilai.

Di masyarakat, pemimpin masyarakat mempergunakan norma dan aturan sebagai metodenya, yang tentu saja diiringi dengan pemberian contoh dan keteladanan yang positif dengan meminimalisir segala bentuk budaya yang negatif, seperti budaya korupsi, untuk mewujudkan *public trust*, sehingga akan tercipta suasana kehidupan bermasyarakat yang kondusif bagi sosialisasi dan pendidikan karakter yang kritis. Dalam kaitan ini, perangkat masyarakat bisa dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada dan peduli terhadap upaya pendidikan karakter. Pendidikan karakter di masyarakat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi misalnya melalui film-film yang memiliki pesan moral yang baik, video animasi atau bahkan melalui game. Pendidikan karakter juga bisa mempergunakan bahasa universal dalam masyarakat yaitu seni dan olahraga, misalnya melalui pertunjukan kesenian tradisional atau kontemporer, wayang, pertandingan bola dan sebagainya.

Yang terakhir, dalam media massa, metoda pendidikan karakter yang dipergunakan adalah pengupayaan CSR kepada masyarakat dan turut membantu pendidikan karakter dengan lebih memperhatikan isi tayangan, dibandingkan nafsu untuk mengejar rating demi profit semata. Hal ini sesuai dengan teori efek media yaitu *Bullet Theory* yang memiliki kesan kuat dan menancap dalam pada karakter seseorang. Sejalan dengan teori hegemoni media juga, maka pemilik media harus menyadari hal ini, sebagai bagian dari upaya mensukseskan pendidikan karakter, sehingga pemilik media bekerjasama dengan instansi yang menangani pendidikan karakter harus mampu menyuguhkan suatu tayangan “berkarakter” namun memiliki sisi profit. Sehingga tayangan tersebut mampu menarik perhatian masyarakat dan terjadi transfer nilai (*values*).

Lebih lanjut, hasil analisa menunjukkan dalam pembentukan manusia berkualitas, pendidikan karakter amat diperlukan agar manusia bukan hanya mengetahui kebajikan (*knowing the good*) tetapi juga merasakan (*feeling the good*), mencintai (*loving the good*), menginginkan (*desiring the good*) dan

mengerjakan (*acting the good*) kebajikan. Metode pendidikan melalui otak kiri dengan hafalan konsep (*memorization in learning*) harus dirubah dengan metode yang lebih menekankan pada otak kanan dengan perasaan, cinta, serta pembiasaan dan amalan kebajikan di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Meskipun berbeda-beda, akan tetapi pada prinsipnya, masing-masing metoda tersebut bermuara pada satu hal yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan mencermati faktor-faktor yang menjadi pendukung seperti keseriusan pemerintah dan instansi terkait serta pendidikan karakter yang kontinyu; dan faktor-faktor penghambat seperti keapatisan pemerintah, lemahnya karakter dan masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan karakter, maka kita dapat mengetahui apa dan bagaimana mengoptimalkan serta mengefektifkan pendidikan karakter yang mampu mencapai tujuan manusia berkarakter Pancasila, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas tiap-tiap lingkungan pendidikan sekaligus sebagai upaya revitalisasi Pancasila demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.2.Saran

Sebagai bangsa yang terlibat dalam pergaulan dunia, kita tidak mungkin menghindar dari arus globalisasi yang membawa semua dampaknya baik positif maupun negatif, yang tentunya akan berpengaruh kepada seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar jatidiri bangsa tetap kokoh di tengah pergaulan dunia internasional, perlu ada upaya yang sistematis dan masif secara berkesinambungan untuk mengaplikasikan nilai Pancasila yang dibangun bersama antara pemerintah dan masyarakat. Reorientasi revitalisasi tentang nilai Pancasila harus dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh seluruh lembaga negara. Dalam tesis ini, upaya yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan karakter,

yang berlandaskan kepada nilai-nilai luhur bangsa yang disarikan ke dalam Pancasila, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya.

Oleh karena itu, sebagai produk intelijen, tesis ini menyertakan pula rekomendasi yang *actionable* sebagai bahan pertimbangan *user* dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait upaya revitalisasi Pancasila melalui pendidikan karakter, yang dibedakan ke dalam tiga level, yaitu level makro, meso dan mikro. Pada level makro, rekomendasi berupa implikasi strategik, pada tataran idea dan berada pada tingkatan negara. Pada level meso, rekomendasi melingkupi institusi yang berwenang, seperti kementerian terkait dan lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus. Sedangkan pada level mikro, rekomendasi berupa sentuhan pendidikan karakter secara langsung kepada keluarga, masyarakat dan media massa.

5.2.1. Level Makro

1. Revitalisasi Pancasila pada prinsipnya harus segera dilakukan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat adanya berbagai permasalahan dan kemerosotan karakter bangsa. Oleh karena itu Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.
2. Revitalisasi Pancasila sebagai falsafah negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan utuh dengan pembukaan, dikonkretisasikan sebagai kondisi cerminan kondisi obyektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang berkembang. Sesuai karakter hakikinya, Pancasila harus mampu menyelaraskan diri dengan perkembangan globalisasi dan mampu beradaptasi dengan situasi persaingan ideologi untuk mewujudkan Pancasila yang mampu *go international*.
3. Revitalisasi Pancasila sebagai falsafah negara harus diarahkan pada pembinaan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam upaya mengatasi krisis dan disintegrasi.

4. Revitalisasi Pancasila harus diarahkan pula pada pembentukan karakter bangsa, khususnya melalui sektor pendidikan, baik formal, informal maupun non formal, karena pada hakekatnya Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur dan karakter bangsa Indonesia, sehingga membangun karakter bangsa sama halnya dengan merevitalisasi Pancasila.
5. Kesadaran dan kebanggaan berbangsa Indonesia harus ditumbuhkan melalui proses usaha-usaha pendidikan, khususnya *nation and character building*, kesadaran bela negara, kemampuan menyaring pengaruh budaya dari luar, penghargaan atas kekayaan dan kreativitas bangsa.
6. Perlunya penyadaran bahwa proses pendidikan bukan hanya transfer knowledge, akan tetapi juga transfer values. Oleh karena itu, pendidikan karakter bangsa harus segera dilakukan dengan mentransfer nilai-nilai Pancasila dalam upaya revitalisasi Pancasila.
7. Perlunya penyusunan kebijakan serta kontinuitas program demi berlangsungnya pendidikan karakter yang menyeluruh, mengingat pendidikan karakter yang bersifat *never ending process*.
8. Perlunya pembenahan pendidikan karakter bangsa dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional, terutama dalam pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan, baik secara terintegrasi maupun dengan penyelarasan kurikulum.
9. Perlunya kesadaran dan komitmen dari kita, mulai dari diri sendiri, sebagai warga dari sebuah keluarga, warga masyarakat, bangsa, dan negara, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal, sampai dengan para pemimpin dalam semua level mempunyai tugas dan tanggung jawab moral untuk dapat memahami (*knowing*), mencintai (*loving*) dan melaksanakan (*implementing*) nilai-nilai etika inti (*core ethical values*) dalam kehidupan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat.
10. Perlunya sosialisasi metode pendidikan karakter melalui upaya Keteladanan, pembiasaan, kedisiplinan, kisah-kisah yang inspiratif dan dialog yang menyentuh kalbu. Pendidikan karakter harus dimulai dengan keteladanan dari pemimpin atau perangkat yang berada pada suatu satuan

pendidikan. Dilanjutkan dengan upaya habituasi karakter yang positif dalam kehidupan sehari-hari.

5.2.2. Level Meso

1. Perlunya peningkatan pengawasan internal dan eksternal dari dan di berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, seperti kementerian dan instansi di bawahnya untuk membiasakan kehidupan di lingkungan kerja yang positif untuk membangun karakter, termasuk upaya penegakan hukum yang lebih tegas.
2. Perlunya pengawasan terhadap sekolah internasional di wilayah Indonesia, untuk menjamin bahwa setiap WNI yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut memperoleh pendidikan kewarganegaraan, agama dan bahasa Indonesia.
3. Perlunya penekanan pendidikan karakter pada usia dini, dengan penginternalisasian karakter Pancasila, agama dan budaya untuk memaksimalkan proses pendidikan karakter sekaligus sebagai pondasi bagi pendidikan karakter di tingkat selanjutnya.
4. Perlunya kerjasama antar instansi terkait seperti kemendiknas dengan kemenegpora untuk menyelenggarakan suatu Pekan Olahraga dan Seni Nasional di berbagai tingkatan sekolah yang selain menunjukkan bakat anak bangsa juga menanamkan nilai-nilai yang positif, seperti kerjakeras, menghargai pluralitas, tanggungjawab, sportif dan nilai-nilai positif lainnya.
5. Perlunya sosialisasi mengenai peranan penting kultur sekolah dalam upaya pendidikan karakter, tentu saja disesuaikan dengan nilai-nilai atau kultur yang berlaku di sekolah tersebut, termasuk Optimalkan fungsi sekolah dan kampus sebagai *conveyor* budaya melalui berbagai media dan teknologi.
6. Pemberdayaan kampus sebagai *Center of Excellence* dalam upaya mengawal, mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan baik yang terprogram maupun tidak, seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di daerah perbatasan maupun

daerah terpencil maupun program-program pengabdian masyarakat lainnya.

7. Perlunya sosialisasi terhadap kepala sekolah maupun guru mengenai bagaimana mengajarkan pendidikan karakter yang efektif.
8. Perlunya sidak di sekolah maupun kampus ketika ujian berlangsung maupun pada saat penerimaan siswa/mahasiswa baru untuk menjamin tidak adanya kecurangan, sehingga terbiasa dengan budaya positif.
9. Perlunya penekanan pentingnya pembelajaran sejarah perjuangan bangsa dan Pancasila dalam bentuk baru yang lebih persuasif dan apresiatif untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan bangsa yang berkarakter.
10. Perlunya pemahaman mengenai pluralisme dan pembiasaan bagi warga sekolah dan kampus untuk hidup dalam pluralitas, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

5.2.3. Level Mikro

1. Diperlukan munculnya kelompok atau ormas yang benar-benar menghayati nilai-nilai akhlak dan karakter yang agung serta aktif mengalirkan arus positif dalam masyarakat lingkungannya, sebagaimana diperlukannya pentahapan dalam sosialisasi nilai-nilai yang ingin ditularkan, dan pembiasaan dengan disiplin, serta persuasi ganjaran dan sanksi bila diperlukan.
2. Perlunya mengembangkan media massa yang memiliki komitmen kebangsaan, untuk menyebarkan atau mempropagandakan nilai-nilai Pancasila agar mampu mendidik anak bangsa yang mempunyai wawasan kebangsaan serta mengembangkan karakter dan jiwa nasionalisme.
3. Pemanfaatan media kesenian seperti wayang, ketoprak dan budaya daerah lainnya, termasuk penggunaan teknologi untuk mensosialisasikan nilai-nilai karakter yang positif sesuai dengan kultur masyarakat setempat.
4. Penguoptimalisasian pertandingan olahraga, baik yang berskala nasional hingga tingkat RT untuk menanamkan karakter yang positif, seperti sportivitas, kerja sama dan bekerja keras.

5. Pembuatan film-film dan dokumenter yang memiliki pesan moral positif seperti Anak Seribu Pulau, Merah Putih, yang tentunya memiliki keseimbangan antara unsur edukasi dan komersialitasnya untuk menjamin bahwa tayangan tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat.
6. Penciptaan game-game mengenai sejarah bangsa, seperti Palagan Ambarawa, Serangan Umum 1 Maret dan sebagainya untuk menarik perhatian anak-anak agar lebih mengenal sejarah bangsanya dan menanamkan nasionalisme secara *internalize*.
7. Pemberdayaan posyandu, karang taruna dan PKK untuk mensosialisasikan pendidikan karakter yang berdasarkan Pancasila.
8. Pembiasaan perilaku yang berkarakter positif dalam kehidupan sehari-hari, di jalan, di rumah maupun di masyarakat.
9. Perlunya perlindungan anak dari kekerasan dan jaminan bahwa anak tersebut memperoleh pendidikan yang layak.
10. Perlunya sinergi dari masing-masing aktor pendidikan karakter untuk memaksimalkan proses sosialisasi dan internalisasi nilai, termasuk mengembangkan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- . *Buku Pintar Politik : Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Great Publisher, Yogyakarta, 2009.
- . *Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila*, Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1984.
- . *Restorasi Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Fisip UI, Jakarta, 2006.
- Adnan, Ricardi S, 2006, *Potret Suram Bangsaku : Gugatan dan Alternatif Disain Pembangunan*, Fisip UI Press, Jakarta.
- Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila : Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro, 2005, *Komunikasi Massa*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Bell, Daniel, 2001, *Matinya Ideologi*, Terjemahan, Indonesiatara, Magelang.
- Boeree, C George, 2005, *Personality Theories : Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, Terjemahan, Primasophie, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Buwono X, Hamengku, 2007, *Merajut Kembali KeIndonesiaan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deal, Terrence & Peterson, Kent, 2009, *Shapping School Culture : Pitfalls, Paradoxes & Promises*, Jossey Bass Books, San Francisco.
- Djatmiko, Harmanto Edy, 2006, *Revolusi Karakter bangsa Menurut Pemikiran M Soeparno*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Eatwell, Roger, 2004, *Ideologi Politik Kontemporer*, Terjemahan, Jendela, Yogyakarta.
- Feist, Gregory J, 2006, *Theories of Personality*, McGraw-Hill, Boston.
- Fukuyama, Francis, 2004, *The End of History and The Last Man : Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Terjemahan, Qalam, Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hoover, Kenneth et al, 2005, *Ideology and Political Life*, Western Washington University, USA.
- Huntington, Samuel, 1997, *The Clash Of Civilizations : Remaking of Wolrd Order*, Touchstone, USA.

- Husaini, Adian, 2009, dr, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Karim, Mulyawan, 2008, *Refleksi Karakter Bangsa*, FFKAI, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kustia, AA, 2007, *Intelijen : Dilema dan Tantangan*, CSICI, Jakarta.
- Larrain Jorge, 1996, *The Concept of Ideology*, terjemahan Ryadi Gunawan, Konsep Ideologi, LKPSM, Yogyakarta.
- Lickona, Thomas, 1991, *Educating For Character : How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, Bantam Books, USA.
- Lubis, Mochtar, 2001, *Manusia Indonesia*, Obor Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, 1999, *Metodologi Riset*, Erlangga, Jakarta.
- Pakan, Djon, 2002, *Kembali Ke Jatidiri Bangsa Indonesia*, Millenium, Jakarta.
- Severin, Werner & Tankard, 2005, *Teori Komunikasi : Sejarah, Metode & Terapan di Dalam Media Massa*, Kencana, Jakarta.
- Sibley, Mulford, 1974, *Political Ideas and Ideologies*, Harper&Row, New York.
- Sucipto, Hery, 2004, *Menegakkan Indonesia*, Grafindo, Jakarta.
- Soedarsono, Soemarno, 2005, *Hasrat Untuk Berubah*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Soedarsono, Soemarno, 2010, *Karakter : Mengantar Bangsa Dari Gelap Menuju Terang*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Soedarsono, Soemarno, 2000, *Menepis Krisis Identitas : Penyemaian Jatidiri*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Swasono, Sri Edi, 1981, *Membudayakan Pancasila Melalui Pendidikan Taman Siswa*, Majelis Luhur Taman Siswa, Jakarta.
- Syamsuddin, dkk, 2009, *Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Total Media, Yogyakarta.
- Syarbaini, Syahrial, 2009, *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Tanlain, Wens, 1996, dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R, 2005, *Manifesto Pendidikan Nasional*, Kompas, Jakarta.
- Wrahatnala, Bondet, 2009, *Sosiologi 1*, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

Jurnal :

- Abdulgani, Roeslan, *Sejarah Pancasila Jangan Dimanipulasi*, dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume III Nomor 15, Januari-februari 2007, halaman 192-231.
- Ali, As'ad Said, *Diskursus tentang Pancasila : Ideologi Negara Versus Ideologi Partai*, dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume III Nomor 16, Maret-April 2007, halaman 5-11.
- Ali, As'ad Said, *Pancasila di tengah Pertarungan Ideologi Dunia*, dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume II Nomor 9, Desember-Januari 2006, halaman 5-12.
- Bahar, Safroedin, *Pancasila Harus Dijabarkan Ke Hilir*, dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume IV Nomor 19, September-Oktober 2007, halaman 5-15.
- Borrong, R.P, *Pentingnya Pendidikan Nilai Dalam Membangun Karakter Kehidupan Bangsa*, dalam Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner Vol XIX Nomor 2 tahun 2007, halaman 67-74.
- Daniel, Wallace, *Islam and the Clash of Civilizations*, in Journal of Church and State page 509, 2006.
- Diem, Chuzaimah Dahlan, *Mengembangkan Program Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Iptek Untuk Membangun Karakter Bangsa*, dalam Forum Kependidikan, Volume 26 Nomor 1 September 2006, halaman 1-12.
- Friedman, Edward. *Is China a Success while India is a Failure?* dalam World Affairs; Fall 2004; 167, 2; Academic Research Library, pg. 59
- Huntington, Samuel P , *If not civilizations, what? Paradigms of the post-Cold War*, Foreign Affairs; Nov/Dec 1993; 72, 5; Academic Research Library, pg. 186
- Kitley, Philip, *Pancasila in the minor key: TVRI's Si Unyil models the child*, Indonesia; Oct 1999; 68; Academic Research Library, pg. 129
- La Ode, Sismono, *Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi*, dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume IV Nomor 19, September-Oktober 2007, halaman 121-136.
- Lucas, Scott, *Culture, Ideology and History* dalam Global Dialogue; Autumn 2001; 3, 4; Academic Research Library, pg. 45.
- Muladi, *Posisi Ideologi Pancasila Sebagai Value Defence dalam Kerangka Security Policy*, dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume II Nomor 9, Desember-Januari 2006, halaman 61-68.
- Poespowarodojo, Soerjanto, *Aktualisasi Pancasila Dalam Perspektif Filosofis Humaniter*, dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Volume I Nomor 6, Juni 2005, halaman 77-88.
- Ridwantono, Totok Ahmad, *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa/Negara*, dalam Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume XV Nomor 2 tahun 2003, halaman 589-595.

- White, Stephen, et al. *The 'Clash of Civilizations' and Postcommunist Europe*, dalam *Comparative European Politics* (2003) 1, 111–127.
- Williamson, Arthur H. *An Empire to End Empire: The Dynamic of Early Modern British Expansion* dalam *The Huntington Library Quarterly*; 2005; 68, 1/2; Academic Research Library pg. 227
- Winataputra, Udin Saripudin, *Multikulturaliseme Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Tahun ke-14 Nomor 075*, November 2008, halaman 1009-1027.
- Yilmaz, Hakan, *Islam, Sovereignty and Democracy : Turkish View*, *The Middle East Journal* page 477, 2007.
- Zubair, Achmad Charris, *Inovasi Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Gajah Mada*, dalam *Lontar Gajah Mada*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2004, halaman 47-57.
- Zuriah, Nurul, *Program Penulisan Buku Teks : Revitalisasi-Radikalisasi Filsafat dan Ideologi Pancasila Di Era Reformasi dan Globalisasi*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002

Penelitian/Riset :

- Arinanto, Satya, *Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila : Studi Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Tentang Polemik Mengenai Hari Lahir Dan Penggali Pancasila Dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara*, TESIS FH UI, Jakarta, 1997.
- Dimiyati, Farida, *Falsafah dan Ideologi Pancasila, dan Implementasi pada Ketahanan Nasional*, RISET PKN UI, Jakarta, 2001.
- Ismail, Faisal, *Islam in Indonesian Politics : a Study of Muslim Response to and Acceptance of The Pancasila*, DISERTASI Mc Gill University, Canada, 1995.
- Rida, Zeniar, *Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Mewujudkan Masyarakat Berbudaya Pancasila*, TESIS PPKN UI, Jakarta, 1988.
- Sinaga, Daniel Togar Maringan, *Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pancasila Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, TESIS PPKN UI, Jakarta, 2003.

Perundang-undangan/Pidato Kenegaraan :

- Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Prioritas Percepatan Pembangunan Nasional.
- Pidato Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, *Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, dalam rangka

memperingati Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta Convention Center, 1 Juni 2006.

Pidato Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, *Pendidikan Karakter Untuk Membangun Peradaban Bangsa*, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Istana Presiden, Mei 2010.

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wawancara :

Atmowiloto, Arswendo, Wawancara, 17 Desember 2010.

Azra, Azyumardi, Wawancara, 17 Desember 2010.

Ima & Widi, Pembicaraan Pribadi, 13 Desember 2010.

Mulyadi, Seto, Wawancara, 26 November 2010.

Pasha, Julian Aldrin, Wawancara, 29 November 2010.

Shambazy, Budiarto, Wawancara, 23 November 2010.

Soekarno, Irawan, Wawancara, 5 Desember 2010.

Suseno, Franz Magnis, Wawancara, 9 Desember 2010.

Utomo, Erry, Wawancara, 16 November 2010.

Website/Artikel :

----- *Naskah Lengkap Silaturahmi Hari Ulang Tahun Ke 5 Gerakan Jalan Lurus dengan Tema : Revitalisasi Pancasila*, dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila di Gedung Pewayangan Kautamaan TMII Jakarta, 30 Mei 2006.

----- *Publik masih ragukan aktualisasi Pancasila*, Jajak Pendapat Kompas, 30 September 2008.

----- *Sebagian Warga Indonesia Tidak hafal Pancasila*, Jajak Pendapat Kompas, 25 Agustus 2009.

Lickona, Tom, et al, *Eleven Principles of Effective Character Education*, Character Education Partnership, 2007.

Setiawan, Bambang, *Pancasila, Kenangan yang Tersisa*, dimuat dalam SKH Kompas edisi 16 Agustus 2010.

Suryaningtyas, Toto, *Pancasila, antara Desakralisasi dan Revitalisasi*, dimuat dalam SKH Kompas edisi 1 Juni 2008.

www.kemdiknas.go.id

www.ortax.org

www.wikipedia.org

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Kabid Kurikulum Pendidikan Dasar Balitbang Kemendiknas
Erry Utomo Ph.D

Waktu : Selasa, 16 November 2010, Pukul 13.30-15.00 WIB

Tempat : Pusat Kurikulum Kemendiknas, Jl Gunung Sahari Raya No
4 Lt 2, Jakarta Pusat

1. Menurut Bapak, seperti apakah karakter bangsa Indonesia pada saat ini, apakah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, sama saja, atau malah semakin mengkhawatirkan? Mohon dijelaskan berikut contohnya.

Mengenai *past* dan sekarang ini, bisa kita katakan sudah terjadi kelunturan karakter. Gotong royong atau *sense of togetherness*, saya ambil contoh keadaan merapi, yang paling banyak bergerak adalah masyarakat. *Helping each other* itu masih ada. Value itu masih ada, akan tetapi value yang lain, atau nilai-nilai yang lain, misal budaya tunggu seperti berlalu lintas di jalan sehari-hari, untuk menghindari macet, sebenarnya kita harus saling ber-*teposeliro*. Tapi di Jakarta sekarang sudah ga ada. Di Amerika, saya pernah mengantri dalam sebuah antrian pembayaran, di sebelah saya ada anak kecil yang juga mengantri, tetapi, ketika melihat kasir di antrian saya sedang ada masalah, anak kecil itu memandang saya, dan bilang "*you go first*"..anak itu tahu. Kalau di Indonesia, yang terjadi malah saling berebutan, sehingga semakin lambat.

Nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang kita, sekarang kita rasakan semakin luntur. Pendidikan sekarang lebih mengejar pengetahuan, daripada sikap, budipekerti. Sebagai contoh, salaman dari murid kepada gurunya sudah jarang terlihat. Padahal itu menunjukkan nilai-nilai *respect* seorang murid kepada guru.

2. Mengenai karakter bangsa, apa yang Bapak ketahui mengenai pendidikan karakter? Seperti apa karakter yang penting bagi bangsa ini?

Pendidikan karakter merupakan suatu bentuk pendidikan yang tidak memiliki kurikulum. Jadi tidak perlu kita menyusun kurikulum baru, atau membuat suatu mata pelajaran baru khusus tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini harus berupa pembiasaan. Karena dari pembiasaan ini akan menjadi habit seseorang dan akhirnya membentuk karakter orang tersebut. Di lingkungan sekolah misalnya, guru harus memberikan contoh dan teladan kepada muridnya. Dalam bahasa Jawa, guru itu *digugu* dan *ditiru*. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan toilet sekolah. Pembiasaan-pembiasaan itu harus terus dilakukan. *Knowledge is power, but character is more..*

Karakter yang penting bagi bangsa ini ya nilai-nilai tadi itu. Seperti yang ada pada Pancasila. Gotong royong, keadilan, ketuhanan, kekeluargaan, dll. Diknas telah merumuskan 18 nilai karakter bangsa seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca,

peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Akan tetapi, sebenarnya value bangsa ini bukan hanya itu saja. Kami masih berupaya untuk mengembangkannya lagi.

- 3. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Sesuai dengan pernyataan ini, bagaimanakah eksistensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah menurut Bapak, Pancasila masih dipegang teguh, atau mulai dilupakan?**

Memang benar, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Akan tetapi, yang terjadi selama ini, Pancasila hanya didoktrinkan saja. Masih berada di awang-awang. Padahal seharusnya Pancasila itu dihayati dan diamalkan sehari-hari. Pancasila itu harus membumi. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah Pancasila masih dipegang teguh atau mulai dilupakan, saya kira mulai banyak yang melupakan Pancasila.

- 4. Dalam era globalisasi ini, apakah yang menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila, baik dari internal maupun eksternal?**

Ancaman bagi Pancasila, sebenarnya bersumber dari bangsa Indonesia sendiri. Ya itu tadi, karakter. Sehingga jika Pancasila harus direvitalisasi, sebenarnya yang harus direvitalisasi adalah karakter, terlebih dahulu. Terlebih pada saat-saat sekarang, ada internet, yang memungkinkan siapa saja mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Sehingga, jika karakter bangsa ini tidak kuat, sudah pasti akan terpengaruh, apalagi tidak ada penyaring atau filternya. Pancasila memang dikatakan sebagai filter budaya, akan tetapi pada kenyataannya, Pancasila sendiri mulai luntur.

- 5. Terkait dengan permasalahan eksistensi Pancasila tersebut, menurut Bapak, apakah Pancasila perlu direvitalisasi? Kalau dirasa perlu, kira-kira melalui apa sajakah perevitalisasian Pancasila ini?**

Tadi yang sudah saya katakan, karakterlah yang harus lebih dulu direvitalisasi. Jika yang diartikan sebagai revitalisasi adalah pemahaman kembali Pancasila untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini melalui pembiasaan kan. Jadi sebenarnya, national character building sangat diperlukan, sebagai penyaring, untuk meredam budaya yang tidak sesuai, untuk membentuk Negara Pancasila, yang sesuai dengan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kesemua nilai-nilai itu harus ada dalam pendidikan karakter dimulai dari pendidikan anak usia dini. Itulah revitalisasi, atau pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Karena kita tidak hanya menginterpretasikan nilai Pancasila, tetapi kita harus menginterpretasikannya dalam perilaku, dalam habituasi, karena dalam habituasi ini harus ada aturan-aturan, sehingga terbentuk nilai yang diinginkan. Agak susah memang, akan tetapi logiknya adalah melalui pendidikan, baik informal melalui keluarga, meskipun ada keluarga yang unwealth, namun tetap harus diajarkan. Kemudian di sekolah, juga harus diajarkan. Sekarang, bagaimana dengan yang tidak bersekolah, anjal bagaimana, karena tuntutan ekonomi. Seharusnya tidak seperti itu, tetapi mereka tetap

anak Indonesia yang harus dibentuk. Dan itu adalah hak mereka. Tanggungjawab Negara, pemerintah. Itulah perlunya aturan yang jelas, seperti pada Undang-Undang Dasar. Sebenarnya pendidikan karakter ini adalah hal pokok yang harus diajarkan sebelum seseorang menjadi *smart*. Dia tahu, dia aware, dia akan melakukan suatu tindakan dengan respect dan tanggung jawab.

Pemerintah yang menciptakan sistem dan dilaksanakan oleh aparatnya. Sistem ini sudah ada. Mereka sudah tahu. Akan tetapi mereka tidak aware. Hanya UN..UN saja yang dikejar, menjadi yang terbaik, menjadi world university, akan tetapi apa perilakunya. Mereka care ga dengan orang, care ga dengan negaranya. Sekolah tinggi-tinggi di luar negeri, akan tetapi setelah berhasil mereka tidak kembali ke Indonesia. Apa ini attitude to your country? Siapa mereka?bener kan..kenapa mereka ga mau pulang. Dimana dia berada. Kita perlu idealis, respect dan responsibility merupakan 2 nilai yang sangat penting, bahkan di United States. Contoh kecil, di Amerika respect terhadap countrynya begitu besar. Begitu bendera Negara mereka naik, mereka langsung dalam sikap tegap, hormat. Kalau di Indonesia, apa kita respect?itu harus diubah. Melalui apa? Pembiasaan-pembiasaan, itu kan simple.

6. **Terkait dengan tema, pendidikan karakter dijadikan upaya revitalisasi Pancasila, menurut Bapak, sebenarnya bagaimana urgensi pendidikan karakter ini dan seberapa penting peranannya dalam Sistem Pendidikan Nasional?**

Ini urgent, penting. Karena ini bagian dari system pendidikan nasional. Makanya kita mulai dari pendidikan anak usia dini, untuk membentuk manusia Indonesia yang berwatak, berbudipekerti luhur. Sehingga dalam inpres no 1 tahun 2010, focus pada pembentukan watak dan nilai-nilai karakter. bukan hanya sebatas pada pengetahuan saja, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai. Kalau to be smart gampang, tapi untuk to be good..itu susah, membutuhkan waktu. It takes time. Makanya self assessment itu bukan hanya nilai 7, 8, 9 atau 10. Sehingga, kenapa you harus cheating?you have to believe yourself. Orang yang pintar adalah orang yang menghargai waktu, disiplin, tanggungjawab. Harus punya sopansantun. Orang bekerja kan juga gitu, jangan sampai you look busy for nothing, karena you tidak punya tanggungjawab. Begitu kan?

7. **Menurut Bapak, seperti apakah bentuk pendidikan karakter yang ideal, yang efektif dan efisien dalam suatu pendidikan?**

Sebenarnya tidak ada bentuk yang idealnya, yang ada melalui pendekatan habituasi, pendekatan contoh. Bagaimana guru mengajarkan murid bekerja kelompok, ajarkan kebiasaan yang baik, meminta izin teman jika ingin meminjam sesuatu. Ajarkan aturan dan norma yang berlaku.

8. **Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan pendidikan karakter di sekolah?**

Ya itu, melalui pendekatan habituasi. Lihat kebersihan sekolah, lihat tempat sampahnya, ajarkan kejujuran. Seperti kantin kejujuran, atau jika ada yang menemukan barang, kembalikan kepada yang punya. Tentukan aturan yang berlaku, *the rule of game* di sekolah tersebut. Jika sekolah itu bersih, rapi, maka karakter yang baik akan

terbentuk disitu. Dan sekali lagi, kita tidak perlu membuat kurikulum yang baru, kalo pengintegrasian ke mata pelajaran yang sudah ada, itu bisa. Karena pendekatan habituasi itu kan sebenarnya penginternalisasian nilai-nilai dalam kegiatan sehari-hari. Pembiasaan kerja keras, rapi, bersih, dan jangan pernah *break down the rule*. Di pesantren pun, ga peduli dari keluarga kaya maupun miskin, saatnya membersihkan WC, ya harus membersihkan.

9. Menurut Bapak, bagaimanakah peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter?

Tadi di awal sudah saya singgung, ada keluarga yang *wealth* ada yang *unwealth*. Bagi *wealth family*, seharusnya tidak ada masalah, karena mereka memiliki akses pendidikan kemana saja. Tapi bagi *unwealth family*? Kembali lagi ke peran pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

10. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk pendidikan karakter di masyarakat?

Aturan harus ditegakkan. Pemerintah begitu juga, harus open kepada *publik*, sehingga publik pun *trust* kepada *government*. Masak sudah diberikan remunerasi juga masih terjadi korupsi. *You do your job*. Lakukan secara professional, disiplin. Karena semua ada aturannya. *Wherever you go, whatever your profession, you have to be respect, you have to be responsible*.

11. Menurut Bapak, bagaimanakah peran media massa dalam pembentukan karakter?

Media massa harus terus memberikan ulasan-ulasan *how to be good*, ini harus gencar. Ada koran-koran yang terus menyoroti masalah pendidikan. sehingga di setiap tempat, ada pendidikan karakter.

12. Dari manakah pendidikan karakter seharusnya dimulai? Apakah mulai dari generasi muda? Atau generasi tua juga harus paham agar dapat mendidik yang muda?

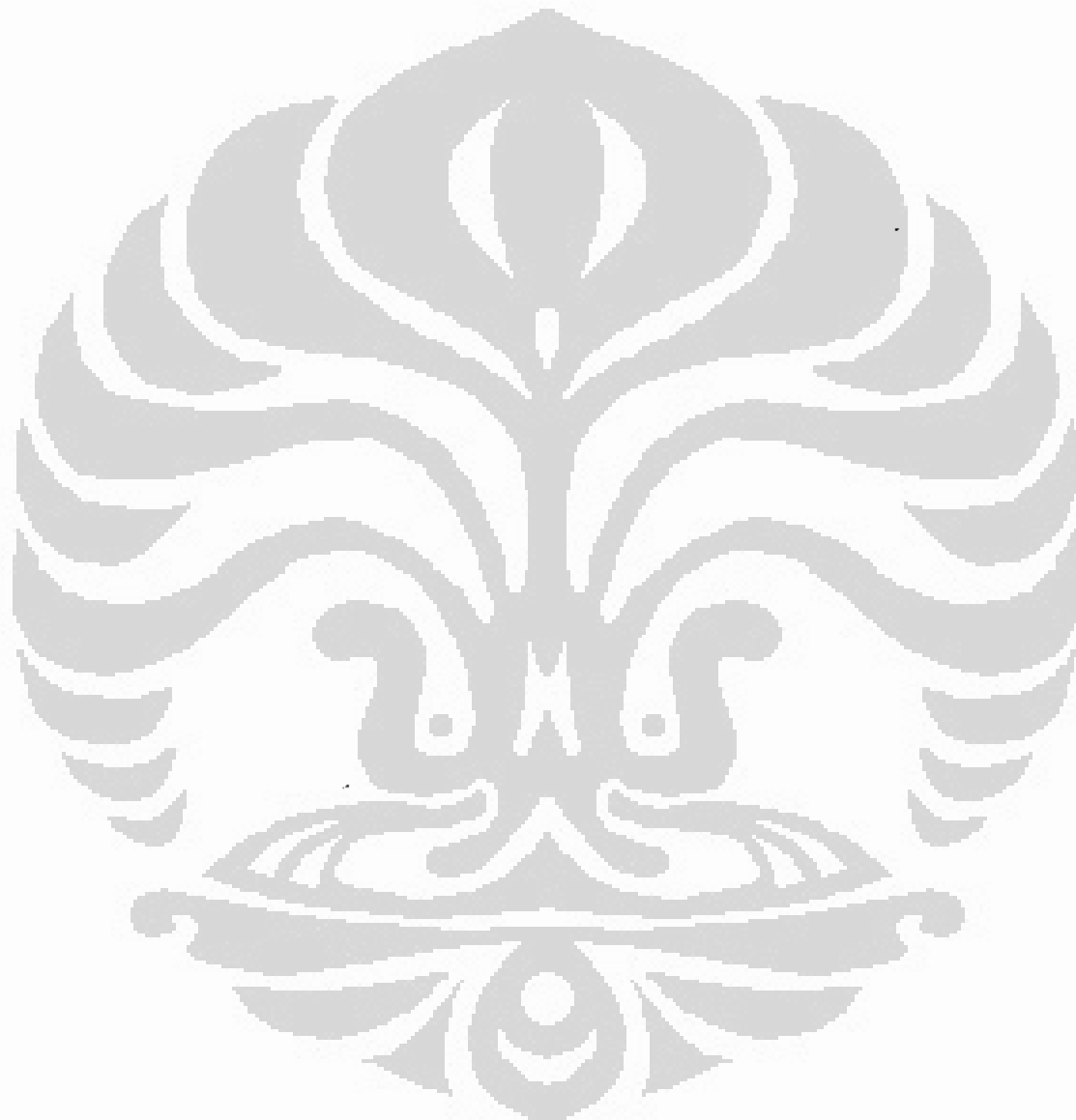
Harus dimulai dari anak usia dini, agar berkarakter. Kalau terlalu tua, akan susah dibentuk. Dengan pembiasaan dari kecil, maka akan lebih mudah dibentuk. Anak kecil yang belajar dibandingkan dengan orang tua, tentunya akan lebih mudah diserap oleh anak kecil.

13. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter?

Yang saya soroti disini adalah satuan sekolah. Faktor yang paling berperan adalah *whole member of the school*. Kalau di *university* ya rektornya, dekan, mahasiswa, tukang kebersihan. Semuanya bersama-sama. Ini sekaligus menjadi faktor pendukung dan penghambat. *Image* dari sekolah yang dibentuk.

14. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak kemukakan terkait pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila ini?

To be consistent. Sustainable. Program tu jangan hangat-hangat tahi ayam. Pembiasaan itu harus berlangsung terus-menerus, misal pembentukan IMTAQ di sekolah, iman dan taqwa. That's it, pendidikan karakter. Dikatakan *If you lost your wealthy, nothing is lost. If you lost your healthy, something is lost, if you lost your character, everything is lost.* Character is your destiny. Itu semua bersumber dari nilai yang ada, dalam hal ini adalah nilai-nilai Pancasila.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Budiarto Shambazy

Waktu : Selasa, 23 November 2010, pukul 16.30-17.30 WIB

Tempat : Gedung Kompas Gramedia, Jl Palmerah Selatan, Jakarta.

- 1. Menurut Bapak, seperti apakah karakter bangsa Indonesia pada saat ini, apakah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, sama saja, atau malah semakin mengkhawatirkan? Mohon dijelaskan berikut contohnya.**

Karakter bangsa saat ini semakin mengkhawatirkan karena kita belum siap menghadapi globalisasi. Bangsa kita belum mempunyai kemandirian yang memadai untuk menghadapi persaingan politik, ekonomi, dan kultural pada tingkat global. Penyebabnya karena bangsa kita terlalu lama dikekang oleh kekuasaan Orde Baru yang memiskinkan dan membodohi rakyat. Kekangan Orde Baru memang berkurang setelah terjadinya Reformasi tahun 1998, tetapi pemiskinan dan pembodohan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun telah terlanjur membuat bangsa kita terpuruk dalam kompetisi global.

Sistem pendidikan kita tidak lagi memberikan bekal yang memadai untuk murid TK sampai mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kewarga negaraan serta budi pekerti. Dua elemen ini, yang semestinya dijadikan sebagai mata pelajaran/mata kuliah wajib, tidak lagi disiapkan secara komprehensif. Di sejumlah institusi pendidikan swasta kedua mata pelajaran/kuliah ini bahkan tidak diberikan lagi. Ketiadaan kedua mata pelajaran/mata kuliah inilah yang mengakibatkan bangsa ini kehilangan karakter dari tahun ke tahun. Akibat lanjutannya, kita tidak lagi menjadi manusia yang berdisiplin.

Contoh makin ambruknya karakter bangsa dapat dilihat dari pemandangan sehari-hari. Kita tidak mampu menjaga kebersihan karena membuang sampah sembarangan. Kita yang hidup di kota-kota besar dengan mudah bisa melihat bagaimana kotornya pasar-pasar tradisional atau pertokoan. Sampah berserakan dimana-mana: di trotoar, di depan toko, di jalan-jalan tempat lalu-lalang pembeli, dan sebagainya. Kondisi ini makin diperparah oleh bertebarannya spanduk-spanduk iklan produk dimana-mana.

Kesemrawutan lalu lintas juga merupakan contoh bagus untuk menggambarkan ambruknya karakter bangsa. Kota-kota besar pasti macet, tetapi di negeri ini yang terjadi

yang muda?

Pendidikan karakter tak bisa lain harus dimulai dari usia dini.

13. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter?

Faktor yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter tentu saja kurikulum Budi Pekerti dan Kewarganegaraan dan kualitas guru-guru yang mengajarkannya. Hambatan-hambatan pasti ada, tetapi bisa diatasi selama kurikulum dan guru teruji kemampuannya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan karakter tersebut.

14. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak kemukakan terkait pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila ini?

Sudah tiba saatnya bagi segenap kalangan masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan dialog-dialog bersifat nasional dan lokal dalam rangka merumuskan kurikulum mata pelajaran/kuliah Budi Pekerti dan Kewarganegaraan. Selama perumusan dilakukan secara matang dan melibatkan sebanyak-banyaknya kalangan, saya yakin sistem pengajaran kedua mata pelajaran/kuliah tersebut akan terbentuk dan mencapai tujuan menciptakan manusia Indonesia yang berbudi pekerti serta memahami sejarah serta ideologi bangsanya sendiri.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dr Seto Mulyadi, S.Psi, M.Si

Waktu : Jumat, 26 November 2010, Pukul 09.30-10.30 WIB

Tempat : Perumahan Cirendeu Indah No 13, Cirendeu, Ciputat

1. Menurut Bapak, seperti apakah karakter bangsa Indonesia pada saat ini, apakah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, sama saja, atau malah semakin mengkhawatirkan? Mohon dijelaskan berikut contohnya.

Iya, menurut saya termasuk mengkhawatirkan, artinya di dalam hal karakter-karakter positif, seperti kreatifitas, persatuan, semangat. Kalo dulu bangsa kita bisa menghasilkan karya-karya besar, seperti candi Borobudur, sumpah palapa nya Gajah mada untuk mempersatukan nusantara. Akan tetapi sekarang, itu tidak terlihat lagi jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Penghayatan kepada Tuhan yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, yang tidak menghargai hak asasi manusia, termasuk hak anak, kemudian persatuan yang mulai banyak goyah, dimana-mana ada kekerasan. Nonton bola ribut, nonton musik ribut, pilkada ribut, sampai kadang-kadang lembaga terhormat ribut, lalu demokrasi yang dibangun juga belum mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya, kadang perwujudan demokrasi itu masih bisa dibeli dengan uang, money politics dan sebagainya, ini memang menunjukkan hal-hal yang cukup mengkhawatirkan. Kalau hal-hal ini dibiarkan terus, bahayanya bisa pecah seperti Uni Sovyet atau Yugoslavia.

Memang, beberapa karakter yang cukup mendasar, seperti sopan santun, di beberapa tempat masih ada juga, kemudian gotong royong, yang muncul pada saat bencana alam, walaupun kadang-kadang harus bawa spanduk, ini dari partai ini, ini dari pabrik ini, misalnya begitu. Tetapi yang mengkhawatirkan justru pada generasi muda atau remaja, misalnya tawur, bunuh diri, lalu bullying, itu sangat mengkhawatirkan. Ini salah satu sebabnya karena tidak ada keteladanan dari beliau-beliau yang jadi pimpinan.

2. Mengenai karakter bangsa, apa yang Bapak ketahui mengenai pendidikan karakter? Seperti apa karakter yang penting bagi bangsa ini?

Ya, saya kira itu yang paling penting, karena kalau dikaitkan dengan kecerdasan dalam ilmu psikologi, bukan hanya kecerdasan kognitif, kecerdasan IQ, tapi juga termasuk kecerdasan emosional atau EQ, bisa mengelola emosi dengan cerdas, santun, tidak harus mengeluarkan kata-kata kasar. Kemudian kecerdasan spiritual, melaksanakan ajaran agama dengan cara-cara yang benar, bukan yang ini harus dibunuh, yang ini harus diserang. Kecerdasan moral juga, itu juga bagian dari pendidikan karakter.

3. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Sesuai dengan pernyataan ini, bagaimanakah eksistensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah menurut Bapak, Pancasila masih dipegang teguh, atau mulai

dilupakan?

Ya, khususnya generasi muda, mulai banyak yang mulai melupakan. Ini perlu kembali diajarkan kepada anak-anak, karena itu merupakan falsafah atau pandangan hidup bangsa dan dasar Negara yang harus dipegang teguh. Dan bagaimana aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, artinya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya berarti menjalankan ibadah agamanya saja, kalau Islam bukan hanya *Hablum minallah*, akan tetapi juga *Hablum minnanaas*, itu yang harus ditekankan betul-betul. Lalu sila kedua kemanusiaan yang Adil dan Beradab, itu harus menghargai hak-hak asasi manusia, dan perlu lebih diteladankan mulai dari orang tua. Orang tua seringkali berbicara tentang HAM..HAM...HAM, tapi hak anak di rumah dilanggar. Itu yang sebetulnya menciptakan budaya kekerasan, karena kekerasan diajarkan sejak usia dini. Menyelesaikan sesuatu tidak dengan dialog, musyawarah, tetapi selalu dengan kekerasan, kekuatan, kekuasaan.

4. **Dalam era globalisasi ini, apakah yang menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila, baik dari internal maupun eksternal?**

Kalau kita melupakan itu dasar Negara kita. Contohnya anak muda yang selalu melihat keluar, terlebih di era global ini, televisi dengan mudah masuk, internet juga, sehingga membuat mereka melupakan apa yang seharusnya mereka jadikan pegangan.

5. **Terkait dengan permasalahan eksistensi Pancasila tersebut, menurut Bapak, apakah Pancasila perlu direvitalisasi? Kalau dirasa perlu, kira-kira melalui apa sajakah perevitalisasian Pancasila ini?**

Saya kira, sangat perlu. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang kuat, yang memiliki pegangan, falsafah. Itu yang harus dipegang terus dalam mengelola perilaku masing-masing dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjadi benturan, ada persamaan visi dan misi, sehingga bisa menuju suatu masyarakat yang dicita-citakan, adil dan makmur, dan sebagainya. Sebetulnya di dalam UU Sisdiknas, sudah ada dasar-dasar pendidikan, yaitu etika, estetika, iptek, kewarganegaraan terkait hal-hal berbangsa dan bernegara, serta kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kita tidak punya pegangan tentu akan terombang-ambing, kalau remaja hanya bisa demo, teriak sana sini, tanpa punya pegangan, mau dibawa kemana bangsa ini.

Langkah revitalisasi Pancasila ini harus dimulai dari anak-anak, karena kalau dari dewasa sudah terlambat. Pancasila harus betul-betul dibuat *internalize*, mulai dari TK. Mengucapkan Pancasila itu bisa dijadikan sebagai suatu tradisi dalam upacara, karena di Negara-negara maju, hal ini juga masih ada. Kemudian diingatkan kembali, aplikasinya di dalam kehidupan. Guru dan orang tua harus bisa memberikan contoh-contoh, misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa dengan beribadah secara teratur, saling menghargai, menghargai anak sebagai manusia seutuhnya, itu semua harus bersumber kepada Pancasila. Tidak ada kekerasan dalam sekolah. Tidak ada kekerasan dalam keluarga. Kemudian mereka itu harus bersatu, menghargai demokrasi, termasuk mendengar suara anak, suara remaja. Banyak remaja selebritis yang mengadu ke saya,

karena mereka merasa ditekan, di eksploitasi dan hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak SMA 70, SMA 11, SMA 6 yang penuh tekanan dari guru, kemudian terlibat bullying, meskipun diajarkan Pancasila, tapi pelaksanaan dalam kehidupannya sehari-hari masih kosong. Ini harus dimulai dari situ.

- 6. Terkait dengan tema, pendidikan karakter dijadikan upaya revitalisasi Pancasila, menurut Bapak, sebenarnya bagaimana urgensi pendidikan karakter ini dan seberapa penting peranannya dalam Sistem Pendidikan Nasional?**

Ini sangat urgent. Intinya masuk dalam 5 misi pendidikan tadi, yang pertama adalah etika, bagian dari kehidupan karakter. Estetika juga merupakan karakter, misalnya mau menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Kemudian Iptek, dengan karakternya semangat belajar, mau mengembangkan diri. Lalu kewarganegaraan, bagaimana berdemokrasi, bagaimana bangga menjadi bangsa Indonesia. Lalu kelima, kesehatan dan olahraga, merupakan karakter hidup sehat, hidup teratur, tidak begadang, tidak narkoba, tidak merokok, ini bagian dari pendidikan karakter. Cuma kadang-kadang itu hanya sekedar sebagai hiasan dan tidak dipraktekkan.

- 7. Menurut Bapak, seperti apakah bentuk pendidikan karakter yang ideal, yang efektif dan efisien dalam suatu pendidikan?**

Yang pertama diberikan melalui keteladanan, tidak sebagai mata pelajaran yang kaku sebagai contoh mata pelajaran yang kaku adalah "yuk, sekarang kita mempelajari pendidikan karakter. Catat. Karakter yang baik adalah....anak yang kreatif adalah anak yang.." hanya begitu saja, dicatat tanpa diamalkan, sehingga anak-anak tidak akan mampu memiliki karakter yang baik. Padahal pada dasarnya, setiap anak memiliki karakter yang baik. Anak-anak yang selalu senyum, anak-anak yang pemaaf, kalau berantem ya berantem, tetapi setelah itu baikan lagi. Itu karakter yang baik, senang belajar, rasa ingin tahu, Cuma tanpa sadar dirusak oleh, pertama orang tua, dan kedua oleh pendidikan formal yang salah.

- 8. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan pendidikan karakter di sekolah?**

Dimasukkan dalam aktivitas-aktivitas atau pelajaran yang sudah ada. Apa itu bahasa Inggris, apa itu biologi, apa itu fisika. Misalnya, fisika, bumi berputa karena apa, karena ada kekuatan Tuhan. Untuk menjaga agar bumi lestari, ya harus kita yang menjaga. Itu karakter yang baik. Jika kita malah merusaknya, itu karakter yang negative, seperti menggunakan plastik, membuang sampah sembarangan, percobaan nuklir untuk perang. Itu fisika. Guru harus pandai membawa itu ke arah pembentukan karakter murid.

- 9. Menurut Bapak, bagaimanakah peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter?**

Ya, itu sangat besar. Karena yang pertama adalah di situ. Dari usia dini. Anak balita yang sedang nakal-nakalnya, dibentak orang tuanya "kamu tu nakal", secara tanpa sadar itu meletakkan pendidikan karakter yang negative. Dibalik itu orang tua harus tahu, ia sedang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, seharusnya tinggal kita arahkan ke

tempat-tempat, seperti TK, akhirnya karakter positif seperti kreatifitas, rasa ingin tahu, kemudian selalu mencoba hal-hal baru, memperluas wawasan, karakter-karakter positif itu semua terpenuhi. Jadi kunci pertama memang di keluarga, lalu kedua adalah di sekolah, dan yang ketiga di masyarakat. Kalau toh pun, keluarga broken, atau orang tuanya harus berpisah, kan bisa berpisah dengan cara yang baik, tidak harus ribut, tidak harus rebutan anak. Sehingga suatu saat, bisa ketemu, kumpul bersama lagi. Tunjukkan perbedaan pendapat itu wajar, tetapi penyelesaian masalah harus dengan cara yang baik. Itu pendidikan karakter yang pertama pada keluarga.

10. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk pendidikan karakter di masyarakat?

Yah, sebetulnya kalau masing-masing individu itu sudah baik karakternya, itu bisa membangun masyarakat. Jadi dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter baik, karena para pemimpin inilah yang bisa mengubah dunia. Kenapa sekarang banyak pemimpin yang memiliki karakter kurang positif yang akhirnya malah merusak tatanan yang ada dalam masyarakat ini. Jadi pemimpin itu harus arif, bijak, kalau ada masalah dihadapi dengan kreatif, kecerdasan moral dan spiritual yang baik, maka masyarakat pun akan baik.

11. Menurut Bapak, bagaimanakah peran media massa dalam pembentukan karakter?

Oh, sangat besar. Khususnya untuk masyarakat. Karena masyarakat mengambil contoh-contoh atau inspirasi dari media. Kalau yang ditayangkan sinetron yang ribut terus, kemudian berita tawuran, itu saja, tanpa sadar akan membentuk masyarakat, oh, inilah dunia kita. Menghadapi sesuatu dengan kekerasan dan kekuatan.

12. Dari manakah pendidikan karakter seharusnya dimulai? Apakah mulai dari generasi muda? Atau generasi tua juga harus paham agar dapat mendidik yang muda?

Pendidikan karakter harus dimulai dari usia dini. Mungkin, yang dewasa bisa kita upayakan melalui diskusi-diskusi, pembentukan LSM yang menghimbau karakter anti kekerasan. Tetapi kita harus berhitung untuk 10, 20 atau 30 tahun ke depan. Itu mulai dari anak-anak. Kita harus berani mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak. Hanya dengan menghentikan kekerasan terhadap anak, kita akan mampu menciptakan generasi yang unggul, yang akan membawa bangsa ini lebih maju dan ideal.

13. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter?

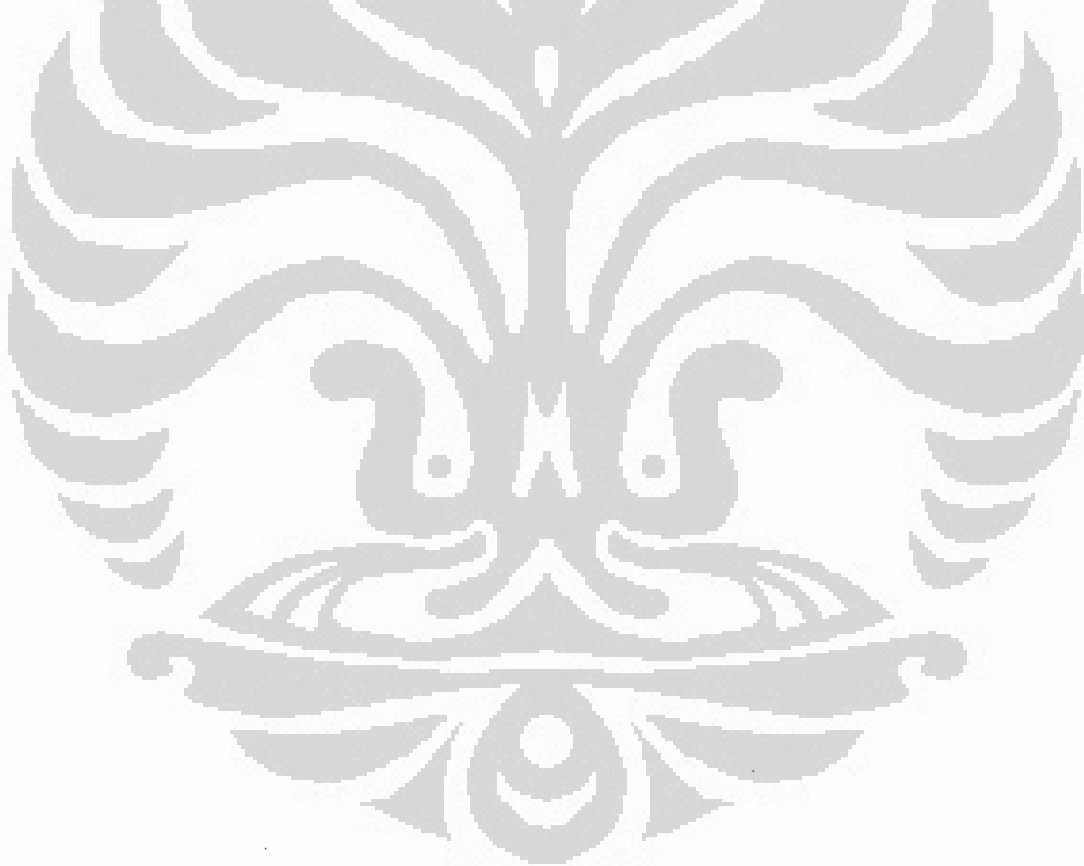
Faktor yang mendukung adalah para pejabat, seperti di Kementerian Pendidikan Nasional. Itu yang harus memegang peranan penting, karena pendidikan itu bukan hanya formal, tetapi juga nonformal dan informal. Kementerian ini juga bisa mengkampanyekan melalui iklan layanan masyarakat yang memberikan contoh-contoh

pendidikan karakter yang positif.

Sebaliknya, yang menghambat adalah kalau kemudian di kalangan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial yang seharusnya menunjukkan karakter yang positif, akan tetapi malah terjadi korupsi. Ini kan karakter yang negatif. Akhirnya anak-anak atau masyarakat menjadi kurang percaya.

14. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak kemukakan terkait pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila ini?

Pendidikan karakter memang sekarang sedang menjadi trend. Kemarin saya berbicara di depan 1200 guru-guru dari seluruh Indonesia di Universitas Terbuka, itu mengenai Pendidikan Karakter. Jadi, harus terus digaungkan, harus terus diingatkan, bahwa jangan hanya sekedar mencetak anak-anak yang cerda, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional dan seterusnya. Bukan hanya Iptek tetapi juga Imtaq. Jadi bisa, "Otak Jerman, hati Mekah".. bisa istilah kayak gitu. Jadi, perlu dikampanyekan terus menerus.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Drs Julian Aldrin Pasha M.A, Ph.D

Waktu : Senin, 29 November 2010, Pukul 09.00-09.30 WIB

Tempat : Via Phone

1. Menurut Bapak, seperti apakah karakter bangsa Indonesia pada saat ini, apakah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, sama saja, atau malah semakin mengkhawatirkan? Mohon dijelaskan berikut contohnya.

Menurut saya, sangat sulit membandingkannya secara kualitatif. Meskipun ada yang mengeluarkan statement bahwa bangsa kita kehilangan karakter, namun kita harus tetap optimis dalam menghadapi masa depan. Karena tidak ada seorangpun yang dapat memberikan ukuran secara pasti mengenai karakter. Terlebih pada era globalisasi ini. Selama kita tetap berpegang pada Pancasila, bangsa ini tidak akan kehilangan karakternya.

2. Mengenai karakter bangsa, apa yang Bapak ketahui mengenai pendidikan karakter? Seperti apa karakter yang penting bagi bangsa ini?

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan UU No 20 tahun 2003, Pasal 2. Pendidikan karakter bukan hanya berkenaan dengan kemampuan kognitif akan tetapi juga ESQ. Dalam pendidikan karakter, yang harus selalu ditekankan adalah Pancasila, tidak boleh ada pandangan lain.

Karakter yang penting bagi bangsa ini adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya.

3. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Sesuai dengan pernyataan ini, bagaimanakah eksistensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah menurut Bapak, Pancasila masih dipegang teguh, atau mulai dilupakan?

Saya kira dengan adanya berbagai konflik agama, konflik etnis maupun komunal, bukan berarti Pancasila mulai dilupakan. Kita harus obyektif dalam memandang berbagai konflik yang terjadi di Negara ini, karena ada banyak variable yang terlibat di dalamnya. Konflik bisa terjadi karena penanganan bibit konflik yang kurang cepat atau juga karena ketidakpahaman personal terhadap Pancasila. Jadi harus dipisahkan antara pemahaman personal tentang Pancasila dengan pemahaman bahwa Pancasila mulai ditinggalkan. Tidak relevan kiranya jika berasumsi bahwa Pancasila tidak diperhatikan, karena jika itu terjadi, maka keadaan yang ada di Indonesia akan lebih parah dari ini. Intinya, konflik dan berbagai kasus lainnya tidak berarti penolakan terhadap Pancasila.

4. Dalam era globalisasi ini, apakah yang menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila,

baik dari internal maupun eksternal?

Globalisasi yang positif pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena globalisasi sesuai dengan sifat Pancasila yang terbuka dan dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Sebagai contoh, penggunaan berbagai bentuk alat komunikasi, semakin menjadikan dunia ini menjadi kecil. Tidak ada batas-batas lagi dalam mengakses informasi, sehingga kita akan senantiasa mengikuti perubahan global. Memang, ada efek negatif yang ditimbulkan dari globalisasi, dan itu sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu, bangsa kita harus memiliki karakter yang kuat agar tidak mudah terombang ambing oleh globalisasi yang negatif, baik internal maupun eksternal.

- 5. Terkait dengan permasalahan eksistensi Pancasila tersebut, menurut Bapak, apakah Pancasila perlu direvitalisasi? Kalau dirasa perlu, kira-kira melalui apa sajakah perevitalisasian Pancasila ini?**

Kita tidak bisa mengatakan bahwa revitalisasi Pancasila itu perlu, karena Pancasila itu masih ada. Dalam kaitan dengan pendidikan nasional, tidak ada dasar selain Pancasila dan UUD 1945, jadi yang yang harus dilakukan adalah *maintenance* Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

- 6. Terkait dengan tema, pendidikan karakter dijadikan upaya revitalisasi Pancasila, menurut Bapak, sebenarnya bagaimana urgensi pendidikan karakter ini dan seberapa penting peranannya dalam Sistem Pendidikan Nasional?**

Banyak ruang untuk *empowering* pendidikan karakter, ini tergantung pada satuan pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan karakter atau budi pekerti dan pendidikan Pancasila harus mendapatkan perhatian khusus, untuk membentuk manusia berbudi luhur dan berwatak mulia, bukan hanya sebagai slogan saja, akan tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam sistem pendidikan nasional.

- 7. Menurut Bapak, seperti apakah bentuk pendidikan karakter yang ideal, yang efektif dan efisien dalam suatu pendidikan?**

Bentuk pendidikan karakter yang ideal adalah dengan mengintegrasikan pendidikan Pancasila, agama dan budaya. Karena ketiga hal tersebut merupakan suatu kesatuan pembentuk karakter yang kohesif dan saling melengkapi. Pendidikan Pancasila pun juga bukan sekedar indoktrinasi, seperti P4 atau penataran Pancasila yang dianggap tidak begitu efektif. Harus lebih diupayakan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa dengan metode yang efektif, salah satunya adalah dengan pengaplikasian langsung dalam kehidupan sehari-hari.

- 8. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan pendidikan karakter di sekolah?**

Dalam pendidikan formal, karakter dibentuk berdasarkan pendidikan Pancasila, agama dan budaya, yang harus saling menguatkan dan melengkapi. Itu harus saling *terconnect*, sehingga tidak perlu ada lagi perdebatan mengenai pendidikan karakter lagi. Dalam kaitan ini, Kemendiknas mempunyai tugas untuk menemukan suatu rumusan baru

dimana ketiga bidang tadi menjadi suatu formulasi khusus dalam pendidikan karakter.

9. Menurut Bapak, bagaimanakah peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter?

Sangat penting sekali, karena pendidikan karakter yang pertama kali dimulai dari keluarga. Bagaimana berperilaku, bagaimana beragama, bagaimana berbuat baik. Orang tua harus mampu menjadi contoh bagi anaknya, seperti di sekolah, guru harus mampu menjadi contoh bagi muridnya.

10. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk pendidikan karakter di masyarakat?

Yang paling krusial sebenarnya adalah pendidikan formal. Jadi tidak perlu khawatir ketika berada di masyarakat, karena masing-masing sudah memiliki nilai dan sikap sebagai bekal yang diperoleh di sekolah. Saat melihat perkembangan yang tidak sesuai di masyarakat, justru akan menghasilkan karakter baru yang kritis. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan global, khususnya di masyarakat, diperlukan suatu pondasi pendidikan karakter yang kuat dalam pendidikan formal. Mereka memiliki nilai-nilai yang baik, ber Pancasila dan berbudaya.

11. Menurut Bapak, bagaimanakah peran media massa dalam pembentukan karakter?

Globalisasi memiliki dampak yang luar biasa yang menjadikan dunia ini borderless, baik itu dampak positif maupun negative. Oleh karena itu, dalam pemberitaan seharusnya media massa benar-benar memberitakan informasi, bukan memprovokasi masyarakat, agar tidak timbul kebingungan di tengah masyarakat.

12. Dari manakah pendidikan karakter seharusnya dimulai? Apakah mulai dari generasi muda? Atau generasi tua juga harus paham agar dapat mendidik yang muda?

Pendidikan karakter seharusnya dimulai sejak dari keluarga, dan diperkuat dengan pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar dan menengah.

13. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter?

Keseriusan Kemendiknas merupakan faktor utama yang bisa mendukung maupun menghambat penyelenggaraan pendidikan karakter. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran setiap subyek dalam satuan pendidikan formal, nonformal dan informal.

14. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak kemukakan terkait pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila ini?

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Irawan Sockarno

Waktu : Minggu, 5 Desember 2010, Pukul 10.00 – 11.30 WIB

Tempat : Jl. Cempaka Putih Raya No 15A, Jakarta Pusat

1. Menurut Bapak, seperti apakah karakter bangsa Indonesia pada saat ini, apakah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, sama saja, atau malah semakin mengkhawatirkan? Mohon dijelaskan berikut contohnya.

Kalo menurut saya ya, kayak stagnan...stagnan...karena apa ya, apa itu masalah Pancasila. Kalo menurut saya, itu ndak jelas. Jadi di sekolahan-sekolahan harus ada mata pelajaran leadership, tapi yang benar-benar berlandaskan pada way of life, Pancasila itu. Sekarang tidak ada, kecuali tentara. Tentara itu ada mata pelajaran leadership. Intel itu ada mata pelajaran leadership. Kayak apa sih leader yang Pancasila. Itu kalau tidak bisa digambarkan kepada masyarakat itu ya repot. Mata pelajaran leadership itu di kuliah-kuliah itu tidak ada. Mungkin ada, tapi disana-sini, tidak menjadi satu. Padahal leadership itu yang paling penting dalam pembangunan Negara. Leader yang inovatif, leader yang Pancasila. Dan sosialisasi di masyarakat itu harus ada. Kayak apa sosoknya. Sosoknya leader yang berkarakter, leader yang ber way of life Pancasila. Saya usul, harus ada mata kuliah leadership di kuliah-kuliah itu.

malah, menurut saya..ini mundur ya. Mundur.. kalo saya lihat ya di yudikatif, legislative eksekutif..di 3 sektor itu tidak kelihatan leader yang Pancasila, semua terlalu primordialis, semua cuma mbela golongan-golongannya saja.

2. Mengenai karakter bangsa, apa yang Bapak ketahui mengenai pendidikan karakter? Seperti apa karakter yang penting bagi bangsa ini?

Ya seperti Bung Karno bilang ya..bung karno bilang...social budaya kita terbuka. Pancasila itu terbuka. maksudnya boleh menampung nilai-nilai yang baik yang dari luar. Tapi harus disaring. Bung karno bilang, itu budaya ngak ngek ngok itu..buang...itu yang menurut saya malah makin membudaya. Cucu saya ya, yang saya tanya waktu ulang tahun. Minta hadiah apa dari eyang kakung, ga ada yang minta baju gathutkaca, bahkan gathutkaca saja ga tahu. Maunya superman. Itu kan tanda-tanda sang budaya Pancasila itu makin tertindas, tertekan ke bawah.

Yang penting dalam pendidikan karakter yaitu tadi way of life bangsa kita yang Pancasila itu. sudah sampai mana. Yang saya lihat, ga ada yang berani Pancasila lagi. Apalagi mengkaitkan Pancasila dengan policies yang dimiliki leader. Leader itu bikin policies, dikaitkan ga dengan Pancasila. Welthanschauung itu..kan ndak. Malah orientasinya itu ideology ideology luar. Ideology yang sekarang ikut menindas Pancasila. Misalnya mendewa-dewakan Hak asasi manusia. Mendewa-dewakan demokrasi. Mendewa-dewakan lingkungan hidup. Saya kurang pas ya...saya bilang itu hebatnya

sono, tidak hebatnya kita. Dimana tidak hebatnya kita...ada istilah pancasila itu hanya untuk Indonesia, kenapa tidak go international seperti mereka. Kenapa.. itu komunis ya.. ada komintern, komunis internasional. Kenapa kita tidak ada pancasila internasional. Kita harus ada terobosan-terobosan seperti itu ..go internasional....mereka go internasional. sudah masuk disini. Sekarang disini itu mendewa-dewakan HAM. Padahal ya pondasinya disono ya, itu individualism. Kita tidak individualis, tidak kita. masuk Indonesia itu begitu lahir, dia seorang individu, sekaligus masyarakat. ada orang meninggal, datang ke sana, angkat itu sampai ke makam...tanpa perhitungan apapun,tetangga berangkat. Tanpa pandang ras, tanpa pandang apapun. Itu pancasila. Tapi...saya ingin ada terobosan komparatif..kalau ideology mereka bisa sampai sini entah itu barat atau timur, kenapa kita tidak sampai kemana-mana. Kenapa. Kurang inovatif. Dan intelijen..intelijen itu, kalau menurut Sherman kant..it is the search of the single best answer, then strategic intelligence is the extension of the search for useful knowledge. The extension however in several direction. Tuh...orang intel harus kembali kesana the single best solution, the single one...orang intel tiap hari mencari solusi.

- 3. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Sesuai dengan pernyataan ini, bagaimanakah eksistensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah menurut Bapak, Pancasila masih dipegang teguh, atau mulai dilupakan?**

Kalau menurut saya..pancasila ini memang ada factor-faktor yang membuat pancasila itu hilang di atas permukaan. perspektif sejarah membuktikan hal-hal itu. Pada waktu komunis, madiun affair..muso, amir syarifuddin mendeklarasikan Negara uni soviet Indonesia. Komunism datang kesini, kenapa Indonesia tidak datang kesana. Dimana elite-elite kita, dimana orang-orang pintar kita, dimana kampus-kampus kita. Jangan pancasila hanya untuk orang Indonesia. Jangan...sejarah lagi DI?TII untuk mendirikan Negara islam Indonesia, dimana Pancasila??hilang pancasila...lalu sekarang ini ada neoliberalism. Neoliberalism itu anaknya liberalism. Tertindaslah pancasila. Jadi ya salah kita sendiri. Bung karno itu..welthanschauung...pandangan hidup...kembali kesana kepada nasionalisme bung karno. Nasionalisme bung karno itu ada 3, nasionalisme bidang politik, nasionalisme bidang ekonomi dan nasionalisme bidang social budaya. Nasionalisme bidang politik, bung karno bilang, usir penjajah, dirikan Negara berdaulat. Betul Negara ini berdaulat. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Nasionalisme di bidang ekonomi, bung karno bilang, usir itu orang-orang orang-orang yang *Exploitation de L'home par L'home*, sumber daya alam kita habis. Yang ketiga, nasionalisme bidang social budaya, itu tadi bung karno bilang, saring itu, usir itu yang tidak betul-tidak betul itu. Kita perhatikan itu

- 4. Dalam era globalisasi ini, apakah yang menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila, baik dari internal maupun eksternal?**

Begini ya globalisasi ini ya...dulu kan ada perang dingin antara blok komunis dan blok kapitalis, paling sedikit ada 20 tahun. Itu hilang timbul globalisasi. Dampaknya apa. Dampaknya ancaman-ancaman terhadap pancasila itu makin masuk ke Indonesia.

Ancaman dari dalam dan luar negeri, jadi satu, menjadi Ancaman yang

multidimensional. Yang di dalamnya ada ancaman di bidang politik, ekonomi, social budaya. Itu yang membahayakan Pancasila. Makin terbahayakan kita.

- 5. Terkait dengan permasalahan eksistensi Pancasila tersebut, menurut Bapak, apakah Pancasila perlu direvitalisasi? Kalau dirasa perlu, kira-kira melalui apa sajakah perevitalisasian Pancasila ini?**

Kita ini, kalau belajar dari sejarah...maka sosialisasi di bidang Pancasila itu..sudah usang, sudah ndak laku lagi, sudah ndak bisa diterima masyarakat. buku banyak tentang pancasila, sering ada seminar tentang pancasila, tapi ndak ada yang ndenger lagi, tidak ada. Jadi anda harus bisa menemukan terobosan baru. Apa. Kembali ke intelijen. The single best solution. Menurut saya, pertama-tama, pancasila ini dibikin untuk menjadi komoditi yang bisa dikirim ke luar negeri. Yang kedua, di Indonesia sosialisasinya jangan kayak dulu lagi. Jangan sampai kayak dulu, indoktrinasi. Saya itu berpikir, apa sih salah nya indoktrinasi. Tolok ukurnya apa. Bagaimana semua agama disosialisasikan. Menurut saya ya indoktrinasi. Apa ada orang bisa membantah dai. Apa ada orang bisa membantah gereja. Jangan Cuma bisa menyalahkan Soeharto. Bagaimana kalau dikita sekarang menggunakan cara-cara seperti di ponpes untuk sosialisasi. Apa itu nanti juga tidak disebut indoktrinasi. Dan jangan lupa, indoktrinasi yang disebut orang itu Soeharto, itu keputusan MPRS, bukan Soeharto. Disamping tolok ukur tadi tidak jelas, bahwa indoktrinasi itu tidak jelas. Jadi bagaimana sekarang kalau kita pakai sosialisasi pancasila seperti ponpes, seperti gereja. menurut observasi saya, what is wrong with indoktrinasi. Orang cuma nyalahkan Soeharto, nyalahkan soeharto.

- 6. Terkait dengan tema, pendidikan karakter dijadikan upaya revitalisasi Pancasila, menurut Bapak, sebenarnya bagaimana urgensi pendidikan karakter ini dan seberapa penting peranannya dalam Sistem Pendidikan Nasional?**

Saya itu sekolah manggala. P4 itu. Perintahnya Tap MPR. Di sekolah manggala itu boleh diskusi, boleh bantah kiri boleh bantah kanan. Itu bohong kalau ada yang bilang ndak bisa diskusi. Saya ngalamin, boleh itu mbantah sama yang ngajar. Ini ada politisasi. Ada distorsi. dari penilaian yang tidak obejektif. Ini harus dikaji oleh kampus-kampus. Ndak betul. Dan saya sebagai orang intel, saya tidak bisa terima begitu saja. Dan mengenai pendekatan contoh dari atas, saya kok kurang pas ya. Menurut saya itu ndak betul itu cara berpikir yang salah, memangnya sapa mereka. Malaikat?nabi?dia kan sama dengan saya, masak minta contoh dia. Saya harus tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan saya tahu, tidak perlu minta contoh dari orang itu. Bodoh saya, kalau minta contoh dari pemimpin-pemimpin kayak begitu itu. Saya lebih baik dari dia, Cuma saya ndak ada kesempatan jadi pemimpin. Ini harus dikaji. Jangan langsung nggugu omongan orang yang dipolitisasi. Ndak betul.

Mengenai urgensinya, yaitu tadi, harus ada mata pelajaran leadership, di kampus-kampus, yang landasannya Pancasila. Buang cara-cara lama. Misal dengan berbagai penulisan yang dipublikasikan. Tapi sebenarnya masyarakat juga sudah bosan dengan cara ini. Jadi harus ada terobosan baru. Misalnya penggunaan animasi untuk menarik perhatian, disamping upaya dari orang-orang pinter di kampus untuk membuat

pancasila go internasional.

7. Menurut Bapak, seperti apakah bentuk pendidikan karakter yang ideal, yang efektif dan efisien dalam suatu pendidikan?

Ya itu tadi, animasi. Harus dimanfaatkan production house. Bikin animasi, untuk tayangan di sekolah apa, di rumah apa, di masyarakat apa.

8. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan pendidikan karakter di sekolah?

Melalui mata pelajaran. Kalau sudah di universitas, bikin tulisan yang dipublikasikan. Suruh nulis, bikin seminar, tapi bukan habis seminar terus korupsi lagi. Animasi..animasi..juga bisa. kampus mengajak production house bikin animasi atau tayangan, missal tentang pemimpin yang pancasilais. Kampus jangan hanya menerima secara mentah-mentah informasi yang ada. Harus obyektif. Itu juga yang saya pegang.

9. Menurut Bapak, bagaimanakah peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter?

Animasi. Orang tua yang baik, yang pancasilais..ini lho gambarnya. Bapaknya begini, ibunya begini, kakeknya begini, anaknya begini..

10. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk pendidikan karakter di masyarakat?

Tetap saja dengan animasi. Animasi bisa, sandiwara bisa, wayang bisa, mass media juga bisa, coveraganya lebih luas. Pemerintah, punya kementerian pendidikan. yaitu yang ditugasilah.jangan ke tempat lain. Kedua, sosialisasi dalam jangka pendek dan sedang, ya itu kementerian kminfo. Tapi bagi saya, tidak mengandalakna itulah...saya lebih mengandalakan kampus. Kampus jangan hanya menuntut ilmu begitu saja. Soeharto salah, pancasila salah. Coba itu kampus bikin riset. Soeharto otoriter, coba kampus bikin riset, tolok ukurnya apa.

11. Menurut Bapak, bagaimanakah peran media massa dalam pembentukan karakter?

Sekarang ini, wartawan itu masuk kurungan...industri mass media. Jaman dulu, perjuangan. wartawan itu berjuang, rosihan anwar itu berjuang. Jaman sekarang, wartawan harus mengikuti pemilik industri media. Oke, lewat itu...mass medianya dipake, kampus bersama production house bikin....di jawa tengah, wayang..pelajari anthropologi daerah masing-masing, masuk...itu istilah intelnya penggalangan. Penggalangan itu apa, to win the heart and the mind of the people..tuh...bisa ndak tu?ini yang membutuhkan keterampilan otak. Sudahlah tinggalkan cara-cara lama. Kampus-kampus itu harus mendekati media juga, ndak ada jalan lain. Untuk mensosialisasikan pancasila. Semua terima, Cuma banyak yang ga tau, pancasila itu kayak apa.

12. Dari manakah pendidikan karakter seharusnya dimulai? Apakah mulai dari generasi muda? Atau generasi tua juga harus paham agar dapat mendidik yang

muda?

Kampus harus menjadi center of excellence. Jangan kampus itu malah terlalu banyak mengakomodasi hal-hal dari luar. Misalnya HAM didewa-dewakan. Demokratisasi didewa-dewakan. Demokrasi di Indonesia harus ada local content. Local contentnya apa, Pancasila. Di semua Negara demokrasi itu ada local contentnya, jangan diterima begitu saja, kedodoran kita. Rousseau bilang apa, demokrasi itu yang kuasa rakyat. Di Negara ini yang kuasa sapa? Yang kuasa yudikatif, eksekutif, legislative, apalagi yang pancasilais..tidak ada...orang rebut tentang demokrasi. Kita harus belajar dari rousseau, apa kayak yang sekarang ini. Masih banyak question mark, dan kampus yang harus bisa menjawabnya. Kampus kalau riset jangan 15 atau 30 tahun, terlambat itu. Harus kayak intelligence cycle, renpulolahsaji, untuk mendapatkan basic descriptive intelligence. Intelijen dasar. Demokrasi, apa dasarnya. Rousseau bilang kuasa ditangan rakyat. Sekarang rakyat sama DPR berantem, padahal DPR wakil rakyat. Gitu lho...bagi intel, seperti saya, masih banyak question mark, dan kampus yang harus menjawabnya, karena kampus itu center of excellence. Ketika saya di Taiwan, kampus benar-benar menjadi center of excellence. Hasil riset di kampus diterapkan di masyarakat. misalnya mangga, bisa dibuat agar berbuah yang sama. Iptek disini masuk ke kampong-kampung. Tapi di Indonesia, ndak ada iptek masuk kampong. Kapan kampus kita menjadi center of excellence. Bikin kampong pancasila. Tapi yang paling sulit memang kita tiru-tiru komintern, bisa go international.

13. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter?

Kalau menurut saya, jangka panjang ya melewati pendidikan mulai dari sekolah dasar. Kalau jangka pendeknya harus segera disosialisasi dengan cara-cara baru, metodologi baru. Kalau ada tuntutan pemimpin atau pemerintah harus memberi contoh, saya tidak setuju..seratus tahun lagi juga ndak bisa..lha kalau saya dikasih contoh orang yang begituan, kan tambah rusak saya. Orang Indonesia harus dididik. You harus tahu sendiri mana yang bener. Jangan minta contoh orang lain, contoh itu nabi. Mau minta contoh pemimpin politik sekarang ini? Rusak nanti...rusak...itu lh yang saya tidak setuju, orang minta contoh, wah, ini orang bodoh minta contoh dari bos-bos politik jaman sekarang.

Yang bisa menghambat adalah ideology-ideologi asing yang masuk ke Indonesia, yang mereka memang ingin ideology itu menyebar ke seluruh dunia. Ada clash of civilization disitu, seperti Huntington bilang itu. Globalisasi itu menjadi tantangan berat bagi kita. Nilai-nilai sana masuk kesini dan nilai-nilai disini tertindas habis. Contoh-contoh empiris sejarah sudah membuktikan, dan itu berlanjut.

14. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak kemukakan terkait pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila ini?

Lubis bilang, intel itu harus obyektif. Dan itu saya pegang. Sampai hari ini yang saya pegang merah putih, saya tidak mbela yang lain. Merah putih isinya 4, NKRI, Pancasila,

UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan pluralism lepas, tapi bhinneka tunggal ika. Bukan plural yang dilepas begitu saja, bisa pecah NKRI, hancur berkeping-keping.

Saya ingin tetap menghimbau kepada kampus untuk menjadi center of excellence. Jangan menerima begitu saja nilai-nilai asing yang masuk ke Indonesia. Jangan mendewa-dewakan HAM, jangan mendewa-dewakan demokrasi, jangan mendewa-dewakan ideology asing. Banyak S1, S2 dalam dan luar negeri, terkena distorsi. Kalau mereka jadi pemimpin di negeri ini, saya malah kuatir.

HAM kita beda dengan barat. HAM individu itu kalah oleh HAM Negara, kalah oleh kepentingan masyarakat, kalah oleh kepentingan Negara. Di Indonesia HAM itu masyarakat.masyarakat itu lebih tinggi dari individu, itu bedanya.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Romo Franz Magnis Suseno

Waktu : Kamis, 9 Desember 2010, Pukul 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : STF Driyarkara Jl Cempaka Putih Indah 100A, Rawasari

1. Menurut Bapak, seperti apakah karakter bangsa Indonesia pada saat ini, apakah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, sama saja, atau malah semakin mengkhawatirkan? Mohon dijelaskan berikut contohnya.

Saya tidak akan merumuskannya dalam kategori moral, meskipun segi moral juga sangat penting, tetapi menurut saya, karakter orang-orang Indonesia terancam kacau dan bingung. Dan ada beberapa sebab untuk itu, yang pertama, yang paling dasar menurut saya, itu bahwa proses transformasi masyarakat Indonesia ke dalam masyarakat modern, pertama-tama membawa ketidakpastian. System normative dulu dalam konteks masyarakat tradisional, tidak memadai. Tidak berarti nilai-nilai dasar tradisional tidak bisa dipakai, tetapi tidak dalam kemasan struktur social budaya tradisional, karena masyarakat betul-betul berubah. Misalnya saja, 2 unsur yang dulu hampir tidak memainkan peranan dan sekarang memainkan peranan bagi siapa saja termasuk kita berdua, itu keharusan untuk menang dalam kompetisi hak, hampir terus menerus. Dulu justru kompetisi mungkin ada, tetapi ditutup-tutup diberi bantal. Sekarang kita harus menjalani tempat kerja, di tempat kerja kita harus unggul, bahkan dari teman, kompetisi tidak berarti harus permusuhan tetapi harus maju, kita harus memikirkan gaji apalagi berkeluarga. Itu yang pertama. Ini sebuah nilai yang hakikatnya egois, ee, kita lepaskan pertanyaan moral, wajar nilai itu tadi, tetapi mengacaukan. Yang kedua adalah perlunya image, itu tentu tergantung. Saya pribadi menganggap image saya tidak penting, tetapi barangkali karena saya punya image baik. Kalau kita melihat para panutan masyarakat seperti para selebriti. Selebriti hidup dari image, sampai ada bintang film bisa masuk partai politik dan menaruh orang. Dan Image didalam masyarakat tradisional sama sekali tidak dinilai, sebaliknya orang jawa disuruh sepi ing pamrih, ojo pamer, ojo dumeah, dan sebagainya. Jadi, ini sejak kecil dialami manusia Indonesia, sejak ia anak-anak, tentu saja ada kebingungan dalam karakter. Itu situasi dimana kita harus membantu. Lalu harus ditambah bahwa kita, menurut saya, menderita kelangkaan panutan positif yang sungguh-sungguh, sangat jelas di dalam politik sebetulnya bahwa Pak SBY itu masih punya approval right yang begitu tinggi, karena sosok beliau dalam membawa diri masih menimbulkan kepercayaan mendalam, tetapi tentu orang yang melihat kenyataan kebijakan minimal akan mempunyai pertanyaan pertanyaan, para politisi pada umumnya sudah dianggap remeh dan jelek oleh masyarakat. yang masih sangat berpengaruh adalah para panutan agama, tetapi disitu kita punya berbagai macam. Kalau orang seperti sahabat saya, pak syafei maarif menjadi panutan itu tentu pengaruhnya sangat positif baik untuk memperdalam Islam maupun untuk mengembangkan antara umat-umat Islam sikap terbuka dan positif yang bagi kami, non Islam itu sangat membantu, tetapi ada juga yang sempit fanatic, itu juga tidak membantu karakter, dimana misalnya nilai-nilai

kemanusiaan tidak memainkan peranan, nah, di dalam situasi kacau ini tentu saja tantangan untuk pembangunan karakter, untuk pertanyaan, apakah identitas seorang Indonesia sekarang, akan muncul, jadi ini latar belakang. Sebelum menanyakan bagaimana harus keluar. Nah, Saudara mengatakan Pancasila, menurut saya itu betul jadi Pancasila tentu bukan obat untuk segala-galanya. Kita harus melihat bahwa Pancasila pertama-tama merupakan etika bidang public dan etika politik. Etika politik dalam arti bahwa seharusnya seluruh kebijaksanaan politik bangsa Indonesia di semua level, di semua kekuasaan apakah ini legislative, eksekutif atau yudikatif, senantiasa diarahkan dalam memecahkan segala macam konkret sehingga akhirnya tercapai realitas 5 sila itu. Untuk hidup biasa, karakter sudah dibentuk sebelum Pancasila menjadi ideology, tentang Pancasila, menurut saya kita harus belajar misalnya pluralism di sila yang pertama, misalnya perasaan kuat mengenai yang menolak ketidaksamaan, yang menolak adanya paksaan, sila yang kelima dan sebagainya, tetapi sila ketiga misalnya bagaimana generasi berikutnya merasa diri orang Indonesia, merasa bangga menjadi orang Indonesia, merasa besatu menjadi orang Indonesia, nah itu semua pertanyaan yang penting. Sila yang kedua bagi saya kunci, karena itu merupakan bottom line bagi yang paling bawah, mari kita semua bertekad, bersumpah yang sama, mari kita berlaku secara beradab dalam situasi apapun, itu bottom line, kalau itu tercapai itu bagus, banyak masalah kita kenapa orang dalam kebingungan membawa diri secara beradab, ikut melakukan yang dia kemudian merasa malu kalau orang lain menyanyakannya. Jadi Pancasila memang berguna. Saya kira, harusnya unsure-unsur itu diberi tempat dalam kurikulum, minimal sekolah menengah. Yang bisa dipengaruhi adalah pendidikan guru-guru agama, karena guru agama berpengaruh besar pada orang banyak, saya sendiri, katakanlah intelektual katolik, saya kenal dengan banyak sekali intelektual protestan, intelektual islam dan lain-lain. Tetapi saya sama sekali tidak tahu mengenai apa yang diajarkan guru agama saya, apa yang diajarkan para ustad, para dai, apakah mereka punya wawasan misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab memainkan peranan atau hanya sudut agama. Itu sangat berpengaruh, kalau selama tahun-tahun pertama anak-anak kita mendapat pelajaran agama, secara sempit, eksklusif mungkin dengan kebencian yang tersembunyi terhadap agama-agama lain atau sebagainya ya jangan heran kalau karakter sudah rusak sebelum Pancasila mulai.

2. Mengenai karakter bangsa, apa yang Bapak ketahui mengenai pendidikan karakter? Seperti apa karakter yang penting bagi bangsa ini?

Pendidikan karakter itu pada hakekatnya masih terjadi di dalam keluarga dan menurut psikologi, sebetulnya yang paling penting terjadi dalam umur antara 3-7 tahun, dan itu sangat sulit disentuh oleh pemerintah dsb. Itu hanya bisa melalui karakter masyarakat itu sendiri. Tapi karakter masyarakat menurut saya masih lumayan, hanya mungkin yang berpengaruh disini barangkali yang paling pertama adalah guru. Mereka bisa kita pengaruh. Sedangkan kemudian misalnya nilai-nilai bangsa yang dianggap penting secara eksklusif dibicarakan, misalnya pluralisme, implikasi pluralitas budaya, intrik dan agama di Indonesia, tidak hanya dengan cara baik-baik dan sebagainya melalui saling menghormati tetapi juga mengapa ada kesulitan, lalu bagaimana mengatasi untuk anak itu agar mau berdiskusi, boleh atau tidak seorang katolik bermain bola bersama

seorang anak islam, mulai disitu, dan hal seperti itu mulai harus dibicarakan.

- 3. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Sesuai dengan pernyataan ini, bagaimanakah eksistensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah menurut Bapak, Pancasila masih dipegang teguh, atau mulai dilupakan?**

Menurut saya pancasila pertama-tama harus dipertanyakan di dalam institusional itu, organisasi politik, masyarakat dalam hidup sehari-hari tentu tidak pikir pancasila dan tidak pernah pikir pancasila, karena moralitas dasar nilai yang kita dapati dari Pancasila, terungkap dalam pancasila tetapi dapat kita rubah. Tetapi apakah kebijakan Negara, kebijakan gubernur, kebijakan pembangunan dalam kabupaten dan sebagainya pancasilais atau tidak, misalnya apakah lurah ataukah camat memiliki perasaan tentang pluralism sehingga masalah minoritas yang hampir dimana-mana ada bisa ditangani baik, tentu akan berpengaruh. Jadi pancasila itu sebetulnya sangat bergantung apakah secara eksklusif disadari oleh para policy maker. Dari tingkat nasional, pancasila sendiri sejauh saya lihat tidak dipersoalkan lagi. Bahkan tahun 2001 waktu tujuh kata piagam Jakarta mau dikembalikan, itu tidak diusulkan ke dalam pembukaan undang-undang dasar dan juga pancasila, tetapi ke pasal 29 ayat 1 yang berbicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa, disitu saja mereka sudah tidak berani mengutik-utik pancasila, tentu dalam kenyataan bisa digerogeti, tetapi secara eksplisit, pancasila mantap.

- 4. Dalam era globalisasi ini, apakah yang menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila, baik dari internal maupun eksternal?**

Sebetulnya persaingan ideology cukup terbatas, saya melihat hanya 3 macam ajaran ideology, yang dua yang pertama, sudah bukan ideology dalam arti tajam, Bell itu benar. Itu yang ideology yang sering disini disebut dengan neoliberalisme, fundamentalisme pasar dan sebagainya terutama dari amerika serikat, dan yang kedua itu lawannya, katakana saja cita-cita ekonomi, seperti di eropa, welfare state, karena di Amerika, Negara sejahtera itu ditertawakan. Jadi ini sebetulnya, katakan saja di bidang ekonomi dan politik yang berlawanan sebenarnya adalah market fundamentalism dengan semacam kombinasi tidak tajam antara welfare state dan perhatian kepada kepentingan nasional yang merasa terancam oleh deregulasi umum, karena harus diperhatikan duaduanya, tidak didasarkan ideology tetapi kepentingan itu berbeda dengan ideology, juga fundamentalisme pasar tidak lagi sebuah ideology kapitalis tetapi tidak susah melihat dibelakangnya kepentingan amerika serikat. Dan mereka pura-pura punya ideology, tapi sebetulnya perusahaan kami mau ada pasar dan anda terbuka, nah yang melawan itu yang saya lihat hanya islamisme. Islamisme tidak mudah dirumuskan, saya tidak mengatakan islam. Islam itu plural sekali. Melihat di Indonesia. Tapi islamisme dalam pandangan dimana unsure anti barat, yang mungkin agak umum, anti barat adalah anti amerika serikat, tapi dalam keislamannya ia tidak senang dengan suasana kebarat-baratan, yang di China tidak ada itu. Bahkan di India. Islam itu muncul, islam itu sendiri, tentu lalu bergulat dengan realism pragmatisme, dan yang ideologis ada juga yang sampai fanatisme, ada segala macam, jadi islamisme itu bukan hanya sebuah kata yang

sangat umum, itu yang saya lihat.

- 5. Terkait dengan permasalahan eksistensi Pancasila tersebut, menurut Bapak, apakah Pancasila perlu direvitalisasi? Kalau dirasa perlu, kira-kira melalui apa sajakah perevitalisasian Pancasila ini?**

Urgensinya adalah tinggi karena kalau ini dibiarkan dan dikatakan ya sudah tidak ada yang menentang dan oke-oke saja, akhirnya akan tergeser, disatu pihak oleh pragmatisme, dilain pihak oleh fanatisme sempit religious. Pragmatism mengatakan pokoknya kita membangun, pokoknya kita memajukan bangsa tapi kalau kita melihat lebih tajam, yang untung dari pragmatism adalah 40% keatas. Dan 5% paling atas, paling beruntung. Kecepatan mereka menjadi lebih kaya itu luarbiasa. Tetapi yang 40% juga lumayan, tetapi yang lain-lain tidak maju, jadi pragmatism itu bukan kepentingan seluruh bangsa, tetapi dalam kenyataan kepentingan para pengusaha diatas, jadi tidak adil, jadi bertentangan dengan pancasila, jadi mengancam juga kesatuan bangsa.

- 6. Terkait dengan tema, pendidikan karakter dijadikan upaya revitalisasi Pancasila, menurut Bapak, sebenarnya bagaimana urgensi pendidikan karakter ini dan seberapa penting peranannya dalam Sistem Pendidikan Nasional?**

Betul, saya setuju itu. Dan saya melihat dalam pendidikan karakter, tentu semua lima sila itu penting, tetapi yang paling rare adalah 3, yang pertama adalah toleransi dan kemampuan untuk hidup dalam pluralitas, anak harus mampu, mantap dan yakin dalam identitas budaya dan religiusnya, biar dia bisa bergaul bermain bersama dengan anak yang identitasnya berbeda, dengan anak. Yang kedua, barangkali paling penting adalah mendidik anak supaya menjadi peka terhadap penderitaan, orang miskin, orang tertindas, orang tahanan, supaya tidak menjadi keras hati, itu akan sangat membantu pancasila, missal keadilan social, tidak tahan melihat bangsa ini menderita. Yang ketiga adalah nasionalisme yang sehat. Keindonesiaan itu penting jadi anak harus dibantu supaya bangga dan gembira dalam keindonesiaannya.

- 7. Menurut Bapak, seperti apakah bentuk pendidikan karakter yang ideal, yang efektif dan efisien dalam suatu pendidikan?**

Ya, Seperti tadi saya sebutkan, yang pertama adalah toleransi dalam kehidupan yang plural, kedua adalah mendidik agar anak peka terhadap penderitaan dan ketiga nasionalisme yang sehat.

- 8. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan pendidikan karakter di sekolah?**

Kalau yang pertama, kiranya di sekolah ada anak-anak dari berbagai latar belakang. Tidak ada lagi kota besar, kota menengah, semuanya bercampurbaur budaya etnik dan agama, dan ini mudah komunikasi dalam kelas jika komunikasi baik, dan mereka akan melihat yang berambut keriting dari Indonesia timur bisa menjadi teman bahkan menjadi pemain bola yang hebat dan sebagainya, itu mengenai pluralism. Mengenai kepekaan terhadap penderitaan, cara yang paling efektif adalah exposure, program exposure, dimana mereka misalnya bersama guru mengunjungi orang sakit, mengunjungi

orang di pemukiman kumuh, pergi ke bantar gebang, pergi kerumah sakit, supaya mereka tersentuh, kalau ini bisa dijelaskan dengan baik oleh guru, akan sangat membantu. Kalau nasionalisme, menurut pengalaman saya, pada anak itu pertama kali muncul melalui cerita yang membanggakan dari bangsa ini, perjuangan bangsa, kemajuan bangsa, secara historis perlu, tapi juga perlu apresiasi terhadap keadaan bangsa saat ini, kekuatannya, kelemahannya dan sebagainya.

9. Menurut Bapak, bagaimanakah peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter?

Di rumah lebih sulit, tentu 3 hal itu juga bisa diterapkan di rumah. Tapi bagaimana kita mau mendekati orang tua. Bisa saja diadakan seminar bagi orang tua di berbagai tempat dimana itu ditekankan, tapi secara langsung ini tergantung kepada sikap dan perasaan orang tua itu sendiri. Mungkin bagi mereka tidak ada masalah. Jadi menurut saya ini yang paling tidak mudah disentuh, karena keluarga berjalan menurut kebiasaan, tidak menurut rencana point satu, point dua, point tiga, itu ya tidak. Dalam keluarga, pengorbanan itu a worthwhile, demi kebahagiaan happiness.

10. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk pendidikan karakter di masyarakat?

Di masyarakat, ya kita harus bertanya bagaimana para pemimpin masyarakat dan pemerintah bisa mendidik masyarakat, disatu pihak melalui pendidikan formal yang sudah kita sebut tadi, dilain pihak bidang public, dalam kualitas politik. Sekarang sangat terbuka bagi masyarakat lewat media, seperti televise, sekian orang nonton, saya kira para pemulung dibantar gebang pun punya televisi, disitu kita mengharapkan baik tokoh formal atau tokoh politik, panutan agama, formal maupun nonformal sudah mempunyai cirri itu. Kalau mereka itu tidak menyadari ya susah. Sebaliknya kalau mereka konsisten dalam apa yang mereka katakan dan mereka putuskan berorientasi pada pancasila akan ada efeknya pada masyarakat.

11. Menurut Bapak, bagaimanakah peran media massa dalam pembentukan karakter?

Ya besar..saya tidak ingin menyinggung ini karena saya hampir tidak pernah nonton televisi, jadi saya tidak bisa komentari. Saya hanya mendengar keluhan dan sebagainya, baru saja saya juga lihat daftar bahwa berita informasi itu nomer 5 dari 5 kepentingan. Yang nomer 4 itu talkshow, yang ke 3 saya lupa. Pokoknya bagaimana program itu disusun itu sangat berpengaruh. Dan ini perlu dibicarakan dengan para ahli. Kalau media itu semata-mata hanya dari sudut komersial mungkin mereka tidak akan sempit fanatic tapi mungkin tidak sepenuhnya menjalankan perannya, mungkin. Jadi harus ada kesadaran normative, tidak hanya sekedar mendapatkan bayaran dari iklan. Dan sebaliknya, saya mau tambah. Saya kira pengaruh iklan itu sangat besar. Orang mau cita-cita kehidupan menjadi seperti orang dalam iklan itu.

12. Dari manakah pendidikan karakter seharusnya dimulai? Apakah mulai dari generasi muda? Atau generasi tua juga harus paham agar dapat mendidik yang

muda?

Menurut saya harus sekaligus di semua dimensi, karena para pendidik itu kan berbeda. Saya misalnya, senang bahwa mendiknas yang sekarang menyadari itu. Ini juga berkat usaha yayasan jatidiri bangsa dimana saya juga anggota, yang sejak bertahun-tahun menciptakan hal ini, dan dari menteri sekarang mendapat perhatian sungguh-sungguh. Dan disini kita harus mulai dari anak kecil sejak SD dengan disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk menangkap Pancasila. Dan ini juga memerlukan para ahli, termasuk psikolog.

13. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter?

Factor pendukung paling besar adalah bahwa nilai-nilai pancasila masih berakar dalam hati masyarakat. pengalaman saya jelas sekali itu ada, hanya sering suasana tidak membantu, misalnya di lalu lintas. Saya pernah mengalami, saya naik motor, tabrakan dengan sepeda. Orang yang naik sepeda itu orang Katolik Flores, lalu kami sama-sama omong-omong daripada marah-marah, bahkan kekerasan. Kita harus menggali bahwa dalam situasi seperti itu, saya berpendapat bahwa pada hakekatnya dalam hati masyarakat masih ada modal yang perlu dirangsang dan diberi konteks yang memungkinkan, sehingga bisa kita andalkan.

Yang menghambat itu adalah terutama segala macam kekerasan, ketidakadilan. Orang yang selalu dalam ketakutan, tidak bisa membuka diri dan akan negative thinking. Kalau saya takut dengan anda, saya tidak akan bisa berbicara lepas. Saya akan selalu hati-hati, mungkin saya takut nanti anda kutip suatu kalimat saya yang menghancurkan. Tapi tentu saya tidak takut, karena jika saya takut, anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi suasana ini, banyak orang misalnya dalam rangka urbanisasi masuk ke Jakarta, pertama adalah takut, Jakarta itu keras, orangnya keras dan itu akan membentuk sebuah defence mechanism dan itu tidak membantu. Lalu ketidakadilan yang dialami lama oleh orang membuat orang bingung sehingga bisa mengikuti satu ideology atau satu fanatisme religious yang sempit sebagai hasil dari situasi seperti itu, tertekan dan sebagainya.

14. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak kemukakan terkait pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila ini?

Saya kira tidak, semua sudah anda rangsang dari saya untuk keluar.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Arswendo Atmowiloto

Waktu : Jumat, 17 Desember 2010, Pukul 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : Jl Damai No 34 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jaksel

1. **Menurut Bapak, seperti apakah karakter bangsa Indonesia pada saat ini, apakah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, sama saja, atau malah semakin mengkhawatirkan? Mohon dijelaskan berikut contohnya.**

Sebetulnya kalau kita mau ngambil kurun waktu yang eksak ya, sejak tahun 90 itu memang terasa sekali hal-hal semacam itu dipertanyakan lagi, meskipun waktu itu, jaman orde baru itu, pak harto masih, kalau istilahnya indoktrinasi masih kenceng, tapi ketika, saya melihat gejalanya dari media massa, ketika kemudian dibukanya beberapa saluran televisi, beberapa pendekatan yang lebih neoliberal, meskipun menurut saya itu lebih kepada globalisasi media saja, itulah nilai-nilai itu menjadi ditawarkan lagi, jadi dua sisi, satu pancasila diberi makna ekstrem melalui P4, di sisi yang lain dalam tindakan dalam policy, tidak tercermin itu. Lhah itu terus berlanjut sampai sekarang ini, sehingga kalau yang biasa khawatir ya ini mengkhawatirkan banget, bagi yang lain ya cuek, dan lain sebagainya.

2. **Mengenai karakter bangsa, apa yang Bapak ketahui mengenai pendidikan karakter? Seperti apa karakter yang penting bagi bangsa ini?**

Begini...ee...pendidikan karakter adalah dengan contoh, sikap keseharian, yang terutama untuk masyarakat kita ini melalui kepemimpinan yang..yang memang mencerminkan itu, kalau itu saja sebenarnya sudah lebih dari pada pendidikan. lalu tentu ada bentuk-bentuk yang lainnya, kayak apakah melalui kesenian, apakah melalui budaya, apakah melalui..teknologi dan lainsebagainya, karena kalau tidak ada contoh yang konkret, contoh konkret itu maksud saya dari peristiwa keseharian, ini peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa budaya, kan akan berhenti kembali di tesis itu tadi, indoktrinasi, lalu hafalan, padahal sekarang hafalan aja katanya ga bisa, hehe..

3. **Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Sesuai dengan pernyataan ini, bagaimanakah eksistensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah menurut Bapak, Pancasila masih dipegang teguh, atau mulai dilupakan?**

Kalau saya melihat, dari generasi ya..mungkin generasi saya, masih..masih sangat memegang teguh, meski mungkin ada juga yang mulai melupakan, hanya.....dalam nilai-nilai pancasila ketika berhadapan dengan nilai-nilai global, atau yang saya sebut nilai-nilai industrial, ini ada yang tidak terjembatani. Gini, misalnya dalam pancasila ada nilai-nilai mufakat. Ketika industry, ini yang tidak bisa dimengerti, seperti pemilu itu, suara terbanyak, padahal dalam pancasila suara terbanyak itu belum tentu mufakat.

Contoh yang lainnya perikemanusiaan lah, ini dalam dunia industry tidak ada ukurannya, sehingga mereka memakai ukuran banyak, menarik, lebih pada unsure shownya. Ini tercermin misalnya pada karya-karya seni, karya-karya yang edukatif. Di pancasila ini dianggap bernilai tinggi tapi bagi industry, kalau penontonnya sedikit ya dianggap kalah. Karena system industry berbeda dengan system pancasila. Nah, inilah yang sebetulnya harus diwaspadai atau kita seperti tadi, menterjemahkan nilai-nilai pancasila ini dalam bentuk yang seperti itu.

Selama kita meyakini pancasila, pasti akan beda. Masalahnya karena sekarang kita sudah masuk ke era industrial ini, ya kita diarahkan kesana. Contoh misalnya TVRI yang masih relative edukatif, tapi di era sekarang ini itu saja tidak cukup, mereka menganggap lha kalau tontonan unyil memang bagus, edukatif, tapi kalau dibandingkan dengan termehk-mehk, banyak yang nonton termehk-mehk, nah disitu. Kalau tadi caranya adalah bahwa bikinlah yang termehk-mehk ini juga mementingkan nilai-nilai itu, tapi itulah yang kontras, dan menurut saya belum bisa terjembatani sampai saat ini. Nilai-nilai industrial itu sangat menjadi ancaman bagi Pancasila, itu sudah jelas, karena idiomnya beda. Kita menilai, o wanita itu berbudi baik, tapi ketika pemilihan ratu, pemilihan miss kecantikan ya yang diukur bukan itu, yang diukur teteknya, diukur perutnya, diukur pantatnya, harus itu dulu baru dia cantik. Kalau dia ga memenuhi syarat itu ya dia ga akan dibilang cantik.

4. **Dalam era globalisasi ini, apakah yang menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila, baik dari internal maupun eksternal?**

Kalau saya Cuma satu, kalau dia menjadi fanatik dipake sebagai kayak zaman orde baru itu, itu ancaman tersendiri dari dalam. Kedua ya nilai-nilai global dan nilai-nilai local yang merasa bahwa dia tidak bersentuhan atau tidak memerlukan pancasila. Ekstremis-ekstremis atau apapun yang menolak pancasila.

5. **Terkait dengan permasalahan eksistensi Pancasila tersebut, menurut Bapak, apakah Pancasila perlu direvitalisasi? Kalau dirasa perlu, kira-kira melalui apa sajakah perevitalisasian Pancasila ini?**

Sebetulnya kalau kita jadiin program saja, jadi revitalisasi itu kita jadikan program tu begini, change mindset nya masyarakat kita ini, nah ini yang tidak ada. Perubahan mental masyarakat, inilah yang diperlukan. Dulu kita orang Indonesia ga ada yang sarapan mie, karena sarapan pasti nasi, tapi dengan brainwashing, dengan kampanye yang luar biasa ini, sekarang bisa. Misalnya gitu. Ga ada dulu air putih tu beli, ga ada. Tapi sekarang beli. Nah, pancasila itu juga harus didekati, disosialisasikan dengan cara yang sama. Itu baru kita bisa mengubahnya. Mana mau orang Indonesia transmigrasi, atau masyarakat Indonesia kita yang mayoritas muslim, KB, itu kan berat banget, tapi dengan itu justru mereka bisa berubah.

6. **Terkait dengan tema, pendidikan karakter dijadikan upaya revitalisasi Pancasila, menurut Bapak, sebenarnya bagaimana urgensi pendidikan karakter ini dan seberapa penting peranannya dalam Sistem Pendidikan Nasional?**

Kembali lagi, kita sebetulnya sangat sederhana ya. Contoh-contoh yang ada, itu yang dimunculkan, dengan nuansa atau frame yang kita pilih. Kita menceritakan waktu diponegoro melawan Belanda, misalnya, tetapi bahwa dia bisa menggalang kelompok Jawa, kelompok priyayi, kelompok Islam, itulah persatuan yang kita butuhkan, bukan hanya melawan Belandanya, bukan. Tapi, itu yang dimunculkan seharusnya. Kalau kita bicara tentang Ibu Kita Kartini ya, perjuangan dia, bukan sekedar emansipasi, tetapi perjuangan dia yang..wanita punya perang, itu yang dimunculkan. Jadi apa ya, point approvalny, frame nya, inti yang disampaikan itu yang harus diperluas dari yang ada.

7. Menurut Bapak, seperti apakah bentuk pendidikan karakter yang ideal, yang efektif dan efisien dalam suatu pendidikan?

Sekali lagi ya, itu hanya contoh, peristiwa dan beberapa kita create sendiri, apakah dari dongeng-dongeng lama, seperti sangkuriang, itu kan bebas tafsir.

8. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan pendidikan karakter di sekolah?

Pendidikan character itu, istilah saya itu harus long life education, bukan class room lagi. Jadi bukan ..gotong royong itu begini, tapi anak-anak disuruh praktek. Bahkan anak-anak itu keluar dari ruang kelas itu harus praktek, membuang sampah itu begini, menolong orang itu begini, ada panti asuhan, itu sebagai mata pelajaran bukan sebagai ekstrakurikuler. Kalau lihat pengemis, tu kalau kamu ga sekolah yang bener, jadinya kayak begitu.nah..

9. Menurut Bapak, bagaimanakah peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter?

Peranan orang tua itu penting, tapi dia...sekarang waktunya hampir ga ada. Sekarang orang tua, dua-duanya bekerja, satu-satunya adalah medianya televisi, media cetak, nah kita masuknya kearah sana, sekarang peran orang tua itu hanya berapa jam di rumah, 8 jam di sekolah bahkan dijalanan, nah ini yang lebih penting, dan orang tuanya harus lebih well informed, harus lebih menguasai, kalau ga ya begitulah..

10. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk pendidikan karakter di masyarakat?

Yah, itu gini. Perkembangan anak itu pertama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan dimasyarakat itu lebih..aaa...cucu saya aja kelas 3 SD sudah bisa mbuka video ariel disekolahnya kok, karena di sekolahnya techno. Nah bagian-bagian ini yang pokok. Disekolahnya ada computer dan mereka bisa mempergunakan internet, nyari itu di Google juga mudah.

11. Menurut Bapak, bagaimanakah peran media massa dalam pembentukan karakter?

Ya sama, kita akan kembali kepada dia bagian dari industry. Dia akan menyuarakan nilai-nilai Pancasila, misalnya, kalau itu menguntungkan penerbitannya dia. Kalau enggak, ya enggak. Media massa yang paling rawan disini, karena dia bagian dari industry. Kamu majalahnya dianggap bagus, medianya dianggap bagus atau stasiun

tv nya dianggap bagus kalau penontonnya sedikit, orang ga akan pasang iklan disitu. Dia bekerja dengan..sistem nilainya berbeda dengan yang itu tadi. Mereka memang mengabdikan pada industry. Paling campur tangan politik, salah satunya pada zaman orba pemerintah menguasai media, benar atau tidak, tapi program-programnya jalan. Ini, sekarang..sudah ga mungkin begitu lagi. Nah, larinya media ini kepada industry itu saja. System industry memang begitu, karena yang punya modal kuatlah yang bisa..kayak calon anggota DPR kalau ga punya duit ya ga bisa maju, kasarnya gitu. Mereka kalau ga punya duit ya ga bisa punya media, makin kuat, makin kuat dan makin menguasai. Dan disini policy pemerintah itu dibutuhkan, kayak di Amerika, stasiun tv itu diharuskan memiliki tayangan edukasi buat anak, di Thailand juga diharuskan, kalau disini kan pasar dibiarkan liar kayak begitu. Amerika juga mengalami ini tahun 70an, tapi sebelum tahun 80an, mereka sudah lolos dari situ. Ada banyak program-program seperti Baywatch, tapi ada juga tayangan keluarga seperti little house and the prairiy.

12. Dari manakah pendidikan karakter seharusnya dimulai? Apakah mulai dari generasi muda? Atau generasi tua juga harus paham agar dapat mendidik yang muda?

Yang paling bagus itu harus sudah ditanamkan dibawah 9 tahun, itu menurut penelitian Perancis tentang anak-anak, karena itu yang paling bisa anak-anak itu dibentuk. Jadi paling tidak mereka tahu fiksi dan non fiksi. Sehingga bisa membedakan superman itu Cuma cerita , sehingga mereka ga ikut-ikutan terbang sampai jatuh misalnya dan lain sebagainya. Dari anak-anak sampai dengan usia 9 tahun, itu harus kenceng, namun sesuai dengan porsinya.

13. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter?

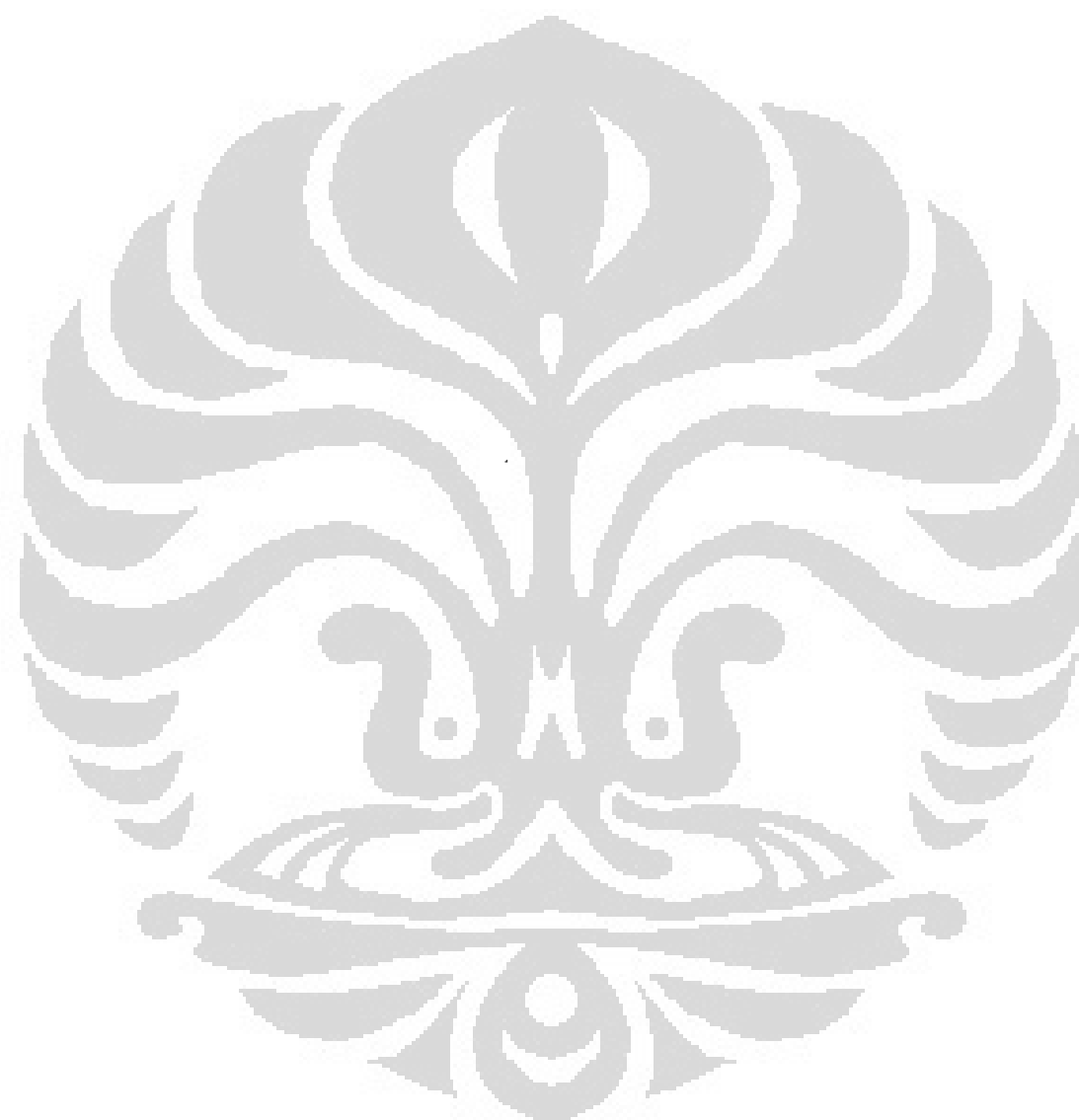
Itu policy pemerintah kok, ya..kalau pemerintah ga menganggap ini penting, ga menganggap ini sebagai perwujudan nilai Pancasila, ga menganggap ini sebagai bagian dari pendidikan karakter bangsa, ya ga akan jalan. Itu ga bisa dari pribadi atau perorangan, ya bisa tapi ga akan maksimal, karena perubahan itu perlu policy dari pemerintah.

Hambatannya ya sebaliknya, pemerintah punya..punya keinginan itu atau tidak. Dan orang-orang yang ada di pemerintahan itu yang memegang policy, yang memegang akses itu, pengen itu atau enggak, kalau enggak ya ga jalan. Kalau pemerintah ga mengharuskan kalau naik motor pake helm atau naek mobil pake safety belt, ya itu tidak akan terjadi. Itulah gunanya kekuasaan, untuk kearah itu.

14. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak kemukakan terkait pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila ini?

Kalau saya ya, komunitas itunya yang dibentuk, saya tidak ingin mengatakan komunitas penerus pancasila, tetapi misalnya seperti kamu, nanti ada kelompok lain yang bertemu, bersinggungan dan merumuskan ini dalam bentuk-bentuk yang konkret, dari situlah

mungkin ini bisa mendesak pemerintah melaksanakan policynya, kalau enggak ya enggak. Masalahnya adalah, yang ingin saya tambahin, masalahnya adalah kita ini sudah terpecah-pecah, misalnya diantara partai, kalau dia masuk partai A lalu masuk partai B, mungkin suaranya beda. Karena istilah saya, hak mereka ini terkooptasi diambil oleh partainya.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A

Waktu : Jumat, 17 Desember 2010, Pukul 15.30 – 16.00 WIB

Tempat : Kantor Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Selatan

1. Menurut Bapak, seperti apakah karakter bangsa Indonesia pada saat ini, apakah lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu, sama saja, atau malah semakin mengkhawatirkan? Mohon dijelaskan berikut contohnya.

Kondisi watak atau “karakter” manusia umumnya dewasa ini, sejak dari level internasional sampai kepada tingkat personal individual, khususnya bangsa kita, kelihatan mengalami berbagai disorientasi dan kemerosotan. Karena itu, harapan dan seruan dari berbagai kalangan masyarakat kita dalam beberapa tahun terakhir untuk pembangunan kembali watak atau karakter melalui pendidikan karakter menjadi semakin meningkat dan nyaring. Karena itu, kebijakan Mendiknas mengutamakan pula pendidikan karakter dapat menjadi momentum penting dalam konteks ini di tanah air kita.

Sekarang ini dari hari ke hari kita menyaksikan semakin meningkatnya penyimpangan moral dan akhlak pada berbagai kalangan masyarakat. Karakter bangsa yang sebelumnya berpegang pada ajaran-ajaran agama, nilai-nilai luhur bangsa terus mengalami kemerosotan secara cepat. Dan, celakanya berbagai bentuk pelanggaran itu dengan segera dan instan menyebar melalui media komunikasi instan pula seperti internet, HP, dan semacamnya.

Ada kepedihan mendalam di sini. Meski bisa terkesan sedikit simplistis dan menyederhanakan masalah, semua pelanggaran akhlak mulia dan nilai-nilai luhur itu banyak bersumber dari terjadinya krisis dalam watak dan karakter bangsa. Dan, jika dilacak lebih jauh, krisis dalam watak dan karakter bangsa itu terkait banyak dengan semakin tiadanya harmoni dalam keluarga (Cf. International Education Foundation 2000). Banyak keluarga mengalami disorientasi bukan hanya karena menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga karena serbuan globalisasi nilai-nilai dan gaya hidup yang tidak selalu kompatibel dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, sosial-budaya nasional dan lokal Indonesia. Akibatnya, tidak heran kalau banyak anak-anak yang keluar dari keluarga dan rumahtangga hampir tidak memiliki watak dan karakter. Banyak di antara anak-anak yang alim dan bajik di rumah, tetapi nakal di sekolah, terlibat dalam tawuran, penggunaan obat-obat terlarang, dan bentuk-bentuk tindakan kriminal lainnya, seperti perampokan bis kota dan sebagainya. Inilah anak-anak yang bukan hanya tidak memiliki kebajikan (*righteousness*) dan *inner beauty* dalam karakternya, tetapi malah mengalami kepribadian terbelah (*split personality*).

Sekolah seolah tidak berdaya menghadapi kenyataan ini. Dan sekolah selalu menjadi kambing hitam dari merosotnya watak dan karakter bangsa. Padahal, sekolah

sendiri menghadapi berbagai masalah berat menyangkut kurikulum yang *overload*, fasilitas yang tidak memadai, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang rendah. Menghadapi beragam masalah ini sekolah seolah kehilangan relevansinya dengan pembentukan karakter. Sekolah, sebagai konsekuensinya, lebih merupakan sekadar tempat bagi *transfer of knowledge* daripada *character building*, tempat pengajaran daripada pendidikan. (Azyumardi Azra, *Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya*, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010)

2. Mengenai karakter bangsa, apa yang Bapak ketahui mengenai pendidikan karakter? Seperti apa karakter yang penting bagi bangsa ini?

Berbicara tentang pendidikan karakter, baik kita mulai dengan ungkapan indah Phillips dalam *The Great Learning*(2000:11): “*If there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character; if there is beauty in the character, there will be harmony in the home; if there is harmony in the home, there will be order in the nation; if there is order in the nation, there will be peace in the world*”.

Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan watak dan pendidikan karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali. Sebagaimana disarankan Phillips, keluarga hendaklah kembali menjadi “*school of love*”, sekolah untuk kasih sayang (Phillips 2000). Dalam perspektif Islam, keluarga sebagai “*school of love*” dapat disebut sebagai “*madrasah mawaddah wa rahmah*, tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang. (Azyumardi Azra, *Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya*, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010)

3. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Sesuai dengan pernyataan ini, bagaimanakah eksistensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah menurut Bapak, Pancasila masih dipegang teguh, atau mulai dilupakan?

Kenyataan yang tak menggembirakan ini terkait erat dengan masih bertahannya tiga faktor yang membuat Pancasila tetap masih marginal dalam hiruk biruk perkembangan politik Indonesia.

Pertama, dalam ingatan bersama banyak kalangan, Pancasila masih dipandang tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang pernah menjadikan Pancasila sebagai alat politik mempertahankan status quo kekuasaan. Rezim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang diindoktrinasikan melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi yang memberikan peluang bagi adopsi asas- asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama.

Ketiga, desentralisasi dan otonom daerah yang sedikit banyak memperkuat semangat kedaerahan, berbau nasionalisme lokal yang tumpang-tindih dengan

etnonasionalisme dan bahkan sentimen agama.

Tetap kurangnya perhatian publik terhadap Pancasila cukup mencemaskan: lampu kuning jika kita ingin Indonesia yang tetap terintegrasi. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara dan garis haluan bersama dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia merupakan aktualisasi tekad bersama segenap warga untuk tetap bersatu di tengah berbagai keragaman. Pancasila sebagai kerangka dan dasar ideologis negara-bangsa Indonesia merupakan sebuah *deconfessional ideology*, ideologi yang tidak berbasiskan agama mana pun. Khususnya dengan sila pertama, Ketuhanan yang Mahaesa, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sesuai dan bersahabat dengan agama. (*Azyumardi Azra, Revisitasi Pancasila, dimuat dalam Harian Kompas edisi 10 Agustus 2010*)

4. Dalam era globalisasi ini, apakah yang menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila, baik dari internal maupun eksternal?

Apakah "ideologi" semacam Pancasila masih relevan dalam masa globalisasi dan demokratisasi yang nyaris tanpa batas dewasa ini? Dalam hiruk-pikuk politik menjelang pemilu capres-cawapres, pertanyaan seperti ini mungkin terlalu akademis untuk diajukan kepada capres-cawapres. Namun, pertanyaan itu sering diajukan audiens kepada saya dalam berbagai diskusi dan seminar tentang posisi dan relevansi Pancasila dalam Indonesia yang lebih demokratis, yang kini diwujudkan dalam pemilu presiden. Pertanyaan tentang relevansi ideologi umumnya dalam dunia yang berubah cepat sebenarnya tidak terlalu baru. Sejak akhir 1960-an, mulai muncul kalangan yang mulai mempertanyakan relevansi ideologi baik dalam konteks negara-bangsa tertentu maupun dalam tataran internasional. Pemikir seperti Daniel Bell pada awal 1970-an telah berbicara tentang "the end of ideology". Namun, perang dingin yang terus meningkat antara Blok Barat dengan ideologi kapitalisme dan Blok Timur dengan ideologi sosialisme-komunisme menunjukkan bahwa ideologi tetap relevan dalam kancah politik, ekonomi, dan lain-lain.

Gelombang demokrasi yang berlangsung sejak akhir 1980-an, yang mengakibatkan runtuhnya rezim sosialis-komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, kembali membuat ideologi seolah-olah tidak relevan. Bahkan pemikir seperti Francis Fukuyama memandang perkembangan seperti itu sebagai "the end of history", masa "akhir sejarah" di mana satu-satunya ideologi yang relevan adalah demokrasi Barat.

Gelombang demokratisasi yang terjadi berbarengan dengan meningkatnya globalisasi seakan-akan membuat ideologi makin tidak relevan dalam dunia yang kian tanpa batas. Namun, seperti sudah banyak diketahui, globalisasi mengandung banyak ironi dan kontradiksi. Pada satu pihak, globalisasi mengakibatkan kebangkrutan banyak ideologi-baik universal maupun lokal-tetapi pada pihak lain globalisasi mendorong bangkitnya nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling kasar, semacam ethno-nationalism dan bahkan tribalism. Gejala terakhir ini sering disebut sebagai penyebab "Balkanisasi", yang terus mengancam integrasi negara-bangsa yang majemuk dari sudut etnis, sosio-kultural, dan agama seperti Indonesia.

Gelombang demokratisasi, yang juga melanda Indonesia berikut dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik sejak akhir 1997, juga membuat Pancasila sebagai basis ideologis dan common platform bagi negara-bangsa Indonesia yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya. (*Azyumardi Azra, Rejuvenasi Pancasila dan Kepemimpinan Nasional, dimuat dalam Harian Kompas edisi 17 Juni 2004*)

- 5. Terkait dengan permasalahan eksistensi Pancasila tersebut, menurut Bapak, apakah Pancasila perlu direvitalisasi? Kalau dirasa perlu, kira-kira melalui apa sajakah perevitalisasian Pancasila ini?**

Karena posisi Pancasila yang krusial itu, saya tetap melihat urgensi rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila. Jika tidak, ideologi-ideologi lain, khususnya yang berbasis agama, dapat terus memunculkan diri sebagai alternatif. Gejala meningkatnya pencarian dan upaya memasarkan ideologi berbasis agama masih tetap merupakan salah satu tendensi yang terlihat jelas dalam dinamika politik Indonesia pasca-Soeharto sampai sekarang.

Rejuvenasi Pancasila dapat dimulai dengan kembali menjadikan Pancasila sebagai diskursus. Dengan menjadi wacana publik, sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Langkah ini merupakan tahap awal krusial untuk revitalisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat dimaknai secara terus-menerus sehingga tetap relevan dan fungsional bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Revitalisasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral para pemimpin bangsa dalam berbagai tingkatan, baik pemimpin formal maupun informal. Kegagalan membawa Pancasila ke dalam wacana dan kesadaran publik dapat berujung pada tragedi negara-bangsa Indonesia. (*Azyumardi Azra, Revisitasi Pancasila, dimuat dalam Harian Kompas edisi 10 Agustus 2010*)

- 6. Terkait dengan tema, pendidikan karakter dijadikan upaya revitalisasi Pancasila, menurut Bapak, sebenarnya bagaimana urgensi pendidikan karakter ini dan seberapa penting peranannya dalam Sistem Pendidikan Nasional?**

Pendidikan karakter kembali menemukan momentumnya belakangan ini; bahkan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Nasional. Meski sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak perbincangan baik melalui konferensi, seminar dan pembicaraan publik lainnya, belum banyak terobosan kongkrit dalam memajukan pendidikan karakter. Dengan kebijakan Mendiknas Muhammad Nuh, pendidikan karakter sudah saatnya dapat terlaksana secara kongkrit melalui lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat luas.

Segera jelas, pendidikan karakter terkait dengan bidang-bidang lain, khususnya budaya, pendidikan, dan agama. Ketiga-tiga bidang kehidupan terakhir ini berhubungan erat dengan nilai-nilai yang sangat penting bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Budaya atau kebudayaan umumnya mencakup nilai-nilai luhur yang secara tradisional menjadi panutan bagi masyarakat. Pendidikan—selain mencakup

proses transfer dan transmisi ilmu pengetahuan—juga merupakan proses sangat strategis dalam menanamkan nilai dalam rangka pembudayaan anak manusia. Sementara itu, agama juga mengandung ajaran tentang berbagai nilai luhur dan mulia bagi manusia untuk mencapai harkat kemanusiaan dan kebudayaannya.

Tetapi, ketiga sumber nilai yang penting bagi kehidupan itu dalam waktu-waktu tertentu dapat tidak fungsional sepenuhnya dalam terbentuknya individu dan masyarakat yang berkarakter, berkeadaban, dan berharkat. Budaya, pendidikan dan bahkan agama boleh jadi mengalami disorientasi karena terjadinya perubahan-perubahan cepat berdampak luas, misalnya, industrialisasi, urbanisasi, modernisasi dan terakhir sekali globalisasi. (*Azyumardi Azra, Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010*)

7. Menurut Bapak, seperti apakah bentuk pendidikan karakter yang ideal, yang efektif dan efisien dalam suatu pendidikan?

Pembentukan karakter merupakan bagian dari pendidikan nilai (*values education*) melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Bahkan, kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggungjawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian. Dan hal ini relevan dan kontekstual bukan hanya di negara-negara yang tengah mengalami krisis watak seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju sekalipun (cf. Fraenkel 1977: Kirschenbaum & Simon 1974).

Usaha pembentukan watak melalui sekolah, hemat saya, selain dengan pendidikan karakter di atas, secara berbarengan dapat pula dilakukan melalui pendidikan nilai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan pendekatan “*modelling*” atau “*exemplary*” atau “*uswah hasanah*”. Yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan. Setiap guru dan tenaga kependidikan lain di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi “*uswah hasanah*” yang hidup (*living exemplary*) bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai yang baik tersebut.

Kedua, menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. Usaha ini bisa dibarengi pula dengan langkah-langkah; memberi penghargaan (*prizing*) dan menumbuhsuburkan (*cherishing*) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discouraging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk; menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan kontinu; memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan; membiasakan bersikap dan bertindak atas niat dan prasangka baik (*husn al-zhan*) dan

tujuan-tujuan ideal; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola yang baik yang diulangi secara terus menerus dan konsisten.

Ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*character-based education*). Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan *character-based approach* ke dalam setiap mata pelajaran nilai yang ada di samping matapelajaran-mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter, seperti pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan (PKn), sejarah, Pancasila dan sebagainya. Memandang kritik terhadap matapelajaran-matapelajaran terakhir ini, perlu dilakukan reorientasi baik dari segi isi/muatan dan pendekatan, sehingga mereka tidak hanya menjadi verbalisme dan sekedar hapalan, tetapi betul-betul berhasil membantu pembentukan kembali watak bangsa. (*Azyumardi Azra, Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010*)

8. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan pendidikan karakter di sekolah?

Sekolah, pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat "*transfer of knowledge*" belaka. Seperti dikemukakan Fraenkel (1977:1-2), sekolah tidaklah semata-mata tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah juga adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*). Lebih lanjut, Fraenkel mengutip John Childs yang menyatakan, bahwa organisasi sebuah sistem sekolah dalam dirinya sendiri merupakan sebuah usaha moral (*moral enterprise*), karena ia merupakan usaha sengaja masyarakat manusia untuk mengontrol pola perkembangannya.

Pembentukan watak dan pendidikan karakter melalui sekolah, dengan demikian, tidak bisa dilakukan semata-mata melalui pembelajaran pengetahuan, tetapi adalah melalui penanaman atau pendidikan nilai-nilai. Apakah nilai-nilai tersebut? Secara umum, kajian-kajian tentang nilai biasanya mencakup dua bidang pokok, estetika, dan etika (atau akhlak, moral, budi pekerti). Estetika mengacu kepada hal-hal tentang dan justifikasi terhadap apa yang dipandang manusia sebagai "indah", apa yang mereka senangi. Sedangkan etika mengacu kepada hal-hal tentang dan justifikasi terhadap tingkah laku yang pantas berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersumber dari agama, adat istiadat, konvensi, dan sebagainya. Dan standar-standar itu adalah nilai-nilai moral atau akhlak tentang tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. (*Azyumardi Azra, Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010*)

9. Menurut Bapak, bagaimanakah peran orang tua/keluarga dalam pendidikan karakter?

Berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Anas r.a, keluarga yang baik memiliki empat ciri. Pertama; keluarga yang memiliki semangat (*ghirah*) dan kecintaan untuk mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya untuk kemudian mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keluarga di mana setiap anggotanya saling menghormati dan menyayangi; saling

asah dan asuh. Ketiga, keluarga yang dari segi nafkah (konsumsi) tidak berlebih-lebihan; tidak *ngoyo* atau tidak serakah dalam usaha mendapatkan nafkah; sederhana atau tidak konsumtif dalam pembelanjaan. Keempat, keluarga yang sadar akan kelemahan dan kekurangannya; dan karena itu selalu berusaha meningkatkan ilmu dan pengetahuan setiap anggota keluarganya melalui proses belajar dan pendidikan seumur hidup (*life long learning*), *min al-mahdi ila al-lahdi*.

Datang dari keluarga *mawaddah wa rahmah* dengan ciri-ciri seperti di atas, maka anak-anak telah memiliki potensi dan bekal yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Dan, sekali lagi, sekolah—seperti sudah sering dikemukakan banyak orang—seyogyanya tidak hanya menjadi tempat belajar, namun sekaligus juga tempat memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan watak dan pendidikan nilai. (*Azyumardi Azra, Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010*)

10. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk pendidikan karakter di masyarakat?

Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Dari perspektif Islam, menurut Quraish Shihab (1996:321), situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan mereka terbatas pada “kini dan di sini”, maka upaya dan ambisinya terbatas pada kini dan di sini pula.

Dalam konteks itu, al-Qur’an dalam banyak ayatnya menekankan tentang kebersamaan anggota masyarakat menyangkut pengalaman sejarah yang sama, tujuan bersama, gerak langkah yang sama, solidaritas yang sama. Di sinilah, tulis Quraish Shihab, muncul gagasan dan ajaran tentang *amar ma’ruf* dan *nahy munkar*; dan tentang *fardhu kifayah*, tanggung jawab bersama dalam menegakkan nilai-nilai yang baik dan mencegah nilai-nilai yang buruk. (*Azyumardi Azra, Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010*)

11. Menurut Bapak, bagaimanakah peran media massa dalam pembentukan karakter?

Sebagai contoh saja, gaya hidup hedonistik dan materialistik; dan permissif sebagaimana banyak ditayangkan dalam telenovela dan sinetron pada berbagai saluran TV Indonesia, hanya mempercepat disorientasi dan dislokasi keluarga dan rumahtangga. Dalam konteks ini, penulis lebih menekankan seharusnya posisi media massa sebagai lembaga pendidikan. Media massa baik cetak maupun elektronika telah memosisikan diri sebagai media hiburan dan sumber informasi, dengan demikian dalam konteks ini media massa ikut bertanggungjawab atas pembentukan informasi yang positif untuk pendidikan dan pembangunan karakter bangsa yang berkualitas. (*Azyumardi Azra, Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010*)

12. Dari manakah pendidikan karakter seharusnya dimulai? Apakah

mulai dari generasi muda? Atau generasi tua juga harus paham agar dapat mendidik yang muda?

Mempertimbangkan berbagai kenyataan pahit yang kita hadapi seperti dikemukakan di atas, hemat saya, pendidikan karakter merupakan langkah sangat penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri bangsa dan menggalang pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Tetapi penting untuk segera dikemukakan—sebagaimana terlihat dalam pernyataan Phillips tadi—bahwa pendidikan karakter haruslah melibatkan semua pihak; rumahtangga dan keluarga; sekolah; dan lingkungan sekolah lebih luas (masyarakat). Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyambung kembali hubungan dan *educational networks* yang nyaris terputus antara ketiga lingkungan pendidikan ini. Pembentukan watak dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan harmonisasi. (*Azyumardi Azra, Pendidikan Karakter : Perspektif Budaya, makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Dies Natalis 48 UNJ 12 Juni 2010*)

13. Menurut Bapak, faktor apa sajakah yang mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter?

Faktor yang mampu mendukung pembangunan karakter diantaranya adalah adanya identitas nasional yang mencakup : 1) semangat kebangsaan (nasionalisme) Indonesia; 2) Negara bangsa (*nation state*) Indonesia; 3) Dasar Negara Pancasila; 4) Bahasa nasional, bahasa Indonesia; 5) lagu kebangsaan Indonesia Raya; 6) Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika; 7) bendera Negara sang Merah Putih; 8) Konstitusi Negara UUD 1945; 9) Integrasi wawasan nusantara; 10) Tradisi dan kebudayaan daerah yang diterima sebagai bagian integral dari budaya nasional.

Faktor yang menghambat adalah lemahnya identitas nasional, seperti yang telah disebut di atas. (*Azyumardi Azra, Revitalisasi Pancasila dan Identitas Nasional, disampaikan sebagai pengantar seminar wawacan kebangsaan DPP MKGR Jakarta 29 Juli 2008*)

14. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak kemukakan terkait pendidikan karakter bangsa sebagai upaya revitalisasi Pancasila ini?

Hemat saya, ketika Negara bangsa tidak menampilkan identitas yang kuat atau tidak member ruang bagi terciptanya koalisi kepentingan social yang dapat memberdayakan diri dalam identitas yang direkonstruksi kembali, maka suatu kekuatan social politik boleh jadi mengambalalih Negara dan menjadikan kelompok mereka sebagai ekspresi eksklusif identitas tersebut. Jika ini terjadi, maka jelas merupakan ancaman serius bagi kelangsungan Negara bangsa Indonesia. (*Azyumardi Azra, Revitalisasi Pancasila dan Identitas Nasional, disampaikan sebagai pengantar seminar wawacan kebangsaan DPP MKGR Jakarta 29 Juli 2008*)

POINT-POINT PEMBICARAAN

Narasumber : Irhamni Rahman (FIB UI'06/Peserta K2N UI 2009 di Miangas) dan Widy Arini (FIK UI'06/Peserta K2N UI 2009 di Miangas)

Waktu : Senin, 13 Desember 2010, Pukul 20.00 – 21.30 WIB

Tempat : Kalibata Mall, Jakarta Selatan

1. Miangas merupakan sebuah kecamatan kecil di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara dengan berpenduduk sekitar 180 KK yang merupakan daerah perbatasan RI-Filipina. Jarak Miangas ke Manado bisa menempuh 2-3 hari, sedangkan jarak Miangas ke Mindanao hanya beberapa jam saja. Beberapa orang Miangas yang berusia sekitar 50 tahunan masih bisa berbahasa Tagalog.
2. Kuliah Kerja Nyata (K2N) UI di Miangas pada 15 Juli - 18 Agustus 2009 yang diikuti 71 mahasiswa UI dari berbagai fakultas, merupakan hasil kerjasama UI, Kementerian Pertahanan dan Pemprov Sulawesi Utara yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh mahasiswa UI secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, merubah mental berpikir dan berperilaku serta pengembangan SDM dan system yang ada di masyarakat yang lebih bersifat non-fisik, merubah mindset mahasiswa untuk senantiasa berpikir holistic sebagai agent of change, mendorong masyarakat Miangas berubah ke arah yang lebih baik dan mandiri dalam konteks system pertahanan non militer.
3. Peran TNI di daerah perbatasan seperti Miangas, sangat dominan di masyarakat, karena selain TNI turut membantu memasok barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat Miangas juga karena TNI punya power. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan TNI sehingga TNI bisa menanamkan nasionalisme kepada masyarakat. Hal ini terbukti ketika masyarakat Miangas melakukan upacara bendera 17 Agustus 2009, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lancar dan semangat serta mengikuti upacara dengan khidmat tanpa ada yang ribut bahkan berbisik-bisik selama upacara berlangsung, bahkan sebelum upacara, sekolah telah diliburkan agar muridnya bisa ikut latihan upacara, berbeda dengan masyarakat ibukota. Namun ada kekhawatiran bahwa nasionalisme yang ditanamkan adalah nasionalisme kaku ala militer melalui indoktrinasi, sehingga mereka menjadi nasionalis karena takut kepada TNI meskipun hubungan antara TNI dan masyarakat Miangas cukup baik.
4. Meskipun nasionalis, akan tetapi karena belum ada upaya pembinaan karakter yang tepat dengan penyadaran masyarakat maka karakter malas, mabuk-mabukan, pergaulan bebas dan berjudi masih melekat pada sebagian besar masyarakat, hal ini dibuktikan oleh pernyataan para peserta K2N UI yang tinggal selama sebulan di rumah-rumah masyarakat Miangas, misalnya ada acara dangdut semalam suntuk sambil minum-minuman keras dan berjudi, beberapa guru sekolah di Miangas melepaskan tanggungjawabnya ketika ada mahasiswa UI yang turut mengajar padahal

seharusnya guru-guru tersebut turut serta dalam KBM, adanya perselingkuhan dengan tetangga dan pergaulan bebas sehingga susah menemukan gadis dewasa yang masih perawan di Miangas, sebagian masyarakat mulai menggantungkan diri kepada pemerintah tanpa mau berupaya lebih keras lagi untuk bekerja. Pekerjaan mereka yang utama yaitu melaut, berdagang dan berkebun Cuma dikerjakan asal-asalan. Sehingga banyak remaja yang sadar dengan kehidupannya, memilih untuk meninggalkan Miangas, biasanya menuju Manado untuk belajar atau bekerja.

5. Meski di Kecamatan Miangas terdapat kantor kecamatan, akan tetapi mengenai administrasi kependudukan masih terlihat tidak tertib, hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat yang tidak memiliki KTP maupun surat kependudukan lainnya.
6. Pendidikan formal di Miangas diantaranya adalah SD, SMP dan SMK. Namun yang mengesankan, masih ada juga siswa kelas 1 SMP yang masih belum lancar membaca dan menulis. Selain karena kualitas guru dan fasilitas sekolah yang masih kurang, juga adanya factor sungkan jika tidak meluluskan siswa sekolah karena mereka bertetangga dekat. Di samping itu, mengenai pendidikan karakter, hampir tidak ditemukan upaya pendidikan karakter, karena di sekolah dan dirumah dibudayakan kekerasan, seperti yang diungkapkan tentang adanya kekerasan ayah terhadap anaknya, atau tingkah anak-anak sekolah yang mengintip rok temannya, atau mencolek-colek wanita yang berpakaian sedikit terbuka seperti yang pernah dialami peserta K2N UI. Mengenai media massa, masyarakat lebih sering menonton televisi yang menayangkan sinetron, bukan berita. Hanya beberapa masyarakat yang sadar mengenai pentingnya berita.
7. K2N UI benar-benar di back up oleh TNI, mulai dari akomodasi hingga transportasi, termasuk kewajiban untuk melapor setiap hari demi keamanan peserta K2N UI.
8. Beberapa kegiatan mahasiswa K2N UI di Miangas diantaranya adalah penyelenggaraan rumah baca, program dongeng dan permainan tradisional, penyuluhan hukum, koperasi dan pariwisata, penyuluhan bahaya narkoba dan rokok, pelayanan lansia dan menjenguk orang sakit, penyuluhan kesehatan ibu hamil dan remaja putri, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembuatan dan pengembangan produk baru dengan menggunakan bahan yang sudah ada seperti minyak Virgin Coconut Oil, briket arang batok kelapa dan kecap air kelapa.
9. Pada 1 Juli hingga 31 Juli 2010 ini, K2N UI diikuti oleh 117 mahasiswa dari berbagai fakultas dan daerah tujuan K2N UI pun mengalami perkembangan, diantaranya adalah Sabang, Tanjung Dato, Subi Kecil, Entikong, Sebatik, Rote, Selaru, Morotai, Merauke dan Befonde sebagai bentuk kontribusi nyata UI kepada bangsa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI.

THE WILLINGNESS TO CHANGE

When I was Young and free,
 And my imagination has no limits,
 I dreamed of changing the world.
 As I grew older and wiser,
 I discovered the world would not change,
 So I shortened my sights somewhat
 And decided to change only my country
 but it too seemed immovable
 As I grew into my twilight years
 in one last desperate attempt
 I settled for changing only my family
 Those closest to me, but alas
 They would have none of it
 And now as I lay on my deathbed
 I suddenly realize
 if I had only changed myself first
 Then by example I might have changed my family.
 from their inspiration and encouragement,
 would then have been able to better my country,
 And who knows, I may have even change the world.

(An Anglican Bishop, 1100 AD, as written in the Crypts of Westminster Abbey)

